

U.S. SECURITY ASSISTANCE DALAM PROSES INTEGRASI
DAN
PELEPASAN TIMOR TIMUR

TESIS

MARTINUS SISWANTO PRAJOGO
NPM: 0706191000



UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM KAJIAN WILAYAH AMERIKA
JAKARTA
Juni 2009

U.S. SECURITY ASSISTANCE DALAM PROSES INTEGRASI
DAN
PELEPASAN TIMOR TIMUR

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master Sains (M.Si)

MARTINUS SISWANTO PRAJOGO
NPM: 0706191000



UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM KAJIAN WILAYAH AMERIKA
JAKARTA
Juni 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk,
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Martinus Siswanto Prajogo

NPM : 0706191000

Tanda Tangan



Tanggal : 24 Juni 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Martinus Siswanto Prajogo
NPM : 0706191000
Program Studi : Kajian Wilayah Amerika (KWA)
Judul Tesis : *U.S. Security Assistance* dalam Proses Integrasi dan Pelepasan Timor Timur

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Master Sains (M.Si) pada Program Kajian Wilayah Amerika, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Alfian Muthalib, M.Si.

(*Alfian Muthalib*)

Pembaca : Dr. Siswanto, M.Si.

(*Dr. Siswanto*)

Penguji : Ronny M. Bishry, Ph.D.

(*Ronny M. Bishry*)

Penguji : Dr. Nana Nurliana Soejono, MA.

(*Dr. Nana Nurliana Soejono*)

Penguji : Dr. Hj. Albertine Minderop, MA.

(*Dr. Hj. Albertine Minderop*)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Juni 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kerana atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bp. Alfian Muthalib, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bp. Ronny M. Bishry Ph.D. dan para dosen KWA yang telah membuka dan memperluas cakrawala berfikir saya tentang Amerika, khususnya Bp. Dr. Siswanto, M.Si. yang telah berkenan membaca dan menyempurnakan tesis saya sebelum diajukan untuk diuji, serta seluruh staf/perpustakaan KWA yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan saya hingga penulisan tesis;
- (3) Dirjen Strahan Dephan beserta jajaran, khususnya Dirkersin yang telah memberi kesempatan dan memberikan dukungan moril bagi saya untuk melaksanakan perkuliahan hingga penyusunan tesis ini pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Program Pascasarjana Universitas Indonesia;
- (4) Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, yang telah memberikan bantuan bea siswa selama saya mengikuti program studi Kajian Wilayah Amerika;
- (5) Orang tua beserta kerabat saya yang telah memberikan restu;
- (6) Teristimewa istri dan putri-putri saya yang dengan penuh pengertian dan kesabaran memberikan dukungan moril dan materiil;
- (7) Rekan-rekan, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 24 Juni 2009

Penulis



Martinus Siswanto Prajogo



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Martinus Siswanto Prajogo
NPM : 0706191000
Program Studi : Kajian Wilayah Amerika
Fakultas/Program : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

U.S. Security Assistance dalam Proses Integrasi dan Pelepasan Timor Timur

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juni 2009
Yang menyatakan



(Martinus Siswanto Prajogo)

ABSTRAK

Nama : Martinus Siswanto Prajogo
Program Studi : Kajian Wilayah Amerika (KWA)
Judul : *U.S. Security Assistance* dalam Proses Integrasi dan Pelepasan Timor Timur.

Timor Timur menjadi salah satu arena bagi penerapan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal ini tampak pada saat Indonesia mulai mengintegrasikan wilayah tersebut ke NKRI, pemerintah AS memberikan dukungan penuh, baik politis maupun *security assistance*. Namun ketika tokoh komunis Ramos Horta – yang didukung oleh *East Timor Action Network* (ETAN) yang berbasis di AS – memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur, pemerintah AS memberi peluang yang sangat luas bagi lepasnya Timor Timur dari NKRI. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan AS dalam menghadapi ancaman dan tantangan global yang berorientasi pada keamanan nasionalnya.

Kata kunci:

Kebijakan luar negeri, *security assistance*, ancaman dan tantangan global, keamanan nasional.

ABSTRACT

Name : Martinus Siswanto Prajogo
Study Program: American Studies
Title : *U.S. Security Assistance in Processing Integration and Released of East Timor*

East Timor is one of the arenas for U.S. foreign policy implementation. This matter seemed when Indonesia began to integrate the territorial to Republic of Indonesia, the U.S. Government fully supported both politically and security assistance. But when Ramos Horta – who supported by East Timor Action Network (ETAN) that based in the USA – struggle for East Timor independence, the U.S. Government gave widely opportunities for the released of East Timor from Republic of Indonesia. This situation occurred due to there was a changing on U.S. foreign policy in dealing with global threat and challenging which oriented to its national security.

Key words:

Foreign policy, security assistance, global threat and challenge, national security.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kerangka Teori	3
1.3. Permasalahan	10
1.4. Hipotesis	10
1.5. Metodologi Penelitian	10
1.6. Kerangka Tesis	11
2. KEBIJAKAN KAWASAN POLITIK LUAR NEGERI AS DALAM POLITIK PEMBENDUNGAN	13
2.1. Kebijakan Politik Pembendungan di Kawasan Asia – Pasifik	13
2.2. <i>U.S. Security Assistance</i> dan Kepentingan AS	21
2.3. Persyaratan-persyaratan yang Ditetapkan bagi Negara Penerima <i>U.S. Security Assistance</i>	24
3. KEBIJAKAN AS TERHADAP PENYATUAN TIMOR TIMUR DENGAN INDONESIA	27
3.1. Kepentingan AS dalam <i>U.S. Security Assistance</i> terhadap Indonesia	27
3.2. Arti Penting <i>U.S. Security Assistance</i> bagi Indonesia	35
3.3. Keselarasan Kepentingan AS dengan Kepentingan Nasional Indonesia dalam <i>U.S. Security Assistance</i>	42
3.4. Peran <i>U.S. Security Assistance</i> dalam Mendukung Upaya Indonesia Mengambil Timor Timor	44
4. PARADOKSAL KEBIJAKAN BANTUAN AS TERHADAP INDONESIA	53
4.1. Sikap AS terhadap Upaya-upaya Timor Timor dalam Memperoleh Kemerdekaannya	53
4.2. Benturan Kepentingan Nasional AS dengan Indonesia	63
4.3. AS Mencabut <i>U.S. Security Assistance</i> dan Menerapkan Embargo kepada TNI Paska Jajak pendapat Kemerdekaan Timor Timor	73
5. KESIMPULAN	77
DAFTAR REFERENSI	82

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Daftar Perlengkapan Militer (*MAP Inventory*) yang diberikan sebagai bantuan hibah *Military Assistance Program (MAP)* berdasarkan perjanjian tahun 1950 dan amandemen tahun 1953. *U.S. Treaties and Other International Agreements*.
(Sumber: Arsip Departemen Pertahanan RI).
- Lampiran 2: "Exchange of Notes: U.S. – Indonesia, Security Assistance for Indonesia." Jakarta, 15 Agustus 1950. TIAS no. 2306. *U.S. Treaties and Other International Agreements*.
(Sumber: Arsip Departemen Pertahanan RI).
- Lampiran 3: Amandemen perjanjian 15 Agustus 1950 tentang Military Assistance. TIAS no. 2768: Constabulary Equipment for Indonesia yang terdiri dari: (1) "Proposal Amendment U.S. Security Assistance," 5 January 1953. Dubes RI di Washington DC. *U.S. Treaties and Other International Agreements*. (2) "Indonesia Military Assistance." 12 January 1953. American Embassy. *U.S. Treaties and Other International Agreements*.
(Sumber: Arsip Departemen Pertahanan RI).
- Lampiran 4: "Exchange of Notes: Sale of Military Equipment, Materials, and Services." The American Ambassador and Indonesian Minister of Foreign Affairs. Jakarta, August 13, 1958. TIAS no. 4095. *U.S. Treaties and Other International Agreements*.
(Sumber: Arsip Departemen Pertahanan RI).
- Lampiran 5: "Memorandum of Conversation President Ford with President Soeharto in Laurel Cabin, Camp David, Maryland, July 5, 1975." National Security Archive Electronic Briefing Book, no.62.
(Sumber: <<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB/62/...>>).
- Lampiran 6: "Memorandum for the President." National Security Archive Electronic Briefing Book, no.62.
(Sumber: <<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB/62/...>>).
- Lampiran 7: "Telegram US Embassy Jakarta to Secretary of State." National Security Archive Electronic Briefing Book, no.62.
(Sumber: <<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB/62/...>>).
- Lampiran 8: Nota Diplomatik "505 Agreement." No. D.638/PO/IX/2006/36, tanggal 6 September 2006. Departemen Luar Negeri RI.
(Sumber: Arsip Departemen Pertahanan RI).
- Lampiran 9: "DATA IMET/E-IMET Program for Indonesia."
(Sumber: Arsip Departemen Pertahanan RI).

BAB 1 PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

U.S. Security Assistance merupakan salah satu perwujudan dari kebijakan politik luar negeri AS, khususnya yang terkait dengan komitmen dalam memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Indonesia adalah salah satu penerima bantuan tersebut. AS memandang Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang cukup signifikan berperan dalam menciptakan dan memelihara perdamaian di kawasan ini. *U.S. Security Assistance* diberikan kepada Indonesia sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang. *U.S. Security Assistance* ini antara lain diberikan dalam bentuk bantuan hibah berbagai peralatan senjata, dan program bantuan/hibah yang diluncurkan pada saat ini yang disebut sebagai *U.S. FMF (U.S. Foreign Military Financing)* – pengganti istilah *Military Assistance Program (MAP)* – berupa peralatan radar *maritime surveillance* untuk dipasang di Selat Malaka dan Laut Sulawesi, serta bantuan pendidikan bagi para prajurit TNI yang dikenal dengan sebutan *IMET (International Military Education Training)* termasuk *E-IMET (Extended IMET)*.

U.S. Security Assistance sangat membantu Indonesia. Sejak tahun 1950, AS memberikan bantuan berupa berbagai peralatan militer (*defense articles*) antara lain senjata ringan (*pistol*) hingga senjata berat (*cannon*), kendaraan militer (*military vehicle*), peralatan zeni (*military engineering equipment*), radio komunikasi, pesawat tempur seperti *Cesna*, helikopter dan kapal perang.¹ Pada saat itu Indonesia sebagai negara yang baru merdeka menghadapi berbagai konflik kebangsaan, khususnya adanya upaya-upaya pemberontakan baik dari partai komunis maupun dari golongan tertentu yang berkedok keagamaan yang terjadi secara sporadis di berbagai tempat di hampir seluruh tanah air. *U.S. Security Assistance* yang diterima Indonesia dalam berbagai bentuk persenjataan memungkinkan TNI mengatasi berbagai pemberontakan tersebut. Pemberontakan

¹ American Embassy & Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Serikat, "Exchange of Notes: U.S. – Indonesia, Security Assistance for Indonesia," Jakarta, 15 Agustus 1950, TIAS no. 2306, *U.S. Treaties and Other International Agreements*, 1619-23.

terbesar adalah yang dilakukan oleh komunis dengan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G 30 S/PKI).

Peristiwa lain yang menunjukkan dukungan kebijakan AS terhadap Indonesia adalah pecahnya konflik domestik dikoloni Portugal yakni Timor Portugis. Pada tahun 1970-an Timor Timur – yang berada di bawah kekuasaan Portugal merupakan wilayah yang berbatasan dengan Timor Barat yang merupakan wilayah Indonesia – mengalami pergolakan akibat adanya perebutan pengaruh antara partai komunis yang ingin merdeka dengan partai nasionalis yang ingin berintegrasi dengan Indonesia. Dengan peristiwa G 30 S/PKI, Indonesia tidak ingin Timor Timur jatuh ke dalam kekuasaan komunis. Pada tahun 1975 Indonesia berhasil melakukan serangan untuk mengintegrasikan Timor Timur kedalam wilayah NKRI. Dalam peristiwa tersebut pemerintah AS memberikan dukungan kepada Indonesia baik dari aspek politis maupun dalam bentuk *U.S. Security Assistance*.

Namun ketika terjadi pergolakan dan tuntutan pemisahan Timor Timur, AS tidak lagi memberikan dukungan politis kepada NKRI, dan bahkan Kongres AS secara terbuka mendukung tokoh komunis Ramos Horta yang menuntut kemerdekaan Timor Timur. Indonesia memperoleh kecaman dan desakan dari komunitas internasional agar memberikan kesempatan kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri melalui jajak pendapat di bawah supervisi PBB dengan dukungan penuh dari pemerintah AS, hingga akhirnya pada tahun 1999 Timor Timur lepas dari NKRI. Situasi sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari nilai “pragmatisme” Amerika, yang acap kali menimbulkan kontroversi dalam percaturan politik internasional.

... Pragmatisme Amerika secara politis sejiwa dengan azas demokrasi liberal yang juga memiliki ciri-ciri yang selaras dengan orientasi pragmatisme, yakni azas manfaat. Agaknya demokrasi liberal Amerika memberikan tempat bagi pragmatisme sehingga menampilkan cara perilaku yang inkonsisten dan penuh paradoks.²

Fokus penelitian tesis ini adalah “perubahan” kebijakan luar negeri AS pasca pelepasan Timor Timur dari NKRI. Indikasinya adalah pada tahun 1975 AS

² Albertine Minderop, *Pragmatisme Amerika: Di Bawah Bayang-bayang C. Pierce, W. James, J. Dewey* (Jakarta: Obor, 2005), 105.

mendukung proses integrasi Timor Timur, namun pada tahun 1999 AS berbalik mendukung tokoh komunis Ramos Horta yang menuntut kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia. Bagaimana peran AS dalam kaitan dengan *security assistance* yang diberikan kepada Indonesia sejak proses integrasi sampai pelepasan Timor Timur dari NKRI? Mengapa terjadi perubahan kebijakan bantuan keamanan AS terhadap Indonesia yang telah bertahan selama hampir 50 tahun?

1.2. Kerangka Teori

Dalam sejarahnya, AS yang pernah terlibat dalam perang saudara yang sangat menyakitkan dan juga sebagai negara pemenang Perang Dunia I dan II, sangat memperhatikan keamanan didalam negerinya (*U.S. Homeland Security*). Untuk menjaga keamanan tersebut AS menerapkan politik luar negeri ekspansionis, yang merupakan perwujudan doktrin maksimalisme:

Pada kenyataannya adalah bahwa maksimalisme bukan suatu pemikiran baru dalam sejarah politik Amerika. Pemikiran ini menekankan pada pencapaian tuntutan dilakukan baik secara langsung atau revolusioner, tanpa kompromi. Suatu kebijakan politik dipola mencapai terobosan strategis guna mentransformasikan suatu situasi yang mampu menopang pengaruh Amerika secara berkesinambungan.³

Pernyataan tersebut di atas dapat ditelusuri dari sejarah Amerika, bahwa politik ekspansionis ini pada dasarnya telah diterapkan sejak dari terbentuknya cikal bakal bangsa tersebut (John Winthrop tahun 1629 dengan *the city upon a hill*) hingga terbentuknya negara (*declaration of independence*) tahun 1776. Dan politik ekspansionis ini nampaknya tidak akan pernah berhenti bahkan hingga detik ini dan mungkin hingga masa yang akan datang.

Semangat ekspansionis bangsa Amerika yang ditunjukkan oleh John Winthrop dengan kotbahnya yang terkenal *the city upon a hill* tampak ketika Winthrop sebagai tokoh Puritan ingin mengembangkan kebebasan menjalankan ibadah agama didunia baru. Dengan mengantongi "*charter*" dari Raja Charles, ia melakukan pelayaran dengan kapal *Arbella* ke Dunia Baru sebagaimana yang tertera dalam tulisan yang dikompilasi oleh Paul Lauter (editor):

³ Alfian Muthalib, "Politik Luar Negeri Maksimalis Amerika," Nasion, PPSN, volume 5, no. 1 (2008): 111.

... *The charter, which granted the Massachusetts Bay Company the right to settle in New England, is unique in that no provision was made for a designated meeting place for the administration of the Company, thus freeing it to establish a government in New England. The Company was lucky to have been granted such a liberal charter, ...*⁴

Pada tahun 1629, Winthrop telah membentuk pemerintahan baru, di tempat baru (New England) dengan komunitas orang-orang Puritan yang berjumlah sekitar 400 orang. Untuk memotivasi para pengikutnya Winthrop dalam pelayaran diatas kapal *Arbella* memberikan kotbah model ajaran Kristiani (*A Model of Christian Charity*) yang kemudian dikenal sebagai "*the city upon a hill.*" Inti dari kotbah tersebut adalah mengajak para pengikutnya untuk berlayar menuju tempat baru seperti yang difirmankan Allah kepada umat Israel. Di tempat baru tersebut Allah menjanjikan kemuliaan dan kesejahteraan bagi umatnya. Dengan kotbah tersebut Winthrop telah menanamkan sebuah motivasi atau "imagi" kepada pengikutnya untuk membangun sebuah kota di atas bukit yang berarti sebuah tantangan untuk membangun kejayaan yang akan memancar ke seluruh negeri yang berada di bawah bukit di mana kota tersebut akan dibangun. Dan dengan imagi tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu justifikasi dalam kegiatan ekspansi yang pertama kali dilakukan oleh cikal bakal bangsa Amerika dengan semangat frontirnya yang pantang menyerah.

Sementara ajaran ekspansionis yang bisa ditarik dari semangat awal kemerdekaan (*declaration of independence*) adalah rumusan deklarasi kemerdekaan Jefferson tahun 1776 yang mengadopsi teori kontrak pemerintahan ajaran John Locke sebagaimana dinyatakan oleh Tindall:

..., *was an eloquent restatement of John Locke's contract theory of government, the theory in Jefferson's words that governments derived "their just Powers from the consent of the people," who were entitled to "alter or abolish" those which denied their "unalienable right" to "life, Liberty, and the pursuit of Happiness." ...*⁵

Dengan rumusan teks deklarasi kemerdekaan tersebut "*the founding father*" bangsa Amerika yang secara turun temurun mewarisi "imagi"

⁴ Nicholas D. Romber, Jr., "John Winthrop 1588 - 1649," in *The Heath Anthology of American Literature*, vol.1, 2nd ed, ed. Paul Lauter (Lexington: D.C. Heath and Company, 1994), 224.

⁵ George Brown Tindall, *America a Narrative History*, vol.1 (New York, London: W.W.Norton & Company, 1984), 201.

sebagaimana yang telah ditanamkan oleh Winthrop dalam meletakkan dasar-dasar bagi bangsa baru Amerika dengan hak-hak “hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan.” Dengan dasar-dasar inilah para pemimpin Amerika dari generasi ke generasi mencari peluang untuk mengejar kebahagiaan kemana pun berada yang kemudian melahirkan suatu ajaran ekspansionisme yang hebat “*manifest destiny*.”⁶

Bermula dari ekspansi teritorial yang berlanjut dengan ekspansi ekonomi demi menyejahterakan rakyatnya, selanjutnya untuk mengamankan apa yang telah diperoleh dari hasil-hasil ekspansi sebelumnya, maka AS berupaya untuk melakukan ekspansi demokrasi. AS meyakini manakala demokrasi dapat disebarkan dan diterapkan di seluruh dunia, maka dunia akan aman dan damai, sehingga akan berdampak bagi terjaminnya keamanan didalam negerinya.

Dalam menjalankan politik luar negeri melalui penyebaran demokrasi, AS meluncurkan program-program bantuan kepada negara-negara berkembang, termasuk bantuan keamanan yang merupakan perwujudan dari *sense of mission* bangsa Amerika. Salah satu program bantuan keamanan dimaksud adalah *U.S. Security Assistance*. Dengan penyebaran demokrasi ke seluruh penjuru dunia yang dilandasi oleh semangat *manifest destiny*, maka persoalan kepentingan nasional AS adalah identik dengan kepentingan globalnya.

Dengan demikian bangsa Amerika memandang bahwa kepentingan nasional adalah terutama ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi warganegaranya. Dan oleh karena itulah keamanan nasional merupakan bagian utama dari kepentingan nasionalnya. Keamanan nasional tersebut benar-benar dijaga. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan nasional adalah dengan cara ekspansi atau membuka hubungan kerjasama dengan negara-negara lain dalam mengupayakan terciptanya dunia yang aman, damai, dan sejahtera.

⁶ Tentang ajaran ekspansionis “*manifest destiny*,” Tindall dalam buku *America A Narrative History* pada halaman 512 antara lain menyatakan bahwa pada tahun 1845 *John Louis O’Sullivan*, editor *the United States Magazine and Democratic Review*, memberikan istilah “*Manifest Destiny*” bagi semangat juang kaum penjelajah yang bergerak dari wilayah Timur ke wilayah barat benua Amerika.

Bila kita perhatikan, kepentingan nasional AS dijalankan sesuai dengan konsep-konsep yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli hubungan internasional yang mendefinisikan bahwa kepentingan nasional suatu bangsa akan terkait erat dengan masalah internal dan masalah eksternal. Hans J. Morgenthau menyampaikan pandangan tentang konsep kepentingan nasional sebagai berikut: *The concept of the national interest, then, contains two elements, one that is logically required and in that sense necessary, and one that is variable and determined by circumstances.*⁷

Dengan demikian konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau pada dasarnya terdiri dari dua elemen, yang pertama didasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri, dan yang kedua mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan strategis disekitarnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri, dapat diperoleh dengan cara melindungi kelangsungan hidup bangsa dalam mempertahankan kedaulatan integritas wilayah nasional, sistem politik, dan identitas budaya dari ancaman bangsa lain. Adapun pertimbangan adanya berbagai kondisi lingkungan strategis adalah dengan menjalankan kebijakan politik luar negeri melalui upaya diplomasi demi terciptanya perdamaian dunia. Sementara Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf menyatakan bahwa tujuan dari sebuah negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional adalah:

*The State should promote the internal welfare of its citizens, provide for defense against external aggression, and preserve the state's values and way of life. ... No country can long afford to pursue its own welfare in ways that reduce the security and welfare of its competitor.*⁸

Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf menyatakan bahwa kepentingan nasional dari sebuah negara hendaknya tidak hanya didasarkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan internal bagi setiap warganegaranya, menyediakan pertahanan terhadap agresi dari luar, dan melindungi nilai-nilai negara dan cara hidup. Lebih jauh mereka juga menyatakan bahwa tidak mungkin sebuah negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya dengan mengurangi

⁷ Hans J. Morgenthau, "Another "Great Debate": The National Interest of the United States," in *Classics of International Relation*, 3rd ed, ed. John A. Vasquest (New Jersey: Prentice Hall, 1966), 147.

⁸ Charles J. Kegley and Eugene R. Wittkopf, *World Trend and Transformation Politics*, 8th ed (Boston: Bedford/St. Martin's, 2001), 653 – 54.

keamanan dan kesejahteraannya terhadap kompetitornya. Dan untuk mencapai tujuan nasional seperti yang diharapkan maka setiap negara harus mengkaitkan kepentingan nasionalnya melalui upaya kerjasama dengan banyak bangsa dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan keamanan global.

Terkait hal tersebut di atas setiap negara selalu berupaya melakukan kerjasama dengan negara lain, baik dalam bentuk kerjasama bilateral maupun multilateral. Untuk merealisasikan kerjasama tersebut diperlukan kebijakan luar negeri yang dimaksudkan sebagai alat diplomasi dalam rangka menjamin dan mengembangkan kepentingan nasionalnya. Dengan demikian terdapat kaitan yang sangat erat antara kepentingan nasional dengan kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam konteks ini dua orang peneliti kebijakan luar negeri menarik korelasi yang begitu erat dengan kepentingan nasional, antara lain dinyatakan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara sudah seharusnya didasarkan pada beberapa sumber yang mengacu pada berbagai bentuk kepentingan nasionalnya. Dalam tulisan mereka disebutkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara yang paling pokok adalah didasarkan pada kepentingan nasional yang dianggap fundamental (mutlak). Jenis kepentingan nasional yang dianggap mutlak tersebut adalah kelangsungan hidup (*survival*) bangsa tersebut dan integritas wilayah nasionalnya. *The most fundamental of source foreign policy objectives is perhaps the universally shared desire to insure the survival and territorial integrity of the community and state.*⁹

Selanjutnya kebijakan luar negeri harus didasarkan pula pada sumber kepentingan nasional lainnya yang dianggap sangat penting (*vital*). Kepentingan nasional yang termasuk dalam kelompok ini adalah kepentingan nasional terkait dengan kepentingan ekonomi bangsa tersebut dan dalam upaya penerapan sistem demokrasi yang mampu mengakomodasi kepentingan individu maupun kelompok ekonomi/bisnis.

... the most important set of domestic sources of foreign policy are the economic needs of the community. ... It is important to emphasize that economic needs are fundamental sources of a state's foreign policy. ... there are strong pressures

⁹ Keith R. Legg and James F. Marison, "The Formulation of Foreign Policy," in *Perspective on World Politics*, 2nd ed, ed. Richard Little & Michael Smith (London: Croom Helm in association with Open University Press, 1992), 62.

*generated in the state's political system to satisfy individual or group economic needs through foreign policy.*¹⁰

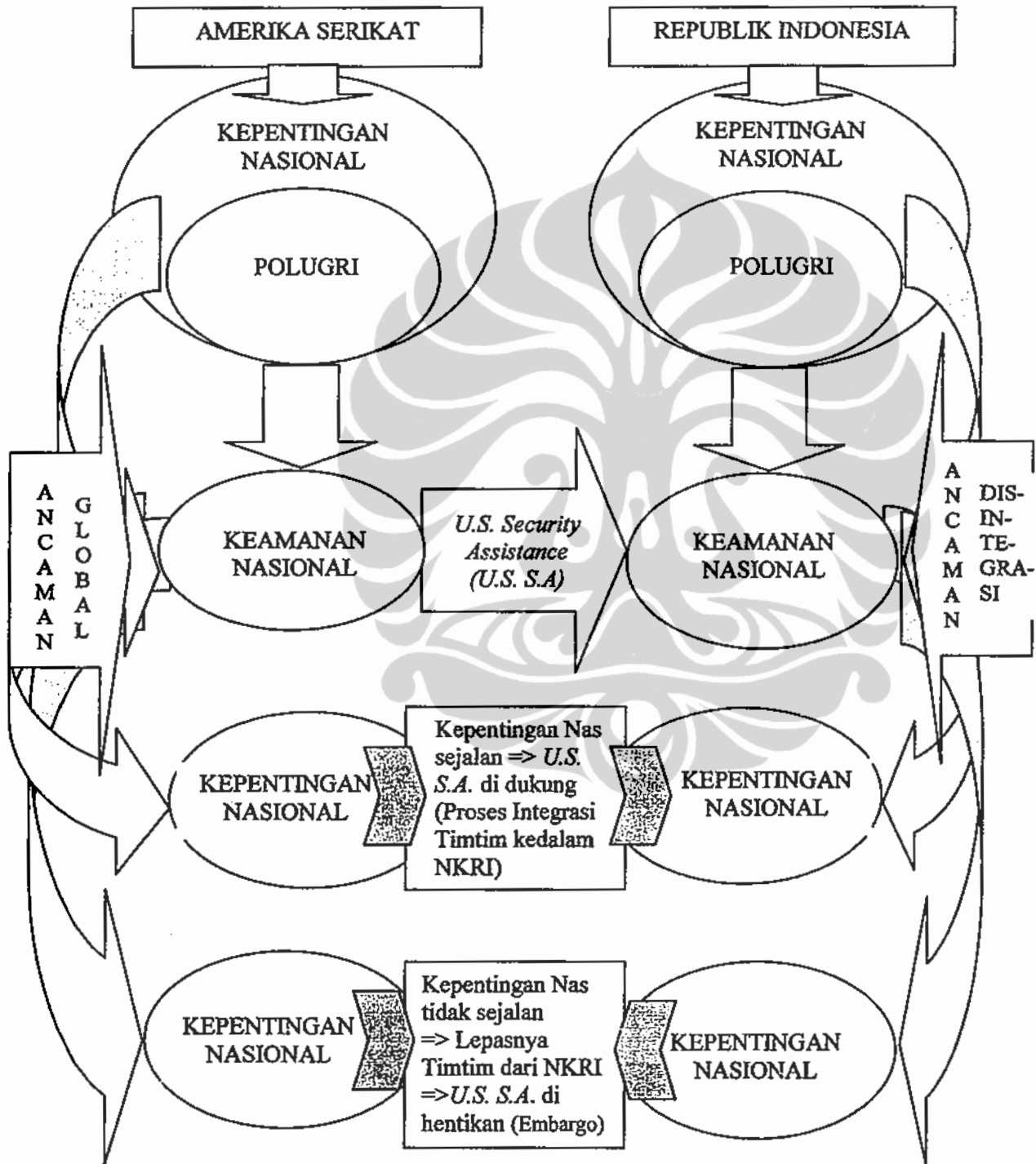
Selanjutnya kebijakan luar negeri suatu bangsa seyogianya juga didasarkan pada sumber kepentingan nasional lainnya yang sifatnya tidak begitu signifikan. Dengan kata lain kepentingan nasional seperti ini lebih bersifat sebagai pendukung. Yang masuk dalam kelompok ini antara lain adalah yang menyangkut upaya memelihara akar budaya dan ideologi sebagai identitas yang dapat dijadikan sebagai kebanggaan dalam percaturan internasional dan perhatian bangsa tersebut terhadap terciptanya perdamaian dunia sebagai kewajiban moral yang harus dipenuhi.

*Another major domestic sources of foreign policy is what we might call the political needs of a state and its leader... Still another major domestic sources of foreign policy is the cultural, psychological, and/or ideological needs of the state for prestige and status in the world: identity or meaning in life, needs for fulfillment of religious or sacred ideological imperatives, need to follow moral principles of fulfill obligation...*¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid., 62-63.

ALUR PIKIR
KEBIJAKAN AS TERHADAP INDONESIA:
U.S. SECURITY ASSISTANCE TERKAIT DENGAN
KASUS TIMOR TIMUR



1.3. Permasalahan

Dari latar belakang yang telah diuraikan, proses lepasnya Timor Timur dari NKRI dapat dilihat sebagai akibat dari adanya perubahan kebijakan AS dalam hal pemberian bantuan keamanan setelah terjadinya kerusuhan pasca jajak pendapat terhadap status Timor Timur. Selanjutnya dalam tesis ini penulis akan menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana peran *U.S. Security Assistance* dalam proses integrasi dan pelepasan Timor Timur dari NKRI? Namun untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan pembahasan terhadap jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan *U.S. Security Assistance*?; (2) Apakah kepentingan AS dalam *U.S. Security Assistance*?; dan (3) Apakah ada keselarasan antara kepentingan AS dengan kepentingan nasional Indonesia dalam *U.S. Security Assistance*? Adapun pertanyaan yang paling mendasar dalam penelitian ini adalah: Mengapa terjadi perubahan kebijakan bantuan keamanan AS (*U.S. security assistance*) terhadap pemerintah Indonesia pasca lepasnya Timor Timur? Disamping itu terdapat pula beberapa pertanyaan penelitian yang akan terjawab dalam tesis ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain meliputi: (1) Siapa yang berperan dalam penentuan politik luar negeri itu?; (2) Bagaimana reaksi masyarakat AS terhadap perubahan politik luar negeri tersebut?; dan (3) Mengapa mereka bereaksi seperti itu?

1.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori dan dikaitkan dengan latar belakang dan permasalahan maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu tentang lepasnya Timor Timur dari NKRI disebabkan oleh adanya benturan-benturan kepentingan nasional AS dan Indonesia sehingga kepentingan nasional kedua belah pihak tidak lagi konvergen.

1.5. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metoda kualitatif. Pertama, penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan penulisan termasuk mengakses internet dan menginventarisasi berbagai sumber

kepustakaan yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian. Prioritas pertama yang penulis kumpulkan adalah sumber primer yang akan mendukung proses analisis baik berupa buku maupun dokumen-dokumen resmi pemerintah. Selanjutnya sebelum melakukan penelitian penulis mengkaji bahan-bahan yang telah terkumpul dan memfokuskan perhatian pada upaya menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.

1.6. Kerangka Tesis

BAB 1: Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menyampaikan Latar belakang Penelitian, Kerangka Teori, Permasalahan, Hipotesis, Metodologi Penelitian dan Kerangka Tesis.

BAB 2: Kebijakan Kawasan Politik Luar Negeri AS dalam Politik Pembendungan. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Penerapan Kebijakan Politik Luar Negeri AS di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara; *U.S. Security Assistance*, termasuk jenis-jenis bantuan yang diberikan kepada Indonesia dan kepentingan AS dalam memberikan *Security Assistance* kepada negara penerima bantuan; serta berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah AS bagi setiap negara penerima bantuan.

BAB 3: Kebijakan AS terhadap Penyatuan Timor Timur dengan Indonesia. Pada bab ini akan diuraikan lebih lanjut tentang kepentingan AS dalam memberikan bantuan (*U.S. Security Assistance*) kepada Indonesia. Selanjutnya juga akan disinggung tentang arti penting *U.S. Security Assistance* bagi Indonesia. Akan diamati pula tentang adanya keselarasan kepentingan nasional kedua belah pihak terkait dengan adanya *U.S. Security Assistance* ini; akan dikaitkan pula dengan peran *U.S. Security Assistance* dalam mendukung upaya Indonesia mengintegrasikan Timor Timur ke dalam NKRI.

BAB 4: Paradoksal Kebijakan Bantuan AS terhadap Indonesia. Pada bab ini akan disoroti sikap AS terhadap upaya-upaya Timor Timur dalam memperoleh kemerdekaannya. Akan disoroti pula tentang ditariknya dukungan politis AS terhadap integritas NKRI, di mana Timor Timur ada di dalamnya. Selanjutnya akan dibahas pencabutan *U.S. Security Assistance* terhadap Indonesia, atau lazim disebut dengan istilah embargo. Kebijakan embargo ini diterapkan pasca

berlangsungnya jajak pendapat terhadap kemerdekaan Timor Timur (1999) yang berakhir dengan kerusuhan yang diindikasikan terjadi pelanggaran HAM berat yang melibatkan TNI.

BAB 5: Kesimpulan. Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan secara komprehensif tentang adanya perubahan kebijakan AS dalam pemberian *security assistance* pada saat proses integrasi dan pelepasan Timor Timur dari wilayah NKRI.



BAB 2 KEBIJAKAN KAWASAN POLITIK LUAR NEGERI AS DALAM POLITIK PEMBENDUNGAN

2.1. Kebijakan Politik Pembendungan di Kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara

Doktrin maksimalisme merupakan dasar bagi kebijakan politik luar negeri AS dalam upaya penyebaran demokrasi AS, khususnya ketika berhadapan dengan upaya komunisme yang menentang kapitalisme barat. AS berusaha menyebarkan kapitalisme – yang didasarkan pada liberalisme – ke seluruh penjuru dunia atas nama demokrasi guna menjamin kepentingan ekonomi global sekaligus kepentingan politik. Kondisi ini dapat dilihat terutama pada saat pemerintahan Presiden Harry Truman, yang mewarisi persoalan serius yang ditinggalkan oleh Franklin D. Roosevelt, yang telah menyerahkan kontrol atas Eropa Timur kepada Soviet.

Situasi yang tidak kondusif ini memaksa Truman mengeluarkan doktrin *containment* mengingat Soviet semakin agresif dalam menanamkan pengaruhnya di Eropa Timur yang dikhawatirkan akan diperluas dengan melakukan penetrasi kewilayah perbatasan Eropa Barat. Kekhawatiran AS semakin nyata ketika Soviet berhasil menjatuhkan pemerintahan Cekoslovakia (Februari 1948), disusul secara berturut-turut dengan tindakan Soviet melakukan blokade terhadap Berlin (Juni 1948), keberhasilan Soviet dalam uji coba ledakan bom atom (September 1949), kejatuhan pemerintahan nasionalisme Chiang Kai-shek oleh rezim komunis Mao Tse-tung (Oktober 1949), yang disusul dengan invasi Komunis Korea Utara atas Korea Selatan (Juni 1950) yang disinyalir ditunggangi oleh Soviet.

Menyikapi situasi tersebut, AS tidak bisa tinggal diam, segala daya dan upaya ditempuh. Sidang darurat pun digelar oleh Truman (Desember 1949), begitu Soviet melakukan blokade atas Berlin dan atas jatuhnya pemerintahan nasionalisme Chiang. Sidang lanjutan dilaksanakan pada April 1950 yang membahas Memorandum Badan Keamanan Nasional 68 (*National Security Council's Memorandum 68/NSC-68*), yang diharapkan mampu mengambil langkah-langkah strategis untuk merespon setiap ancaman Soviet di mana pun di

dunia, melalui pembangunan kemampuan senjata konvensional. Dari sinilah berawal terjadinya perlombaan senjata antara dua kekuatan *super power* pada waktu itu, yang mana kedua belah pihak menerapkan doktrin yang sama yaitu maksimalisme.

Pasca PD II, Soviet yang merupakan sekutu Amerika dalam menaklukkan fasisme Jerman merasa dikhianati oleh AS terutama dalam hal pengembangan teknologi bom atom, yang digunakan oleh AS dalam mengakhiri PD II. Stalin berusaha menerobos AS dengan perluasan paham komunisme di Eropa. Sebagai langkah awal Soviet menuntut dominasi atas Eropa Timur sesuai perjanjian Yalta (Februari 1945). Di samping itu Stalin juga berkeinginan untuk melebarkan sayapnya ke Jerman yang merupakan musuh.

Stalin's primary goal at Yalta seems to have been the guarantee of Soviet security through the establishment of friendly regimes receptive to Soviet troops in strategic areas of Eastern Europe, ... No doubt he wanted Communist regimes in Western Europe, or at least weak nation in that area. ...¹²

Sikap menentang yang ditunjukkan oleh Soviet mulai nampak ketika AS menghendaki agar negara-negara Eropa Timur diberikan hak pemerintahan sendiri melalui pemilihan umum – sebagai ciri demokrasi AS – tetapi ditolak Soviet. Pertarungan demokrasi Barat melawan komunisme meruncing pada masa pemerintahan Presiden Harry Truman, dengan upaya Stalin merealisasikan rencana lima tahunan yang bertujuan untuk pembangunan industri militer Soviet secara cepat. Hal ini semakin menunjukkan ambisi Soviet untuk memperkuat posisinya dalam upaya meningkatkan pengaruhnya atas kontrol Eropa Timur. AS tidak dapat membiarkan situasi ini. George Kenan – seorang diplomat AS yang bertugas di Moskow – mengirim peringatan tentang ambisi Soviet ini ke Washington yang antara lain mengatakan bahwa hanya AS yang mampu mengubah atau menghentikan ambisi Soviet. Peringatan Kenan inilah yang selanjutnya dikembangkan dan memuncak sebagai doktrin pembendungan Truman, yang kemudian dikenal sebagai doktrin Truman atau *Containment*.

¹² Jerald A. Combs, *The History of American Foreign Policy* (New York: Alfred A. Knopf, 1986), 306.

Istilah doktrin ini lahir berawal dari sebuah artikel yang dimuat pada jurnal *Foreign Affair* yang berjudul "*The Sources of Soviet Conduct.*" Penulisnya hanya membubuhkan "tanda X,"¹³ yang kemudian diketahui adalah George Kenan yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Perencanaan Kebijakan Deplu AS.

Doktrin Truman atau *Containment* ini dipadukan dengan *Marshall Plan* kemudian diimplementasikan sebagai kebijakan luar negeri AS yang dikenal sebagai kebijakan pembendungan (*policy of containment*). Perpaduan kebijakan ini menjadi pola kebijakan AS yang pada awalnya lebih ditekankan pada unsur-unsur politik dan ekonomi daripada militer, dan terutama ditujukan untuk membangun kembali kekuatan industri di Eropa.¹⁴ Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada saat Turki dan Yunani dalam posisi terjepit antara ultimatum Soviet atas kontrol Dardanelles di satu sisi dan terhentinya bantuan Inggris di sisi lain. AS memandang pentingnya keamanan di wilayah Timur Mediterania, oleh karena itulah kebijakan pembendungan diimplementasikan. Pada tanggal 12 Maret 1947 AS menyatakan untuk memberikan bantuan kepada Turki dan Yunani senilai US\$400 juta dan mengirimkan tenaga ahli dan militer untuk memberikan supervisi atas bantuan yang diberikan.¹⁵ Para sejarawan menyatakan bahwa peristiwa ini menandai dimulainya Perang Dingin. Sebelumnya, pada Februari 1947 Menlu Dean Acheson melakukan konsultasi dengan Menhan dan memberikan paparan tentang pentingnya menjaga agar Yunani dan Turki tidak sampai jatuh ke rezim komunis, ia memprediksi apabila Yunani sampai jatuh ke rezim komunis, maka tidak mustahil akan diikuti oleh kejatuhan Turki yang akan memberikan keleluasaan bagi Soviet untuk mengontrol Dardanelles yang merupakan akses lalu lintas utama bagi pelayaran Rusia ke Mediterania melalui Laut Hitam. Apabila hal ini terjadi maka kejatuhan negara-negara Italia, Jerman dan Perancis hanya tinggal menunggu waktu. Teori yang dikemukakan Acheson ini dikemudian hari dikenal sebagai teori domino.

¹³ Stephen E. Ambrose, *Rise to Globalism: American Foreign Policy Since 1938*, 4th ed (New York: Penguin Books Inc., 1985), 99.

¹⁴ Jerald A. Combs, *op.cit.*, 333.

¹⁵ Alexander Deconde, *A History of American Foreign Policy* (New York: Charles Scripner's Sons, 1963), 669 – 670.

Pada saat itu kondisi perekonomian Eropa semakin memburuk, termasuk Inggris. AS menerapkan kebijakan pemberian bantuan ekonomi dalam rangka membantu pemulihan ekonomi Eropa Barat melalui *Marshall Plan*. Rancangan bantuan ini diolah relatif hampir bersamaan dengan proses penggodokan doktrin pembendungan. Sehingga kemudian secara bersamaan kedua doktrin ini lahir dan terimplementasikan sebagai kebijakan pembendungan komunis (*policy of containment*). Kebijakan ini ibarat tombak bermata dua, negara-negara yang menerima implementasi kebijakan ini secara bersamaan memperoleh bantuan ekonomi dan sekaligus bantuan militer.

Kondisi perekonomian Eropa Timur pada saat itu tidak lebih baik atau bahkan cenderung lebih buruk dibandingkan Eropa Barat. Menanggapi *Marshall Plan* yang diluncurkan oleh AS bagi Eropa Barat, Soviet pada 25 Januari 1949 meluncurkan program tandingan untuk membantu pemulihan ekonomi Eropa Timur, yaitu *Council for Mutual Economic Assistance* (COMECON).

Marshall Plan merupakan bagian integral dari *policy of containment* melalui pendekatan ekonomi. Untuk mengoptimalkan pencapaian kebijakan tersebut melalui pendekatan *security* – yang merupakan perwujudan dari doktrin maksimalis Amerika – AS menginisiasi pembentukan Pakta Pertahanan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) pada 4 April 1949 yang beranggotakan 12 negara Eropa Barat (AS, Canada, Turki, Yunani, Perancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Italia, Inggris, Jerman, Spanyol). Pembentukan Pakta ini dipicu oleh tindakan Soviet yang mendirikan Republik Demokrat Jerman sebagai tandingan atas prakarsa AS mendirikan Republik Federasi Jerman. Enam tahun kemudian tepatnya pada 14 Mei 1955 Soviet kembali membuat Pakta tandingan yaitu Pakta Warsawa yang beranggotakan 6 negara-negara Eropa Timur (Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Ceko-slovakia) yang berada di bawah pengaruh kuat komunis Soviet.

Kebijakan pembendungan ini semakin tegas ketika Soviet semakin meningkatkan pembangunan kemampuan persenjataan militernya, termasuk dalam hal pengembangan senjata bom atom. Truman melakukan pertemuan khusus membahas Memorandum Keamanan Nasional 68 (*National Security*

Council's Memorandum 68/NSC- 68) yang diharapkan mampu merespon setiap ancaman Soviet di mana pun didunia.

Ancaman komunis Soviet telah membuat kekhawatiran AS meningkat semenjak jatuhnya Cekoslovakia dan kekhawatiran ini semakin bertambah ketika Soviet berhasil mengembangkan bom atom. Soviet mengumumkan keberhasilan atas uji coba ledakan bom atom pada 23 September 1949, disusul dengan jatuhnya China ke rezim komunis dengan diproklamasikan *the People's Republic of China* oleh Mao Tse-tung pada 1 Oktober 1949. Hal ini membuat situasi global semakin memanas, yang kemudian memicu terjadinya perlombaan senjata dan membuat Truman menetapkan kebijakan anggaran pertahanan menjadi sekitar \$15 milyar.

Pada awal Maret 1950 Menlu Acheson dalam suatu forum diskusi menyatakan bahwa: ...*The US, must fight the cold war with "total diplomacy," comparable in sacrifice by the American people to total war.*¹⁶ Lebih lanjut Acheson menyatakan untuk mengimplementasikan "*total diplomacy*" dalam membendung komunis, diperlukan perubahan kebijakan yang drastis dibidang politik, sosial dan ekonomi dengan memperlonggar masuknya dollar dari Eropa Barat, dan membenahi kemunduran industri domestik. Sementara kebijakan luar negeri AS diarahkan mencari aliansi untuk menghadapi perang melawan komunis dan melindungi kemerdekaan mereka dari agresi komunis. Dari pernyataan ini AS menyadari benar bahwa pertempuran melawan komunis akan sangat sulit bila AS hanya bertindak secara unilateral.

Pada 14 April 1950, dalam sidang khusus membahas lanjutan NSC-68, antara lain disimpulkan bahwa:

The foregoing analysis indicates that the probable fission bomb capability of Soviet Union have greatly intensified the Soviet threat to the security of United States. This threat is of the same character as described in NSC 20/4 (approved by the President on November 24, 1948) but is more immediate than had previously been estimated. ...within the next four or five years the Soviet Union will possess the military capability of delivering a surprise atomic attack of such weight that the United States must have substantially increase general air, ground, and sea strength, atomic capability, and air and civilian defenses to deter war and to provide reasonable assurance, in the event of war, that it could survive the initial blow and go on the eventual attainment of its objectives. In

¹⁶ *Time in partnership with CNN*, "Total Diplomacy." (New York), 13 Maret 1950., 8 March 2009. <<http://www.time.com/time/printout/8816.812120.00.htm>>.

*turn, this contingency requires the intensification of our effort in the field of intelligence and research and development...*¹⁷

Untuk mewujudkan rekomendasi NSC-68 dalam membangun kemampuan militer AS, diperkirakan akan menelan biaya sebesar \$30 milyar hingga \$50 milyar, hal ini berarti memerlukan anggaran 2 hingga 3 kali lipat dari anggaran pertahanan yang diajukan Truman sebelumnya. Dari sinilah awal mula AS mempersiapkan secara serius strategi persiapan menghadapi perang melawan komunisme Soviet, yang pada masa pemerintahan Nixon strategi ini dikembangkan menjadi strategi *flexible respons* dalam memerangi komunisme global. Hal ini semakin menguatkan bahwa doktrin maksimalis Amerika benar-benar diterapkan dengan sangat tegas untuk membendung penyebaran komunisme.

Penerapan *containment policy* selanjutnya adalah ketika Amerika melakukan pembebasan Korea Selatan dari invasi Komunis Korea Utara. Perang Korea ini merupakan bagian dari warisan konflik PD II yang tidak diselesaikan pada saat itu. Sekutu tidak memperlakukan Korea Selatan sebagai sesuatu yang penting selama berlangsungnya PD II. Mereka tidak membuat pengaturan untuk pendudukan Korsel hingga kemudian Uni Soviet memasuki perang Pasifik, sehari sebelum Jepang menyerah. Soviet dan Amerika secara tergesa-gesa menyetujui bahwa Rusia secara temporer akan menduduki Korea Utara, sementara Amerika menduduki Korea Selatan. Amerika berasumsi bahwa Korea akan segera disatukan dan membentuk pemerintahan sendiri, setelah itu kedua kekuasaan (AS dan Rusia) yang menduduki Korea segera menarik pasukan mereka.

Namun dalam perkembangannya Soviet membentuk pemerintahan Korea Utara dari Partai Komunis Korea buangan. Uni Soviet memberlakukan aturan yang sangat ketat bagi hubungan Korea Utara dengan dunia luar. Rusia juga membangun tentara Korea Utara yang kuat untuk membantu pasukan merah dalam memelihara kontrol, serta meluncurkan program *land reform* untuk membantu memenangkan dukungan lokal, meskipun menekan pemerintahan baru. Kemudian Amerika mengajak Soviet segera membentuk pemerintahan sendiri

¹⁷ NSC-68 Conclusions, *NSC-68 of April 14, 1950.*, 8 March 2009. <<http://history.sandiego.edu/gen/20th/nsc68.html>>.

bagi penyatuan kedua Korea melalui pemilihan umum, namun kedua belah pihak mengalami kesulitan dalam membuat format yang tepat karena keduanya tidak pernah sepaham. Akhirnya rencana pemilihan umum yang digagas oleh kedua belah pihak mengalami kegagalan. Selanjutnya Amerika mengusulkan kepada Soviet agar pemilihan umum dilakukan dengan melibatkan PBB, namun hal ini ditolak Soviet. Dalam hal ini kembali dipertontonkan pertarungan ideologi demokrasi AS dengan ideologi komunis Soviet yang tidak dapat dikompromikan untuk menyelesaikan konflik Korea secara damai dan bermartabat.

PBB mengadakan pemilihan umum di Korsel. Pemilihan umum pada tahun 1948 menghasilkan formasi Republik Korea (*Republic of Korea*) dengan Syngman Rhee sebagai pemimpin. Menjelang pertengahan tahun 1949, AS menarik sisa pasukannya yang berjumlah 7.500 dari Korsel. Rhee segera membangun kekuatan tentaranya dan mengirimkan tentaranya ke daerah perbatasan. Dalam perkembangan selanjutnya Korea Utara melakukan invasi ke Korsel (Juni 1950). AS mencurigai bahwa invasi ini ditunggangi oleh Soviet. Amerika semakin gerah, ia tidak mau kejadian di Cina terulang, dimana Chiang Kai-shek (Pemimpin Kelompok Nasionalis Cina) ditaklukkan oleh Mao Tse-tung yang membentuk pemerintahan Komunis. Disini kredibilitas Truman dengan doktrin *containment* nya benar-benar dipertaruhkan.

Dalam konteks itu, Truman menugaskan Jenderal McArthur memimpin pasukan Amerika dengan Armada Ketujuhnya yang digerakkan dari Piliphina ke Selat Taiwan, dengan pesan agar Jenderal McArthur berupaya menghindari terjadinya perluasan peperangan dengan Rusia ataupun Cina. Pergeseran pasukan ini dimaksudkan sekaligus untuk menghalangi Mao yang berusaha merebut Taiwan. Ketika Jenderal McArthur menemui Chiang Kai-shek dan mengisyaratkan permintaan terhadap komitmen permanen Amerika dalam mendukung pemerintahan nasionalis Taiwan, Truman mengirim Averell Harriman untuk mengingatkan McArthur agar menghindari membuat janji yang menyanggupi permintaan Chiang. Kemudian McArthur mengumumkan bahwa Armada Ketujuh akan ditarik dari Selat Taiwan setelah Perang Korea.

Pasukan Jenderal McArthur melakukan serangan amfibi di garis pertahanan pasukan Korea Utara di pantai Incheon, dan terus bergerak maju hingga akhirnya mampu menghancurkan pasukan regime komunis Korut melampaui garis perbatasan 38 derajat lintang Utara. Dalam operasi pembebasan Korseul ini McArthur mengingatkan agar Cina tidak campur tangan, sebab kalau sampai Cina melakukannya, Jenderal McArthur tidak akan segan/ragu untuk menaklukkannya.

Serangan McArthur dihentikan setelah melintasi garis perbatasan 38 lintang Utara dan dilanjutkan dengan negosiasi damai. Secara efektif pertempuran berakhir hanya dalam waktu 3 bulan dengan menelan biaya dan korban jiwa yang relatif kecil. Dalam pertempuran ini korban jiwa yang dialami Amerika berjumlah sebanyak 30.000 prajurit, dan dari Korseul menelan korban jiwa yang lebih banyak. Dalam perang Korea ini rekomendasi NSC-68 sepenuhnya terimplementasikan. Belanja pertahanan Amerika mengalami pelipatan hingga 3 kali, dari semula \$15 milyar sebelum perang Korea, menjadi \$44 milyar ditahun 1952 dan menjadi \$50 milyar ditahun 1953. *Shock* yang dialami oleh Amerika secara berturut-turut yaitu jatuhnya Cekoslovakia, blokade Berlin, keberhasilan uji coba ledakan bom atom Soviet, jatuhnya Cina ke rezim komunis Mao, dan terakhir Perang Korea telah membawa Perang Dingin ke puncak yang membahayakan yang akan berlanjut bagi generasi berikutnya.¹⁸

Perang Korea ini, memberikan pelajaran bagi AS bagaimana komunis menggarap negara-negara miskin dan negara berkembang untuk menanamkan pengaruhnya. Pada saat yang bersamaan dengan pecahnya perang Korea, pengaruh komunis mulai berkembang di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti di Vietnam, Laos, Kamboja dan Indonesia. Amerika tidak mau mengambil resiko atas meluasnya komunis di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu untuk membendung pengaruh komunis, AS meluncurkan program bantuan yang memadukan bantuan ekonomi dan militer sebagai perwujudan perpaduan *Marshall Plan* dan doktrin *Containment*. Salah satu dari aplikasi kebijakan ini adalah *U.S. Security Assistance*.

¹⁸ Alexander Deconde, op.cit., 345

Dalam memaksimalkan pencapaian kebijakan pembendungan, AS tidak hanya sampai pada pemberian *Security Assistance*. Memperhatikan pengaruh komunis yang cenderung semakin menguat di kawasan Asia Pasifik khususnya Asia Tenggara, timbul kekhawatiran AS terhadap kejatuhan negara-negara di kawasan ke dalam rezim komunis, sebagaimana teori (domino) yang pernah dikemukakan oleh Acheson ketika menjaga kejatuhan negara-negara Eropa Barat ke rezim komunisme.

Kekhawatiran AS semakin beralasan ketika perang Korea berakhir di tahun 1953, justru pengaruh komunis di Indochina semakin menguat. Bahkan ketika pasukan Perancis menghadapi kesulitan dalam pertempuran melawan komunis di Indochina dan memperoleh bantuan berbagai peralatan militer dari AS, Perancis tetap tidak mampu menghadapi perlawanan komunis Indochina. Untuk mengantisipasi kondisi yang semakin tidak menentu Menlu Dulles pada 6 September 1954 mengadakan konferensi di Manila dengan perwakilan dari negara-negara Inggris, Perancis, Australia, New Zealand, Philipina, Thailand dan Pakistan. Negara-negara di kawasan yang diundang, namun tidak hadir adalah India, Burma, Srilanka (*Ceylon*) dan Indonesia. Dalam konferensi tersebut akhirnya disepakati pembentukan Pakta Pertahanan sejenis NATO di kawasan Asia Tenggara yaitu *Southeast Asia Treaty Organization* (SEATO), yang dimaksudkan untuk membendung penyebaran komunis di Asia Tenggara.

2.2. *U.S. Security Assistance* dan Kepentingan AS

U.S. Security Assistance adalah salah satu program yang terkait erat dengan politik luar negeri AS dibidang kerjasama militer dan pertahanan dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bantuan diberikan dalam beberapa bentuk program seperti: *International Military Education Training* (IMET), *Military Assistance Program* (MAP), *Foreign Military Sales* (FMS).

Dalam menjalankan politik luar negeri melalui penyebaran demokrasi, AS meluncurkan program-program bantuan kepada negara-negara berkembang, termasuk bantuan keamanan. *U.S. Security Assistance* merupakan salah satu program bantuan keamanan dimaksud. Melalui penyebaran demokrasi ke seluruh penjuru dunia yang dilandasi oleh semangat *manifest destiny*, maka persoalan

kepentingan nasional AS adalah identik dengan kepentingan globalnya. Salah satu tantangan global AS dalam penyebaran demokrasi pada kurun waktu tertentu adalah adanya pengaruh/ancaman penyebaran ajaran komunis, yang secara ideologis paham tersebut sangat berseberangan dengan demokrasi dan kapitalisme. Pada tahun 1947 Presiden Harry Truman mencanangkan doktrin *containment*, yang merupakan pernyataan perang globalnya untuk membendung penyebaran paham komunis. Perang Dingin telah dimulai.

Sebagai negara demokrasi yang berazaskan kebebasan termasuk kapitalisme, Amerika mendorong para pengusahanya untuk melebarkan sayapnya dalam melakukan bisnis di mana pun. Salah satu sasaran para pebisnis Amerika dalam mengembangkan bisnisnya adalah negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alamnya, sekaligus memanfaatkan negara-negara berkembang tersebut dalam rangka memperluas pangsa pasar bagi produk-produk *manufacture* dan memperkenalkan sistem mekanisme pasar bebas (kapitalisme), tanpa campur tangan pemerintah.

AS yang juga sebagai negara industri tentunya memerlukan ketersediaan energi yang sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian yang menjadi nafas berbagai bidang kehidupan lainnya. Keberhasilan ekonomi tentunya harus diproteksi dengan kontrol keamanan domestik yang ketat, untuk itu diperlukan kehadiran militer yang kuat sebagai *deterrence factor* untuk mengamankan seluruh aset dan kekayaan yang dimiliki. Kembali pada kebutuhan akan energi sebagai penggerak roda perekonomian yang sangat vital bagi AS, AS memerlukan pasokan energi yang sangat besar, yang dalam hal ini tidak mungkin dipenuhi hanya dari produksi bahan bakar (energi) domestik. Oleh karena itu, AS dalam melakukan ekspansi bisnis di seluruh belahan dunia, salah satu tujuannya adalah untuk mencari peluang bisnis melalui investasi dibidang eksplorasi energi. Salah satu sumber pasokan energi AS pada awalnya diperoleh di negara-negara berkembang seperti kawasan Timur Tengah, dan Asia Pasifik khususnya Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Salah satu ketegangan yang pernah terjadi di Timur Tengah pasca PD II antara lain juga disebabkan oleh perebutan penguasaan sumber energi. Rusia

berusaha hadir ke Iran memasuki arena eksplorasi minyak di sana menyusul masuknya Jerman, di mana Inggris telah terlebih dahulu melakukan eksplorasi sejak tahun 1920. Kemudian antara Inggris dan Rusia menjadi sekutu untuk mencegah masuknya Jerman. Persoalan ini tidak terlepas dari persoalan tahta kekaisaran Iran. Selanjutnya AS juga masuk yang diawali dengan pembangunan infrastruktur perkerataapian. Dalam perkembangan selanjutnya AS mulai mengkhawatirkan terhadap kehadiran Inggris dan Rusia beserta pasukan militer mereka secara permanen di Iran. Kehadiran pasukan kedua negara ini merupakan sisa-sisa pendudukan semasa berlangsungnya PD II. Oleh karena itu AS mengupayakan sebuah *treaty* dan pada tahun 1942 *treaty* tersebut disepakati oleh semua kekuatan yang menduduki Iran untuk menarik pasukan mereka dalam waktu 6 bulan setelah berakhirnya perang. Dengan *treaty* tersebut, Inggris dan AS menarik pasukan mereka sebelum batas akhir yang ditetapkan pada 2 Maret 1944 kecuali untuk beberapa orang penasehat AS yang memang dikehendaki oleh pemerintah Iran. Sementara itu, Soviet ingin tetap mempertahankan kehadiran pasukannya di Iran.¹⁹ Hal inilah yang juga menjadi salah satu pemicu ketegangan hubungan antara AS dan Rusia.

Perburuan ladang-ladang minyak terus dilakukan oleh AS, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian AS memiliki kepentingan-kepentingan di setiap kawasan, dalam mana dia menanamkan investasinya. Kepentingan ekonomi sebuah negara merupakan kepentingan vital yang tidak akan lepas dari upaya untuk melindunginya. Untuk kepentingan itulah maka AS mengerahkan militernya dan membangun basis-basis militer di setiap kawasan. Terkait dengan perburuan ladang-ladang minyak oleh AS di kawasan Asia antara lain disebutkan bahwa:

In 1948, the United States became a net importer of oil. Seven major companies, "Big Oil," spearheaded the world industry. Of these companies five were American -- Chevron, Exxon, Gulf, Mobil and Texaco -- ... The developing countries that owned the vast supply of discovered oil reserves were scattered across the earth: Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela...

¹⁹ Jerald A. Combs, op.cit., 326

*The companies proceeded to construct legal and business systems for extracting the oil and controlling supply.*²⁰

AS menyadari bahwa tidak mungkin untuk melindungi kepentingan-kepentingan ekonominya secara langsung di negara-negara berkembang. Oleh karena itulah seiring dengan penerapan doktrin pembendungan, AS juga memberikan bantuan-bantuan terutama dalam bentuk *security assistance*. Sebab manakala terjadi pergolakan politik di sebuah negara berkembang, dalam mana kepentingan ekonomi AS ada di negara tersebut, maka kepentingan tersebut akan ikut terancam dengan pola perjuangan komunis, yang akan menghancurkan kapitalisme AS, melalui nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing secara sepihak. *U.S. Security Assistance* kepada negara-negara berkembang dalam mana kepentingan nasional AS ada didalamnya adalah terutama untuk memberikan peningkatan *capacity building* dibidang keamanan negara tersebut. Dengan kondisi yang aman dinegara tersebut, maka kepentingan AS pun juga akan ikut terjamin.

2.3. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan bagi negara penerima *U.S. Security Assistance*

Kebijakan yang mendasari pelaksanaan program *U.S. Security Assistance* terdapat 3 ketentuan yaitu:

2.3.1. Kewenangan Kongres dalam memberikan persetujuan terhadap bantuan luar negeri (*Congressional Authorization and Appropriations*)²¹

Program bantuan ini biasanya diinisiasi oleh pemerintah AS, dalam hal ini *U.S. Department of Defense*, atau berdasarkan kebutuhan negara penerima bantuan. Adapun program-program yang termasuk di dalamnya adalah baik yang akan sepenuhnya didanai oleh Pemerintah Amerika maupun yang didanai oleh pemerintah negara penerima bantuan. Ini perlu disampaikan agar tidak ada konotasi bahwa program *U.S. Security Assistance* ini sepenuhnya bersifat gratis.

²⁰ Joseph Coton Wright, *Oil: Demand, Supply and Trends in the United States* (T.k.: University of California Berkeley, T.t.), 2.

²¹ The Defence Institute of Security Assistance Management, *The Management of Security Assistance*, 26th ed (Ohio: DISAM, 2006), 2-1.

Untuk program yang diluncurkan namun harus menggunakan dana dari pemerintah negara penerima bantuan adalah *Foreign Military Sales (FMS)*, yaitu program-program yang digunakan untuk pengadaan berbagai *defense articles* beserta suku cadang dan komponen peralatan militer produk AS. Sekalipun menggunakan dana dari Pemerintah negara penerima bantuan, pihak AS tetap memiliki kewenangan dalam melakukan kontrol terhadap pemanfaatannya. Bantuan yang diberikan dalam *FMS Cases* antara lain dalam bentuk *softloan* dengan bunga tetap serta jangka waktu pembayaran yang relatif panjang.

2.3.2. Ketentuan Perundang-undangan (*Authorization Acts*)

Foreign Assistance Act of 1961 (FAA), berikut amandemennya. Ketentuan ini berisi berbagai hal terkait dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara penerima *U.S. Security Assistance*.²² Persyaratan-persyaratan dimaksud antara lain: (1) Pihak pemerintah negara penerima bantuan dilarang menyerahkan *any defense articles* yang diberikan, kepada pihak ketiga tanpa persetujuan resmi dari pemerintah AS; (2) Seluruh *defense articles* beserta komponennya wajib diserahkan kembali kepada pemerintah AS, manakala pihak pemerintah negara penerima bantuan bermaksud tidak akan memanfaatkannya lagi; (3) Apabila *defense articles* tersebut dihapus – atas persetujuan Amerika – dan dijual dalam bentuk *scrap*, maka pemerintah negara penerima bantuan harus menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada pemerintah AS; (4) Pihak pemerintah negara penerima bantuan bersedia memberlakukan tingkat kerahasiaan terhadap *defense articles* yang diberikan sesuai dengan tingkat kerahasiaan yang diberlakukan oleh AS. Apabila diperlukan pihak pemerintah negara penerima bantuan harus mengizinkan personil AS melakukan observasi terhadap *defense articles* tersebut.²³

Arms Export Control Act of 1976 (AECA), yang sekaligus juga mengakomodasikan berbagai ketentuan yang telah ada yaitu *International Traffic in Arms Regulation (ITAR)*. Ketentuan ini berisi hal-hal yang terkait dengan

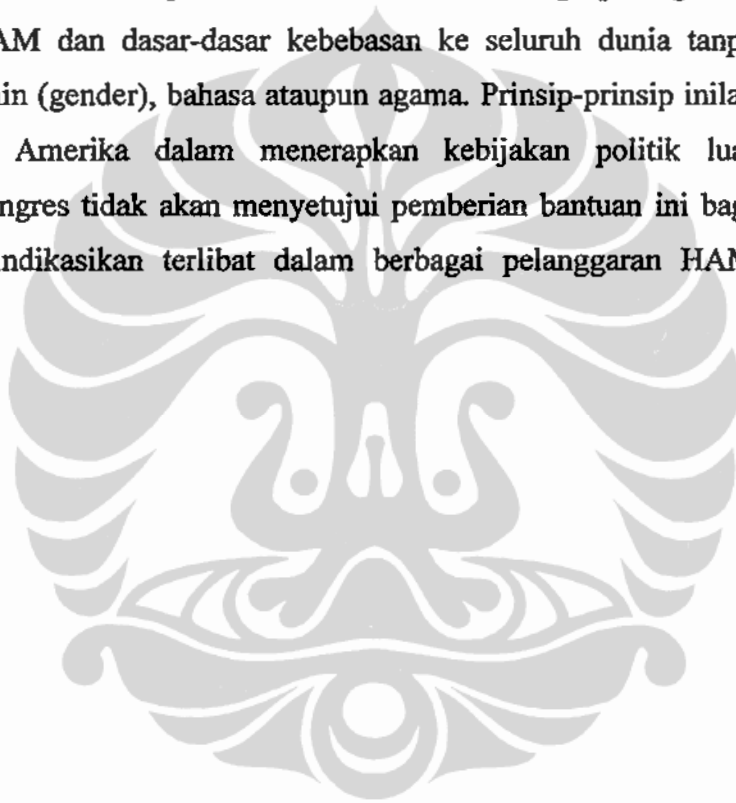
²² Ibid.

²³ Amandemen terbaru *Foreign Assistance Act of 1961 (FAA)* adalah Nota Diplomatik “505 Agreement” Deplu RI kepada Kedubes AS di Jakarta No. D.638/PO/LX/2006/36, Jakarta: 6 September 2006.

pengaturan tentang peralatan militer apa saja yang boleh dijual dan yang tidak boleh dijual kepada negara yang memerlukan.²⁴

2.3.3. *Human Rights.*

Pemerintah Amerika merasa memiliki kewajiban internasional sebagaimana yang ditetapkan di dalam Ketetapan PBB dan sebagai perwujudan dari apa yang ditulis dalam warisan dan tradisi Konstitusinya. Dalam hal ini Amerika diwajibkan untuk mempromosikan dan mendorong peningkatan penghormatan pada HAM dan dasar-dasar kebebasan ke seluruh dunia tanpa membedakan ras, kelamin (gender), bahasa ataupun agama. Prinsip-prinsip inilah yang digunakan oleh Amerika dalam menerapkan kebijakan politik luar negerinya, sehingga Kongres tidak akan menyetujui pemberian bantuan ini bagi negara-negara yang diindikasikan terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM [Section 502B, FAA].²⁵



²⁴ The Defence Institute of Security Assistance Management, *op.cit.*, 2-1.

²⁵ *Ibid.*, 2-9.

BAB 3

KEBIJAKAN AS TERHADAP PENYATUAN TIMOR TIMUR DENGAN INDONESIA

3.1. Kepentingan AS dalam *U.S. Security Assistance* terhadap Indonesia

Deklarasi kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson antara lain mengadopsi teori kontrak pemerintahan John Locke, yang selanjutnya dirumuskan oleh Jefferson dalam suatu kalimat yang menggambarkan sebuah keinginan luhur bangsa Amerika pada masa itu, dan sekaligus dijadikan landasan falsafah kenegaraan oleh bangsa Amerika dari generasi ke generasi. ...*that governments derived "their just Powers from the consent of the people," who were entitled to "alter or abolish" those which denied their "unalienable right" to "life, Liberty, and the pursuit of Happiness."*...²⁶ Dengan rumusan teks deklarasi kemerdekaan tersebut "*the founding father*" bangsa Amerika menyadari benar bahwa pembentukan sebuah negara didasarkan pada kekuasaan yang diberikan oleh rakyatnya, dan sebaliknya kekuasaan yang diperoleh harus menjamin hak-hak setiap warga negaranya untuk memperoleh penghidupan yang layak, kebebasan menjalankan aktivitasnya serta dalam mencapai kebahagiaan.

Dengan demikian pemerintah Amerika memberikan keleluasaan bagi setiap warga negaranya untuk menjalankan bisnis yang secara berjenjang akan berdampak bagi penciptaan peluang kerja dan kemudian berkembang menjadi korporasi, menggerakkan ekonomi masyarakat dan pada gilirannya akan menopang perekonomian negara. Untuk menggerakkan dan meningkatkan perekonomian nasional, pemerintah Amerika menerbitkan berbagai regulasi yang memungkinkan terciptanya ekspansi ekonomi yang secara bersamaan dimanfaatkan untuk menyebarkan demokrasi dan kapitalisme ke seluruh penjuru dunia. Asia Pasifik dan khususnya Asia Tenggara termasuk Indonesia tidak luput dari sasaran Amerika dalam hal ekspansi ekonomi.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam dan sumber daya manusia yang relatif murah merupakan prospek yang belum dieksploitasi oleh para pengusaha Amerika untuk

²⁶ George Brown Tindall, *op. cit.*, 201.

menanamkan investasinya. Investasi awal pada dasarnya telah dilakukan oleh bangsa Amerika bahkan sejak Indonesia masih berada dalam penjajahan Belanda. Pada tahun 1910 – pada saat karet menjadi salah satu primadona komoditi perdagangan internasional dengan semakin maraknya berbagai industri manufaktur dan industri otomotif – para pengusaha Amerika telah berhasil memasuki industri karet Indonesia sebagai mitra para pengusaha Belanda yang usaha bisnisnya didaftarkan di Belanda. Kemitraan ini adalah Perusahaan Perkebunan Belanda-Amerika, yang mana perusahaan-perusahaan karet Amerika mempunyai saham terbesar dan bahkan menjadi perkebunan karet terbesar di dunia. Hal ini antara lain disebabkan oleh upaya seorang botanis Amerika, Dr. Carl La Rue dalam pengembangan teknik pencakokkan pucuk yang membawa perubahan besar dalam industri karet.²⁷

Selanjutnya pada tahun 1920 perusahaan minyak Amerika, *Standard Vacuum* berhasil masuk ke Hindia Belanda, setelah pemerintah Amerika melakukan tekanan kepada Belanda, karena sebelumnya pemerintah Belanda sangat membatasi masuknya investor minyak asing. Pada tahun 1935 sebuah perusahaan minyak lainnya, *Standard Vacuum of California* (Socal), diijinkan beroperasi di Hindia Belanda dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Richard Hooper, seorang geolog yang berkarir di Indonesia selama lima belas tahun pernah menulis:

*Socal, now known as Chevron, obtain permission to send six geologists, headed by Emerson M. Butterworth, to the Netherlands East Indies in 1924 to survey oil prospects. By 1930, they had pinpointed two areas worth prospecting, in southeast Borneo and in northwest New Guinea but only in partnership with Shell and Standard Vacuum. In lieu of the Borneo site, it offered Central Sumatra, with the prominent Dutch geologist. L.T.C. van Es had found to have no prospects for oil. Socal's headquarters in San Francisco said "go to hell with it" but finally gave in to Butterworth pleas to accept the offer and continue prospecting. In 1939, the year of my arrival, we discovered a small field northwest Minas in central Sumatra. I recommended Minas as an area of considerable promise. After the war, Minas was discovered to be the largest field in Southeast Asia. An American company was able to develop it because the Dutch had been certain it did not exist.*²⁸

²⁷ Paul F. Gardner, *Shared Hopes Separate Fears: Fifty Years of U.S.-Indonesian Relation* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1997), 10.

²⁸ Ibid.

Karet dan minyak merupakan bisnis yang sangat prospektif pada saat itu. Untuk karet pada saat itu benar-benar merupakan produk yang belum tersaingi oleh produk karet sintetis, yang menjadi bahan baku yang sangat dibutuhkan untuk berbagai produk permesinan yang digunakan sebagai bahan penyekat (*seal*) pada bagian-bagian utama peralatan permesinan yang berputar dengan bantuan pelumasan. Di samping itu, karet juga merupakan bahan dasar ban-ban mobil serta berbagai komponen penting untuk peralatan persenjataan/militer. Sementara untuk tambang-tambang minyak bumi, dari dahulu hingga saat ini masih menjadi bahan dasar berbagai produk bahan bakar, terutama pada saat itu, yang mana Amerika yang telah menjadi raksasa industri tidak dapat melepaskan ketergantungan dari kontinuitas suplai bahan bakar. Terlebih dengan potensi kandungan minyak terbesar di kawasan Asia Tenggara, menjadikan bisnis minyak Amerika di Hindia Belanda sebagai salah satu andalan kelangsungan pasokan energi bagi industri Amerika. Sehingga tidak heran dalam era perebutan pengaruh antara Amerika dan demokrasi serta kapitalismenya dengan Soviet dan komunismenya yang semakin memuncak dengan terjadinya Perang Dingin, Amerika memiliki kepentingan ekonomi yang tidak kecil di Hindia Belanda. Dan kepentingan tersebut tetap dipertahankan manakala Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya.

Kepentingan ekonomi yang sangat vital tersebut membuat Amerika berada dalam kebimbangan ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, sementara Belanda masih berupaya mempertahankan bekas koloninya yang berjuang dengan keras mempertahankan kemerdekaannya. Kebimbangan tersebut mendorong Amerika tidak gegabah untuk langsung memberikan pengakuannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Hal ini disebabkan Amerika masih ada ikatan moral dengan Belanda sebagai salah satu negara Eropa yang menjadi sekutunya pada saat berperang. Lebih dari itu, Amerika juga memberikan bantuan ekonomi kepada Belanda yang mana bantuan tersebut antara lain digunakan untuk membiayai operasinya di Indonesia.

Amerika mulai gamang manakala pengaruh komunis mulai menguat di Indonesia di satu sisi, dan di sisi lain melihat sepak terjang Belanda yang tidak mau menerima permintaan Amerika untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia menghirup udara kemerdekaan. Berbagai langkah mediasi yang

dilakukan Amerika untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda pasca kemerdekaan Indonesia, baik melalui persetujuan Linggarjati (11 November 1946) maupun mediasi di Kapal *U.S.S. Renville* (17 Februari 1948) yang berlabuh di Tanjung Priok tidak ditanggapi dengan serius oleh Belanda.

Ketika suasana konflik Indonesia-Belanda memanas, demi melindungi kepentingannya, Deplu AS secara bersamaan mengirimkan pesan secara terpisah, baik kepada Indonesia maupun Belanda agar memberikan jaminan bahwa warganegara dan aset mereka di lapangan minyak Sumatra bagian Selatan akan dilindungi sekiranya terjadi bentrokan bersenjata di antara keduanya.²⁹ Konflikpun pecah, pada 20 Juli 1947 Belanda melakukan aksi polisionil (agresi) nya yang pertama dan pasukan Belanda sempat menguasai Sumatra dan sebagian Jawa, kecuali Jawa Tengah dan Yogyakarta yang dijadikan pusat pemerintahan sementara dan dikawal TNI dengan sangat ketat. Aksi Belanda ini justru telah menjatuhkan citranya sendiri di dunia internasional.

Pada 19 Desember 1948 Belanda kembali melakukan aksi polisionil kedua terhadap Yogyakarta. Aksi tersebut dilakukan setelah bangsa Indonesia baru saja berhasil menumpas pemberontakan PKI Muso di Madiun yang dilancarkan pada 18 September 1948. Merespon agresi tersebut TNI melakukan perlawanan melalui perang gerilya selama 7 bulan di bawah pimpinan Jenderal Soedirman yang sedang sakit.³⁰ Pada 19 Desember 1948, AS dan Australia mendesak diadakan sidang Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan usulan Konferensi Meja Bundar untuk mengakhiri konflik RI-Belanda. Belanda tidak menggubris, hingga Menlu AS yang baru Dean Acheson memberikan pernyataan keras kepada Belanda yang antara lain berisi ancaman bila Belanda tidak bersedia menyelesaikan konflik dengan Indonesia maka AS akan menghentikan dana bantuan militer bagi Belanda. Bahkan kemudian Acheson menekankan bahwa pemulihan pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta merupakan inti persoalan dan bahwa pasukan-pasukan Belanda harus ditarik mundur dari Yogyakarta dan wilayah sekitarnya.³¹

²⁹ Ibid., 34 -- 35.

³⁰ M. Fahlevi, *Soedirman & Sudirman* (Jakarta: Pusat Sejarah TNI, 2004), 15.

³¹ Paul F. Gardner., *op.cit.*, 88.

Campur tangan Acheson memberikan perubahan yang signifikan bagi kebijakan Belanda yang akhirnya menyetujui diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda. Konferensi ini berlangsung cukup sengit dan berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 dan baru berakhir pada tanggal 2 November 1949. Itupun masih menyisakan bom waktu tentang status Irian Barat. Setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar, AS secara resmi memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia melalui surat yang disampaikan oleh Presiden Truman yang dibawa langsung oleh Merle Cochran yang ditunjuk sebagai Dubes AS pertama di Indonesia. Bantuan ekonomi dan militer mulai diberikan kepada Indonesia.

Kepentingan global AS pada era Perang Dingin di Indonesia tidak berhenti sampai pada pengakuan kemerdekaan RI, di mana kepentingan ekonomi AS berada didalamnya. Ancaman global bagi kepentingan Amerika pada saat itu terutama bagaimana Amerika berupaya membendung penyebaran komunisme di seluruh dunia. Kebijakan pembendungan komunis Truman yang diimplementasikan melalui kebijakan luar negerinya juga tidak terlepas dari upaya membendung penyebaran komunisme di Asia Pasifik dan Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Kakhawatiran Amerika terhadap pemerintah Republik Indonesia datang dari kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia yang mencanangkan “politik bebas aktif” di satu sisi, dan adanya kebijakan Presiden Soekarno yang akomodatif di sisi lain, termasuk memberi keleluasaan bagi berkembangnya PKI, meskipun partai ini telah mengkhianati bangsa Indonesia melalui pemberontakan Madiun. Kebijakan ini ternyata pada saatnya telah mampu memberikan *bargaining position* bagi pemerintah Indonesia pada saat perebutan Irian Barat yang tidak didukung oleh AS. Sementara dengan kebijakan politik bebas aktif serta tetap diakomodasikannya partai komunis memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi Indonesia meminta dukungan Soviet.

Sebelum sampai pada perebutan Irian Barat (1962), pemerintah AS melalui Dubesnya di Indonesia berupaya mempengaruhi pemerintah Indonesia dengan cara memancing Indonesia memasuki persekutuan keamanan bersama di

kawasan dalam upaya membendung komunis. Deplu AS meminta Dubes Cochran untuk membujuk Hatta menandatangani bantuan militer dengan syarat Indonesia ikut aktif mendukung blok Barat dalam membendung penyebaran komunis di Asia Tenggara. Pada saat tersebut bangsa Indonesia yang baru merdeka memang tidak dapat menghindari bantuan Amerika baik bantuan ekonomi maupun militer. Pada saat Indonesia mengajukan bantuan militer itulah Deplu AS melalui Dubesnya berupaya memanfaatkan kesempatan untuk memasukkan persyaratan bagi kesediaan Indonesia memasuki persekutuan keamanan bersama AS dalam membendung komunis di Asia Tenggara. Dubes Cochran telah mengenal para tokoh kunci bangsa Indonesia dan menyadari benar tentang prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, melalui negosiasi yang cukup ketat akhirnya Cochran dan Hatta melakukan penandatanganan dokumen perjanjian rahasia yang telah dimodifikasi dari draft sebelumnya tentang dukungan *U.S. Security Assistance* pada tanggal 15 Agustus 1950, yang utamanya ditekankan pada bantuan kepolisian.³²

Dalam Nota Diplomatik yang ditandatangani oleh Dubes AS, H. Merle Cochran ini antara lain dinyatakan bahwa:

*The United States of America and the Republic of the United States of Indonesia mutually undertake that such assistance as may be furnished by the United States of America to the Republic of the United States of Indonesia agree this program shall be utilized solely for the maintenance of an effective constabulary and for the carrying out of the purpose of such constabulary.*³³

Sementara Nota Diplomatik yang ditandatangani Hatta yang pada saat itu bertindak sebagai Perdana Menteri dan sekaligus merangkap sebagai Menlu Indonesia antara lain dinyatakan bahwa:

*The Government of the Republic of the United States of Indonesia undertake not to transfer, without the prior consent of the Government of the United States of America, title to or possession of any equipment, material, or service which are received pursuant of paragraph 2 above, or which are substitutable for, or similar in category to the equipment, material, or services so received.*³⁴

Paragraf 2 yang dimaksud adalah pernyataan yang sama dengan yang tertera pada nota diplomatik yang ditandatangani oleh Dubes AS tersebut di atas.

³² Ibid., 100.

³³ U.S. Embassy & Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Serikat, op. cit., 1619.

³⁴ Ibid., 1621.

Dari isi *exchange of notes* tersebut di atas dapat disimak bahwa yang dimaksud bantuan militer tersebut di atas pada dasarnya ditujukan untuk memperkuat kepolisian RI, dan Indonesia tidak diijinkan untuk memindahtangankan kepemilikan bantuan tersebut kepada pihak ketiga tanpa memperoleh persetujuan pemerintah AS.

Ketika proses bantuan tersebut sedang berlangsung terjadi perubahan kabinet. Pada dasarnya kabinet baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sukiman dan Menlu Subarjo secara personal mendukung bantuan militer yang telah disepakati sebelumnya secara rahasia oleh Hatta-Cochran. Ketika kabinet baru ini – yang tidak didukung sepenuhnya oleh anggota kabinet dalam menyikapi perjanjian rahasia ini – membuka bantuan ini ke Sidang Perlemen dalam rangka memperoleh ratifikasi, justru yang terjadi adalah ditolaknya perjanjian bantuan militer tersebut. Tidak disetujuinya bantuan ini oleh Parlemen tentu saja membuat Amerika merasa dipermalukan dan kejadian ini oleh Ida Anak Agung Gde Agung – yang menjabat sebagai Menlu RI pada tahun 1955-1956 – disebut sebagai *Cochran Affair*.³⁵

Menyikapi bantuan tersebut, dalam perkembangan politik di Indonesia yang mulai marak menentang kehadiran Amerika khususnya oleh partai komunis, telah memaksa Menlu RI memerintahkan Dubes Indonesia di Washington DC untuk menerbitkan surat kepada Dubes AS di Jakarta. Pada tanggal 5 Januari 1953 surat dimaksud ditulis, yang antara lain dinyatakan bahwa bantuan militer yang diperuntukkan bagi kepolisian RI berdasarkan perjanjian rahasia Cochran-Hatta apabila tidak lagi diperlukan, pemerintah Indonesia akan menawarkan untuk mengembalikan bantuan tersebut kepada pemerintah Amerika. Kutipan surat dimaksud antara lain berbunyi:

..., has the honor to propose that the undelivered balance of constabulary equipment authorized under the agreement of August 15, 1950 be converted from a grant to an aid on a reimbursable basis. Equipment and material which have been provided on a grant basis under the Constabulary Agreement of August 15, 1950 will be retained by the Government of the Republic of Indonesia on the term and conditions contained in that agreement so long as required for the purpose

³⁵ Timo Kivimaki, *US-Indonesian Hegemonic Bargaining Strength of Weakness: US Foreign Policy and Conflict in the Islamic World* (London: Ashgate, 2003), 107 – 108.

*for which originally made available and, if no longer required for this purpose, they will be offered for return to the Government of the United States.*³⁶

Menanggapi surat tersebut di atas Dubes AS memberikan jawaban dan menyetujui usul yang disampaikan oleh Dubes RI di Washington DC melalui surat tertanggal 12 Januari 1953 yang dialamatkan kepada Menlu RI yang pada saat itu dijabat oleh Mukarto Notowidagdo. Dalam suratnya tersebut Dubes AS antara lain menulis:

*... to inform you that the Government of the United States of America accepts the above proposal and agrees that the Indonesian Ambassador's note of January 5, 1953 and this note of acceptance constitute an agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the United States of America effective on the date of this note.*³⁷

Nota diplomatik tersebut di atas pada dasarnya merupakan amandemen terhadap perjanjian tanggal 15 Agustus 1950. Dengan adanya nota diplomatik antara kedua pemerintahan ini, pemerintah AS menjadi lebih khawatir, terlebih dengan adanya penguatan pengaruh komunis terhadap pemerintah Indonesia dan ditambah dengan penolakan Indonesia dalam pembentukan pakta pertahanan di Asia Tenggara (SEATO) pada 6 September 1954 sebagaimana yang telah dibentuk di Eropa (NATO). Pembentukan SEATO dimaksudkan untuk membendung penyebaran komunisme di Asia Tenggara yang menjadi ancaman global AS pada saat berlangsungnya Perang Dingin.

Pasca Pemilihan Umum di Indonesia 1955, pengaruh PKI semakin menguat ditambah dengan kebijakan Presiden Soekarno yang mendukung langkah pimpinan PKI untuk mengambil aset-aset Belanda di Indonesia, sementara tindakan ini ditentang oleh Hatta, Jenderal Nasution selaku Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) serta beberapa pemimpin Indonesia lainnya. Situasi ini memaksa AS melancarkan operasi rahasia melalui CIA yang mendukung gerakan anti Komunis PRRI/Permesta di Sumatera dan Manado yang berupaya menjatuhkan Presiden Soekarno yang dianggap pro-Komunis. Dalam gerakan ini

³⁶ Embassy of Indonesia Washington DC, "Proposal Amendment U.S. Security Assistance 15 August 1950," 5 January 1953, TIAS no. 2768, in *Amending Agreement of August 15, 1950, U.S. Treaties and Other International Agreements*, 114.

³⁷ American Embassy, "Indonesia Military Assistance," January 12, 1953, TIAS no. 2768 in *Amending Agreement of August 15, 1959, U.S. Treaties and Other International Agreements*, 115.

Menlu Dulles sempat membujuk KASAD Jenderal Nasution untuk mendukung PRRI/Permesta. Jenderal Nasution menolak dan tetap mendukung pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Soekarno. Dubes AS di Jakarta yang pada saat itu dijabat oleh Allison menyatakan pengunduran dirinya karena tidak mendukung kebijakan yang diambil oleh Menlu Dulles yang ingin menjatuhkan pemerintahan Presiden Soekarno.³⁸ Pemberontakan PRRI/Permesta meletus pada 8 Februari 1958 dengan dukungan Amerika melalui CIA, dapat ditumpas oleh TNI dengan cepat.

Sungguh, Amerika memiliki kepentingan yang besar baik dari aspek ekonomi maupun aspek keamanan global dari ancaman komunis yang mempengaruhi pemerintah Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Amerika berada pada suatu persimpangan jalan yang sulit menghadapi perkembangan politik di Indonesia. Bahkan kekhawatiran yang berlebihan telah membuat Amerika berusaha melakukan aksi *regime change* terhadap pemerintahan Soekarno yang mendukung komunisme, melalui operasi CIA yang mendukung gerakan anti komunis PRRI/Permesta. Dalam situasi yang tidak menentu di Indonesia tersebut, bantuan ekonomi tetap diberikan, disertai dengan bantuan militer/kepolisian yang merupakan bagian dari skema umum dalam penerapan kebijakan pembendungan melalui *U.S. Security Assistance*.

3.2. Arti pentingnya *U.S. Security Assistance* bagi Indonesia

Beberapa ahli hubungan internasional mendefinisikan bahwa kepentingan nasional suatu bangsa akan terkait erat dengan masalah internal dan masalah eksternal. Hans J. Morgenthau menyampaikan pandangan bahwa konsep kepentingan nasional pada dasarnya terdiri dari dua elemen, yang pertama didasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri, dan yang kedua mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan strategis disekitarnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri, dapat di peroleh dengan cara melindungi kelangsungan hidup bangsa dalam mempertahankan kedaulatan integritas wilayah nasional, sistem politik, dan identitas budaya dari ancaman bangsa lain. Adapun pertimbangan adanya berbagai kondisi lingkungan strategis adalah dengan

³⁸ Timo Kivimaki, *op. cit.*, 114 – 115.

menjalankan kebijakan politik luar negeri melalui upaya diplomasi demi terciptanya perdamaian dunia.³⁹

Sementara Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf menyatakan bahwa kepentingan nasional dari sebuah negara hendaknya tidak hanya didasarkan pada peningkatan kesejahteraan internal bagi setiap warganegaranya, menyediakan pertahanan terhadap agresi dari luar, dan melindungi nilai-nilai negara dan cara hidup (*way of life*), namun juga harus dikaitkan dengan upaya kerjasama dengan banyak bangsa untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan global.⁴⁰

Para pendiri bangsa Indonesia dalam menyusun UUD 45, juga memperhatikan kaidah-kaidah universal dalam merumuskan kepentingan nasional sebagaimana yang dirumuskan oleh para ahli hubungan internasional. Pembukaan yang mengantar pasal-pasal didalam UUD 45 yang merumuskan kepentingan nasional tersebut juga tidak terlepas dari kaidah-kaidah universal dimaksud. Hal ini nampak dengan jelas pada Pembukaan UUD 45 pada alinea 4 yang berbunyi: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) dan untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasca kemerdekaan, bangsa Indonesia menghadapi berbagai situasi yang tidak kondusif, antara lain adanya upaya-upaya gangguan keamanan yang dilakukan oleh PKI, pemberontakan PRRI/Permesta yang merupakan gerakan anti-komunis dukungan CIA, persoalan Belanda yang masih berupaya untuk meruntuhkan Republik Indonesia dengan aksi polisionil (agresi militer) I dan II, operasi Trikora dalam rangka penyatuan Irian Barat, dan operasi Komodo/Seroja guna menyatukan Timor-Timor ke wilayah NKRI.

Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia dituntut adanya peran aktif dalam percaturan internasional, menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh bangsa, serta tekad untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia

³⁹ Hans J. Morgenthau., op. cit., 147 – 149.

⁴⁰ Charles J. Kegley and Eugene R. Wittkopf., op. cit., 653 – 54.

menyadari betul bahwa dalam percaturan internasional tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi pasif. Oleh karena itu, pada saat Hatta menjadi Perdana Menteri dengan bekal pemahaman yang luas dibidang percaturan internasional, ia tidak menghendaki Indonesia ikut serta memasuki salah satu diantara dua blok yang saat itu terlibat dalam konflik global Perang Dingin. Hatta memutuskan keikutsertaan Indonesia dalam percaturan di kancah internasional dengan menerapkan kebijakan “politik bebas aktif”.

Keputusan ini tidaklah mudah. Dua *super power* dunia saling berupaya menarik Indonesia untuk menjadi sekutu dalam pertempuran mereka, antara demokrasi dan kapitalisme Barat dengan komunisme. Tarik menarik pengaruh ini tidak urung sempat mewarnai proses kebijakan luar negeri Indonesia. Dan sejarah telah mencatat bahwa Presiden Soekarno sempat berupaya membelokkan arah kebijakan tersebut ke arah blok komunis. Kebijakan pembelokan ini berpuncak pada tahun 1965 pada saat Soekarno menyampaikan pidato dalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan dengan mengumumkan “kebijakan Poros Jakarta – Phnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang.”⁴¹ Namun sejak awal para pemimpin bangsa Indonesia yang lain berusaha tetap bertahan dengan kebijakan luar negeri bebas aktif, khususnya dari kelompok TNI AD yang mencoba mengimbangi dengan tetap melakukan persahabatan dengan pihak AS, antara lain dengan tetap menerima program-program *U.S. Security Assistance* dalam bentuk *International Military Education Training* (IMET) dan *Military Assistance Program* (MAP). Dengan kebijakan bebas aktif ini pada saat Indonesia menghadapi situasi-situasi yang mempertaruhkan kepentingan nasional, para pemimpin bangsa Indonesia mampu memilah dan memilih kebijakan yang paling tepat demi mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional.

U.S. Security Assistance termasuk yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia, dalam mana bantuan ekonomi dan militer dari Amerika secara riil dan intensif diberikan segera setelah Amerika memberikan pengakuan terhadap eksistensi bangsa Indonesia pada tahun 1950 sesuai Konferensi Meja Bundar, yang mempuskan usaha-usaha Belanda untuk kembali menguasai wilayah bekas

⁴¹ Paul F. Gardner., op. cit., 210

koloninya yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun secara *de jure* Amerika memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia pasca Konferensi Meja Bundar, sejarah juga mencatat peran Amerika terhadap upaya Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Belanda. Konflik RI-Belanda rasanya tidak akan terselesaikan dalam waktu singkat tanpa campur tangan dan mediasi Amerika. Bahkan Belanda mulai melunakkan kebijakan atas agresinya (aksi polisionil) yang ke II kepada Indonesia, berkat intervensi Menlu AS, Dean Acheson.

Namun walau bagaimana pun, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat semenjak proklamasi dicanangkan. Seberapa pun besarnya jasa Amerika terhadap bangsa Indonesia, maka tidaklah ada keharusan moral bagi bangsa Indonesia untuk selalu menggantungkan nasibnya pada bangsa Amerika. Atau dengan kata lain, tidak seharusnya dengan mudah Indonesia mengikuti semua kemauan politik Amerika. Sejauh ajakan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia, maka tidak ada salahnya ajakan tersebut diikuti. Namun sebaliknya, apabila ajakan tersebut justru akan membawa bangsa Indonesia terseret dalam arus yang tidak menentu dan ada kepentingan nasional yang dipertaruhkan, maka tidak ada salahnya bagi Indonesia menolak atau setidaknya tidak mengikuti ajakan tersebut.

Untuk mempertahankan kepentingan nasional tersebut, antara lain pada tahun 1948 setelah meletusnya pemberontakan komunis di Madiun, Indonesia berunding dengan Amerika untuk dapatnya memperoleh bantuan kepolisian berupa senjata dan perlengkapan bagi 10.000 personil.⁴² Dan permintaan bantuan tersebut baru direalisasikan pada tanggal 15 Agustus 1950 melalui pertukaran nota diplomatik yang dilakukan secara rahasia. Terlepas persoalan ini kemudian menjadikan suatu preseden buruk bagi kedua belah pihak dengan tidak lolosnya proses ratifikasi oleh parlemen Indonesia pada waktu itu, hingga memunculkan *Cochran Affair*, namun bantuan tersebut tetap berlangsung, meskipun *agreement* nya kemudian diamandemen pada tanggal 12 Januari 1953.⁴³

⁴² Ibid., 78 – 79.

⁴³ Data berbagai jenis peralatan kepolisian dan militer dalam bentuk *Military Assistance Program (MAP) Inventory List*, sebagaimana pada lampiran I.

Permintaan bantuan militer selanjutnya diajukan kepada Amerika pada Mei 1957 untuk keperluan meningkatkan kemampuan TNI dalam menjaga keamanan dalam negeri (*self-defence*) dari berbagai kemungkinan aksi komunis.⁴⁴ Permintaan bantuan inipun segera direalisasikan, antara lain adanya peningkatan jumlah program bantuan militer yang pada tahun fiskal 1958 bernilai \$7,3 juta menjadi \$22 juta pada tahun fiskal 1959 dan 1960. Dalam waktu 6 bulan, 21 batalyon TNI dengan jumlah prajurit sekitar 16.000 orang, telah diperlengkapi dengan senjata-senjata Amerika.⁴⁵

Penerimaan bantuan yang diberikan pada tahun 1958 sebagian diantaranya berupa kredit *Foreign Military Sales* (FMS). Untuk merealisasikan pembelian ini pada tanggal 13 Agustus 1958, kedua belah pihak (Indonesia dan AS) telah menandatangani sebuah dokumen *Sale of Military Equipment, Materials and Services*. Dalam dokumen ini antara lain disebutkan:

(A) *Any weapons or other military equipment of services purchased by the Government of Indonesia from the Government of the United States shall be used by the Government of Indonesia solely for legitimate national self-defense, and it is self-evident that the Government of Indonesia, as a member of the United Organization, interprets the term legitimate national self-defense within the scope of the United Nation Charter as excluding an act of aggression against any other state.*

(B) *Any weapons or other military equipment or services purchased by the Government of Indonesia from the Government of the United States shall not be sold or otherwise disposed of to third parties.*⁴⁶

Menjelang berakhirnya tahun 1960 terjadi pergantian presiden Amerika dari Eisenhower (Republik) ke John F. Kennedy (Demokrat). Perubahan ini berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia, khususnya dalam menyikapi konflik Irian Barat.⁴⁷ Pada sekitar awal tahun 1961 ketika Indonesia mengajukan bantuan militer untuk merebut Irian Barat – yang tetap di bawah penguasaan Belanda seusai Konperensi Meja Bundar – permintaan tersebut ditolak oleh Presiden Kennedy. Penolakan ini dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan tersebut di atas. Akhirnya demi kepentingan nasional, Indonesia

⁴⁴ Timo Kivimaki, *op.cit.*, 111 – 112.

⁴⁵ Paul G. Gardner, *op.cit.*, 163.

⁴⁶ American Embassy & Deplu RI, "Exchange of Notes: Sale of Military Equipment, Materials, and Services," August 13, 1958, TIAS no. 4095, *U.S. Treaties and Other International Agreements*, 1150.

⁴⁷ Paul G. Gardner, *op.cit.*, 172 – 173.

meminta bantuan kepada Soviet. Soviet nampaknya memanfaatkan momentum permintaan bantuan Indonesia ini dengan sangat baik. Soviet di bawah kepemimpinan Khurshev bersedia memberikan bantuan berupa kontrak pengadaan perlengkapan militer senilai US\$600 juta.⁴⁸

Disinilah letak fleksibilitas kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia dimanfaatkan secara optimal oleh Presiden Soekarno, yang nampaknya juga mengikuti paham pragmatisme Amerika. Dengan tetap mengakomodasi PKI ia dengan sangat leluasa melakukan kontak, baik dengan Cina maupun Soviet, sehingga pada saat kritikal di mana Indonesia akan melancarkan operasi Trikora dengan menyatukan Irian Barat ke wilayah NKRI, dengan sangat mudah Indonesia memperoleh bantuan militer dari Soviet, manakala Amerika dengan kepemimpinan Kennedy tidak bersedia memberikan bantuan militer.

Meskipun Kennedy menolak untuk memberikan bantuan militer, namun sepertinya tidak bermaksud menghentikan langkah Indonesia menyatukan Irian Barat ke dalam wilayah NKRI. Bahkan ketika Belanda meminta dukungan Amerika tentang konfliknya dengan Indonesia, Amerika tidak juga menanggapi. Dalam kasus ini Amerika nampaknya ingin bersikap netral dan kembali berupaya menjadi mediator bagi penyelesaian krisis Irian Barat. Namun mediasi Amerika tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1962 operasi Trikora di bawah Komando Mandala Mayjen TNI Soeharto digelar dan akhirnya berhasil membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Konflik RI-Belanda tentang Irian Barat berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Irian Jaya oleh pihak RI dan Belanda di PBB pada tanggal 15 Agustus 1962. Setelah krisis Irian Jaya berakhir, Amerika kembali memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia dalam rangka mempersempit pengaruh Soviet yang telah memberikan bantuan yang jumlahnya sangat signifikan. Bantuan militer Soviet kepada Indonesia di akhir tahun 1962 diperkirakan sebesar US\$1,3 milyar. Sementara bantuan militer

⁴⁸ Paul G. Gardner., *op.cit.*, 178.

yang diberikan Amerika kepada Indonesia hanya bernilai kurang dari seperempat belas atau senilai kurang dari US\$93 juta.⁴⁹

Tragedi 30 September 1965, merupakan sejarah kelabu bagi Indonesia di mana PKI berusaha melakukan pemberontakan untuk menghancurkan falsafah dasar bagi bangsa Indonesia yakni Pancasila dan menggantikannya dengan komunisme. Peristiwa berdarah telah membawa korban para petinggi TNI, termasuk Kasad Jenderal TNI A. Yani yang selama ini membaktikan darmanya bagi tetap tegaknya negara kesatuan RI di bawah azas Pancasila. Langkah komunis ini akhirnya gagal total setelah Panglima Kostrad, Letjen TNI Soeharto mengambil alih pimpinan TNI AD dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna mengendalikan situasi keamanan. Peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI ini luput dari pengamatan AS, sehingga AS sempat kehilangan momentum pada saat itu. Bahkan kemunculan Soeharto di saat-saat kritis melumpuhkan aksi G 30 S/PKI benar-benar diluar perhitungan AS, sebab selama ini tokoh-tokoh TNI yang sering berkomunikasi dengan AS adalah Jenderal Nasution serta beberapa jenderal TNI AD yang sejak awal menentang komunis dukungan presiden Soekarno.

Perkembangan situasi yang terjadi begitu cepat membuat Amerika terperangah untuk beberapa saat, dan bantuan keamanan untuk sementara terhenti, meskipun untuk beberapa waktu kemudian bantuan ekonomi mulai diberikan guna membenahi perekonomian Indonesia yang sempat ambruk. Pada tahun 1969 bantuan militer kembali diberikan seiring dengan bantuan ekonomi, dengan demikian *U.S. Security Assistance* kembali diberikan. Momentum ini terjadi sesuai Presiden Richard M. Nixon kembali dari suatu perjalanan ke Asia dalam pesawat *Air Force One* pada Juni 1969. Kebijakan Nixon ini disampaikan secara langsung kepada Dubes AS di Jakarta Marshall Green.⁵⁰ Sejak saat itu hubungan bilateral Indonesia-Amerika mulai membaik.

Pada tahun 1975 pemerintah Indonesia mulai resah dengan masalah Timor Timur dan memutuskan untuk mendukung kelompok pro-integrasi yang menentang kemerdekaan Timor Timur yang digagas oleh Partai Komunis Fretilin.

⁴⁹ Ibid., 178 – 179.

⁵⁰ Ibid., 265.

Pada saat persiapan serangan ke Timor Timur Indonesia meminta dukungan AS, Presiden Ford yang didampingi Menlu Kissinger yang datang ke Indonesia memberikan dukungan dengan pesan yang disampaikan oleh Menlu Kissinger agar Indonesia tidak menggunakan senjata Amerika dalam penyerangan tersebut. *Kissinger feared at the time that possible use of U.S.-made arms in this East Timor operation might cause problems in Congress.*⁵¹ Alasan mengapa AS mendukung kebijakan Indonesia mengintegrasikan Timor Timur, hal ini akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab selanjutnya.

3.3. Keselarasan kepentingan AS dengan kepentingan nasional Indonesia dalam *U.S. Security Assistance*

U.S. Security Assistance yang diberikan kepada negara-negara berkembang dalam rangka penerapan kebijakan pembendungan, dalam mekanismenya dilakukan melalui prosedur dalam mana bantuan dimaksud diusulkan oleh Pemerintah – yang dalam hal ini oleh *U.S. Department of Defense* – kepada komisi hubungan luar negeri Kongres AS. Salah satu persyaratan pokok yang ditetapkan oleh Kongres adalah bahwa bantuan keamanan tersebut benar-benar digunakan dalam rangka membantu negara berkembang yang berjuang melawan komunisme. Persyaratan pokok lainnya adalah *U.S. Security Assistance* tidak akan diberikan kepada negara-negara yang diindikasikan terlibat pelanggaran HAM.

Dalam kaitan bantuan keamanan Amerika yang diberikan kepada Indonesia, tidak terlepas dari hal-hal tersebut di atas. Bila diperhatikan secara kilas balik, bantuan militer yang diberikan kepada Indonesia melalui perjanjian Hatta-Cochran yang ditandatangani secara rahasia pada 15 Agustus 1950 yang kemudian memunculkan *Cochran Affair*, merupakan implementasi dari permintaan bantuan kepolisian RI kepada Amerika pada saat meletusnya pemberontakan PKI Madiun 1948. Deplu AS semula ingin memanfaatkan permintaan bantuan ini dengan perjanjian yang lebih mengikat, khususnya dalam hal kerjasama keamanan untuk membendung pengaruh komunis baik di Indonesia maupun Asia Tenggara. Dengan adanya politik bebas aktif yang dianut Indonesia

⁵¹ Ibid., 286.

maka kemudian Cochran memodifikasi rumusan yang dibuat oleh Deplu AS menjadi rumusan yang lebih lunak sebagaimana perjanjian Hatta-Cochran yang telah ditandatangani tersebut. Dari sisi ini terlihat adanya upaya *bargaining* antara kedua belah pihak dalam mendapatkan *win-win solution* bagi kepentingan bersama tanpa mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Kepentingan bersama yang membawa pada suatu kesepakatan bersama pada saat itu adalah dalam rangka membendung pengaruh/ancaman komunis global bagi AS di satu sisi, dan upaya Hatta untuk membendung pengaruh/ancaman komunis dalam pemerintahan Soekarno di sisi lain. Hatta dan Cochran melakukan kesepakatan rahasia karena tidak ingin kesepakatan ini diketahui oleh para pimpinan PKI yang telah berhasil mempengaruhi pemikiran dan kebijakan Soekarno.

Bantuan selanjutnya yang diminta oleh Indonesia kepada Amerika adalah pada tahun 1957 yang akan digunakan untuk memperkuat TNI dengan adanya kekhawatiran semakin meluasnya pengaruh PKI pasca pemilihan umum 1955, yang mana PKI menempati posisi ketiga terbesar setelah PNI dan Masyumi. Perolehan suara PKI mencapai 16,4%, sementara PNI dan Masyumi masing-masing 22,3% dan 20,9%. Perolehan suara PKI ini menyebabkan komposisi di Parlemen meningkat lebih dari 2 kali lipat.⁵² Dengan demikian dukungan komunis terhadap Soekarno semakin meningkat.

Untuk mengantisipasi aksi komunis lebih lanjut dengan semakin menguatnya komunis di legislatif, yang dikhawatirkan akan semakin berani melakukan aksi-aksinya, Indonesia – dalam hal ini TNI – merasa perlu meminta dukungan Amerika untuk memperkuat posisinya. Pada tahun 1958 bantuan militer untuk Indonesia didukung US\$7,3 juta dan pada tahun fiskal 1959 dan 1960 terjadi peningkatan dukungan bantuan militer sebesar masing-masing US\$22 juta.⁵³

Bantuan militer yang diberikan kepada Indonesia ini tidak terlepas dari adanya kekhawatiran yang juga semakin meningkat dari pihak AS. Kekhawatiran yang berlebihan ini bahkan membuat Amerika melakukan tindakan yang tidak

⁵² Ibid., 246.

⁵³ Ibid., 163.

terpuji, pada tahun 1958 AS mengherahkan operasi rahasia yang dilakukan oleh CIA dalam rangka mendukung aksi anti-komunis yang dilakukan oleh Perdana Menteri PRRI Syafrudin Prawira Negara yang berusaha menjatuhkan pemerintahan Soekarno yang dinilai pro-komunis.

Dari skenario tersebut di atas nampaknya Amerika tidak sabar untuk segera menerapkan strategi *regime change* terhadap Soekarno. Sementara doktrin TNI AD yang ditanamkan oleh Jenderal Soedirman untuk membela pemerintahan sipil yang sah, benar-benar dipegang teguh oleh Jenderal Nasution, yang tidak bergeming manakala Amerika membujuknya untuk mendukung tindakan makar ini. Bahkan kemudian Jenderal Nasution menjalankan kewenangan komandonya untuk memadamkan pemberontakan PRRI di Sumatra dan pemberontakan Permesta di Manado yang juga ditunggangi oleh agen-agen CIA.

Dari situasi ini juga nampak bahwa bantuan militer Amerika yang diberikan kepada TNI pada tahun 1958 dalam rangka mengantisipasi aksi komunis telah diberikan oleh Amerika karena adanya kekhawatiran yang sama atas akibat buruk yang mungkin ditimbulkan oleh komunis Indonesia. Hanya saja, sayangnya Amerika mengambil langkah yang sangat gegabah meskipun secara strategi, penerapan usaha melalui *regime change* tidak menyalahi kebijakan politik luar negerinya, yang menggambarkan doktrin maksimalis yang ingin diterapkan.

3.4. Peran U.S. Security Assistance dalam mendukung upaya Indonesia mengintegrasikan Timor Timor ke dalam NKRI

Strategi *regime change* merupakan salah satu implementasi dari kebijakan politik luar negeri yang secara universal telah diberlakukan oleh negara-negara besar terhadap negara-negara yang lebih kecil yang berada di bawah pengaruhnya. Strategi ini tidak saja diterapkan oleh Amerika, namun juga dilakukan oleh Soviet pada saat menjatuhkan pemerintahan nasional China di bawah Chiang Kai-shek. Kasus perebutan pengaruh di Cina merupakan kisah pertarungan Amerika yang mendukung Chiang dengan pemerintahan nasionalnya, dengan Soviet yang mendukung Mao Tse-tung dengan komunisnya. Kisah pertarungan dua raksasa yang berebut pengaruh ini akhirnya dimenangkan Soviet yang mampu

menjatuhkan pemerintahan nasionalis Chiang untuk digantikan oleh rezim komunis Mao.

Strategi *regime change* ini nampaknya juga digunakan oleh Indonesia pada saat mengintegrasikan Timor Timur meskipun dalam skala yang lebih kecil, dan konteks yang agak berbeda. Pada tahun 1975, "*Carnation Revolution*" di Portugal telah mempengaruhi pergolakan politik di Timor Timur. Muncul tiga kekuatan partai politik yang berpengaruh yaitu (1) *The Frente Revolucionária de Timor Leste Independente/Fretilin*, sebuah partai berhaluan komunis yang menuntut kemerdekaan Timor Timur dengan segera. Fretilin didukung oleh para pegawai negeri sipil terutama dari kaum mudanya, guru, pekerja pendatang, dan mahasiswa. (2) *The União Democrática de Timor/UDT* menginginkan otonomi seluas-luasnya namun masih di bawah kekuasaan Portugal. UDT didukung oleh pegawai negeri yang menduduki jabatan-jabatan tinggi, para pemuka masyarakat setempat, penduduk pedesaan yang mengakui pemerintahan Portugal, beberapa pengusaha Cina dan komunitas Portugal. (3) *The Associação Popular Democrática de Timor/Apodeti*, menginginkan otonomi yang terintegrasi dengan RI sesuai dengan hukum internasional. Apodeti didukung secara luas oleh kelompok-kelompok etnis dan hubungan sejarah.⁵⁴

Dalam perkembangan selanjutnya Fretilin berhasil menggandeng UDT bersama dengan tokoh-tokoh elit lokal dan menjadi kekuatan aliansi yang sangat besar mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal. Sementara salah satu partai yang menginginkan integrasi dengan Indonesia (Apodeti), kurang mendapatkan dukungan massa. Aliansi Fretilin dan UDT tidak bertahan lama, dan disusul oleh adanya kudeta yang dilakukan oleh UDT pada 11 Agustus 1975 yang dengan cepat menguasai instalasi-instalasi yang menentukan di Dili seperti stasiun radio, bandara, gedung-gedung pemerintahan serta menuntut kemerdekaan segera bagi Timor Timur dan dipenjarakannya anggota-anggota Fretillin. Situasi makin panas. Kekuatan komunis Fretillin nampaknya sangat kuat, sehingga akhirnya pada Oktober 1975 UDT bergabung dengan Apodeti serta partai-partai kecil yang lain

⁵⁴ Robert Lawless, "The Indonesian Takeover of East Timor," *University of California: Asian Survey*, vol. 16, no. 10 (October 1976): 950., 2 December 2009 <<http://www.jstor.org/stable/2643535>>.

seperti Kota dan Tralabista. Di bawah perwalian Indonesia mereka membentuk sebuah koalisi dengan nama *Movimento Anti Comunista* (MAC, Gerakan Anti Komunis).

Situasi semakin kacau, nampaknya kekuatan komunis Fretilin tidak dapat diremehkan, yang kemudian mampu memegang kendali dan pada tanggal 28 November 1975 secara sepihak Fretilin menyatakan kemerdekaan Timor Timur, dan memproklamasikan sebagai Republik Demokratik Timor Timur ("*Democratic Republic of East Timor*"). Sembilan hari kemudian pada tanggal 7 Desember 1975 Indonesia melakukan serangan militer ke Timor Timur, dan akhirnya Timor Timur terintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu tindakan Indonesia mendapat dukungan penuh baik dukungan politis maupun peralatan militer (*security assistance*) dari AS.

Sebagaimana telah disinggung di bagian akhir sub-bab sebelumnya (3.2), Menlu Kissinger dalam lawatannya ke Indonesia mendampingi presiden Gerald Ford, menyatakan bahwa pada prinsipnya Amerika tidak keberatan terhadap operasi militer Indonesia ke Timor Timur, meskipun ia meminta agar operasi dimaksud dapat dengan cepat dilaksanakan tanpa menggunakan senjata-senjata buatan Amerika. Apakah sebenarnya hasil pembicaraan resmi antara presiden Soeharto dengan presiden Gerald Ford? Pada saat itu memang tidak diketahui adanya catatan resmi tentang hasil pembicaraan dimaksud.

Dari apa yang disampaikan oleh Menlu Kissinger dapat dipastikan bahwa pemerintah AS memberikan dukungan politik terhadap serangan tersebut, karena pada saat itu Amerika masih dalam fase Perang Dingin dengan komunis Soviet. Dunia internasional juga telah mengetahui bahwa ketika terjadi *carnival revolution* di Portugal, telah memaksa Portugal melepaskan koloninya mengingat biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional di Timor Portugis sangat tidak sebanding dengan apa yang diperoleh dari sana. Portugis sudah tentu mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu tentang pergolakan di negeri koloninya tersebut, yang mana terdapat beberapa partai yang memiliki landasan dan tujuan politik yang saling bertentangan. Fretilin yang berhaluan komunis dan ingin

membentuk pemerintahan sendiri, dan Apodeti yang berorientasi nasionalis dan menginginkan berintergrasi dengan bangsa Indonesia.

Dalam situasi yang tidak menentu ini, nampaknya Portugal sudah tidak bersedia menanggung resiko politis atas persoalan bekas koloninya ini. Namun sepertinya Portugal tidak merelakan manakala Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Wakil Asisten Menlu AS, Kenneth M. Quinn yang memandang kembali situasi tujuh belas tahun kemudian ketika ia memberikan kesaksian di depan Kongres:

*... Portugal's leftist government abruptly withdrew in August 1975, handing over to Fretilin weapons which were then used to gain the upper hand. ... When the world turned its attention to East Timor in the mid-1970s, self-determination was not a realistic option. The choice was Marxist rule by Fretilin or action by Indonesia. ...*⁵⁵

Dengan dukungan persenjataan yang ditinggalkan oleh kelompok kiri (komunis) pemerintah Portugal, Fretilin memiliki kepercayaan diri yang besar untuk membentuk pemerintahan komunis secara sepihak dengan memproklamasikan Timor Timur sebagai Republik Demokratik Timor Timur ("Democratic Republic of East Timor"). Indonesia tidak mungkin membiarkan situasi seperti ini. Indonesia memiliki trauma kebangsaan yang begitu hebat pada saat terjadinya peristiwa G 30 S/PKI. Oleh karena itulah Presiden Soeharto sebagai Panglima Tertinggi memerintahkan agar TNI mengatur strategi untuk melakukan penyerangan ke Timor Timur.

Dalam melakukan serangan ini, Indonesia tidak ingin melakukannya secara gegabah. Presiden Soeharto yang berpengalaman sebagai Panglima Mandala pembebasan Irian Jaya tentunya memahami betul konsekuensi yang akan timbul apabila aksi ini dilakukan sendirian. Pada saat tersebut Amerika yang memiliki kepentingan yang sama dalam pembendungan komunis menjadi suatu pilihan utama untuk diajak berkonsultasi dan meminta dukungan baik secara politis maupun bantuan militer.

Upaya Indonesia melakukan pendekatan kepada AS ditanggapi secara positif dengan kunjungan singkat Presiden Gerald Ford yang disertai oleh Menlu

⁵⁵ Paul F. Gardner., op. cit., 285.

Henry Kissinger. Setelah Amerika memberikan dukungannya maka dengan tidak ada keraguan lagi, Indonesia melakukan serangan atas Timor Timur, guna menjatuhkan regime komunis yang dideklarasikan secara sepihak oleh Fretilin. Serangan Indonesia dilakukan pada 7 Desember 1975 hanya selang sembilan hari setelah pernyataan kemerdekaan Timor Timur. Meskipun Kissinger menyatakan agar Indonesia tidak menggunakan persenjataan Amerika, nampaknya Amerika tidak mencegah ketika senjata-senjata buaatannya digunakan oleh pasukan Indonesia. Pernyataan Kissinger ini nampaknya hanya sebuah pernyataan diplomatis agar pemerintah AS tidak disalahkan oleh Kongres. Bahkan tampaknya Kongres AS pada saat itu juga tidak begitu keberatan atas dukungan politik dan bantuan militer pemerintahnya yang diberikan kepada Indonesia. Hal ini dapat disimak dari adanya suatu pernyataan:

When reports were received that some U.S. arms might have been used, military assistance deliveries were quietly withheld for several months. At least one key senator was informed of third fact, but the matter did not become a public issue either in Congress or in bilateral relationship.⁵⁶

Penulis lain memaknai penundaan pengiriman bantuan militer yang disebutkan diatas sebagai embargo. Dalam tulisannya lebih lanjut penulis tersebut menyatakan bahwa serangan Indonesia terhadap Timor Timur ini memperoleh dukungan penuh dari AS baik secara politik maupun dukungan persenjataan.

Indonesia invaded the territory [East Timor] in December 1975, relying on US diplomatic support and arms, used illegally, but with secret authorization from Washington; there were even new arms shipments sent under the cover of an official "embargo." ...⁵⁷

Setelah Indonesia berhasil mengintegrasikan Timor Timur kedalam wilayah NKRI, dukungan Amerika dalam bentuk bantuan militer memang sempat menjadi teka-teki publik. Hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai pemberitaan yang simpang-siur sebelumnya, sebagaimana terdapat tulisan yang menyatakan bahwa invasi Indonesia ke Timor Timur dilaksanakan 12 jam setelah kunjungan 2 hari presiden Ford ke Indonesia, Gedung Putih mengabarkan bahwa presiden Soeharto tidak memberitahu Ford tentang rencana serangan ke Timor

⁵⁶ Ibid., 286

⁵⁷ Noam Chomsky, "East Timor Retrospective," *Le Monde diplomatique* (October 1999), 20 January 2009 <<http://www.chomsky.info/articles/199910-.htm>>.

Timur, tetapi tidak disangkal bahwa pasukan penyerbu sebagian diperlengkapi dengan persenjataan Amerika, adapun usulan tentang bantuan militer yang lebih besar kepada Indonesia telah ditanggihkan oleh Kongres. Dan dari pihak Indonesia melalui siaran radio dinyatakan bahwa Menlu Henry Kissinger memberikan jaminan kepada Indonesia bahwa pemerintah AS tidak akan memberikan pengakuan terhadap proklamasi kemerdekaan Timor Timur oleh Fretilin.⁵⁸

Dalam kaitan ini sepertinya Amerika memang berada pada posisi sulit. Di satu sisi dukungan politis yang disampaikan melalui Ford tidak bertentangan dengan kebijakan pembendungan, sebab Amerika juga baru saja mengakhiri Perang Vietnam. Sementara di sisi lain Amerika juga tidak mau mengambil resiko politik yang datangnya justru dari warganegaranya sendiri yang disuarakan oleh Kongres. Sementara akhir Perang Vietnam juga masih membawa luka traumatis bagi sebagian keluarga Amerika yang anggota keluarganya menjadi korban dari perang tersebut. Oleh karena itu bisa dimengerti bahwa keterlibatan Amerika dalam bentuk bantuan militer dikaburkan, dengan demikian diharapkan tidak akan menjadi perdebatan publik. Nampaknya upaya tersebut cukup berhasil, setidaknya pada saat itu.

Kenyataan tentang pelibatan Amerika secara aktif, tidak saja dukungan politis, namun juga bantuan militer akhirnya tidak terbantahkan setelah dalam otobiografinya Ford mencatat, dalam kunjungannya ke Indonesia, pada saat itu Indonesia merasa khawatir apabila Amerika tidak memberikan dukungan. Namun setelah Ford memberikan jaminan untuk membantu baik bantuan ekonomi maupun bantuan militer, para pemimpin Indonesia menjadi lebih lega dalam meneruskan rencana serangan kepihak komunis Timor Timur.

President Ford's visit to Indonesia in late 1975 was in part designed to counter such fear. Ford notes in his autobiography that Indonesian leaders seemed reassured by his statements regarding bilateral economic and military aid and the U.S. regional commitment.⁵⁹

Dukungan AS terhadap proses integrasi Timor Timur juga dapat dibuktikan dengan adanya laporan bahwa pada tanggal 3 Maret 1976, *the U.S.*

⁵⁸ Robert Lawless, op. cit., 963.

⁵⁹ Paul F. Gardner, op. cit., 266.

House of Representative menyetujui rancangan UU otorisasi bantuan luar negeri senilai US\$4,8 milyar meskipun terdapat amandemen yang mengakibatkan bantuan militer dalam bentuk hibah yang dialokasikan kepada Indonesia sebesar US\$19,4 juta dihapus dengan alasan karena adanya pengambilan Timor Timur dan adanya indikasi pelanggaran HAM. Namun untuk bantuan dalam bentuk kredit *Foreign Military Sales* (FMS) sebesar US\$23,1 juta tetap diberikan, ditambah sekitar US\$2 juta dalam bentuk dukungan *Foreign Military Training Program* atau *International Military Education Training* (IMET), dan US\$13 juta dalam bentuk *excess defense articles*. Catatan lain menyatakan bahwa bantuan militer bagi Indonesia diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun fiskal 1976 hingga mencapai nilai sebesar US\$57 juta, yang berarti melebihi jumlah pembelanjaan aktual yang dialokasikan pada tahun fiskal 1975 sebesar US\$23,8 juta.⁶⁰

Keterlibatan AS secara politis atas serangan Indonesia ke Timor Timor semakin diperkuat setelah dokumen-dokumen AS terungkap bahwa dukungan Amerika kepada Indonesia diawali oleh kunjungan Presiden Soeharto ke AS dan mengadakan pertemuan pada tanggal 5 Juli 1975 di Camp David. Dalam pertemuan ini dibahas berbagai situasi tentang penguatan pengaruh komunis di Indocina dan Asia Tenggara. Dalam diskusi ini presiden Soeharto menekankan pentingnya bagi setiap negara di kawasan memiliki ideologi nasional yang kuat dalam membendung pengaruh komunis yang seringkali dilakukan melalui kegiatan subversi. Untuk itu diperlukan upaya bagi negara-negara di kawasan dalam memperkuat bidang-bidang politik, ekonomi dan militer.

Selanjutnya Presiden Soeharto juga menyatakan bahwa cara terbaik dalam memerangi subversi (komunis) adalah operasi intelijen dan teritorial, sehingga kita dapat mendeteksi secara dini terhadap kegiatan subversi yang dilakukan oleh komunis. Indonesia sangat mengharapkan dukungan dan bantuan AS dalam memperkuat satuan TNI AL dalam mempersiapkan sejenis satuan reaksi cepat, khususnya bantuan kapal-kapal yang akan digunakan untuk memerangi setiap upaya (komunis) dalam melakukan aksinya. Menyinggung perkembangan situasi

⁶⁰ Robert Lawless, *op. cit.*, 963.

Timor Timur, Presiden Soeharto antara lain menyatakan bahwa terdapat tiga kemungkinan yaitu: merdeka, tetap di bawah pemerintahan Portugal atau bergabung dengan Indonesia. ... Jika mereka (rakyat Timor Timur) menginginkan berintegrasi dengan Indonesia sebagai bangsa merdeka, adalah tidak mungkin karena Indonesia adalah negara kesatuan, jadi hanya satu cara yang dapat ditempuh yaitu berintegrasi kedalam NKRI.⁶¹ Dalam diskusi lebih lanjut tentang Timor Timur Presiden Soeharto menyatakan bahwa:

... The problem is that those who want independence are those who are Communist-influence. This wanting Indonesian integration are being subjected to heavy pressure by those who are almost Communist. ... I want to assert that Indonesia doesn't want to insert itself into Timor self-determination, but the problem is how to manage the self-determination process with a majority wanting unity with Indonesia. These are some of the problem I wanted to raise on this auspicious meeting with you.⁶²

Menyikapi situasi yang semakin tidak kondusif di Timor Timur serta menindaklanjuti kesepakatan Camp David, pada 21 November 1975 Menlu AS Henry Kissinger membuat memorandum bagi Presiden Ford yang akan berkunjung ke Indonesia. Dalam memorandum tersebut, khususnya terkait dengan *U.S. Security Assistance to Indonesia* diungkapkan bahwa dalam serangkaian konsultasi pada September 1975 dengan telah berlangsungnya kunjungan militer Indonesia ke AS terkait dengan tindak lanjut pertemuan Camp David, Kissinger menyatakan persetujuan AS:

... to provide a modest military package (\$30 million in grants and \$12,5 million in credit for total of \$42,5 million) of helicopter, ships, communication and radar equipment to meet Indonesia's primary threat – the sea infiltration of arms – and to maintain more effective control of the archipelago. Since we could not supply all their requirement, we agreed to work with them on a longer term effort to rehabilitate their military forces.⁶³

⁶¹ William Burr and Michael L. Evans, ed., "Memorandum of Conversation President Ford with President Soeharto in Laurel Cabin, Camp David, Maryland, July 5, 1975," in *East Timor Revisited: Ford and Kissinger Gave Green Light to Indonesia's Invasion of East Timor, 1975*, 3–6 [National Security Archive Electronic Briefing Book, no.62]., 21 March 2009 <<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/...>>.

⁶² Ibid., 6

⁶³ William Burr and Michael L. Evans, ed., "Memorandum for the President," in *East Timor Revisited: Ford and Kissinger Gave Green Light to Indonesia's Invasion of East Timor, 1975*, 9 [National Security Archive Electronic Briefing Book, no.62]., 21 March 2009 <<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/...>>.

Meskipun Amerika tidak dapat memenuhi permintaan militer Indonesia sepenuhnya sesuai yang telah dijanjikan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas, namun kemudian pada tahun 1975 Amerika menjanjikan sekitar \$10 juta bantuan militer berupa hibah dan kredit.⁶⁴ Dalam kunjungan Presiden Ford dan Menlu Henry Kissinger, kemudian juga terungkap adanya dukungan politis AS pada saat Indonesia menyiapkan penyerangan ke Timor Timur. Dalam kunjungan 2 hari di Jakarta tercatat adanya perbincangan antara Presiden Ford yang didampingi oleh Menlu Kissinger dengan Presiden Soeharto tentang permintaan Indonesia agar AS bersedia memahami rencana penyerangan ke Timor Timur. Presiden Ford menyatakan, *"we will understand and will not press you on the issue, we understand the problem you have and the intentions you have."* Selanjutnya diikuti oleh tanggapan yang disampaikan oleh Kissinger, *"you appreciate that the use of US-made arms could create problem."*⁶⁵

Dalam pembicaraan selanjutnya terungkap tentang permintaan AS agar serangan Indonesia atas Timor Timur dilakukan setelah Presiden Ford kembali ke tanah air. Dan menjelang akhir pembicaraannya Presiden Soeharto berjanji bahwa tindakannya akan didasarkan pada hukum yang berlaku dan menjamin untuk tidak akan membahayakan kepentingan ekonomi Amerika. Menanggapi hal ini Kissinger menyatakan penghargaannya dan Presiden Ford sekali lagi menyatakan jaminannya bahwa AS memahami situasi ini, meskipun kemudian disusul dengan pernyataan bahwa ia tidak merekomendasikan apapun.⁶⁶ Sebuah pernyataan diplomatis yang menunjukkan kearifannya sebagai seorang negarawan yang berusaha bersikap netral, dalam arti ia tidak ingin sikapnya ini mengakibatkan terjadinya polemik di dalam negeri bagi dukungannya terhadap Presiden Soeharto.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ William Burr and Michael L. Evans, ed., "Telegram US Embassy Jakarta to Secretary of State," in *East Timor Revisited: Ford and Kissinger Gave Green Light to Indonesia's Invasion of East Timor, 1975*, paragraf 42 – 43 [National Security Archive Electronic Briefing Book, no.62]., 21 March 2009 <<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/...>>.

⁶⁶ Ibid., paragraf 59.

BAB 4 PARADOKSAL KEBIJAKAN BANTUAN AS TERHADAP INDONESIA

4.1. Sikap AS terhadap upaya-upaya Timor Timur dalam memperoleh kemerdekaannya

Kebijakan luar negeri AS terhadap proses integrasi Timor Timur (1975) kepada NKRI dari tahun ke tahun nampaknya tetap dipertahankan. Hal itu tampak dalam *security assistance*, meskipun tidak secara terbuka, atau paling tidak, untuk beberapa saat setelah proses integrasi. Kebijakan ini tidak banyak diperdebatkan, baik oleh komunitas internasional maupun oleh anggota Kongres. Hal ini tidak lain karena pada saat itu Perang Dingin masih berlangsung, dan kepentingan AS hadir di negara-negara berkembang di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Seiring penerapan doktrin pembendungan dan dalam melindungi kepentingan-kepentingan ekonominya, AS terus menerapkan kebijakan luar negerinya melalui pemberian *security assistance*. AS menyadari sepenuhnya apabila negara-negara berkembang yang mana kepentingan ekonomi AS di negara tersebut tidak diberikan *security assistance* – bagian dari strategi peningkatan *capacity building* dari aspek keamanan – maka apabila negara tersebut jatuh ke rezim komunis hal ini akan mengancam kepentingan Amerika.

Terkait dengan upaya AS melindungi kepentingan-kepentingannya di berbagai belahan dunia, Menhan AS Harold Brown pada 5 Februari 1979 mempresentasikan proposal dukungan Dephan AS kepada negara-negara berkembang di depan *the House International Relation Committee* tentang pemberian *security assistance* untuk Tahun Anggaran 1980 sebesar \$4,236 juta. Bantuan tersebut diberikan dalam tiga jenis (*three elements*): (1) *Military Assistance Program/MAP*; (2) *International Military Education Training/IMET*; (3) *Foreign Military Sales/FMS*.

This budget is modest in relation to our many interests around the world and their impact on our security, economy, and general well-being. Three elements within this total relate most directly to our worldwide defense posture. ...in Military Assistance Program funding – “MAP” – for grant materiel aid to four countries and overall management of the security assistance program. ... in International Military Education Training funds – “IMET” – for grant training of students from 52 foreign countries. ... in credits to 25 countries for the financing of foreign military sales. I shall highlight the support which these

*programs will provide key allies and friendly countries as I review our defense posture in the various region of the world.*⁶⁷

Pada tahun 1979 saat Menhan AS Harold Brown menyampaikan proposal di depan Kongres, bantuan IMET yang telah diberikan kepada Indonesia sebesar US\$1,973,000 namun dalam pelaksanaannya terserap sebesar US\$1,848,000 dengan jumlah personel TNI yang mengikuti program IMET sebanyak 195 orang. Sementara realisasi dari program yang dilaksanakan pada tahun 1980 adalah sebesar US\$1,874,000 hal ini ternyata lebih besar dari yang direncanakan yaitu sebesar US\$1,639,000. Namun jumlah personel yang dikirim mengikuti program IMET mengalami pengurangan yaitu hanya sejumlah 173 orang.⁶⁸

Menarik untuk menyimak pernyataan Menhan AS bahwa, *U.S. Security Assistance* yang akan dialokasikan, terkait erat dengan begitu banyak kepentingan AS di seluruh dunia dan diakui bahwa hal tersebut akan sangat berpengaruh bagi keamanan nasional, kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Amerika. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa AS memerlukan mitra dalam menjamin terselenggaranya seluruh kepentingan nasionalnya melalui penciptaan citra positif kepada negara-negara berkembang sekaligus memberikan *capacity building* dibidang keamanan bagi negara-negara mitra dalam mana kepentingan-kepentingan Amerika hadir. Sikap tersebut di atas juga tercermin sewaktu AS memberikan dukungan terhadap proses integrasi Timor Timur ke dalam NKRI.

Permasalahan integrasi Timor Timur mulai muncul kepermukaan setelah terjadi peristiwa "Kerusuhan Santa Cruz Dilli" pada 12 November 1991. Demo di Dilli dilakukan berkaitan dengan terbunuhnya seorang aktivis kemerdekaan Timor Timur yang dimakamkan di pemakaman Santa Cruz sebulan sebelumnya serta rencana kunjungan Parlemen Portugal yang batal karena adanya keberatan dari pemerintah Indonesia. Demo ini kemudian dihentikan oleh aparat keamanan yang dilakukan secara anarkis. Kerusuhan ini membawa korban 251 orang meninggal, 382 orang terluka, dan 250 orang menghilang. Masalahnya adalah bahwa peristiwa ini disaksikan oleh dua wartawan Amerika, Amy Goodman dan Allan

⁶⁷ Security Assistance Community, FY 1980 Security Assistance Program, *Resource: Security Assistance news from the Military Departments* (T.k., T.t.), 8.

⁶⁸ Departemen Pertahanan RI, "Record program IMET Tahun 1971 – 2009" (Jakarta: Ditkorsin Ditjen Strahan, 2009).

Nairn dan direkam dalam pita video oleh Max Stahl untuk stasiun televisi *Yorkshire* di Inggris. Video tersebut selanjutnya digunakan dalam pembuatan sebuah film dokumenter *First Tuesday* berjudul *In Cold Blood: The Massacre of East Timor*, dan ditayangkan di ITV Inggris pada Januari 1992.⁶⁹ Ini merupakan “*casus belli*” antara pemerintah AS dan Indonesia kemudian.

Pada dasarnya peristiwa ini merupakan letupan pertama di mana permasalahan integrasi Timor Timur menarik perhatian komunitas internasional, karena tayangan tersebut kemudian disiarkan ke seluruh dunia. Tentunya letupan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Permasalahan integrasi Timor Timur sendiri pada dasarnya memang belum diakui oleh PBB yang mewakili komunitas internasional. Tapi, masalah ini mampu bertahan sekian lama sekalipun ditentang PBB. Tentunya semua ini tidak luput dari pengaruh kuat yang dipancarkan oleh Amerika sebagai salah satu *super power*, sementara Australia pada saat itu juga tidak terlalu mempersoalkannya, karena adanya kepentingan dengan Indonesia tentang deposit minyak bumi di celah Timor. Dari kaca mata ini terlihat jelas bahwa dukungan Amerika telah mampu meredam persoalan integrasi Timor Timur ke dalam NKRI dari sorotan internasional.

Peristiwa kerusuhan ini kemudian mulai mendunia setelah munculnya gerakan solidaritas internasional yang diawali oleh berdirinya *East Timor Action Network* (ETAN) di AS. Gerakan ini mulai mempersoalkan keterlibatan pemerintahnya dalam bentuk dukungan *security assistance* yang secara terus menerus disalurkan kepada Indonesia dari sejak proses integrasi Timor Timur kedalam NKRI (1975) hingga pasca kerusuhan Santa Cruz.⁷⁰

Kerusuhan Santa Cruz (1991) bertepatan waktunya dengan tahun-tahun awal berakhirnya Perang Dingin (1989 – 90). Pada saat itu kepemimpinan AS berada di bawah Presiden George W.H. Bush menggantikan Ronald Reagan. Bush menerapkan doktrin *Liberal democratic internationalism* bagi kebijakan luar

⁶⁹ *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, “Insiden Dili.”, 10 January 2002 <<http://id.wikipedia.org/>>.

⁷⁰ ETAN, *Santa Cruz Massacre* (T.k.: T.p., T.t.), 1., 10 January 2002 <<http://www.etan.org/timor/SntaCRUZ.htm>>.

negerinya.⁷¹ Doktrin pembendungan warisan Truman telah mulai ditinggalkan, pembangunan ekonomi Amerika yang sukses di bawah Reagan, oleh Bush diupayakan untuk dilanjutkan.

Perhatian utama (*major concern*) Presiden Bush dalam melanjutkan pembangunan ekonomi yang dilandasi oleh doktrin *Liberal democratic internationalism* adalah adanya kebebasan pasar (*free market*). Hambatan perdagangan internasional yang dirasakan selama ini adalah adanya hambatan tarif (bea masuk) perdagangan dengan negara-negara tetangga dekatnya yaitu Amerika Latin. Salah satu inisiatif Bush untuk menghapus hambatan tersebut adalah melalui upaya negosiasi dengan Mexico dalam bentuk *the North American Free Trade Agreement* (NAFTA) yang berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Desember 1992. Melalui perjanjian ini hambatan perdagangan dibidang tarif (bea masuk) antara tiga negara (AS, Mexico dan Canada) dihilangkan.⁷² Sementara terkait dengan liberalisme dibidang penyebaran demokrasi, AS menerapkan kebijakan penghormatan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu permasalahan pelanggaran HAM di beberapa negara untuk kali ini juga menjadi perhatian utama bagi AS. Era pasca Perang Dingin juga disebut sebagai era *neoliberalism* atau era kebangkitan kembali *Wilsonian Liberalism* sebagai alat diplomasi hubungan bilateral dan multilateral dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak azasi manusia.

*Neoliberals have recently given great emphasis to bilateral and multilateral diplomacy for promotion and protection of human rights. They have brought the topic of humanitarian intervention into spotlight ... This, too, returns inquiry to focus on concerns central to idealists in the liberal tradition of Wilson.*⁷³

Dengan demikian pada saat ETAN memulai kampanyenya kepada para pejabat AS dan Kongres untuk menghentikan bantuan IMET kepada TNI, upaya tersebut memperoleh respon yang positif dari pemerintah maupun Kongres. Akhirnya sebuah rancangan UU tentang penghentian program IMET dihasilkan.

⁷¹ Tony Smith, *America's Mission: The United States and the Worldwide Struggle for Democracy in the Twentieth Century* (T.k.: A Twentieth Century Fund Book, Princeton University Press, 1994), 312.

⁷² Gaddish Smith, *George Bush*, in *The Presidents: A Reference History*, 2nd ed., ed. Henry F. Graff (New York: Charles Scribner's Sons, 1996), 603.

⁷³ Charles W. Kegley Jr., *Controversies in International Relations Theory: Realism and Neoliberal Challenge* (New York: St. Martin's Press, 1995), 14.

Meskipun rancangan UU ini semula ditentang oleh perusahaan-perusahaan Amerika di Jakarta seperti General Electric, McDonnell-Douglas, Freeport-MacMoRan dan AT&T melalui *lobby* yang intensif kepada Kongres, nampaknya *lobby* tersebut sia-sia. Pada Oktober 1992, akhirnya Kongres meloloskan rancangan UU penghentian program IMET kepada TNI, upaya ETAN untuk mendesak pemerintah AS bagi penghentian bantuan militer kepada Indonesia berhasil.⁷⁴ Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari kebijakan luar negeri AS yang diterapkan pada saat itu yang memang memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Keberhasilan ini diikuti oleh keberhasilan lainnya terhadap penerapan kebijakan luar negeri AS dalam hal pembatalan rencana penjualan pesawat tempur F-5 kepada Indonesia pada tahun 1993.⁷⁵

Pada tahun 1993 pemerintahan Bush digantikan oleh William J. Clinton. Pemerintahan Clinton melanjutkan kebijakan politik luar negeri Bush. Pada tahun itu juga pemerintah AS ikut mendukung sebuah resolusi yang mengkritik Indonesia. Resolusi ini dilaksanakan oleh Komisi HAM PBB di Jeneva. Ini adalah untuk yang pertama kalinya AS memberikan dukungan secara resmi bagi *event* seperti ini. Pada awal 1994 Deplu AS mengumumkan larangan Kongres bagi penjualan senjata ringan kepada Indonesia.

*... In early 1994 the State Department announced a ban on small arms sales to Indonesia again in response to Congressional and grassroots pressure. Not since Indonesia's invasion of East Timor in 1975 had the U.S. government suspended weapon transfer to Indonesia.*⁷⁶

Pemerintah AS memperoleh tekanan bertubi-tubi dari berbagai kelompok solidaritas Timor Timur yang dipelopori oleh ETAN. Bahkan ETAN mampu membangkitkan suatu strategi yang efektif namun fleksible dalam membangun dukungan bagi munculnya debat publik tentang Timor Timur yang mampu mempengaruhi kebijakan AS. Sebuah argumen yang keras berhasil diciptakan oleh ETAN yang berisi tuntutan bagi pertanggungjawaban pemerintah AS

⁷⁴ Brad Simpson, "Solidarity in an Age of Globalization: The Transnational Movement for East Timor and U.S. Foreign Policy," *Peace History Society and Peace and Justice Studies Association: Peace & Change*, vol. 29, no. 3&4, (Juli 2004), 460.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, 461.

terhadap terjadinya tindak kekerasan di Timor Timur dimasa yang lalu. Untuk itu ETAN berupaya mengumpulkan berbagai informasi tentang tindak kekerasan atas Timor Timur yang dapat dipercaya, serta terus melakukan lobi-lobi secara langsung kepada Kongres.⁷⁷

ETAN benar-benar mampu menciptakan isu-isu tentang HAM yang sangat mempengaruhi hubungan bilateral AS – Indonesia, dan mendesak agar pemerintah AS mengakhiri bantuan militer kepada Indonesia dan mendukung bagi penentuan nasib Timor-Timur oleh rakyatnya sendiri. ETAN melakukan lobi kepada para senator dan anggota Parlemen yang simpatik, yang menduduki jabatan yang menentukan dalam hal pemberian bantuan militer, pelatihan dan penjualan senjata ke Indonesia. ... *it only could hope to affect U.S. policy by establishing relationships with sympathetic senators and representatives who were in a position to restrict military aid, training, and weapons sales to Indonesia.*⁷⁸ Hasilnya antara 1992 – 99 ETAN dengan para pendukungnya telah mampu mempengaruhi kebijakan AS dalam menghambat berbagai bentuk bantuan militer termasuk pelatihan bagi militer Indonesia.

Keberhasilan ETAN dalam upaya menginternasionalisasi berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Timor-Timur tidak saja di dalam negeri AS, namun juga mampu mempengaruhi opini komunitas internasional. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah AS di bawah Presiden Clinton yang menerapkan kebijakan politik luar negeri berdasarkan doktrin *Liberal democratic internationalism* yang diwarisi semasa pemerintahan Bush. Hal ini terbukti dengan dinobatkannya Uskup Dilli (Belo) dan Ramos Horta sebagai pemenang hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1996 atas upaya mereka yang terus memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur secara damai.

Masa pemerintahan Clinton, khususnya pada paruh kedua adalah puncak dari perubahan kebijakan luar negeri AS kepada Indonesia, khususnya setelah Presiden Soeharto lengser dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Pada 22 Mei 1998, sehari setelah lengsernya Soeharto, Senat AS dengan suara bulat

⁷⁷ Ibid., 462.

⁷⁸ Ibid., 464.

menghimbau Presiden Habibie untuk mendukung reformasi demokrasi dan ekonomi di Indonesia serta meminta pula agar Habibie mendukung referendum bagi penentuan nasib sendiri terhadap Timor Timur, yang dalam pelaksanaannya seyogianya dilakukan dengan supervisi komunitas *internasional*.⁷⁹

Habibie memenuhi tuntutan pemerintah AS yang disampaikan melalui Senat tersebut. Pada 5 Mei 1999 melalui mediasi PBB Indonesia dan Portugal mencapai kesepakatan bagi penyelesaian secara politis terhadap Timor Timur melalui pemungutan suara/jajak pendapat yang direncanakan pada akhir Agustus 1999. Jajak pendapat ini akan menentukan apakah rakyat Timor Timur akan menerima tawaran otonomi luas dengan tetap berintegrasi dengan Indonesia, atau menolak dan lebih memilih untuk merdeka.

Jajak pendapat akhirnya dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dan hasilnya 78,5% rakyat Timor Timur lebih memilih untuk merdeka. Hasil jajak pendapat ini membuat milisi pro-integrasi mengalami *shock* dan kemudian melakukan serangan secara membabi buta kepada rakyat Timor Timur yang memilih untuk merdeka, serta melakukan aksi bumi hangus terhadap berbagai fasilitas publik. Tindakan anarkis ini mengakibatkan terjadinya arus pengungsian terhadap lebih dari 250.000 orang yang melintasi perbatasan ke Timor Barat – wilayah Indonesia – dan diperkirakan sebanyak 2.000 korban meninggal dunia. Tindakan anarkis milisi pro-integrasi ini diindikasikan melibatkan unsur-unsur TNI. Pemerintah Indonesia dipersalahkan oleh komunitas internasional berada dibalik aksi pelanggaran HAM berat ini.

*... During the approximately three weeks that followed, the TNI and its militia destroyed an estimated 70% of the territory's building and infrastructure, forcibly deported about 250.000 people to Indonesia, raped untold numbers of women, and killed upward of 2.000 people – to create what many have called "ground zero." ...*⁸⁰

Kenyataan pahit persoalan Timor Timur, khususnya terkait adanya pelanggaran HAM berat terhadap keterlibatan TNI baik di lapangan maupun

⁷⁹ Ibid., 469.

⁸⁰ Joseph Nevins, "The Making of "Ground Zero" in East Timor in 1999: An Analysis of International Complicity in Indonesia's Crimes," *Asian Survey: The Legacy of Violence in Indonesia* vol. 42. No. 4 University of California Press, (Jul. – Aug., 2002), 623., 2 December 2009 <<http://www.jstor.org>>.

secara institusional sempat menjadi perdebatan publik, baik di dalam negeri maupun dalam percaturan internasional. Namun setelah sebuah tim pencari fakta yang bersifat independen dibentuk oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah Indonesia dan Timor-Leste, hasilnya menguak beberapa kesaksian yang memang sangat disesalkan oleh semua pihak. Terlepas dari apapun fakta tindak kekerasan yang terjadi, kedua belah pihak telah sepakat bahwa tujuan pembentukan tim ini yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor Leste (*The Commission of Truth and Friendship (CTF) Indonesia – Timor Leste*) tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk membuat penuntutan lewat peradilan, namun lebih diarahkan untuk pembelajaran bagi kedua bangsa, betapa mengerikan sebuah sengketa yang melibatkan Angkatan Perang serta berbagai ekses pelanggaran HAM yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itulah laporan akhir komisi ini di beri judul “*Per Memoriam Ad Spem*” yang bermakna “Melewati Masa Lalu untuk Menyongsong Harapan Masa Depan.”⁸¹

Dari fakta-fakta yang diungkapkan oleh Komisi ini dalam *Executive Summary* disimpulkan beberapa hal yaitu: (1) bahwa pelanggaran HAM berat terjadi dalam bentuk kejahatan kemanusiaan di Timor Timur pada 1999 dan pelanggaran dimaksud meliputi pembunuhan, pemerkosaan ataupun pelecehan seksual dalam bentuk lain, penyiksaan, penahanan ilegal, dan pengusiran secara paksa yang dilakukan terhadap penduduk sipil; (2) bahwa terdapat tanggung jawab institusional dalam berbagai tindak pelanggaran tersebut; (3) dalam hal tindak kejahatan yang dilakukan oleh gerakan pro-otonomi, komisi menyimpulkan bahwa kelompok milisi pro-otonomi, TNI, pemerintahan sipil lokal (Pemda), dan Polri seluruhnya harus menerima beban tanggung jawab institusional terhadap pelanggaran HAM berat yang ditujukan kepada masyarakat sipil yang mendukung kemerdekaan, kejahatan yang dilakukan meliputi pembunuhan, pemerkosaan dan pelecehan sexual, penyiksaan, penahanan ilegal, dan pengusiran secara paksa; (4) dalam hal tindak kejahatan yang dilakukan oleh gerakan pro-kemerdekaan, komisi menyimpulkan bahwa karena kurangnya bukti-bukti yang menguatkan yang ditemukan di lapangan, sulit dipastikan apakah

⁸¹ The Commission of Truth and Friendship (CTF) Indonesia – Timor-Leste, *Final Report: Per Memoriam Ad Spem* (Denpasar: Commission of Truth and Friendship Indonesia – Timor-Leste, 2009), ii-iii.

mereka melakukan pelanggaran, meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa kelompok pro-kemerdekaan bertanggung jawab terhadap terjadinya pelanggaran HAM berat dalam bentuk penahanan secara ilegal terhadap penduduk sipil yang pro-otonomi; (5) bahwa karena adanya keterlibatan secara institusional dalam hal terjadinya pelanggaran HAM berat dari kedua belah pihak, maka kedua belah pihak harus menerima tanggung jawab baik secara moral maupun politis terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan institusi masing-masing.⁸²

Sungguh, sebuah letupan di tengah-tengah komunitas internasional sekali lagi terjadi, dan letupan yang kedua ini ternyata jauh lebih dahsyat dari apa yang pernah terjadi sebelumnya atas kerusuhan Santa Cruz pada tahun 1991. Kejadian ini menyebabkan Pemerintah AS dan Kongres menerima puluhan ribu tilpon dari berbagai aktivis HAM internasional yang berisi tuntutan agar AS segera memutus hubungan militer dengan Indonesia. Segera sesudahnya Senator Feingold dan yang lain mengajukan rancangan UU penghentian bantuan Amerika bagi Indonesia.⁸³ Pada 9 September 1999 pemerintahan Clinton secara resmi mengumumkan dihentikannya hubungan militer dengan Indonesia dan menuntut agar Indonesia menerima pasukan penjaga perdamaian internasional.

Pada 12 September 1999 Presiden Habibie menyerah terhadap adanya tekanan internasional dan kemudian mengundang pasukan pemelihara perdamaian ke Timor Timur. Misi pemelihara perdamaian internasional – *the International Force for East Timor/INTERFET* – tiba di Timor Timur pada 20 September 1999 dibawah pimpinan Australia. Misi ini didasarkan pada Resolusi DK PBB No. 1264.⁸⁴ Dari kenyataan ini jelas terlihat bahwa dominasi AS di PBB memberikan pengaruh yang menentukan, sebab bila kita amati sesungguhnya pasca serangan Indonesia atas Timor Timur, pada 12 Desember 1975 Dewan Keamanan (DK) PBB juga telah mengeluarkan Resolusi No. 384 yang antara lain mendesak agar Indonesia menarik pasukannya dari wilayah Timor Timur; tidak mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia; menuntut agar rakyat Timor Timur diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri; serta meminta agar

⁸² Ibid., xiii – xiv.

⁸³ Brad Simpson, *op.cit.*, 471.

⁸⁴ *Wikipedia, the free encyclopedia*, “1999 East Timorese crisis.”, 10 January 2002 <[http://en.wikipedia.org ...](http://en.wikipedia.org...)>.

Perwakilan Khusus Sekjen PBB dapat dikirim untuk meninjau situasi.⁸⁵ Namun dari sekian banyak tuntutan/permintaan DK PBB hanya satu yang dikabulkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu pengiriman Utusan Khusus Sekjen PBB Vittorio Winspeare Guicciardi, *Under-Secretary-General* yang merangkap sebagai *Director General of the UN Office at Geneva*. Kunjungan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1976. Dan pada saat itu pertempuran sedang berlangsung sengit antara TNI dan Falintil (Tentara Fretilin).

Berdasarkan laporan yang diberikan oleh Utusan Khusus Sekjen PBB, pada 22 April 1976 DK PBB mengadopsi Resolusi No. 389 yang isinya sekali lagi mendesak agar pemerintah Indonesia segera menarik pasukannya dari wilayah Timor Timur dan meminta agar Utusan Khusus Sekjen PBB dapat melanjutkan tugas pemantauannya. ... *The Resolution again "called upon" the Government of Indonesia to withdraw without delay all its forces from the Territory and request the Special Representative to continue his assignment.*⁸⁶ Dua resolusi DK PBB No. 384 dan 389 yang mendesak agar Indonesia menarik tentaranya tidak begitu diindahkan – karena Indonesia memiliki alasan sendiri dan telah menganggap sah terhadap proses integrasi tersebut – sekalipun demikian DK PBB tidak mampu mengeluarkan sanksi apapun. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh Amerika yang sejatinya memberikan dukungan baik secara politis maupun dalam bentuk *security assistance*.

Dalam suatu laporan dinyatakan bahwa adanya perubahan kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia tentang kasus Timor Timur karena keberhasilan ETAN yang memanfaatkan munculnya teknologi komunikasi seperti internet, yang telah memungkinkan untuk menciptakan sebuah jaringan yang mampu menyebarkan informasi ke seluruh negara dan memobilisasi suatu jajak pendapat (*pooling*) yang relatif terbatas untuk dapat bekerja dengan berbagai organisasi yang kemudian menyatu dan mampu menjamin dan memperkuat suara organisasi tersebut terhadap kondisi yang tidak kondusif di Timor Timur. Selanjutnya dikatakan bahwa pada akhirnya keberhasilan jaringan solidaritas Timor Timur di

⁸⁵ Paul D. Elliot, "The East Timor Disput," *The International and Comperative Law Quarterly*, vol. 27, no. 1 (Jan., 1978), 240., 2 January 2009 <[http://www.jstor.org/...](http://www.jstor.org/)>.

⁸⁶ Ibid.

AS disebabkan oleh kemampuan organisasi tersebut dalam mengkombinasikan argumen keyakinan moral tentang tanggungjawab Amerika terhadap penderitaan yang dialami oleh rakyat Timor Timur, dengan adanya tekanan fisik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Lebih jauh dikatakan pula bahwa ETAN dan kelompok lainnya mampu meyakinkan banyak penentu kebijakan Amerika agar menekan Jakarta terkait kasus Timor Timur dengan tanpa perlu merusak hubungan bilateral secara menyeluruh.⁸⁷

Klaim yang dinyatakan tersebut mungkin benar, tapi tentunya tidak sepenuhnya. Sebagaimana uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa perubahan kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia terkait kasus Timor Timur, lebih ditentukan oleh adanya perubahan kebijakan luar negeri AS secara global pasca berakhirnya Perang Dingin. AS di bawah kepemimpinan Bush dan penggantinya Clinton menerapkan doktrin *Liberal democratic internationalism* yang selaras dengan paham Wilson. Dimana orientasi kebijakan luar negeri AS berpusat pada kepentingan nasional yang mendasar atau mutlak yaitu keamanan nasional yang dikombinasikan dengan kepentingan nasional vitalnya yaitu pembangunan ekonomi. Dalam implementasinya terkait dengan penyebaran demokrasi, AS sangat memperhatikan kebebasan individu melalui penghormatan terhadap HAM. Sehingga langkah pemerintah AS menekan Indonesia tidak terlepas dari kondisi tersebut. Tentunya kebijakan ini tidak akan diambil, andaikata persoalan ini masih dalam konsteks Perang Dingin, di mana AS menerapkan doktrin pembendungan. Dengan demikian bahwa momentum lepasnya Timor Timur dari NKRI terjadi karena adanya perubahan kebijakan luar negeri AS dalam percaturan global.

4.2. Benturan Kepentingan Nasional AS dengan Indonesia

Salah satu visi Presiden AS yang cukup terkenal adalah visi Presiden Woodrow Wilson yang menyatakan tentang perdamaian tanpa kemenangan ("*peace without victory*") melalui penyebaran demokrasi ke seluruh penjuru dunia dalam rangka mewujudkan dunia yang aman. Visi Wilson ini memunculkan debat nasional yang cukup seru pada tahun 1918 – 19, bagaimana mungkin hal tersebut dapat terwujud dalam situasi dunia yang berada dalam kesemrawutan dan ketidak

⁸⁷ Brad Simpson, *op.cit.*, 472 – 3.

pastian.⁸⁸ Pada saat itu situasi dunia sedang dibayangi perang besar. Eropa terbelah dalam dua sistem aliansi yang saling berhadapan sebagai musuh yang kemudian memicu meletusnya Perang Dunia I. Dua aliansi besar tersebut adalah *Triple Alliance* atau *Central Power* (German, Austria-Hungaria, dan Italia) berhadapan dengan *Triple Entente* (Perancis, Inggris, dan Rusia).⁸⁹

Sementara Amerika di bawah Wilson berupaya bersikap netral serta berupaya menjadi mediator untuk mengakhiri perang Eropa, namun Amerika juga tidak mungkin berdiam diri dengan situasi dunia yang sedang kacau, sebab bagaimanapun Amerika memiliki kepentingan perdagangan global yang terganggu dengan adanya blokade jalur perniagaan oleh dua belah pihak yang berperang, sehingga Amerika harus mempersiapkan kekuatan untuk melindungi kepentingan globalnya tersebut. Pada tahun 1916, ketika dilakukan pemilihan presiden AS, Wilson kembali terpilih untuk masa jabatan kedua, dan berbagai persiapan untuk perang terus dilanjutkan.⁹⁰

Berbagai upaya mediasi yang dilakukan oleh Wilson kepada kedua belah pihak yang tengah berperang selalu menemui jalan buntu. Wilson kembali membuat keputusan untuk melakukan mediasi, dengan harapan pendapat publik akan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Berbicara sebelumnya kepada Senat pada 22 Januari 1917, Wilson menegaskan hak AS untuk berbagi dalam meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian abadi, yang barang kali akan terjadi “perdamaian tanpa kemenangan” atau hanya “perdamaian diantara kesetaraan” (“*peace without victory*” or only “*peace among equals*”).⁹¹ Namun nampaknya upaya inipun menemui jalan buntu, sementara pertempuran di daratan Eropa terus berkecamuk. Visi Wilson untuk menciptakan perdamaian abadi di dunia masih harus melalui perjalanan panjang untuk dapat terwujud.

Visi Wilson nampaknya tidak hanya menjadi sebuah visi tanpa makna, karena para pemimpin Amerika setelah dia mampu melihat bahwa visi Wilson merupakan sebuah visi universal yang hanya mungkin untuk dapat diwujudkan oleh sebuah bangsa besar seperti Amerika.

⁸⁸ Tony Smith, *op.cit.*, 31.

⁸⁹ George Brown Tindall, *op.cit.*, 947.

⁹⁰ *Ibid.*, 957.

⁹¹ *Ibid.*

Thus, when President Clinton, like Presidents Bush (senior) and Reagan before him, speaks of his conviction that no feature of U.S. foreign policy is more critical at the end of the cold war than helping the democratic forces in Russia, he may often be at a loss on how best to proceed. But he is articulating his concerns for peace in a recognizable way that stretches back across the generation, to American leaders in other time who have speculated on what to do in the aftermath of victory and who rightly concluded that the answer consisted in promoting the fortunes of democracy for other the sake of American national security.⁹²

Sedemikian kondusifnya sistem pemerintahan Amerika yang mampu bertahan dari generasi ke generasi, yang mana keamanan nasional menjadi tujuan utama bagi bangsa ini. Keamanan Nasional benar-benar diagungkan sebagai kepentingan nasional yang diutamakan (mutlak). Adapun strategi untuk mewujudkan kepentingan nasional tersebut disesuaikan dengan situasi tantangan jaman yang selalu berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada saat Amerika menghadapi tantangan Perang Dingin, strategi yang digunakan adalah dengan menerapkan kebijakan pembendungan (*policy of containment*), dan strategi ini tentunya sudah tidak valid lagi manakala ancaman komunis Soviet sudah tidak ada lagi dengan berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989 - 90 yang ditandai dengan runtuhnya USSR.

Kemenangan AS atas Perang Dingin telah membuktikan keunggulan demokrasi Amerika dalam mana liberalisme menjadi bagian penting dari demokrasi itu sendiri, atau dengan kata lain liberalisme sesungguhnya merupakan nafas dari sebuah demokrasi. Liberalisme dalam bentuk ekonomi terwujud dalam kapitalisme, dan dalam bentuk politik diwujudkan melalui penghormatan hak-hak individu yang menjadi dasar bagi perjuangan demokrasi Amerika yang disebarkan ke seluruh dunia.⁹³ Apakah Amerika telah mengkhianati perjuangan demokrasinya

⁹² Tony Smith, op.cit., 31.

⁹³ *Liberalism* lebih mengutamakan hak-hak warga negara yang direpresentasikan melalui peran yang lebih besar oleh negara dengan membatasi peran *market* dan mengutamakan penghormatan atas hak-hak individu. Liberalisme semacam ini dijelaskan oleh Michael W. Doyle dalam tulisannya yang berjudul *Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs*, ia menyampaikan tentang prinsip-prinsip *liberalism* yang secara umum di bentuk dari sebuah komitmen yang terdiri dari 3 set atau kelompok hak-hak sebagai berikut: Pertama, liberalisme yang bebas dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa atau lazim disebut sebagai "kebebasan negatif." Yaitu termasuk kebebasan hati nurani, kebebasan pers dan menyampaikan pendapat, kesetaraan di mata hukum (tidak pandang bulu), dan hak atas kekayaan yang dimiliki. Kedua, liberalisme atas hak-hak yang diperlukan untuk melindungi dan mempromosikan kapasitas dan kesempatan untuk memperoleh kebebasan atau lazim disebut sebagai "kebebasan positif." Yaitu meliputi hak-hak sosial dan ekonomi seperti kesetaraan dan kesempatan dalam memperoleh pendidikan, dan hak untuk

pada saat mendukung Indonesia mengintegrasikan Timor Timur? Dapat diperhatikan bahwa kepentingan nasional AS yang paling hakiki adalah keamanan nasional. Keamanan Nasional itu pula yang dipertaruhkan pada saat menghadapi komunisme di era Perang Dingin, dan strategi yang paling tepat digunakan untuk menyebarkan demokrasi guna menjaga keamanan nasionalnya pada saat itu dihadapkan pada ancaman global, adalah kebijakan pembendungan melalui penerapan kebijakan luar negeri yang diwujudkan dalam bentuk *U.S. Security Assistance*. Bertepatan waktu itu Indonesia yang dinilai memiliki pengaruh yang cukup dominan bagi terjaminnya kepentingan nasional AS menghadapi ancaman serupa, sehingga Amerika tidak mungkin membiarkan Indonesia jatuh ke rezim komunis. Dengan demikian Amerika meyakini bahwa pilihannya pada waktu itu merupakan pilihan yang tepat.

Setelah Perang Dingin usai, ancaman global yang dialami AS dalam mempertahankan kepentingan nasional bergeser, nilai-nilai demokrasi dalam bentuk penghormatan terhadap hak-hak individu memperoleh porsi yang lebih utama. AS melihat adanya berbagai pelanggaran HAM di Timor Timur yang terus berjuang mendapatkan kemerdekaannya tidak mungkin berdiam diri secara terus menerus. Sementara Indonesia melakukan kesalahan mendasar dalam merebut simpati warga Timor Timur, yaitu lebih mengutamakan pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan, meskipun pendekatan kesejahteraan juga dilakukan, namun tidak diimbangi dengan operasi simpati, yang sejatinya pada saat itu juga menjadi salah satu doktrin TNI dalam dwi fungsi, sehingga yang terjadi adalah suatu hal yang justru kontra produktif.

Bagi Indonesia – pada masa pemerintahan Soeharto – integrasi Timor Timur menjadi harga mati, karena sama dengan Amerika yang mana kepentingan nasional yang paling mendasar adalah keamanan nasional, begitu pula bagi Indonesia yang mana integritas NKRI termasuk Timor Timur adalah bagian integral dari kepentingan nasional. Sementara itu terdapat sebuah mashab yang menyatakan bahwa:

memperoleh perawatan kesehatan serta pekerjaan yang layak, kebutuhan untuk berekspresi dan berpartisipasi. Ketiga, hak atas kebebasan untuk berpartisipasi dan merepresentasikan demokrasi.

Jika kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk keamanan nasionalnya bertentangan dengan sistem internasional secara keseluruhan atau anggota-anggota yang lain asalkan kepentingan negara-bangsa tetap terjamin, maka kebijakan tersebut relevan untuk bangsa yang bersangkutan.⁹⁴

Bila disimak, dalam percaturan internasional China nampaknya juga menganut mashab ini ketika menghentikan demo mahasiswa di Lapangan Tiananmen secara represif. Sebenarnya Indonesia, disadari atau tidak pada saat melakukan tindakan menyerang demonstran di Santa Cruz juga dapat dibenarkan bila dikaitkan dengan mashab tersebut. Hanya saja mashab ini mungkin dapat dikatakan efektif jika dilakukan oleh sebuah negara dengan kekuatan militer yang tiada bandingnya sebagaimana yang dimiliki oleh AS – dalam konteks kontemporer perang global melawan terorisme doktrin Bush membenarkan tindakan *unilateral preemptive strike*⁹⁵ terhadap *rogue states* yang diindikasikan mendukung terorisme global dengan cara mensuplai *weapon mass destruction* (WMD), negara-negara yang diindikasikan tersebut adalah Irak, Iran dan Korea Utara yang oleh Bush disebut sebagai “*axis of evil*.”⁹⁶ – atau paling tidak memiliki kemampuan *deterrence* yang tinggi sebagaimana China. Sementara Indonesia tidak memiliki kedua tingkat kemampuan tersebut sebagaimana yang dimiliki baik oleh AS maupun China. Itulah sebabnya kerusuhan Santa Cruz justru menjadi titik balik bagi proses terlepasnya Timor Timur.

Kembali ke konteks Indonesia dalam upaya mempertahankan integritas teritorial pasca integrasi, yang mana Timor Timur termasuk didalamnya, konsekuensi yang harus dihadapi dalam pertempurannya dengan komunis belum berakhir, Falintil – sayap bersenjata Fretilin di bawah pimpinan Xanana Gusmao – terus melakukan perang gerilya dari rimbunnya hutan belukar Timor Timur. Adapun perjuangan Fretilin secara diplomasi diprakarsai oleh Ramos Horta dari luar negeri, yang mana perjuangan diplomasi ini memperoleh perkuatan dengan berdirinya ETAN di AS, yang terus melakukan pendekatan (*lobbying*) kepada anggota-anggota Kongres dan para Senator.

⁹⁴ IG. Purnawa. ed, *Sistem Keamanan Nasional Indonesia: Sebuah Sumbangan Pemikiran*, (Jakarta: PPSN, 2005),7.

⁹⁵ Robert J. Leiber, *The American Era: Power and Strategy for the 21st Century* (Cambridge University Press, 2005), 43.

⁹⁶ Robert Kagan, *Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order* (Vintage Books: New York, 2004), 92

Perjuangan ETAN yang diawali sesuai kerusuhan Santa Cruz telah mampu mengubah wajah Timor Timur dipercaturan dunia. Hal ini sangat dimungkinkan dengan semakin maraknya perkembangan teknologi informasi, sehingga jejaring informasi mengalir sedemikian deras yang menandai puncak kejayaan era globalisasi. Kerusuhan Santa Cruz menjadi titik balik yang memukul bangsa Indonesia, dalam mana kepentingan nasional untuk mempertahankan integrasi Timor Timur mengalami masa-masa yang sangat sulit. Bahkan mantan Menlu Ali Alatas sempat berkomentar dengan menyatakan bahwa, *the massacre (Santa Cruz) a "turning point," which set in motion the events leading to East Timor's coming independence.*⁹⁷ Gerakan solidaritas bagi rakyat tertindas di Timor Timur mulai bermunculan di seluruh belahan dunia.

Sebuah benturan kepentingan terjadi antara AS dengan Indonesia. AS dalam perjuangan menghadapi tantangan global telah berubah, sementara kepentingan nasional Indonesia yang paling utama (mutlak) yaitu menjaga integritas wilayah nasional yang dikumandangkan sebagai wawasan nusantara – yang mengadopsi prinsip NATO yang mana bagi Indonesia ancaman yang dihadapi oleh salah satu teritorialnya merupakan ancaman bagi NKRI, sedangkan prinsip NATO adalah ancaman yang dihadapi salah satu negara anggota merupakan ancaman bersama yang harus dihadapi secara bersama pula – tetap diperjuangkan secara *all out*. Timor Timur merupakan sebuah tempat dimana benturan kepentingan nasional kedua negara terjadi. Amerika yang mendukung pengintegrasian Timor Timur kedalam NKRI pada tahun 1975 melalui dukungan *security assistance* sebagai perwujudan dukungan politisnya, kini tidak lagi hadir didalamnya. Sementara masyarakat Amerika dan juga masyarakat dunia terperangah oleh letupan Timor Timur yang pertama dengan adanya kerusuhan Santa Cruz, yang disusul oleh letupan kedua yang tidak kalah dahsyat, yaitu serangan milisi pro-integrasi – yang ditenggarai memperoleh dukungan TNI – terhadap orang-orang tak berdosa yang menginginkan kemerdekaan Timor Timur, yang telah menjadi korban sia-sia pasca jajak pendapat tahun 1999. Dunia benar-benar terperangah, dan perjuangan diplomasi Ramos Horta yang didukung oleh ETAN akhirnya mampu menembus Kongres AS. Presiden Clinton tidak berdaya

⁹⁷ ETAN, op. cit., 1.

menghadapi desakan masyarakatnya sendiri dan komunitas dunia. Embargo diumumkan, seluruh bentuk *U.S. Security Assistance* kepada Indonesia dihentikan.

Disadari atau tidak, Indonesia telah mewarisi benih-benih demokrasi dari Barat dan telah diadopsi dalam bentuk pemerintahan yang menganut sistem pembagian kekuasaan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa di dalam UUD 45. Namun sayangnya para pemimpin bangsa Indonesia pada saat itu terlalu menyepelkan hal-hal mendasar tentang penerapan hak-hak warganegara dalam menentukan nasibnya. Kesalahan terbesar yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah pada saat penetapan integrasi Timor Timur kedalam NKRI. Pada waktu itu proses integrasi ini direncanakan untuk dilakukan melalui referendum bagi warga Timor Timur setelah Indonesia berhasil menduduki wilayah tersebut. Namun dengan pertimbangan rendahnya tingkat kecerdasan rakyat dikhawatirkan mereka tidak mampu melaksanakan hak pilihnya. Akhirnya keputusan integrasi Timor Timur hanya dilakukan melalui sistem perwakilan dalam bentuk petisi yang dianggap telah mewakili keinginan rakyat Timor Timur, dan referendum dibatalkan. Indonesia lupa bahwa legitimasi integrasi Timor Timur ke dalam NKRI berdasarkan ketentuan internasional mengalami cacat hukum, karena hak individu masyarakat Timor Timur tidak dihormati.

Andaikan proses integrasi Timor Timur dilakukan lewat referendum, dengan pengalaman pahit sebagian besar rakyat Timor Timur pernah berada dalam penjajahan Portugis, serta tindakan komunis yang kurang dapat diterima oleh kebanyakan warga, mungkin referendum akan menjadi pilihan sebagian besar warga Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia, yang secara ekonomi pada saat itu cukup menjanjikan bagi mereka yang menginginkan perubahan yang lebih baik. Apabila integrasi Timor Timur berhasil dilakukan melalui referendum, mungkin dukungan internasional akan lebih positif dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi akan lebih ringan dengan adanya pengakuan komunitas internasional. Namun sayangnya Indonesia menempuh cara yang tidak tepat, yang membuat integrasi Timor Timur menjadi

agenda PBB (internasional) yang dianggap tidak tuntas dan mengandung cacat hukum. Dalam sebuah tulisan penelitian dinyatakan:

... namun perlu dicatat Indonesia telah melakukan kesalahan saat menjelang integrasi tahun 1976, yakni dibatakannya rencana referendum pada saat itu, karena rendahnya tingkat kecerdasan rakyat dan dikhawatirkan tidak mampu melaksanakan hak pilihnya, walaupun ini mungkin keinginan rakyat Timor melakukan integrasi dengan Indonesia tanpa referendum, tetapi Indonesia sebagai negara yang sudah berpengalaman dalam masalah demikian ..., seharusnya Indonesia menolak keinginan integrasi tanpa referendum tersebut, apalagi jika integrasi tanpa referendum tersebut merupakan keinginan Indonesia, maka Indonesia sesungguhnya telah melakukan kesalahan, karena Indonesia telah mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang universal dan kemudian hal ini akhirnya menjadi ganjalan Indonesia di forum internasional.⁹⁸

Disinilah yang sejatinya menjadi suatu permasalahan mendasar yang membuat kepentingan nasional Amerika tidak lagi konvergen dengan kepentingan nasional Indonesia. Amerika dalam penerapan demokrasi yang dialiri oleh nafas liberalisme sangat menghormati hak-hak individu yang merupakan ciri demokrasi universal, sedangkan Indonesia tidak mau belajar dari perjalanan sejarah masa lalu, para pemimpin Indonesia pada waktu itu cenderung terkungkung oleh hal-hal yang lebih bersifat retorika yang hanya memiliki nilai momentum sesaat, kurang melihat visi jauh ke depan. Mungkin di sini pula letak perbedaan mendasar dengan para pemimpin Amerika, sebagaimana digambarkan pada visi Wilson yang mampu melihat kondisi sesaat bangsanya yang menghadapi situasi ketidakpastian politik internasional, yang kemudian menghubungkan dengan keinginan jangka panjang bagi kepentingan bangsanya. Visi yang barangkali pada saat itu lebih bersifat mimpi, namun mimpi tersebut mampu ditangkap oleh para pemimpin generasi sesudahnya, yang kemudian berupaya dengan segala daya mewujudkannya melalui strategi yang tepat dihadapkan pada tantangan dan ancaman jaman, yang kemudian menjadi landasan bagi bangsa Amerika dalam memenuhi kebutuhan hakiki bagi setiap umat manusia secara universal yaitu keamanan, yang kemudian melahirkan sebuah kepentingan nasional yang abadi (mutlak) yaitu keamanan nasional.

Berakhirnya Perang Dingin 1989 – 90 Amerika dipimpin oleh Presiden George W. H. Bush. Dalam pemerintahannya Bush – dalam hal urusan luar negeri

⁹⁸ Siswanto, "Kebijakan Amerika dan Indonesia terhadap Timor Timur dalam Perspektif Containment Policy," *Jurnal Study Amerika*, vol.V, (Agustus – Desember 1999), 89.

– melakukan pendekatan liberalisme kritis, yang ditandai dengan dimunculkannya kebijakan luar negeri yang difokuskan untuk menjamin keamanan nasional. Kebijakan ini dikenal sebagai doktrin *Liberal democratic internationalism*. Kebijakan ini didukung oleh Menlu James Baker yang juga memiliki visi yang senada dengan Bush, bahkan Baker menyatakan dirinya sebagai pelaksana doktrin *Liberal democratic internationalism*. Yang menarik dari pengakuan ini, Baker dalam suatu acara dengar pendapat dengan Senat (1989) ia menyatakan bahwa kebijakan luar negeri AS akan menerapkan idealisme dan nilai-nilai Amerika yakni kebebasan, demokrasi, persamaan hak, penghormatan pada hak-hak individu (*respect for human dignity*), dan bermain jujur (*fair play*).⁹⁹ Apa yang dilakukan oleh Bush pasca Perang Dingin selaras dengan visi Wilson yang memperjuangkan demokrasi keseluruhan dunia berdasarkan liberalisme demi terjaminnya keamanan nasional. Momentum ini relatif berdekatan dengan kerusuhan Santa Cruz, suatu peristiwa yang memang sangat tidak kondusif bagi Indonesia.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, semakin terlihat jelas bahwa benturan kepentingan ini telah mulai muncul pada saat itu. Di satu sisi Amerika tengah meluncurkan kebijakan luar negeri *Liberal democratic internationalism* yang salah satunya mengedepankan penghormatan pada hak-hak individu, sementara di sisi lain Indonesia mempertontonkan suatu adegan yang sangat bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS, yakni terjadinya kerusuhan Santa Cruz yang sarat dengan pelanggaran HAM yang kemudian tersiar ke seluruh penjuru dunia. Dengan demikian gerakan solidaritas Timor Timur di Amerika yang diawali dengan kemunculan ETAN ibarat gayung bersambut dengan kebijakan politik luar negeri AS. Kemudian membuat Indonesia semakin ditinggalkan oleh AS. Pada periode jabatan presiden sesudahnya, Bush digantikan Bill Clinton yang mengadopsi kebijakan luar negeri Bush dalam hampir semua aspek.¹⁰⁰ Clinton memerintah AS selama 2 periode kepemimpinan, perhatian AS terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM sangat besar.

⁹⁹ Tony Smith, *op.cit.*, 312 – 3.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 324.

Mengutip "U.S. Democracy Promotion Program in Asia," *Hearing before the Subcommittee on Asia and The Pacific of the Committee on International Relations, House of Representatives, 105th Congress, first session, September 17, 1997, Washington, 1998* seorang peneliti menyatakan:

Salah satu pilar penting politik luar negeri AS adalah menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi dan HAM ke seluruh penjuru dunia, khususnya Asia. Hal ini secara tegas diungkapkan oleh *Secretary of State, Madeline Allbright*, dengan menggarisbawahi kebijakan diplomasi HAM pada kebijakan AS terhadap Asia.¹⁰¹

Dari situasi ini, tidak mengherankan bahwa perjuangan ETAN dengan berbagai gerakan sejenis yang tersebar tidak saja di Amerika, namun juga diberbagai belahan dunia lain, mendapatkan momentum yang tepat untuk mendesak para pemimpin dunia melakukan tekanan terhadap Indonesia. Tekanan ini, kembali memperoleh momentum yang tepat pada saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Habibie, yang memperoleh pendidikan tinggi di Jerman. Akhirnya Habibie memutuskan menerima desakan komunitas internasional yang dipelopori oleh PBB dan terutama desakan yang disampaikan oleh Senat Amerika, agar Indonesia menyelenggarakan referendum bagi masyarakat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri, apakah memilih tetap berintegrasi dengan Indonesia atau merdeka.

Difasilitasi lembaga internasional dengan supervisi PBB yaitu *the U.N. Mission to East Timor (UNAMET)* yang dibentuk pada bulan Juni 1999 – kira-kira satu bulan setelah negosiasi Indonesia dan Portugal disepakati pada 5 Mei 1999 – referendum penentuan nasib Timor Timur dilaksanakan pada 30 Agustus 1999, yang hasilnya adalah Timor Timur memilih merdeka. Hal ini membuat milisi pro-integrasi Timor Timur melakukan serangan brutal (secara anarkis) yang menewaskan banyak warga Timor Timur yang memilih merdeka, yang mana tindakan anarkis milisi pro-integrasi ini diindikasikan terdapat keterlibatan unsur-unsur TNI. Hal inilah yang membuat pemerintah AS memberikan sanksi embargo bagi TNI, yang merupakan puncak ketidakharmonisan kepentingan nasional

¹⁰¹ Ratna Shofi Inayati dan Irine Hiraswati Gayatri, *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat, dalam Hubungan Indonesia Amerika Serikat 1992-2000: Masa Pemerintahan Presiden Clinton*, ed. Ratna Shofi Inayati (Jakarta: PPW-LIPI, 2000), 18.

kedua negara, atau dengan kata lain kepentingan kedua negara sudah tidak lagi konvergen.

4.3. AS mencabut *U.S. Security Assistance* dan menerapkan embargo kepada TNI pasca jajak pendapat kemerdekaan Timor Timur

Pasca jajak pendapat yang dimenangkan oleh pro-kemerdekaan telah membuat frustrasi bagi pihak pro-integrasi, khususnya bagi para milisi yang selama ini berjuang bersama TNI memerangi Falintil pimpinan Xanana Gusmao. Maka tidak mengherankan rasa frustrasi itu mengakibatkan tindakan yang tidak terkontrol. Pada saat menjelang pemungutan suara dengan supervisi PBB meskipun di satu sisi AS mendesak pemerintahan Habibie melalui Senat, namun di sisi lain pemerintahan Clinton masih bersedia mendengar permintaan Indonesia agar pasukan internasional yang digagas oleh PBB dan dipelopori Australia tidak dihadirkan selama berlangsungnya pemungutan suara (jajak pendapat). Indonesia menyatakan kepada PBB dan pemerintah AS, akan bertanggungjawab untuk mengawal pelaksanaan jajak pendapat dan menjamin bahwa jajak pendapat akan berlangsung aman. Amerika sebagai negara yang menerapkan azas demokrasi liberal dalam percaturan internasional menghormati sepenuhnya terhadap keinginan Indonesia tersebut.

Sejatinya pemerintah Amerika berupaya mendukung Indonesia sepenuhnya sejak Indonesia mengintegrasikan Timor Timur ke dalam wilayahnya hingga berbagai perjuangannya dalam upaya menghadapi perlawanan pasukan komunis Falintil di bawah pimpinan Xanana Gusmao. Dukungan militer (*security assistance*) bahkan terus diberikan hingga tahun 1997, sekalipun Kongres dan ETAN berupaya menghentikan bantuan militer tersebut. Penghentian bantuan militer memang pernah dilakukan pasca kerusuhan Santa Cruz. Namun hanya sebatas program IMET, itupun atas desakan Kongres yang dipelopori seorang Senator yang kemudian mendapatkan dukungan dari beberapa Senator yang lain. Pada tahun 1994 program IMET dihidupkan kembali setelah dibekukan selama 3 tahun. Menurut Menlu Warren Christopher dihidupkannya kembali program IMET “merupakan suatu hal yang penting” untuk mempromosikan “reformasi

militer” di Indonesia.¹⁰² Pada awal tahun yang sama (1994) Deplu AS mengumumkan larangan bagi penjualan senjata ringan kepada Indonesia untuk memenuhi desakan Kongres. Bahkan pada tahun 1996 format IMET diubah menjadi *Extended – IMET* (E-IMET) yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum humaniter, hubungan sipil-militer yang proporsional dalam pemerintahan sipil, serta penghormatan terhadap HAM. Secara keseluruhan pada masa pemerintahan Clinton terungkap bahwa bantuan militer yang diberikan kepada Indonesia senilai ± US\$150 juta. Sepertinya AS dalam menerapkan kebijakan luar negerinya bersifat mendua (*double standard*).

*The degree of cooperation between Washington and Jakarta is impressive. US weapons sales to Indonesia amount to over \$1 billion since the 1975 invasion. Military aid during the Clinton years is about \$150 million, and in 1997 the Pentagon was still training Kopassus units, in violation of the intent of congressional legislation. In the face of this record, the US government lauded “the value of the years of training given to Indonesia’s future military leader in the US and millions of dollars in military aid for Indonesia.”*¹⁰³

Dari catatan tersebut di atas, terlihat bahwa pemerintah AS sejatinya masih menaruh perhatian terhadap Indonesia, dan berharap bahwa reformasi di Indonesia akan diawali oleh para petinggi dengan latar belakang militer yang pernah mendapatkan pendidikan militer di AS melalui program IMET. Tapi apakah perhatian yang diberikan ini benar-benar menjadi dasar kebijakan luar negerinya? Sebagaimana diketahui bahwa kepentingan nasional yang bersifat mutlak bagi setiap bangsa di dunia dan menjadi dasar bagi penentuan kebijakan luar negeri adalah menjamin kelangsungan hidup dan mempertahankan integritas teritorial bagi suatu komunitas sebuah bangsa dan negara. Di samping itu terdapat kepentingan nasional yang dianggap vital yaitu kepentingan ekonomi yang mungkin bisa berada di mana pun, dan juga menjadi salah satu dasar bagi penentuan kebijakan luar negeri suatu negara. Keith R. Legg dan James F Morisson merumuskan hubungan kepentingan nasional dengan kebijakan luar negeri sebagai berikut:

The most fundamental source of foreign policy objectives is perhaps the universally shared desire to insure the survival and territorial integrity of

¹⁰² Ibid., 52

¹⁰³ Noam Chomsky, op.cit., 2.

*community and state. ... the single most important set of domestic source of foreign policy are the economic needs of the community.*¹⁰⁴

Dengan demikian bahwa sikap AS yang terlihat mendua ini pada dasarnya tidak terlepas dari upayanya menjamin kepentingan nasional mutlaknya dan sekaligus kepentingan nasional vitalnya. Dalam hal ini secara khusus ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup atau keamanan nasionalnya dan kepentingan ekonomi globalnya. Dan untuk mencapai dua kepentingan nasionalnya tersebut berbagai strategi dirumuskan dalam bentuk-bentuk doktrin. Dan doktrin yang diterapkan oleh Clinton yang meneruskan doktrin Bush dan diwarisi dari pemikiran Wilson telah memaksa AS menerapkan strategi yang tampak mendua tersebut. Di satu sisi paham demokratik liberal dibidang ekonomi mengharuskan Amerika menerapkan *free market* antara lain melalui pembentukan NAFTA. Sementara kepentingan ekonomi AS di Indonesia juga tidak kecil dengan adanya investasi yang ditanamkan diberbagai sektor seperti minyak bumi, pertambangan dan jasa.

Sedangkan di sisi lain paham demokratik liberal di bidang politik mengharuskan AS bersikap tegas dalam hal menyikapi berbagai pelanggaran HAM di seluruh penjuru dunia sebagai salah satu upaya penyebarluasan nilai-nilai demokrasi. Itulah sebabnya sekalipun AS menentang pelanggaran HAM terhadap kasus Timor Timur, khususnya pasca kerusuhan Santa Cruz, serta berbagai tindak kekerasan TNI dalam memerangi Falintil, pemerintah AS nampaknya masih memberikan toleransinya, hal ini mengingat adanya berbagai kepentingan ekonomi yang cukup signifikan di Indonesia. Dengan demikian penjualan senjata dan bantuan militer lainnya yang dilakukan kepada Indonesia selama periode ini tentunya tidak terlepas juga dari upaya AS dalam menjamin kepentingan-kepentingan nasionalnya.

Situasi pasca jajak pendapat Timor Timur, nampaknya tidak dapat lagi dihindari oleh AS. Hal ini disebabkan permasalahan ini telah menjadi perhatian dunia, dan pemerintah AS bahkan dipojokkan oleh publiknya sendiri baik melalui ETAN maupun Kongres. Oleh karena itulah akhirnya pemerintah AS terpaksa menerapkan embargo menyeluruh terhadap Indonesia yang selama ini diberikan

¹⁰⁴ Keith R. Legg and James F. Morrison, *op.cit.*,62.

dalam bentuk *security assistance* selama hampir 50 tahun (sejak 1950 – 1999). Presiden Clinton pada tanggal 9 September 1999 menyatakan, “*if Indonesia does not to end the violence it must invite the international community to assist in restoring security.*” Dan pada tanggal yang sama Washington memutus/menghentikan bantuan militer bagi Indonesia sebesar US\$476,000.¹⁰⁵ Namun ternyata jumlah bantuan (*U.S. Security Assistance*) yang dihentikan tersebut berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh penasehat keamanan presiden, Sandi Berger jauh lebih besar dari data tersebut.

*... that what had not already been delivered of about \$40 million in outstanding U.S. government-to-government sales through the Pentagon's Foreign Military Sales (FMS) program and some \$400 million in commercial arms sales would be put on hold. A Defense Department official subsequently said the suspension would halt \$7 million in undelivered FMS items.*¹⁰⁶

Sikap mendua AS ini akhirnya diakui oleh James Rubin, Juru Bicara Deplu AS yang menyatakan bahwa, “*We did the best that could be done under extremely difficult circumstance.*”¹⁰⁷ Sebuah pengakuan yang disampaikan dengan bahasa diplomasi tingkat tinggi untuk mengungkap tentang adanya paradoksal kebijakan bantuan AS terhadap Indonesia dalam menyikapi kasus Timor Timur, yang dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan nilai pragmatisme Amerika.

¹⁰⁵ Ganewati Wuryandari, *Hubungan Indonesia-Amerika Serikat: Aspek Pertahanan Keamanan*, dalam *Hubungan Indonesia Amerika Serikat 1992-2000 (Masa Pemerintahan Presiden Clinton)*, ed. Ratna Shofi Inayati (Jakarta: PPW-LIPI, 2000), 55.

¹⁰⁶ Arms Control Association, *U.S. and EU Suspend Military Ties With Indonesia*, 14 January 2002 <<http://www.armscontrol.org>...>.

¹⁰⁷ Brad Simpson, *op.cit.*, 640.

BAB 5 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan bantuan keamanan AS (*U.S. Security Assistance*) kepada Indonesia (TNI) disebabkan oleh adanya benturan kepentingan nasional AS dan Indonesia pasca pelepasan Timor Timur. Dengan kata lain, kesimpulan ini menunjukkan bahwa dukungan politis dan *security assistance* AS terhadap Indonesia dalam proses integrasi Timor Timur dilakukan karena adanya kesamaan kepentingan (*common interest*) dalam rangka menghadapi ancaman bersama (*common threat*) yaitu komunis. Namun ketika Timor Timur lepas dari Indonesia juga tidak dipungkiri oleh adanya fakta-fakta yang mengharuskan bagi AS untuk menarik dukungannya. Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri AS pada dasarnya bersifat “adaptif” yang tidak terlepas dari nilai “pragmatisme” Amerika. Dari aspek ini Indonesia nampaknya dalam penerapan kebijakan luar negeri tidak jauh berbeda dengan AS. Hal ini tampak antara lain ketika dibawah Soekarno, Indonesia juga pernah menerapkan nilai pragmatisme pada saat menerapkan kebijakan perebutan Irian Barat dengan meminta dukungan Soviet manakala AS menolak memberikan dukungan.

Faktor-faktor dari luar negeri dan dari dalam negeri sangat mempengaruhi sifat adaptif dari kebijakan luar negeri AS dan hal ini sangat menentukan bagi terjadinya suatu perubahan. Kedua pengaruh tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks Timor Timur, dari satu sisi pengaruh dari luar negeri ditunjukkan oleh adanya perubahan situasi global pasca berakhirnya Perang Dingin – menuntut peran AS untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi ke seluruh penjuru dunia yang dilandasi oleh liberalisme yang mengutamakan penghormatan terhadap HAM – sementara disisi lain pengaruh dari dalam negeri ditunjukkan dengan bangkitnya kesadaran warganegara Amerika terhadap solidaritas kemanusiaan – dalam merespon kerusuhan Santa Cruz – yang ditandai oleh berdirinya ETAN (*East Timor Action Network*). Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia dalam upayanya mempertahankan integrasi Timor Timur dinilai salah langkah khususnya terhadap terjadinya pelanggaran HAM berat

pasca jajak pendapat (1999) yang dilakukan oleh milisi pro-integrasi dan diindikasikan TNI terlibat dalam aksi tersebut. Disinilah letak ketidakharmonisan dari kedua belah pihak memuncak yang diikuti oleh dihentikannya dukungan *security assistance* yang selama ini telah diberikan (embargo). Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa kepentingan keamanan AS tidak lagi konvergen dengan kepentingan keamanan Indonesia.

Perubahan kebijakan AS yang dilakukan ini, tidak terlepas dari upaya Amerika dalam menjamin keamanan nasional – yang merupakan bagian dari kepentingan nasionalnya yang bersifat mutlak (fundamental) – melalui upaya penyebaran nilai-nilai demokrasi yang dilandaskan pada liberalisme, di mana penghormatan kepada hak-hak individu dijunjung tinggi. Dari apa yang terjadi dapat pula dilihat terdapat “tiga unsur” kepentingan nasional AS yaitu: (1) keamanan nasional, (2) kepentingan ekonomi global, dan (3) penyebaran demokrasi yang berazaskan penghormatan pada HAM. Yang pertama yakni keamanan nasional merupakan harga mati atau mutlak. Sedangkan antara kepentingan ekonomi global dengan penyebaran demokrasi – dapat disebut sebagai kepentingan nasional yang vital – dijadikan sebagai salah satu alat utama bagi kebijakan luar negeri AS dalam menjamin keamanan nasionalnya.

Dari dua kepentingan nasional yang disebutkan belakangan, prioritasnya akan ditentukan berdasarkan pada ancaman dan tantangan global yang dihadapi dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Suatu saat kepentingan ekonomi global mendapatkan prioritas, dan pada saat lain, prioritas bergeser pada kepentingan penyebaran demokrasi yang dilandasi oleh penghormatan terhadap HAM. Hal ini terlihat ketika proses integrasi Timor Timur ke dalam NKRI tengah berlangsung, pada saat itu kepentingan ekonomi global AS terancam oleh komunis, yang mana komunis menerapkan perjuangan menentang kapitalisme dan berupaya menghancurkannya. Oleh karena itu, Amerika merasa perlu memberikan dukungan penuh kepada Indonesia. Dengan demikian pada dasarnya dukungan ini diberikan dalam rangka skenario global pembendungan komunisme, di mana AS pada saat itu masih terlibat Perang Dingin dengan komunis Soviet. Strategi yang diterapkan pada waktu itu adalah doktrin *containment*, yang dalam penerapannya dikombinasikan dengan program bantuan ekonomi *Marshall Plan* yang semula

diperuntukkan bagi upaya Amerika membenahi perekonomian Eropa Barat yang menjadi aliannya. Perpaduan doktrin pembendungan dan *Marshall Plan* ini kemudian dijadikan sebagai kebijakan luar negeri pembendungan (*policy of containment*) yang selanjutnya dimodifikasi sedemikian rupa menjadi program *U.S. Security Assistance* kepada negara-negara berkembang. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya investasi-investasi AS yang ditanamkan di negara-negara berkembang yang tersebar di seluruh belahan dunia. Dengan demikian kebijakan *U.S. Security Assistance* ini pada dasarnya merupakan salah satu strategi global AS dalam upayanya meningkatkan *capacity building* dibidang *security* bagi negara-negara berkembang, yang mana kepentingan ekonomi AS terdapat dinegara tersebut.

Demokrasi yang didasarkan pada liberalisme memang memberikan dua *out put* yaitu dibidang ekonomi adalah perlunya *free market* yang mana peran pemerintah dibatasi yang kemudian menghasilkan kapitalisme, dan *out put* lain dibidang politik yaitu adanya penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia. Apabila kedua *out put* ini dapat berjalan seiring maka proses demokrasi akan berjalan dengan kondusif, di satu sisi melalui peningkatan peran pasar, investasi akan bergulir ibarat bola salju yang mampu meningkatkan perekonomian nasional yang berujung pada pencapaian kesejahteraan yang tinggi pada seluruh warganegara. Sementara penghormatan terhadap hak-hak individu memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak-hak azasinya secara penuh yaitu meliputi hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh penghasilan yang layak, dan hak untuk mengejar kebahagiaan serta hak-hak politik lainnya yang dijamin oleh konstitusi. Namun di sisi lain kebebasan individu ini acap kali disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan sesaat yang kemudian justru melanggar kebebasan individu pihak lain. Kasusnya sama dengan bergulirnya kesejahteraan yang akan menghasilkan kondisi yang semakin membaik, bergulirnya pelanggaran hak-hak individu akan membuahkan berbagai tindak kekerasan dan tindak kriminal yang meresahkan dan dalam skala yang lebih besar akan menimbulkan perang antar bangsa.

Untuk itulah perlu dibuat aturan, hukum dan perundang-undangan yang bersifat universal. Untuk menjamin agar hukum dapat ditegakkan diperlukan

aparatus keamanan, dan dalam konteks negara maka pembentukan Angkatan Bersenjata menjadi tuntutan mutlak. Di sinilah peran dan arti pentingnya kekuatan Angkatan Bersenjata yang akan memberikan daya tangkal (*deterrence*) bagi negara tersebut dari upaya-upaya tindak pelanggaran kedaulatan oleh negara lain. Kekuatan Angkatan Bersenjata suatu negara memiliki peran yang menentukan dalam rangka menjaga keamanan nasional negara tersebut. Namun Angkatan Bersenjata yang tidak terkontrol justru akan berakibat pada munculnya pemerintahan diktator sebagai bentuk penyalahgunaan kekuatan bersenjata untuk kepentingan kekuasaan. Oleh karena itulah diperlukan pembatasan dan kontrol sipil yang kuat. Untuk keperluan ini maka dibentuk sistem pemerintahan yang saling mengontrol dan berbagi kekuasaan. Trias politika pun hadir untuk memisahkan cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, karena demokrasi yang sesungguhnya terletak pada harmonisasi hubungan antara ketiga cabang kekuasaan tersebut dalam suatu sistem pemerintahan.

Demokrasi seperti itulah yang sejatinya ingin diterapkan dan disebarkan oleh AS. Visi Wilson merupakan salah satu visi universal tentang bagaimana mengimplementasikan sebuah demokrasi yang ideal dan membuahkan harmonisasi antar bangsa. Ia merumuskan visinya dalam kalimat "*peace without victory*," dengan memfokuskan pada upaya menjamin keamanan nasional melalui kebijakan *Liberal democratic internationalism* yang selanjutnya diadopsi oleh Bush dan Clinton pasca Perang Dingin.

Dalam menyikapi kasus Timor Timur, AS yang melihat terjadinya kerusuhan Santa Cruz, telah berupaya melakukan pendekatan-pendekatan HAM secara persuasif. Strategi yang digunakan tidak frontal, IMET diberikan kepada TNI dengan memberikan berbagai pemahaman tentang sistem pemerintahan yang demokratis, dimana hubungan sipil – militer diletakkan dalam konteks pemerintahan yang berdasarkan pada supremasi sipil. IMET diubah formatnya dalam bentuk *Extended – IMET (E-IMET)*, dalam mana hukum humaniter dan penghormatan HAM termasuk dalam mata pelajaran yang diberikan kepada TNI peserta program ini. Namun permasalahan Timor Timur tidak mampu dikelola dengan baik seperti harapan pemerintah AS. Puncaknya adalah ketika terjadi pelanggaran HAM berat di Timor Timur pasca jajak pendapat (1999) yang

dilakukan oleh kelompok pro-integrasi dan TNI diindikasikan terlibat. Sebagaimana fakta yang diungkap oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor Leste {*The Commission of Truth and Friendship (CTF) Indonesia – Timor Leste*} (Maret 2008), telah terjadi pelanggaran HAM berat pada tahun 1999 yang dilakukan baik oleh pihak pro-integrasi – yang didukung secara institusional oleh TNI, Polri dan Pemda – maupun pro-kemerdekaan atas lawan-lawannya. Dengan adanya indikasi – sebelum fakta-fakta terungkap – pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh milisi pro-integrasi dukungan TNI, maka pemerintahan Clinton pada akhirnya menerapkan embargo kepada Indonesia. Seluruh bentuk *U.S. Security Assistance* dihentikan.

Sungguh, Indonesia merupakan salah satu arena (*theater*), yang menggambarkan perubahan kebijakan luar negeri AS khususnya dalam kasus proses integrasi dan lepasnya Timor Timur dari NKRI. Lepasnya Timor Timur merupakan puncak akibat dari adanya benturan kepentingan antara AS dan Indonesia. Dengan demikian penelitian ini telah menjawab pertanyaan penelitian yaitu bahwasanya memang benar telah terjadi perubahan kebijakan luar negeri AS terhadap kasus Timor Timur, di mana pada saat proses integrasi Timor Timur kedalam NKRI (1975) pemerintah AS memberikan dukungan baik politik maupun *security assistance*. Sementara lepasnya Timor Timur dari NKRI disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan luar negeri AS yang adaptif dalam menyikapi kasus Timor Timur yang menggambarkan adanya benturan kepentingan antara kedua belah pihak yang berpuncak pada terjadinya pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat (1999). Situasi ini kemudian diikuti oleh pengumuman pemerintahan Clinton dalam memutus hubungan militer dengan Indonesia dan menghentikan dukungan *security assistance* yang telah diberikan selama hampir 50 tahun. Atau dapat pula dikatakan bahwa dukungan *U.S. Security Assistance* yang diberikan kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia pada dasarnya lebih berorientasi pada keamanan nasional yang menjadi kepentingan nasional mutlak. Orientasi semacam ini memang tepat, sebab setiap negara di dunia dalam konteks diplomasi antar negara akan senantiasa mengutamakan kepentingan nasionalnya, di samping tetap memperhatikan prinsip *mutual benefit* terhadap mitra kerjasama bilateralnya.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ambrose, Stephen E. *Rise to Globalisme: American Foreign Policy Since 1938*, 4th ed. New York: Penguin Books Inc., 1985.
- Combs, Jerald A. *The History of American Foreign Policy*. New York: Alfred A. Knopf, 1986.
- Deconde, Alexander. *A History of American Foreign Policy*. New York: Charles Scripner's Sons, 1963.
- Fahlevi, M. *Soedirman & Sudirman*. Jakarta: Pusat Sejarah TNI, 2004.
- Gardner, Paul F. *Shared Hopes Separate Fears: Fifty Years of U.S.-Indonesian Relation*. Boulder, Colorado: Westview Press, 1997.
- Inayati, Ratna Shofi dan Gayatri, Irine Hiraswati. *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat. Dalam Hubungan Indonesia Amerika Serikat 1992-2000 (Masa Pemerintahan Presiden Clinton)*, ed. Ratna Shofi Inayati. Jakarta: PPW-LIPI, 2000.
- Kagan, Robert. *Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order*. Vintage Books: New York, 2004.
- Kegley, Charles W. Jr. *Controversies in International Relations Theory: Realism and Neoliberal Challenge*. New York: St. Martin's Press, 1995.
- Kegley, Charles J. and Wittkopf, Eugene R. *World Trend and Transformation Politics*, 8th ed. Boston: Bedford/St. Martin's, 2001.
- Kivimaki, Timo. *US-Indonesian Hegemonic Bargaining Strength of Weakness: US Foreign Policy and Conflict in the Islamic World*. London: Ashgate, 2003.
- Legg, Keith R. and Marison, James F. "The Formulation of Foreign Policy." In *Perspective on World Politics*, 2nd ed, ed. Richard Little & Michael Smith. London: Croom Helm in association with Open University Press, 1992.
- Leiber, Robert J. *The American Era: Power and Strategy for the 21st Century*. Cambridge University Press, 2005.
- Minderop, Albertine. *Pragmatisme Amerika: Di Bawah Bayang-bayang C. Pierce, W. James, J. Dewey*. Jakarta: Obor, 2005.
- Morgenthau, Hans J. "Another "Great Debate": The National Interest of the United States." in *Classics of International Relation*. 3rd ed, ed. John A. Vasquest. New Jersey: Prentice Hall, 1966.
- Romber, Nicholas D., Jr. "John Winthrop 1588 – 1649." In *The Heath Anthology of American Literatur*. Vol 1, 2nd ed, ed. Paul Lauter. Lexington: D.C. Heath and Company, 1994.

- Purnawa, IG. ed., *Sistem Keamanan Nasional Indonesia: Sebuah Sumbangan Pemikiran*. Jakarta: PPSN, 2005.
- Security Assistance Community. FY 1980 Security Assistance Program, *Resource: Security Assistance news from the Military Departments*. T.k., T.t.
- Smith, Tony. *America's Mission: The United States and the Worldwide Struggle for Democracy in the Twentieth Century*. T.k.: A Twentieth Century Fund Book, Princeton University Press, 1994.
- Smith, Gaddish. *George Bush*. In *The Presidents: A Reference History*, 2nd ed., ed. Henry F. Graff. New York: Charles Scribner's Sons, 1996.
- Tindall, George Brown. *America a Narrative History*. Vol 1. New York, London: W.W.Norton & Company, 1984.
- The Commission of Truth and Friendship (CTF) Indonesia – Timor-Leste. *Final Report: Per Memoriam Ad Spem*. Denpasar: Commission of Truth and Friendship Indonesia – Timor-Leste, 2009.
- The Defence Institute of Security Assistance Management. *The Management of Security Assistance*, 26th ed. Ohio: DISAM, 2006.
- Wright, Joseph Coton. *Oil: Demand, Supply and Trends in the United States*. T.k.: University of California Berkeley, T.t.
- Wuryandari, Ganewati. *Hubungan Indonesia-Amerika Serikat: Aspek Pertahanan Keamanan. Dalam Hubungan Indonesia Amerika Serikat 1992-2000 (Masa Pemerintahan Presiden Clinton)*, ed. Ratna Shofi Inayati. Jakarta: PPW-LIPI, 2000.

Jurnal

- Doyle, Michael W. "Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs." *Philosophy and Public Affairs*. Vol. 12, no. 3 (Summer, 1983).
- Muthalib, Alfian. Alfian Muthalib, "Politik Luar Negeri Maksimalis Amerika," *Nasion, PPSN*. Volume 5, no. 1 (2008).
- Simpson, Brad. "Solidarity in an Age of Globalization: The Transnational Movement for East Timor and U.S. Foreign Policy." *Peace History Society and Peace and Justice Studies Association: Peace & Change*. Vol. 29, no. 3&4 (Juli 2004).
- Siswanto. "Kebijakan Amerika dan Indonesia terhadap Timor Timur dalam Perspektif Containment Policy." *Jurnal Study Amerika*. Vol.V, (Agustus – Desember 1999).

Dokumen Pemerintah

American Embassy & Deplu RI. "Exchange of Notes: Sale of Military Equipment, Materials, and Services," August 13, 1958. TIAS no. 4095. *U.S. Treaties and Other International Agreements*.

American Embassy & Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Serikat. "Exchange of Notes: U.S. – Indonesia, Security Assistance for Indonesia," Jakarta, 15 Agustus 1950. TIAS no. 2306. *U.S. Treaties and Other International Agreements*.

American Embassy. "Indonesia Military Assistance," January 12, 1953. TIAS no. 2768. In Amending Agreement of August 15, 1959, *U.S. Treaties and Other International Agreements*.

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Nota Diplomatik "505 Agreement,"* No. D.638/PO/EX/2006/36 (Jakarta, 6 September 2006).

Departemen Pertahanan RI, "Record program IMET Tahun 1971 – 2008" (Jakarta: Ditkorsin Ditjen Strahan, 2009).

Embassy of Indonesia Washington D.C. "Proposal Amendment U.S. Security Assistance 15 August 1950," 5 January 1953. In Amending Agreement of August 15, 1950. TIAS no. 2768. *U.S. Treaties and Other International Agreements*.

Publikasi Elektronik

Arms Control Association. *U.S. and EU Suspend Military Ties With Indonesia*. Tk.: Tp., T.t. 14 January 2002 <<http://www.armcontrol.org> ...>.

Burr, William and Evans, Michael L, ed. "Memorandum for the President." In *East Timor Revisited: Ford and Kissinger Gave Green Light to Indonesia's Invasion of East Timor, 1975*. National Security Archive Electronic Briefing Book, no.62. 21 March 2009 <<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/...>>.

----- "Memorandum of Conversation President Ford with President Soeharto in Laurel Cabin, Camp David, Maryland, July 5, 1975." In *East Timor Revisited: Ford and Kissinger Gave Green Light to Indonesia's Invasion of East Timor, 1975*, 3–6. National Security Archive Electronic Briefing Book, no.62. 21 March 2009 <<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/...>>.

----- "Telegram US Embassy Jakarta to Secretary of State." In *East Timor Revisited: Ford and Kissinger Gave Green Light to Indonesia's Invasion of East Timor, 1975*. National Security Archive Electronic Briefing Book, no.62. 21 March 2009 <<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/...>>.

- Chomsky, Noam. "East Timor Retrospective," *Le Monde diplomatique* (October 1999). 20 January 2009 <<http://www.chomsky.info/articles/199910-.htm>>.
- Elliot, Paul D. "The East Timor Dispute." *The International and Comperative Law Quarterly*. Vol. 27, no. 1 (Jan., 1978). 2 December 2009 <<http://www.jstor.org/...>>.
- ETAN, *Santa Cruz Massacre*. T.k.: T.p., T.t. 10 Januari 2002 <<http://www.etan.org/timor/SntaCRUZ.htm>>.
- Lawless, Robert. "The Indonesian Takeover of East Timor." *University of California: Asian Survey*. Vol. 16, no. 10 (Oct. 1976). 2 December 2009 <<http://www.jstor.org/stable/2643535>>.
- Nevins, Joseph. "The Making of "Ground Zero" in East Timor in 1999: An Analysis of International Complicity in Indonesia's Crimes." *Asian Survey: The Legacy of Violence in Indonesia*. Vol. 42. no. 4. University of California Press. (Jul. – Aug., 2002). 2 December 2009 <<http://www.jstor.org...>>.
- NSC-68 Conclusions. *NSC-68 of April 14, 1950*. 8 March 2009 <<http://history.sandiego.edu/gen/20th/nsc68.html>>.
- (*Time in partnership with CNN*. "Total Diplomacy" (New York), 13 Maret 1950). 8 March 2009 <<http://www.time.com/time/printout/8816,812120,00.htm>>.
- (*Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, "Insiden Dili"). 10 January 2002 <<http://id.wikipedia.org/...>>.
- (*Wikipedia, the free encyclopedia*, "1999 East Timorese crisis."). 10 January 2002 <<http://en.wikipedia.org...>>.

Lampiran 1:

Daftar Perlengkapan Militer (*MAP Inventory*) yang diberikan sebagai bantuan hibah *Military Assistance Program (MAP)* berdasarkan perjanjian tahun 1950 dan amandemen tahun 1953. *U.S. Treaties and Other International Agreements.*

(Sumber: Arsip Departemen Pertahanan RI).



MAP INVENTORY

PAGE NO. 1

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
15100000007F51	AIRCRAFT FIGHTER F51	\$150,000.00	DID	2/71			
15100000007F51	AIRCRAFT FIGHTER F-51	\$200,000.00	DID	1/72			
15100000007F51	AIRCRAFT FIGHTER F51	\$185,000.00	DID	5/72			
15100000007C47	AIRCRAFT CARGO TC-47		DID	1/72			
15100000000C47	AIRCRAFT CARGO C47	\$ 57,000.00	DID	9/71			64-0065
15100000000C47	AIRCRAFT CARGO C47		DID	10/70	3/JAN 80		64-0066
					3/JAN 80		
					4/MAY 91	0	64-1043
100000000C47	AIRCRAFT CARGO C47		DID	2/72			
15100000000C47	AIRCRAFT CARGO C47		DID	1/69			
1510000000733A	AIRCRAFT TRAINER T-33A		DID	17/72	1/JAN 80		64-0065
1510000000734A	AIRCRAFT TRAINER T-34A	\$ 17,360.00	DID	50/63	6/JUL 80		64-0067
					14/APR 89	30	64-8032
1510000000741D	AIRCRAFT TRAINER T41D	\$ 17,000.00	DID	9/69			
1510000000741D	AIRCRAFT TRAINER T41D	\$ 20,000.00	DID	6/70			
15100000007565	AIRCRAFT OBSERVATION	\$ 18,500.00	DID	2/63			
1510000000761D	AIRCRAFT UTIL BF-16D		DID	2/63			
1520000000734D	HELICOPTER OH-34D (HUS-1)	\$465,000.00	DID	1/63			
1520000000734D	HELICOPTER OH-34D	\$ 30,000.00	DID	12/72			8
1520000000734D	HELICOPTER OH-34D		DID	3/78			3

4 Oct 93 P. 100

MAF INVENTORY

<u>NSN</u>	<u>NONEXHAUSTIVE</u>	<u>PRICE/UNIT</u>	<u>SERVICE</u>	<u>ISSUED</u>	<u>DISPOSAL</u>	<u>BALANCE</u>	<u>REMARKS</u>
1920002238877	TESTER STARTER TORQUE	\$ 2,107.00	DID	2			
281000R182084	ENGINE RECP-1820-84		DID	12			
281000R183090	ENGINE RECP-1830-900	\$ 8,751.00	PID	5			
2810001096150	ENGINE RECP-10-860	\$ 5,700.00	DID	2			
2810008573272	ENGINE RECP-0470-F18-O-1A	\$ 4,000.00	BID	1			
2840000333655	ENGINE JET-0733/435	\$ 47,999.00	DID	5			
2840006758061	ENGINE JET-0758/6E1	\$ 797.00	DID	2			
0000000000000	TANK LANDING SHIP	\$ 94,750.00	PID	4	17Feb-81	3	64-1031
0000000000000	PHOTO-CRAFT	\$ 33,333.00	PID	3	27Feb-81	1	64-1031
0000000000000	PATROL-GUNBOAT	\$ 37,000.00	PID	3	1/Oct-81	1	64-2009
					1/Feb 81	1	64-1031
0000000000000	AUXILIARY OCEAN TUGS	\$ 814,000.00	PID	1			
0000000000000	LANDING CRAFT MECHANIZED	\$ 25,500.00	PID	2			
0000000000000	LANDING CRAFT VER/PER		PID	18			
0000000000000	LANDING CRAFT VER/PER	\$ 25,000.00	PID	4			
0000000000000	LAND. CRAFT RFR SEIF ACT/0V	\$ 88,762.00	PID	1			
194000A040CSU	BONT PATROL 40 FT(LCPL MK4)		BID	7			

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
1940002876962	BOAT PENEU 3 MAN	\$ 366.00	BIDN	10			
1940002876962	BOAT PENEU 3 MAN	\$ 851.00	BIDN	2			
1940002876962	BOAT PENEU 3 MAN	\$ 851.00	BIDN	35			
1940002876962	BOAT PENEU 3 MAN	\$ 851.00	PIDQ	10			
1940002876962	BOAT PENEU 3 MAN	\$ 1,171.00	BIDN	15			
1940002876962	BOAT PENEU 3 MAN	\$ 1,171.00	BIDN	24			
1940003520584	BOAT LNDG INFET 10 MONCO 2		BIDZ	1			
1940005405609	BOAT LNDG INFET 15	\$ 1,072.00	BIDN	75			
1940005405609	BOAT LNDG INFET 15	\$ 1,072.00	BID	40			
1940005405609	BOAT LNDG INFET 15	\$ 1,072.00	BIDN	10			
1940005405609	BOAT LNDG INFET 15	\$ 1,925.00	BIDN	10			
1740008336263	TRACTOR A/C TDW INTERMED	\$ 5,856.00	DID	5			
2310006500203	COTO SEDAN LIGHT 4X2	\$ 1,565.00	BID	6	2/Oct 81		64-2009
2310006500203	COTO SEDAN LIGHT 4X2	\$ 1,500.00	KID	3	2/Mar 83		64-3019
2310007892205	AMBUULANCE 1 TON 4X4 M615	\$ 5,646.00	DIDD	1	2/Aug 88	0	64-8017
2310007892205	AMBUULANCE 1 TON 4X4 M615	\$ 5,776.00	BIDJ	2	1/Dec 89		64-9023
2310007892205	AMBUULANCE 1 TON 4X4 M615	\$ 5,776.00	BIDS	1			
2310005424634	TRUCK AMB 3/4 TON M43B1	\$ 2,000.00	BIDZ	3	1/Dec 83	2	64-4007
2310008358516	TRUCK AMB 3/4 TON M43		BIDA	1			
2310008358516	TRUCK AMB 3/4 TON M43		BIDH	1	1/Mar 83	0	64-3019

MAP INVENTORY

PAGE NO: 4

NSN	REMARKS/TYPE	PRICE/UNT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
23100085886	TRUCK 1/4 TEN-AMB-H170	\$ 2,100.00	BID	62	31/Mar 83	59	64-3019
2310001779256	TRUCK-AMB 1/4-TEN-W718A1	\$ 3,930.00	BIDM	3			
2310001779256	TRUCK AMB 1/4 TON W718A1	\$ 4,156.00	BIDM	9			
2310001779256	TRUCK-AMB 1/4-TEN-W718A1	\$ 6,931.00	BIDB	0			
2310001779256	TRUCK AMB 1/4 TON W718A1	\$ 6,937.00	BIDM	2			
2310001779256	TRUCK-AMB 1/4-TEN-W718A1	\$ 9,955.00	BIDR	21	17/Sep 88	21	64-8018
2310009216369	AMBULANCE 1 1/2 T X W725	\$ 5,025.00	PIDR	1	1/Oct 81	0	64-2009
2310009216369	AMBULANCE 1 1/2 T X W725	\$ 5,025.00	PIDQ	2	1/Sep 88		64-8018
2310009216369	AMBULANCE 1 1/2 T X W725	\$ 5,025.00	BIDA	215	1/Dec 88	0	64-8037
2320009216365	TRK CLO 1 1/2 TON X W715	\$ 4,050.00	BIDG	3	2/Mar 83		64-3019
2320009216365	TRK CLO 1 1/2 TON X W715	\$ 4,050.00	BIDA	634	1/Dec 83	0	64-3007
2320009216365	TRK-650 1 1/2-TEN-X-W715	\$ 4,850.00	BIDA	40	10/Oct 81		64-2009
2320009216365	TRK-650 1 1/2-TEN-X-W715	\$ 4,850.00	BIDA	40	2/Dec 88		64-8037
2320009216365	TRK-650 1 1/2-TEN-X-W715	\$ 4,850.00	BIDA	40	11/Jun 83	17	64-9006
2320009216365	TRK-650 1 1/2-TEN-X-W715	\$ 4,850.00	BIDA	40	2/Sep 92	15	60-3006
232000ACN0002	CAR ASVD COMMAND 110182	\$ 76,629.00	BIDB	1			
232000ACN0003	CAR ASVD W/2.7.62MG 110995	\$ 82,637.00	BIDB	6			
232000ACN0004	CAR ASVD W/7.62/50MG 110280	\$ 88,788.00	BID	6			
2320008358646	RECOV VEH FTRAC W74	\$ 67,000.00	BID	2			
0000000000000	TRUCK 1/4 TON CARGO		BID	412			
0000000000000	TRUCK 1/4-TEN-CARGO		PID	101	5/Dec 83		64-1007

HAP INVENTORY

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
2320001779258	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A2	\$ 3,238.00	BIDK	5	5/Mar 83	0	64-3019
2320001779258	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A2	\$ 3,238.00	BIDH	3	3/Dec 83	0	64-4007
2320001779258	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A2	\$ 3,238.00	BIDM	160			
2320001779258	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A2	\$ 3,238.00	BID	10	10/Oct 81	0	64-2009
2320001779258	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A2	\$ 3,238.00	BIDT	3	3/Dec 83	0	64-4007
2320001779258	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A2	\$ 3,760.00	BIDS	8	8/Dec 88	0	64-8037
2320001779258	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A2	\$ 3,760.00	BIDK	4	4/Dec 88	0	64-8037
2320001779258	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A2	\$ 6,292.00	BIDZ	1	1/Oct 81	0	64-2009
2320001779258	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A2	\$ 6,292.00	BIDB	34	1/Jan 88	33	Abandon
2320001779258	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A2	\$ 6,996.00	BIDB	66			
2320001779258	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A2	\$ 6,345.00	BIDH	27	27/Dec 88	0	64-8037
2320001779258	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A2	\$ 6,945.00	BIDG	18	18/Sep 88	0	64-8018
2320001779258	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A2	\$ 9,537.00	BIDR	61	21/Apr 89	40	abandon
2320005424783	TRUCK UTIL 1/4 TON M151		BIDZ	4	6/Sep 92	34	60-3005
2320005424783	TRUCK UTIL 1/4 TON M151		BIDZ	4	4/Dec 83	0	64-4007
2320007631092	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A1	\$ 3,196.00	BIDJ	19	19/Oct 81	0	64-2009
2320007631092	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A1	\$ 3,196.00	BIDA	2	2/Oct 81	0	64-2009
2320007631092	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A1	\$ 3,196.00	BIDG	8	8/Oct 81	0	64-2009
2320007631092	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A1	\$ 3,196.00	BIDD	2	2/Oct 81	0	64-2009
2320007631092	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A1	\$ 1,792.00	BIDM	94	3/Mar 83		64-3019
					20/Dec 83		64-4007
					21/Dec 88		64-8018
					4/JUL 83		Abandon
					1/Sep 88	45	Abandon
					14/Jan 92	21	64-1041
					6/Sep 92	15	60-3006
2320007631092	TRUCK UTIL 1/4 TON M151A1	\$ 1,920.00	BIDZ	4	4/Mar 83	0	64-3019

MAP INVENTORY

PAGE NO: 6

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
2320007631092	TRUCK UTIL 1/4 TON HISSAL		DIDD	5	5/Mar 83	0	64-3019
2320007631092	TRUCK UTIL 1/4 TON HISSAL		BID	244			
2320008358318	TRUCK UTIL 1/4 TON HEB		BID	50	3/Oct 81		64-2009
					6/Mar 83		64-3019
					4/Dec 83	0	64-4007
2320008358319	TRUCK UTIL 1/4 TON HEB	\$ 2,615.00	KID	20	1/Oct 81		64-2009
					4/Mar 83		64-3019
					9/Dec 83		64-4007
					4/Jul 81	2	Abandon
2320008358319	TRUCK UTIL 1/4 TON HEB		BID	15			
2320009350808	TRUCK UTIL 1/4 T H06A2 12V	\$ 2,450.00	DID	5	1/Aug 81	4	Abandon
2320009990551	TRUCK CGO 1/4 T LAND ROVER	\$ 1,300.00	PID	40	1/Oct 81		64-3009
					17/Mar 83	38	64-3019
0000000000000	TRUCK CARGO 3/4 TON	\$ 4,500.00	BID	678	12/Oct 81		64-2009
					35/Mar 83		64-3019
					12/Dec 83		64-4007
					12/Sep 88		64 8018
					18/Dec 88		64-8037
					6/Jul 81	589	Abandon
0000000000000	TRUCK CARGO 3/4 TON	\$ 4,500.00	PID	9	12/Sep 92	577	64-3006
					9/Oct 81	0	64-2009
2320005424632	TRUCK CGO 3/4 TON H37B1 H4*		BID	1	17/Mar 83	0	64-3019
2320005424636	TRUCK CGO 3/4 TON H37B1 H4*	\$ 4,273.00	KID	11	11/Mar 83	0	64-3019

MAP INVENTORY

NSN	NOMENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
2320005424636	TRUCK CGO 3/4 TON M1781 WOV	\$ 4,236.00	BID	2	2/Feb 81	0	64-7030
2320008358323	TRUCK CGO 3/4 TON M37 WV	\$ 4,500.00	KID	4	4/Oct 81	0	64-2009
0000000000000	TRUCK 3/4 TON AMBULANCE	\$ 1,000.00	PTD	5			
2320005647887	TRUCK CGO 1 TON M601	\$ 3,115.00	BIDH	111	4/Mar 83		64-3019
					37/Dec 83		64-4007
					32/Sep 88		64-8018
					1/Jun 89	37	64-9008
2320005647887	TRUCK CGO 1 TON M601	\$ 3,115.00	BID	189			
2320005647887	TRUCK CGO 1 TON M601	\$ 3,805.00	BID	2	2/Jun 89	0	64-9008
2320005677887	TRUCK CGO 1 TON M601	\$ 4,236.00	BIDI	1	3/Mar 83	0	64-3019
2320005677887	TRUCK CGO 1 TON M601	\$ 4,236.00	BIDH	1	1/Mar 83	0	64-3019
2320005677887	TRUCK CGO 1 TON M601	\$ 4,236.00	BIDS	5	5/Mar 83	0	64-3019
2320005677887	TRUCK CGO 1 TON M601	\$ 4,236.00	KIDS	1	1/Mar 83	0	64-3019
2320005677887	TRUCK CGO 1 TON M601	\$ 4,236.00	BIDH	1	1/Mar 83	0	64-3019
2320007889876	TRUCK CGO 1 TON M601 WOV	\$ 3,975.00	DIDD	1	1/Mar 83	0	64-3019
0000000000000	TRUCK 2 1/2 TON CGO	\$ 5,210.00	BID	349	24/Oct 81		64-2009
					16/Mar 83		64-3019
					3/Dec 83		64-4007
					6/Sep 88	280	64 8018
2320000771616	TRK CGO 2 1/2 TON M35A2 WOV	\$ 9,380.00	BIDS	9	9/Mar 83	0	64-3019
2320000771616	TRK CGO 2 1/2 TON M35A2 WOV	\$ 8,748.00	BIDS	43	3/Mar 83		64-3019
					4/Jul 83	136	Abandon
					31/Sep 82	105	60-3006
2320000771616	TRK CGO 2 1/2 TON M35A2 WOV	\$ 9,380.00	BID	1	1/Mar 83	0	64-3019

MAP INVENTORY

SN	NO/BLK/ABRE	PRICE/UNT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
2320000771616	TRK CGO 2 1/2 T M35A2 WOV	\$ 9,380.00	BIDK	1	1/Mar 83	0	64-3019
2320000771616	TRK CGO 2 1/2 T M35A2 WOV	\$ 9,380.00	BID	5	5/Feb 81	0	64-1030
2320000771616	TRK CGO 2 1/2 T M35A2 WOV	\$ 7,530.00	BIDK	8	8/Dec 88	0	64-8037
2320000771616	TRK CGO 2 1/2 T M35A2 WOV	\$ 17,611.00	BIDB	4	4/Oct 81	0	64-2009
2320000771616	TRK CGO 2 1/2 T M35A2 WOV	\$ 18,985.00	BID	16	16/Mar 83	0	64-3019
2320000771616	TRK CGO 2 1/2 T M35A2 WOV	\$ 18,663.00	BIDH	15	15/Oct 81	0	64-2009
2320000771616	TRK CGO 2 1/2 T M35A2 WOV	\$ 18,929.00	BIDK	6	6/Feb 81	0	64-1030
2320000771617	TRK CGO 2 1/2 T M35A2 WOV	\$ 20,384.00	BIDH	2	2/Feb 81	0	64-1030
2320000771617	TRK CGO 2 1/2 T M35A2 WOV	\$ 20,384.00	BIDK	4	4/Feb 81	0	64-1030
2320005425633	TRK CGO 2 1/2 T M35A1		PIDO	54	51/JAN 80		64-0009
					2/JAN 80		64-0070
2320005425633	TRK CGO 2 1/2 T M35A1		BIDH	2	1/JAN 80	0	64-0071
2320005425633	TRK CGO 2 1/2 T M35A1		BIDH	13	2/Sep 88	9	64-8018
2320005425633	TRK CGO 2 1/2 T M35A1		BIDF	60	41/Mar 83	19	64-3019
2320005425634	TRK CGO 2 1/2 T M35A1		BIDH	3	2/JUN 83	17	Abandon
2320005706541	TRK CGO 2 1/2 T M602 WOV	\$ 7,657.00	BIDJ	11			
2320005706541	TRK CGO 2 1/2 T M602 WOV	\$ 7,657.00	BIDA	5			
2320005706541	TRK CGO 2 1/2 T M602 WOV	\$ 7,657.00	DIDB	1			
2320005706541	TRK CGO 2 1/2 T M602 WOV	\$ 7,657.00	BIDJ	13			
2320005706541	TRK CGO 2 1/2 T M602 WOV	\$ 7,657.00	BIDA	1			
2320005706541	TRK CGO 2 1/2 T M602 WOV	\$ 11,954.00	BIDA	4	4/JUN 89	0	64-9008
2320006470505	TRK CGO 2 1/2 T M36 W/A		PIDO	1			
2320008350463	TRK CGO 2 1/2 T M35 WOV		BIDJ	5	2/JAN 80		64-0069
					2/JAN 80		64-0071
					1/Mar 83	0	64-3019

MAP INVENTORY

NSN	NOVENCLATURE	PRICE/UNT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
2320008358464	TRK CGO 2 1/2 T M35 WOV		PTDQ	1	2/Mar 83	5	64-3019
0000000000000	TRK 2 1/2 TON DORP		PTD	6	1/Jun 81	0	64-0070
2320000771631	TRK VS 2 1/2 T M60VAL WOV	\$ 9,791.00	BIDS	1	1/Feb 81	0	64-1030
2320000771631	TRK TNK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 12,151.00	BID	4			
2320000771631	TRK TNK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 12,765.00	BIDS	3	3/Mar 83	0	64-3019
2320000771631	TRK TNK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 15,626.00	BIDR	1	1/Sep 88	0	64-8018
2320000771631	TRK TNK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 15,626.00	BIDM	4			
2320000771631	TRK TNK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 12,501.00	BIDS	1			
2320000771631	TRK TNK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 12,501.00	BIDM	6			
2320000771631	TRK TNK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 12,501.00	BIDK	2			
2320000771631	TRK TNK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 26,254.00	BIDS	8			
2320000771631	TRK TNK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 27,415.00	BIDM	2	1/Jun 89	1	64-8024
2320000771631	TRK TNK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 27,415.00	BIDG	1	1/Jun 89	0	64-9009
2320000771633	TRK TNK WTR 2 1/2 T M50A2 WE	\$ 11,971.00	BIDM	6			
2320000771633	TRK TNK WTR 2 1/2 T M50A2 WE	\$ 15,445.00	BIDG	4	1/Sep 88	3	64-8018
2320001418235	TRK TNK FS 2 1/2 T M49C WOV	\$ 9,647.00	KIDG	1	1/feb 81	0	64-1030
2320001418235	TRK TNK FS 2 1/2 T M49C WOV		PTDQ	4	1/Mar 83	3	64-3019
2320009734213	TRK TNK FUEL SWC 7611C W/E	\$ 12,151.00	BIDJ	2			
2320009734213	TRK TNK FUEL SWC	\$ 12,151.00	DIDD	1			

MAP INVENTORY

PAGE NO.9

NSN	NOTENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
2320008358464	TRK CGO 2 1/2 T M35 MOW		PIDQ	1	2/Mar 83	5	64-3019
0000000000000	TRK 2 1/2 TON DUMP		PID	6	1/Jun 81	0	64-0070
2320000771631	TRK VS 2 1/2 T M609AL MOW	\$ 9,797.00	BIDS	1	1/feb 81	0	64-1030
2320000771631	TRK TRK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 12,152.00	BID	4			
2320000771631	TRK TRK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 12,765.00	BIDS	3	3/Mar 83	0	64-3019
2320000771631	TRK TRK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 15,624.00	BIDK	1	1/Sep 88	0	64-8018
2320000771631	TRK TRK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 15,624.00	BIDM	4			
2320000771631	TRK TRK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 12,501.00	BIDS	1			
2320000771631	TRK TRK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 12,501.00	BIDM	6			
2320000771631	TRK TRK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 12,501.00	BIDK	2			
2320000771631	TRK TRK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 26,254.00	BIDB	8			
2320000771631	TRK TRK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 27,416.00	BIDM	2	1/Jun 89	1	64-9024
2320000771631	TRK TRK FUEL 2 1/2 T M49AC2	\$ 27,415.00	BIDG	1	1/Jun 89	0	64-9009
2320000771633	TRK TRK WTR 2 1/2 T M50A2 WE	\$ 11,971.00	BIDM	6			
2320000771633	TRK TRK WTR 2 1/2 T M50A2 WE	\$ 15,445.00	BIDG	4	1/Sep 88	3	64-8018
2320001418235	TRK TRK FS 2 1/2 T M49C MOW	\$ 9,617.00	KIDE	1	1/feb 81	0	64-1030
2320001418235	TRK TRK FS 2 1/2 T M49C MOW		PIDQ	4	1/Mar 83	3	64-3019
2320009734213	TRK TRK FUEL SVC 7611C W/E	\$ 12,152.00	BIDJ	2			
2320009734213	TRK TRK FUEL SVC	\$ 12,152.00	DIDD	1			

MAP INVENTORY

PAGE NO.10

NSN	NOUENCLATURE	PRICE/UNT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
000000000000	TRK 2 1/2 T TRK-TRAC	\$ 9,556.00	BID	34			
000000000000	TRK 2 1/2 T WRECKER	\$ 11,000.00	PTD	1			
232008358336	TRK WCR 2 1/2 T N108	\$ 13,832.00	BID	1			
000000000000	TRK 5 TON CARGO	\$ 10,000.00	BID	1			
232008358336	TRK DUMP 5T M51 MOW		PTDQ	22	2/Dec 83	64-4007	
					14/Dec 84	64-5006	
232008358337	TRK DUMP 5T M51 MOW		PTDQ	6	6/Mar 83	64-3019	
2320000508978	TRK TRAC 5T XH818 MW	\$ 15,318.00	BID	4	3/Jun 89	64-9024	
2320000508978	TRK TRAC 5T XH818 MW	\$ 15,486.00	BIDJ	4			
2320000508978	TRK TRAC 5T XH818 MW	\$ 16,063.00	BIDH	5	1/Jun 89	64-9009	
2320000508978	TRK TRAC 5T XH818 MW	\$ 44,155.00	BIDH	2	2/Oct 81	64-2009	
2320000508984	TRK TRAC 5T XH818 MW	\$ 14,831.00	BIDJ	3	3/Feb 87	Abandon	
2320000508984	TRK TRAC 5T XH818 MW	\$ 14,831.00	BIDA	5			
2320000508984	TRK TRAC 5T XH818 MW	\$ 12,960.00	BIDJ	4			
2320000559260	TRK TRAC 5T M52A2 MOW	\$ 14,091.00	BID	2	2/Oct 81	64-2009	
2320000559261	TRK TRAC 5T M52A2 MOW	\$ 11,957.00	BID	2	2/Oct 81	64-2009	
2320000559261	TRK TRAC 5T M52A2 MOW	\$ 14,813.00	DIDD	1	1/Feb 81	64-1030	
2320000867879	TRK TRAC 5T M52A1 MOW		DIDD	1	1/Oct 81	64-2009	

MAP INVENTORY

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
2320000510489	TRK WRECKER 5 TON X4816	\$ 27,824.00	DIDD	4			
2320000510489	TRK WRECKER 5 TON X4816	\$ 27,824.00	BIDJ	2			
2320000510489	TRK WRECKER 5 TON X4816	\$ 30,680.00	BIDJ	4			
2320000510489	TRK WRECKER 5 TON X4816	\$ 30,680.00	BIDC	1	1/Dec 83	0	64-4007
2320000510489	TRK WRECKER 5 TON X4816	\$ 30,680.00	BIDS	3			
2320000510489	TRK WRECKER 5 TON X4816	\$ 30,680.00	BIDH	2			
2320000510489	TRK WRECKER 5 TON X4816	\$ 27,824.00	BIDH	2			
2320000510489	TRK WRECKER 5 TON X4816	\$ 70,130.00	BIDH	2			
2320000510489	TRK WRECKER 5 TON X4816	\$ 72,160.00	BIDH	2	1/Jan 89	1	64-9009
2320000559258	TRK WRECKER 5 TON H513A2	\$ 14,767.00	BIDS	3	3/feb 81	0	64-1030
2320004450856	TRK WRECKER 5 TON H513 HW		BIDZ	3	1/Jan 80		64-0071
					1/Jan 89	1	64-9024
2320000358639	TRK TRAC WKR MDN 5 TON H246		BIDZ	2	2/Jan 80	0	64-0071
2320000358325	TRK WKR MDN 5 TON H62 HW		PIDQ	1	1/Jan 80	0	64-0069
2320000358325	TRK WKR MDN 5 TON H62 HW		BIDZ	8	1/Jan 80		64-0070
					1/Jan 80		64-0071
					2/Jan 80		64-0072
					1/Jan 80		64-0073
					1/feb 81		64-1030
					2/Mar 83	0	64-3019
2320002035709	TRK TANK OIL SVC HCL	\$ 16,046.00	DID	2			
2320007235070	TRK TR AS 32 RS	\$ 33,788.00	DID	1			
2320007235070	TRK TR AS 32 RS	\$ 33,788.00					

MAP INVENTORY

PAGE NO.12

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
232000TRC1203	TRK CGO 1/2 T 4X2 4800 GVW	\$ 2,000.00	BIDZ	2			
232000TRC1204	TRK CGO 1 TON 4X2 5800 GV	\$ 2,200.00	BIDZ	10			
232000TRC1206	TRK CGO 1 T 4X2 4DR 5800 GVW		BIDZ	1			
232000TRC1251	TRK CGO 6 T 19000 GVW IRC	\$ 16,756.00	PIDQ	7			
232000TRC1251	TRK CGO 6 T 19000.GVW IRC	\$ 16,756.00	PIDB	2			
232000TRC2204	TRK CGO 1 TON 4X4 7000 GVW	\$ 3,200.00	BIDM	68	8/Jun 89	60	64-9008
232000TRC2204	TRK CGO 1 TON 4X4 7000 GVW	\$ 3,750.00	BIDM	68			
232000TRC2204	TRK CGO 1TON DODGE PW WAGON	\$ 5,670.00	BIDB	17			
232000TRC2204	TRK CGO 1TON DODGE PW WAGON	\$ 6,330.00	BIDB	20			
232000TRC2204	TRK CGO 1TON DODGE PW WAGON	\$ 6,557.00	BIDB	14			
232000TRC2204	TRK CGO 1 TON CHEVROLET/GH	\$ 6,268.00	BIDM	17			
232000TRC2204	TRK CGO 1TON DODGE PW WAGON	\$ 6,609.00	BIDB	4			
232000TRC2204	TRK CGO 1 TON CHEVROLET/GH	\$ 6,395.00	BIDR	52			
232000TRC2204	TRK CGO 1 TON CHEVROLET/GH	\$ 6,458.00	BIDR	52			
232000TRC2204	TRK CGO 1TON DODGE PW WAGON	\$ 6,394.00	BIDB	3	1/Jun 89	2	64-9008
232000TRC1251	TRK DUMP 5 L/2T 4X2 19000 GVW	\$ 3,086.00	BID	120	12/Mar 83		64-3019
					3/feb 87		Abandon
					11/Jun 89		64-9009
					16/Jun 89	78	64-9024

MAP INVENTORY

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
232000TKD1551	TRK DUMP 5 1/2T 4X2 19000 GVW \$ 4,800.00		PID	2	2/Mar 83	0	64-3019
232000TKD1551	TRK DUMP 5 1/2T 4X2 19000 GVW \$ 4,220.00		PIDQ	7	7/Feb 81	0	64-1030
232000TKD1551	TRK DUMP 5 1/2T 4X2 19000 GVW \$ 7,997.00		BIDH	12	12/Feb 81	0	64-1030
232000TKD1551	TRK DUMP 5 1/2T 4X2 19000 GVW \$ 14,000.00		BIDR	12	12/Feb 81	0	64-1030
232000TKD1552	TRK DUMP 8 TON 4X4 24000 GVW \$ 6,506.00		BIDJ	50			
232000TKD1554	TRK PANEL 1 TON 4X2 7000 GVW \$ 3,100.00		BIDZ	5	1/Dec 83	4	64-4007
232000TRV1401	TRK VAN CGO 4 T 4X2 16000 GVW \$ 3,200.00		PIDE	1			
232000TRU2204	TRK P/U 1 TON 7000 GVW 4X4 \$ 3,672.00		BIDZ	40	14/Aug 81	26	Abandon
2330007886299	S/TLR STAKE 12T 4W/M127H2C \$ 5,507.00		BIDH	1	1/Feb 81	0	64-1030
2330005699372	S/TLR VAN SHOP 6T M146 \$ 6,024.00		BIDH	7			
2330005699372	S/TLR VAN SHOP 6T M146 \$ 6,532.00		BIDH	1			
2330007886289	S/TLR VAN 12T M129A2C \$ 8,282.00		BIDH	3			
2330007886289	S/TLR VAN CARGO 12T M129A2C \$ 18,266.00		BIDH	2			
2330008358122	S/TLR VAN 6TON M119		BIDE	5			
2330009267039	S/TLR VAN RPTS 6T M750 \$ 13,000.00		BIDJ	2			
2330003176448	S/TLR LOWBED 25T M172A1 \$ 6,030.00		DIDD	1	1/Feb 87	0	Abandon
2330003176448	S/TLR LOWBED 25T M172A1 \$ 6,030.00		R7D1	10			

MAP INVENTORY

PAGE NO.14

NSN	NO. ENCLATURE	PRICE/UNT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
2330003176448	S/TLR LOWBED 25T M172AL	\$ 6,302.00	BIDR	1	1/feb 87	0	Abandon
2330003176448	S/TLR LOWBED 25T M172AL	\$ 11,728.00	BIDR	1	1/feb 81	0	64-1030
2330009354477	S/TLR LOWBED 25T M16		DIDD	1			
2330001418050	TLR CGO 1 1/2T M105AL	\$ 1,049.00	PIDQ	1	1/dec 83	0	64-4007
2330007065495	TLR CGO 1 1/4T M16	\$ 349.00	BIDS	0			
2330007065495	TLR CGO 1 1/4T M16		PIDQ	1			
2330007328227	TLR CGO 1/4T M100	\$ 600.00	KID	18	18/oct 81	0	64-2009
2330007328227	TLR CGO 1/4T M100		BIDR	8	9/dec 81	0	64-2009
2330007328227	TLR CGO 1/4T M100		BIDS	10	10/oct 81	0	64-2009
2330007328227	TLR CGO 1/4T M100		BIDA	15	15/dec 81	0	64-2009
2330007328227	TLR CGO 1/4T M100		BIDK	4	4/oct 81	0	64-2009
2330007328227	TLR CGO 1/4T M100		BIDR	4	4/oct 81	0	64-2009
2330007328227	TLR CGO 1/4T M100		PIDQ	6	6/oct 81	0	64-2009
2330007328227	TLR CGO 1/4T M100		PIDQ	15	15/oct 81	0	64-2009
2330007328227	TLR CGO 1/4T M100		BIDS	3	1/dec 81	0	64-2009
2330007540509	TLR CGO 1 1/2T M104		BIDS	146	2/feb 81	0	64-1030
2330008358631	TLR CGO 1 1/2T M105AL	\$ 828.00	PIDQ	4	12/oct 81	0	64-2009
2330008358631	TLR CGO 1 1/2T M105AL	\$ 828.00	PIDQ	11	4/mar 83	0	64-3019
2330008986779	TLR CGO 3/4T M101AL	\$ 818.00	BIDS	5	11/mar 83	0	64-3019
2330008986779	TLR CGO 3/4T M101AL	\$ 654.00	BIDR	2	5/feb 81	0	64-1030
2330008986779	TLR CGO 3/4T M101AL	\$ 654.00	BIDN	5			
2330008986779	TLR CGO 1/4T M101AL		PIDQ	1			

MAP INVENTORY

NSN	NOMENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
3930010543833	LIFT TRUCK	\$ 52,126.00	BID	1			
921000000000	TLR CGO 1/4T ALL TYPES		BID	602	49/Oct 81	64-2009	
					15/MAR 83	64-3019	
					2/Dec 83	64-4007	
					17/Sep 88	64-8018	
922000000000	TLR CGO 1/2T ALL TYPES		PID	25	5/Feb 81	64-1030	
					9/Oct 81	64-2009	
					11/Sep 88	64-8018	
921000000000	TLR CGO 1/2T ALL TYPES		BID	399	2/Sep 88	64-8018	
921000000000	TLR CGO 1/2T ALL TYPES		PID	19	19/Sep 88	64-8018	
2330001418049	TLR TNK WTR 1 1/2T 400G ML07A2		PIDQ	2	2/Mar 83	64-3019	
2330005422039	TLR WATER 1 1/2T ML49	\$ 1,808.00	BID	60			
2330005422039	TLR WATER 1 1/2T ML49	\$ 1,808.00	BIDJ	1	1/JUN 89	64-9008	
2330005422039	TLR WATER 1 1/2T ML49	\$ 2,019.00	BIDQ	5			
2330005422039	TLR WATER 1 1/2T ML49	\$ 1,948.00	BIDS	7	7/Mar 83	64-3019	
2330005422039	TLR WATER 1 1/2T ML49	\$ 2,019.00	BIDH	20			
2330005422039	TLR WATER 1 1/2T ML49	\$ 2,019.00	BID	5			
2330005422039	TLR WATER 1 1/2T ML49	\$ 6,445.00	BIDK	5			
2330007826053	TLR LOADED 8TON	\$ 3,647.00	BIDJ	2			
2230002001737	TLR 4NH 10TON FLAED H345	\$ 4,930.00	BIDJ	4	1/Dec 84	64-5006	
					17/JUN 89	64-9007	
					2/JUN 89	64-9024	

MAP INVENTORY

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
233003312307	TLR CHASSIS GEN M200A1	\$ 374.00	PIDQ	1			
233003770389	TLR 4MM 10MM FIRED	\$ 3,588.00	BIDJ	2	2/Oct 81	0	64-2009
233005637248	DOLLY TLR CON 820M M198A1	\$ 2,878.00	BIDJ	8	1/Oct 81		64-2009
					3/FEB 87	4	Abandon
23400MC SOLO	MOTORCYCLE SOLO 24	\$ 1,140.00	BID	60	7/MAY 83	53	64-3019
1005005612003	PISTOL AUTO M1911A1 CAL 45	\$ 42.00	BID	56000	1497/NOV 85		Demil
					3/NOV 85		Demil
					1505/OCT 85	\$2995	Demil
1005005612003	PISTOL AUTO M1911A1 CAL 45	\$ 42.00	PID	322	12/NOV 85		Demil
					50/Oct 85		Demil
					2007/SEP 85	0	Demil
1005007265786	REVOLVER CAL 38 DEF SPL	\$ 82.00	DID	604			
1005008359773	REV CAL 38 4 IN BELSM	\$ 74.00	BIDZ	316			
1005009375839	REV CAL 38 S&W 4 IN BBL M10	\$ 56.00	BID	1332			
1005009375839	REV CAL 38 S&W 4 IN BBL M10	\$ 56.00	BIDA	3943			
1005009372058	REV CAL 38 SP 2 INCH	\$ 45.00	DID	2000			
1005006741425	CARBINES M1	\$ 65.00	BID	21000			
1005006707670	RIFLES M1	\$ 86.00	PID	1931			

MAP INVENTORY

PAGE NO.17

NSN	NONENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
1005000739421	RIFLES 5.56 MM M16A1	\$ 130.00	BID	15000			
1005000739421	RIFLES 5.56 MM M16A1	\$ 106.00	BIDN	90	1/Nov 85		Demil
					3/Nov 85		Demil
					4/Nov 85		Demil
					6/Oct 85	76	Demil
1005000739421	RIFLES 5.56 MM M16A1	\$ 152.00	BIDN	1618			
1005000739421	RIFLES 5.56 MM M16A1	\$ 221.00	BIDB	1148			
1005000739421	RIFLES 5.56 MM M16A1	\$ 202.00	BIDB	1148			
1005000739421	RIFLES 5.56 MM M16A1	\$ 230.00	BIDR	2088			
1005000739421	RIFLES 5.56 MM M16A1	\$ 230.00	BIDG	327			
1005000739421	RIFLES 5.56 MM M16A1	\$ 230.00	BIDM	738			
1005000739421	RIFLES 5.56 MM M16A1	\$ 260.00	BIDR	1814			
1005000739421	RIFLES 5.56 MM M16A1	\$ 299.00	PID	2500			
1005006741425	RIFLE CAL 30 M1	\$ 33.00	BIDB	21418	1479/Nov 85		Demil
					3/Nov 85		Demil
					89/Nov 85		Demil
					1793/Nov 85		Demil
					1019/Oct 85		Demil
					11789/Oct 85		Demil
					4900/Sep 85		Demil
					54/Sep 85	292	Demil
1005006741425	RIFLE CAL 30 M1	\$ 36.00	BIDA	3000	22/Nov 85		Demil
					22/Nov 85		Demil
					625/Oct 85		Demil
					350/Oct 85		Demil
					140/Sep 85	1841	Demil

MAP INVENTORY

PAGE NO. 18

NSN	NONEXCLUSIVE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
1005006721771	SUBMACHINE GUN M3AL	\$ 43.00	BID	45118	117/NOV 85		Demil
					3/NOV 85		Demil
					62/NOV 85		Demil
					3/35/OCT 85		Demil
					50/Oct 85		Demil
					40/SEP 85	32511	Demil
1005006721640	SUBMACHINE GUN M1A1	\$ 92.00	PID	61	1/NOV 85	60	Demil
1005006057710	MG 7.62 MM M60	\$ 708.00	BID	60	40/OCT 85		Demil
					5/Oct 85	15	Demil
1005006057710	MG 7.62 MM M60	\$ 708.00	BID	120			
1005006057710	MG 7.62 MM M60	\$ 708.00	BID	10			
1005006057710	MG 7.62 MM M60	\$ 823.00	BID	18			
1005006057710	MG 7.62 MM M60	\$ 1,081.00	BID	24			
1005006057710	MG 7.62 MM M60	\$ 1,081.00	BID	52			
1005006057710	MG 7.62 MM M60	\$ 1,351.00	BID	24			
1005006057710	MG 7.62 MM M60	\$ 2,739.00	BID	72			
1005006057710	MG 7.62 MM M60	\$ 2,739.00	PID	100			
1005007265636	MG CAL 50 M2 HB FLEX	\$ 9,457.00	BID	24			
1005006721649	MACHINE GUNS CAL 30	\$ 4,396.00	BID	406	49/NOV 85		Demil
					8/NOV 85		Demil
					27/NOV 85		Demil
					50/NOV 85	28	Demil
1005006721614	MACHINE GUNS CAL 30 M1917A1	\$ 6,556.00	PID	26	1/NOV 85		Demil
					4/NOV 85	21	Demil

MAP INVENTORY

3/Nov 85
21/Nov 85
5/Sep 85

Demil
Demil
301
Demil

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
1005007265644	MACHINE GRIS CAL 50 AN/M2	\$ 5,200.00	PTD	14			
1005003229716	MOUNT TRIPOD CAL 50 M3	\$ 438.00	BID	24			
1005007105599	MT TRIPOD YG 7.62 MM M122	\$ 186.00	BIDM	60			
1005007105599	MT TRIPOD YG 7.62 MM M122	\$ 232.00	BIDB	24			
1005007105599	MT TRIPOD YG 7.62 MM M122	\$ 303.00	BIDG	24			
1005007105599	MT TRIPOD YG 7.62 MM M122	\$ 321.00	BIDB	24			
1005007105599	MT TRIPOD YG 7.62 MM M122	\$ 338.00	BIDR	72			
1005007105599	MT TRIPOD YG 7.62 MM M122	\$ 372.00	PTD	100			
1005009215483	SHOTGUN 12 GA RT-20 IN-BBS	\$ 78.00	BIDZ	45			
1005007620259	GUN SUB-GM 7.62 MM M9A1	\$ 237.00	BIDA	4			
1005000799238	BAYONET KNIFE M7	\$ 3.00	BUD	6800			
1005000739238	BAYONET KNIFE M7	\$ 3.00	KID	8200			
1005003368568	BAYONET KNIFE M5AL DEL	\$ 6.00	BIDH	6029			
1005003368568	BAYONET KNIFE M5AL DEL	\$ 6.00	BID	3000			
1010001796447	LOUNCHER GRANAD 40 MM M203	\$ 90.00	BIDB	66			
1010001796447	LOUNCHER GRANAD 40 MM M203	\$ 236.00	BIDB	80			
1010001796447	LOUNCHER GRANAD 40 MM M203	\$ 271.00	BIDM	54			
1010001796447	LOUNCHER GRANAD 40 MM M203	\$ 271.00	BIDG	72			

MAP INVENTORY

PAGE NO.20

NSN	NOMENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
1010006911382	LOUNCHER M79	\$ 222.00	BIDN	24			
1010006911382	LOUNCHER M79	\$ 222.00	BIDN	84			
1010006792006	MORTAR 60 MM M2 M1M5		BID	316			
1010006732006	MORTAR 60 MM M2 M1M5		PID	9			
1015003229752	105 BOWTZERS		PID	6			
1015003229752	BOW TOWED 105 MM M101A1	\$ 12,413.00	BIDA	3			
1015006577534	RIFLE REC 90 MM M67	\$ 4,252.00	BIDN	18	15/Nov 85		Demil
1015006577534	RIFLE REC 90 MM M67	\$ 2,979.00	BIDM	18	3/Nov 85	0	Demil
1015006577534	RIFLE REC 90 MM M67	\$ 2,979.00	BIDM	18	3/Nov 85	0	Demil
1015006577534	RIFLE REC 90 MM M67	\$ 2,979.00	BIDA	4	1/Oct 85		Demil
1015006577534	RIFLE REC 90 MM M67	\$ 5,401.00	BIDB	12	3/Oct 85	7	Demil
1015006577534	RIFLE REC 90 MM M67	\$ 3,800.00	BIDB	12	12/Oct 85	0	Demil
1015006577534	RIFLE REC 90 MM M67	\$ 3,800.00	BIDR	36	25/Sep 85	11	Demil
1015003484925	106 MM RR M40A1		PID	4			
1015008401836	81 MM MORTARS M29A1		BID	258			
1015008401836	81 MM MORTARS		PID	6			
1015009997794	MORT 81 MM M29A1 W/RT M29A3	\$ 3,420.00	BIDN	19			

NSN NOMENCLATURE PRICE/UNIT SERVICE ISSUED DISPOSAL BALANCE REMARKS

1015009997794	MORT 81 MM M29A1 W/MT M23A3	\$ 5,553.00	BIDR	12			
1220005897282	BOARD PLOTTING M17	\$ 5.00	BIDA	60			
1220005897282	BOARD PLOTTING M17	\$ 5.00	BIDM	24			
1220005897282	BOARD PLOTTING M17	\$ 8.00	BIDS	12			
1220005897282	BOARD PLOTTING M17	\$ 9.00	BIDR	12			
1220006027941	BOARD PLOTTING M16	\$ 29.00	BID	50			
1220006027941	BOARD PLOTTING M16	\$ 40.00	BIDM	72			
1220006027941	BOARD PLOTTING M16	\$ 81.00	BIDR	134			
1240001814806	MOUNT TELESCOPE M128A1	\$ 379.00	BIDR	12			
1240001814806	MOUNT TELESCOPE M128A1	\$ 376.00	BIDB	12			
1240001814806	MOUNT TELESCOPE M128A1	\$ 443.00	BIDR	135			
1240005300974	BINOCULAR M17A1	\$ 201.00	BIDB	200			
1240005300974	BINOCULAR M17A1	\$ 201.00	BIDM	279			
1240007597774	TELESCOPE M84	\$ 71.00	BID	20			
1240007597774	TELESCOPE M81	\$ 71.00	BIDA	45			
1240008235612	TELESCOPE ELEM M109	\$ 130.00	BIDB	12			
1240008235612	TELESCOPE ELEM M109	\$ 130.00	BIDS	12			
1240008235612	TELESCOPE ELEM M109	\$ 130.00	BIDR	126			
1055005750067	LCR 3.5 IN	\$ 53.00	KID	19			
1055005750067	LCR 3.5 IN		BID	45			
1055008401842	LAUNCHER RNT 3.5 IN M20A1B1	\$ 101.00	BIDM	86			
1055008401842	LAUNCHER RNT 3.5 IN M20A1B1	\$ 101.00	BIDO	20			
1055008401842	LAUNCHER RNT 3.5 IN M20A1B1	\$ 201.00	BIDR	48			

NSN	NOMENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
1055005750067	LCHR 3.5 IN		PID	12			
1290007690564	LIGHT INSTRUMENT M36	\$ 11.00	8ID	25			
1290007690564	LIGHT INSTRUMENT M36	\$ 13.00	BID	10			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNMTD	\$ 30.00	KID	10			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNMTD	\$ 52.00	BIDB	297			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNMTD	\$ 45.00	BIDM	47			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNMTD	\$ 59.00	BIDR	582			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNMTD	\$ 44.00	BIDR	880			
1095005080339	SCABBARD BAY KNIFE M8A1	\$ 2.00	BIDM	20256			
1095005080339	SCABBARD BAY KNIFE M8A1	\$ 2.00	BID	6800			
1095005080339	SCABBARD BAY KNIFE M8A1	\$ 2.00	KID	8200			
1095005080339	SCABBARD BAY KNIFE M8A1	\$ 2.00	BID	3000			
1095007265870	PISTOL PYRO IN/MS W/D MT	\$ 22.00	BIDM	98			
1305000000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 90.00	BID	451			
1305000000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 160.00	BIDB	315			
1305000000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 130.00	BIDB	945			
1305000000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 160.00	BIDB	300			
1305000000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 160.00	BIDM	201			
1305000000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 110.00	BIDG	69			
1305000000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 170.00	BIDR	1023			
1305000000A071	CTG 5.56 MM BALL BRD CLIP	\$ 70.00	BID	6873			
1305000000A071	CTG 5.56 MM BALL BRD CLIP	\$ 50.00	BID	3000			
1305000000A071	CTG 5.56 MM BALL BRD CLIP	\$ 60.00	BIDL	1000			
1305000000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 100.00	PIDQ	484			
1305000000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 80.00	BIDG	1290			

Handwritten notes:
 2
 1411
 1411

NSN	MOVEMENT/ATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 100.00	PIDQ	968			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 100.00	BIDR	484			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 100.00	BIDL	2097			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 80.00	BIDR	9			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 80.00	PIDQ	968			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 80.00	BIDR	967			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 90.00	BIDG	1099			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 90.00	BID	451			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 160.00	BIDR	315			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 130.00	BIDR	945			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 160.00	BIDR	300			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 160.00	BIDR	201			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 110.00	BIDG	89			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 170.00	BIDR	1023			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL ERD CLIP	\$ 70.00	BID	6873			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL ERD CLIP	\$ 60.00	BID	3000			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL ERD CLIP	\$ 60.00	BIDL	1000			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 100.00	PIDQ	484			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 80.00	BIDR	1290			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 100.00	PIDQ	968			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 100.00	BIDR	484			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 100.00	BIDL	2097			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 80.00	BIDR	9			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 80.00	PIDQ	968			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 80.00	BIDR	967			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 90.00	BIDR	1099			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 90.00	BIDR	2255			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 100.00	PIDQ	484			

Handwritten notes:
 130500000A068
 130500000A068

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 90.00	BID	451			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 160.00	BID	315			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 130.00	BID	945			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 160.00	BID	300			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 160.00	BID	201			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 110.00	BID	89			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 170.00	BID	1023			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL BRD CLIP	\$ 70.00	BID	6873			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL BRD CLIP	\$ 50.00	BID	3000			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL BRD CLIP	\$ 60.00	BID	1000			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 50.00	BID	1290			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 130.00	PIDO	968			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 100.00	BID	484			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 100.00	PIDL	2097			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 30.00	BID	9			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 30.00	PIDO	968			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 80.00	BID	967			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 30.00	BID	1099			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 90.00	BIDR	2255			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 90.00	BID	451			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 160.00	BID	315			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 130.00	BID	945			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 160.00	BID	300			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 160.00	BID	201			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 110.00	BID	89			
130500000A068	CTG 5.56 MM TRACER	\$ 170.00	BID	1023			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL BRD CLIP	\$ 70.00	BID	6873			

Handwritten note: 5.56 mm G. Submunition

NSN	NOVENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
13050000A071	CTG 5.56 MM BALL BRD CLIP	\$ 60.00	BID	3000			
13050000A071	CTG 5.56 MM BALL BRD CLIP	\$ 60.00	BID	1000			
13050000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 100.00	PIDO	484			
13050000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 80.00	BID	1290			
13050000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 100.00	PIDO	968			
13050000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 100.00	BID	484			
13050000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 100.00	BID	2097			
13050000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 80.00	BID	9			
13050000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 80.00	PIDO	968			
13050000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 80.00	BID	967			
13050000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 80.00	BID	1099			
13050000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 90.00	BID	2255			
13050000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 90.00	BID	360			
13050000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 100.00	BID	3064			
13050000A085	CTG CAL 22 BLANK	\$ 10.00	BID	30			
13050000A209	CTG C 30 API LNK WTR	\$ 100.00	KID	168			
13050000A212	CTG C30 BALL #2 CTN	\$ 69.00	KID	288			
13050000A230	CTG C30 TRACER M1	\$ 114.00	KID	34			
13050000A130	CTG7.62 MM NATO BL 5 RD CLP	\$ 100.00	BID	840			
13050000A131	CTG7.62 MM LK 4HL M801TRM62	\$ 100.00	BIDA	102			
13050000A131	CTG7.62 MM LK 4HL M801TRM62	\$ 230.00	BID	339			
13050000A131	CTG7.62 MM LK 4HL M801TRM62	\$ 200.00	BID	300			
13050000A131	CTG7.62 MM LK 4HL M801TRM62	\$ 200.00	BID	450			
13050000A131	CTG7.62 MM LK 4HL M801TRM62	\$ 230.00	BID	384			

NSN	NOMENCLATURE	PRICE/UNT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
130500000A151	CTG 7.62 MM NATO LNK 4 BALL	\$ 100.00	BIDN	1000			
130500000A151	CTG 7.62 MM NATO LNK 4 BALL	\$ 110.00	BIDN	496			
130500000A151	CTG 7.62 MM NATO LNK 4 BALL	\$ 210.00	BIDL	536			
130500000A151	CTG 7.62 MM NATO LNK 4 BALL	\$ 200.00	BIDL	269			
130500000A400	CTG C 38 BALL SPECIAL	\$ 70.00	BIDZ	778			
130500000A400	CTG C 38 BALL SPECIAL	\$ 130.00	BIDP	518			
130500000A520	CTG C 50 LNKD 4 BL 1TR	\$ 1,010.00	BID	18			
130500000A520	CTG C 50 LNKD 4 BL 1TR	\$ 370.00	BIDB	30			
130500000A557	CTG C 50 BALL TRB H1	\$ 310.00	KID	2			
130500000A574	CTG C 50 SPOT TR M48A1	\$ 950.00	KID	2			
130500A740COM	CTG 20 MM BLGP	\$ 826.00	KID	1			
130500000A071	CTG 5.56 MM BALL 10 RD CLIP	\$ 90.00	BIDR	2255			
1290007690564	LIGHT INSTRUMENT M36	\$ 11.00	BID	25			
1290007690564	LIGHT INSTRUMENT M36	\$ 13.00	BID	10			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNMTD	\$ 30.00	KID	10			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNMTD	\$ 52.00	BIDB	297			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNMTD	\$ 45.00	BIDH	47			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNMTD	\$ 69.00	BIDR	582			
1290007690564	LIGHT INSTRUMENT M36	\$ 11.00	BID	25			
1290007690564	LIGHT INSTRUMENT M36	\$ 13.00	BID	10			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNMTD	\$ 30.00	KID	10			

NSN	NOMENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNSTD	\$ 52.00	BIDR	297			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNSTD	\$ 45.00	BIDR	47			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNSTD	\$ 69.00	BIDR	582			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNSTD	\$ 44.00	BIDR	880			
1290007690564	LIGHT INSTRUMENT M36	\$ 11.00	BID	25			
1290007690564	LIGHT INSTRUMENT M36	\$ 13.00	BID	10			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNSTD	\$ 30.00	KID	10			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNSTD	\$ 52.00	BIDR	297			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNSTD	\$ 45.00	BIDR	47			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNSTD	\$ 69.00	BIDR	582			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNSTD	\$ 44.00	BIDR	880			
1290009304260	COMPASS M2 MAG UNSTD	\$ 44.00	BIDR	880			
1095005080339	SCABBARD BAY KNIFE M8A1	\$ 2.00	BIDR	20256			
1095005080339	SCABBARD BAY KNIFE M8A1	\$ 2.00	BID	6800			
1095005080339	SCABBARD BAY KNIFE M8A1	\$ 2.00	KID	8200			
1095005080339	SCABBARD BAY KNIFE M8A1	\$ 2.00	BID	3000			
1095007265820	PISTOL PYRO AN/M8 W/O MT	\$ 22.00	BIDR	98			
1095005080339	SCABBARD BAY KNIFE M8A1	\$ 2.00	BIDR	20256			
1095005080339	SCABBARD BAY KNIFE M8A1	\$ 2.00	BID	6800			
1095005080339	SCABBARD BAY KNIFE M8A1	\$ 2.00	KID	8200			
1095005080339	SCABBARD BAY KNIFE M8A1	\$ 2.00	BID	3000			
1095007265820	PISTOL PYRO AN/M8 W/O MT	\$ 22.00	BIDR	98			
1095005080339	SCABBARD BAY KNIFE M8A1	\$ 2.00	BIDR	20256			
1095005080339	SCABBARD BAY KNIFE M8A1	\$ 2.00	BID	6800			

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
1095005080339	SCABBARD BAY KNIFE H&A1	\$ 2.00	KID	8200			
1095005080339	SCABBARD BAY KNIFE H&A1	\$ 2.00	BID	1000			
1095007265820	PISTOL PYRO AN/MB W/O HT	\$ 22.00	BIDM	98			
1310000008546	CTG 40 MM HEDP M433	\$ 4.00	BIDL	1944			
1310000008546	CTG 40 MM HEDP	\$ 4.00	BIDB	2952)
1310000008568	CTG 40 MM HE M406	\$ 3.00	BIDM	864			
1310000008568	CTG 40 MM EE M406	\$ 2.00	BIDN	1512			
1310000008568	CTG 40 MM EE M406	\$ 3.00	BIDL	5472			
1310000008568	CTG 40 MM EE M406	\$ 5.00	BIDL	1944			
1310000008568	CTG 40 MM EE M406	\$ 3.00	BIDB	15552			
1310000008568	CTG 40 MM EE M406	\$ 3.00	BIDB	7920			
1310000008568	CTG 40 MM EE M406	\$ 3.00	BIDM	4896			
1310000008568	CTG 40 MM EE M406	\$ 3.00	BIDG	1656			
1310000008568	CTG 40 MM EE M406	\$ 6.00	BIDR	15720			
1310000008626	CTG 60 MM EE M49W/F MCO	\$ 7.00	KID	2500			
1310000008628	CTG 60 MOR TP M50A2 W/F MCO		KID	92			
1310000008628	CTG 60 MM S&K WP W/MCO FUSE		KID	250			
1330000919880	FUSE HAND GREEN M204A2		KIDE	260			
1330000008990	GREEN BAND FRAG M26		KID	340			
1330000008990	GREEN H ITC T33 AN-M14	\$ 3.00	BID	7000			
1330000008915	GREEN H&V FRAC MK2	\$ 1.00	KID	1000			

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
131500000C226	CTG 81 MM MOR ILL M301 M30	\$ 29.00	BID	1080			
131500000C226	CTG 81 MM ILLUM W/P P/MOR	\$ 38.00	BIDL	432			
131500000C226	CTG 81 MM ILLUM M30/A3 W/P	\$ 51.00	BIDL	432			
131500000C226	CTG 81 MM ILLUM M30/A3 W/P	\$ 51.00	BIDB	216			
131500000C226	CTG 81 MM ILLUM M30/A3 W/P	\$ 93.00	BIDB	378			
131500000C226	CTG 81 MM ILLUM M30/A3 W/P	\$ 75.00	BIDB	702			
131500000C226	CTG 81 MM ILLUM M30/A3 W/P	\$ 80.00	BIDR	1080			
131500000C226	CTG 81 MM ILLUM M30/A3 W/P	\$ 7.00	KID	2753			
131500000C236	CTG 81 MM ILLUM M30/A3 W/P	\$ 36.00	BIDB	1080			
131500000C236	CTG 81 MM ILLUM M30/A3 W/P	\$ 53.00	BIDB	972			
131500000C256	CTG 81 MM MOR HE M374 PD	\$ 19.00	BID	3630			
131500000C256	CTG 81 MM MOR HE M374 PD	\$ 19.00	BIDL	2850			
131500000C256	CTG 81 MM MOR HE M374 PD	\$ 31.00	BIDL	2160			
131500000C256	CTG 81 MM MOR HE M374 PD	\$ 33.00	BIDB	630			
131500000C256	CTG 81 MM MOR HE M374 PD	\$ 89.00	BIDB	1728			
131500000C256	CTG 81 MM MOR HE M374 PD	\$ 79.00	BIDR	6480			
131500000C282	CTG 90 MM BR HEAT M371A1	\$ 44.00	BIDW	1340			
131500000C282	CTG 90 MM BR HEAD M371A1	\$ 44.00	BIDL	825			
131500000C282	CTG 90 MM HEAT W/P P/RIFLE	\$ 51.00	BIDW	720			
131500000C282	CTG 90 MM HEAT W/P P/RIFLE	\$ 51.00	BIDB	756			
131500000C282	CTG 90 MM HEAT W/P P/RIFLE	\$ 96.00	BIDL	2000			
131500000C282	CTG 90 MM HEAT W/P P/RIFLE	\$ 44.00	BIDB	864			
131500000C282	CTG 90 MM HEAT W/P P/RIFLE	\$ 109.00	BIDR	1296			
131500000C445	CTG 105 MM HE/O P P/HOM	\$ 38.00	BIDL	15			

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
1315000000449	CTG 125 MM ILLUM N/F P/BOM	\$ 93.00	BIDL	90			
1315000000454	CTG 105 MM SHK WP W/P P/BOM	\$ 58.00	BIDP	72			
1315000015200M	CTG 31N50 VT SD FL RP	\$ 122.00	PID	1590			
1315000015300M	CTG 31N50 VT SD FL RP	\$ 134.00	PID	1456			
1315000018400M	CTG 31N50 SP SHEET	\$ 102.00	PID	12			
1315000034700M	CTG 31N50 RP HC FL	\$ 147.00	PID	690			
1315000034800M	CTG 31N50 RP HG-2L	\$ 54.00	PID	6000	1/JUN 89	20	64-9010
1340000008600	RKT HE-3.5-IN-AT-M28A2	\$ 23.00	BIDL	3585			
1340000008600	RKT HE 3.5 IN AT M28A2	\$ 15.00	BIDL	774			
1340000008600	RKT HE-3.5-IN-AT-M28A2	\$ 18.00	BIDB	10432			
1340000008600	RKT HE 3.5 IN AT M28A2	\$ 21.00	BIDB	432			
1340000008600	RKT HE-3.5-IN-AT-M28A2	\$ 19.00	BIDB	1080			
13700000001312	SIG-ILL-GRD-PAR-AMTR-STAR	\$ 7.00	BIDL	216			
13900000000335	RUBB-ED-M517-05-SEC-DELAY	\$ 9.00	BIDM	150			
13750000473750	DEMO-SQUIET-SEE-EXPIRO-ELECT	\$ 197.00	BIDM	21	1/JUN 89	20	64-9010
13750000473750	CHG-ASSY-DEMO-F.33	\$ 331.00	BIDM	3			
5805002573602	SB-22/PT-SWITCH-BOARD	\$ 602.00	BIDH	1			
5805002573602	SB-22/PT-SWITCH-BOARD	\$ 602.00	BIDS	1			
5805002573602	SB-22/PT-SWITCH-BOARD	\$ 602.00	BID	5			
5805002573602	SB-22/PT-SWITCH-BOARD	\$ 915.00	BIDK	1			
5805002573602	SB-22/PT-SWITCH-BOARD	\$ 915.00	BIDA	10			
5805002573602	SB-22/PT-SWITCH-BOARD	\$ 915.00	BIDS	1			9

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
5805002573602	SB-22/PT SWITCH BOARD	\$ 420.00	BID2	2			
5805005032660	H 1P SB-86/R SWITCHBOARD	\$ 2,842.00	BIDN	1			
5805005032660	H 1P SB-86/R SWITCHBOARD	\$ 2,842.00	BID	2			
5805005430012	H 1P TA-312/PT TELEPHONESET	\$ 54.00	BIDN	8			
5805005430012	H 1P TA-312/PT TELEPHONESET	\$ 54.00	BIDN	150			
5805005430012	H 1P TA-312/PT TELEPHONESET	\$ 54.00	BIDN	310			
5805005430012	H 1P TA-312/PT TELEPHONESET	\$ 54.00	BID	30			
5805005430012	H 1P TA-312/PT TELEPHONESET	\$ 54.00	BIDA	40			
5805005430012	H 1P TA-312/PT TELEPHONESET	\$ 54.00	BIDS	15			
5805005430012	H 1P TA-312/PT TELEPHONESET	\$ 54.00	BIDK	15			
5805005430012	H 1P TA-312/PT TELEPHONESET	\$ 54.00	BIDZ	21			
5805007156171	H 1P SB-22A/PT SWITCHBOARD	\$ 449.00	BIDN	30			
5805007156171	H 1P SB-22A/PT SWITCHBOARD	\$ 915.00	BIDN	30			
5805004077722	CE-11 REEL EQUIPT	\$ 38.00	BIDN	24			
5805004077722	CE-11 REEL EQUIPT	\$ 38.00	BIDN	24			
5820000344239	POWER SUPPLY PF415/GRC-93	\$ 129.00	BIDG	20			
5820001678005	AN/GRC-160A RADIO SET	\$ 8,360.00	BIDB	1			
5820002237473	AN/GRC-160 RADIO SET	\$ 1,039.00	BIDB	10			
5820002237473	AN/GRC-160 RADIO SET	\$ 2,061.00	BIDB	28			
5820002237473	AN/GRC-160 RADIO SET	\$ 2,061.00	BIDN	15			
5820002300449	AN/GRC-5 24V RADIO	\$ 1,744.00	BIDN	8			
5820005431997	AN/GRC-87 RADIO SET	\$ 1,060.00	BID	62			

REMARKS

BALANCE

DISPOSAL

ISSUED

SERVICE

PRICE/UNT

DESCRIPTION

NSN

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
5820006427128	RCVR TCS RADIO SET		PID	68			
5820008324743	AN/GRC-160 RADIO SET	\$ 933.00	BID	17			
5820008324743	AN/GRC-160 RADIO SET	\$ 1,488.00	BIDM	17			
5820008324743	AN/GRC-160 RADIO SET	\$ 1,488.00	BID	10			
5820008324743	AN/GRC-160 RADIO SET	\$ 1,488.00	BIDS	5			
58200090589531	AN/PRC-9 RADIO XMTR	\$ 109.00	BID	10			
5820001138980	AN/PRC-4A RADIO XMTR	\$ 131.00	BID	10			
5820009303724	AN/PRC-77 RADIO SET	\$ 650.00	BIDM	120			
5820009303724	AN/PRC-77 RADIO SET	\$ 650.00	BID	10			
5820009303724	AN/PRC-77 RADIO SET	\$ 650.00	BIDM	580			
5820009303724	AN/PRC-77 RADIO SET	\$ 849.00	BIDA	10			
5820002237434	AN/VRC-47 RADIO SET	\$ 3,574.00	BIDB	89			
5820002237434	AN/VRC-47 RADIO SET	\$ 3,654.00	BIDM	12			
5820002237434	AN/VRC-47 RADIO SET	\$ 3,654.00	BIDM	8			
5820002237434	AN/VRC-47 RADIO SET	\$ 3,654.00	BIDG	3			
5820002237437	AN/VRC-49 RADIO SET	\$ 6,882.00	BIDG	6			
5820005431977	AN/VRC-24 RADIO SET	\$ 3,100.00	BIDM	8			
5820005431977	AN/VRC-24 RADIO SET	\$ 3,100.00	BID	3			
5820005431977	AN/VRC-24 RADIO SET	\$ 3,100.00	BIDG	6			
5820005431996	AN/VRC-34 RADIO SET	\$ 841.00	BID	5			
5820008920622	RT-524/VRC RECVXMTR	\$ 2,109.00	BIDG	1			
5820008920664	AN/VRC-47 RADIO SET	\$ 4,018.00	BIDM	13			
5820008920964	AN/VRC-47 RADIO SET	\$ 3,268.00	BIDB	2			
5820008920865	AN/VRC-49 RADIO SET	\$ 3,356.00	BIDM	8			

NSN NOMENCLATURE PRICE/UNIT SERVICE ISSUED DISPOSAL BALANCE REMARKS

5820008923339	C-2298/VRC CONTROL	\$ 162.00	BIDG	2			
5820008923342	M-1760/GR AMPLIFIER	\$ 407.00	BIDG	3			
5820004978554	KC-292 ANTENNA	\$ 106.00	BIDM	50			
5820004978554	KC-292 ANTENNA	\$ 106.00	BIDM	10			
5820004978554	KC-292 ANTENNA	\$ 106.00	BID	10			
5820004978554	KC-292 ANTENNA	\$ 308.00	BIDR	24			
5820004978554	KC-292 ANTENNA	\$ 308.00	BIDM	4			
5820004978554	KC-292 ANTENNA	\$ 238.00	BIDR	4			
5820004978554	KC-292 ANTENNA	\$ 306.00	BIDR	54			
5820006720029	MAINTENANCE EQUIPT REC 9	\$ 880.00	BIDH	1			
5825004054510	AW/TBN-30V1 RAD BEACON SET	\$ 24,178.00	BIDN	5			
582500665462	AW/URN-5 BEACON SET	\$ 4,275.00	DID	6			
5830001646622	AW/UTQ-2 PA SET	\$ 1,600.00	BID	7			
5830001646622	AW/UTQ-2 PA SET	\$ 1,600.00	BIDM	4			
589500ANTEN12A	AW/TBN-12A RADAR SET		BID	4			
5830008563273	AW/UTL-1-V. INEBCOM	\$ 249.00	BIDG	11			
5830005031079	AW/UTH-2 PA SET	\$ 1,100.00	BID	2			
5830005031079	AW/UTH-2 PA SET	\$ 315.00	BIDA	20			
5835006651618	RD-87/U RECORDER REERO	\$ 132.00	BID	2			
5835006651618	RD-87/U RECORDER REERO	\$ 150.00	BIDV	4			

Delta 1/4 10/1990

NSN	NOMENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
2410002670329	TRACTOR FT LS LGT NFO	\$ 13,094.00	BID	8	2/Feb 81	0	64-1030
					5/Mar 83	0	64-3019
2410002670329	TRACTOR FT LS LGT NFO	\$ 14,628.00	BID	9	1/Mar 83	0	64-3019
					3/Feb 87	0	Abandon
					3/Jun 89	2	64-9024
2410002670329	TRACTOR FT LS LGT NFO	\$ 15,488.00	BID	13	2/Jun 89	0	64-9006
					1/Jun 89	0	64-9010
					2/Jun 89	8	64-9024
2410005424432	TRACTOR FT LS LGT NFO	\$ 28,381.00	BID	20	2/Jun 89	0	64-9007
					2/Jun 89	0	64-9009
					3/Jun 89	0	64-9009
					3 Jun 89	0	64-9009
					1/Jun 89	0	64-9010
					1/Jun 89	0	64-9010
					8/Jun 89	0	64-9024
2410005424432	TRACTOR FT LS LGT NFO	\$ 40,855.00	BID	10	2/Feb 81	0	64-1030
					2/Mar 81	0	64-3019
					3/Dec 84	0	64-5006
					1/Feb 87	0	Abandon
					1/Jun 89	0	64-9006
2410005424432	TRACTOR FT LS LGT NFO	\$ 40,855.00	PID	1	1/Jun 89	0	64-9007
					1/Feb 81	0	64-1030
2410005424432	TRACTOR FT LS LGT NFO	\$ 40,855.00	DID	1	1/Feb 81	0	64-1030
2410005424432	TRACTOR FT LS LGT NFO	\$ 37,275.00	BID	5	5/Feb 81	0	64-1030
2410005424432	TRACTOR FT LS LGT NFO	\$ 37,275.00	PIDQ	1	1/Feb 81	0	64-1030
2410005424432	TRACTOR FT LS MED NFO	\$ 37,808.00	PIDQ	1	1/Feb 81	0	64-1030
410005424445	TRACTOR FT LS HVT NFO	\$ 51,230.00	DIDD	1	1/Feb 81	0	64-1030
2410005424445	TRACTOR FT LS HVT NFO	\$ 15,500.00	BID	3	3/Feb 81	0	64-1030

MSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
2420001900054	TRACTOR IND W/PTO NEW	\$ 3,748.00	BID	8	1/Jun 89	7	64-9010
3805001949823	GRADER RD MIZD 13 FT	\$ 174.00	PIDQ	1			
3805001974184	GRADER RD MIZD 12 FT	\$ 15,029.00	BID	12			
3805001978574	SCRAPER RD 8 CY	\$ 9,156.00	BID	8	1/Jun 89	7	64-9024
3805001978582	SCRAPER TWD 12 CY CABLE	\$ 17,409.00	BID	4	4/Dec 84	0	64-5006
3805001978592	SCRAPER TWD 12 CY CABLE		PIDQ	3	1/feb-87		Abandon
3805002615826	GRADER MIZD Hvy 12 FT	\$ 15,915.00	BIDD	1	2/Jun 89	0	64-9024
3805002615826	GRADER MIZD Hvy 12 FT	\$ 15,915.00	BIDD	1	1/Mar 83	0	64-3019
3805002615826	GRADER MIZD Hvy 12 FT	\$ 19,141.00	BIDD	2	2/feb-81	0	64-1030
			BIDD	6	2/Jun 89		64-9006
			BIDD		2/Jun-89		64-9009
3805002615826	GRADER MIZD Hvy 12 FT		BIDD	1	1/Jun 89		64-9010
3805006204943	GRADER MIZD Hvy 12 FT		PIDQ	1	2/Jun-89	0	64-9024
			PIDQ	4	1/Mar 83	0	64-3019
3805006335794	DITCHING MAC WEL NTD	\$ 24,000.00	BID	1	1/feb-87	0	Abandon
3805007529408	LOADER SCR 2 1/2 CY M-SEG	\$ 17,685.00	BID	8	5/feb-81		64-1030
			BID		1/Mar 83		64-3019
			BID		2/feb-84	0	64-5006
3805009161814	LOADER 2 1/2 CY EDGED FRIME	\$ 17,683.00	BID	5			
3805009161814	LOADER 2 1/2 CY EDGED FRIME	\$ 17,685.00	DID	1			
3805009161814	LOADER 2 1/2 CY EDGED FRIME	\$ 18,742.00	PIDQ	1			
3805009904214	SCRPR TWD BYD 18 CY		PIDQ	3	3/Dec-84	0	64-5006

NSN	NONRECLAMABLE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
3805009161814	LOADER 2 1/2 CY HINGED FRAME	\$ 18,742.00	BID	8	3/Jun 89	5	64-9009
3810005544103	CRANE TRK MTD 20 TON	\$ 44,345.00	BID	1	1/Feb 81	0	64-1030
3810005544103	CRANE TRK MTD 20 TON	\$ 44,345.00	BID	1	1/Feb-81	0	64-1030
3810005544103	CRANE TRK MTD 20 TON	\$ 44,345.00	BID	6	1/Feb 87	4	Abandon 64-9007
3810005544103	CRANE TRK MTD 20 TON		BIDE	1	1/Feb-89	1	64-1030
3810009261031	CRANE CLR MTD 12 1/2 TON	\$ 30,213.00	BID	3	1/Jun-89	2	64-9024
3825001903291	SWEEPER ROT TWD 3 WHL	\$ 5,225.00	DIDD	1			
3825001903291	SWEEPER ROT TWD 3 WHL	\$ 2,180.00	BIDJ	1			
3825001903291	SWEEPER ROT TWD 3 WHL	\$ 1,132.00	DID	3			
3825002752622	DISTR WTR 1000 G TRK MT	\$ 15,472.00	BID	4	1/Mar 83	3	64-3019
3825002752622	DISTR WTR 1000 G TRK MT	\$ 16,413.00	BIDJ	5	2/Jun-89	2	64-9009 64-9024
3825003829001	DISTR WTR 1000 G TRK MT		PIDQ	1	1/Feb 81	0	64-1030
3825008792122	DISTR WTR 1000 G TRK MT		PIDQ	2	2/Feb-81	0	64-1030
5420005303784	BRDG EXD HWY BAILEY	\$ 27,699.00	BID	2			
5420005303784	BRDG EXD HWY BAILEY	\$ 35,391.00	KID	2			
5420005303784	BRDG EXD HWY BAILEY		KID	3			
3820002752617	AUGER EARTH STD MTD	\$ 10,648.00	BIDJ	1			
3820002752620	ROCK DRILL POPT	\$ 18,639.00	BIDJ	1	1/Jun-89	0	64-9024
3820002752620	ROCK DRILL POPT	\$ 18,639.00	DIDD	1			
3820002752620	ROCK DRILL POPT	\$ 9,595.00	BIDJ	2			

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
3820002869196	DRILLING MACH PCSN TYPE	\$ 13,936.00	BID	2	2/Feb 87	1	Abandon
3820009418565	CRUSH SCRN P/IT 75 TB W/GEN	\$135,000.00	DIDD	1			
3820009418565	CRUSH SCRN P/IT 75 TB W/GEN	\$135,000.00	BIDJ	1			
3820009508584	PNED TL COMP 250 CFM TLR MT	\$ 11,230.00	BID	5			
3820009508584	PNED TL COMP 250 CFM TLR MT	\$ 13,602.00	DIDD	3			
3895001903313	PAVG MACH BIT 8-12 FT	\$ 24,926.00	BIDJ	1			
3895001903313	PAVG MACH BIT 8-12 FT	\$ 19,941.00	KIDD	1			
3895001948534	ROLLER MCHD 5-8 TON	\$ 9,298.00	DIDD	1	1/Mar-83	0	64-9019
3895002211771	HAMMER P-D 3000 LB	\$ 467.00	BID	2			
3895002211771	HAMMER P-D 3000 LB	\$ 1,094.00	BIDJ	2			
3895002238210	SPREADR AGGREGATE 8 FT	\$ 1,439.00	BIDJ	3	3/Jun 89	0	64-9024
3895002238210	SPREADR AGGREGATE 8 FT	\$ 1,439.00	DIDD	1	1/Feb-87	0	Abandon
3895002238210	SPREADR AGGREGATE 8 FT	\$ 1,439.00	BIDJ	5			
3895002238840	CAP WOOD PICE 3000 LB.	\$ 583.00	BIDJ	2			
3895002271599	ROLLER TWD 13 TIRES	\$ 1,638.00	BIDJ	3	3/Jun 89	0	64-9024
3895002271599	ROLLER TWD 13 TIRES	\$ 1,639.00	BID	6	1/Jun-89	7	64-9024
3895002271599	ROLLER TWD 13 TIRES	\$ 1,940.00	DIDD	1	1/Feb-87	0	Abandon
3895002385094	MIXER CON AIR CL 16 CF	\$ 4,059.00	BID	5	5/Feb-81	0	64-1030
3895002385094	MIXER CON AIR CL 16 CF	\$ 4,940.00	PID	1	1/Feb 81	0	64-1030
3895002385094	MIXER CON AIR CL 16 CF	\$ 4,038.00	BID	4	2/Feb-81		64-1030
					1/Jun 89	1	64-9024

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
3895002477592	KETTLE HEAT BIT 165 G	\$ 2,000.00	BID	6	6/Jun 89	0	64-9024
3895002477592	KETTLE HEAT BIT 165 G	\$ 2,000.00	BID	1	1/Feb-81	0	64-1030
3895002477592	KETTLE HEAT BIT 165 G	\$ 1,600.00	BID	2	2/Feb 87	0	Abandon
3895002526896	RL-31 REEL MACHINE	\$ 138.00	BIDN	150			
3895002630121	ROLLER TWD SEPSPT 2 DR	\$ 2,256.00	BID	4	2/Jun 89	2	64-9024
3895002630121	ROLLER TWD SEPSPT 2 DR	\$ 2,256.00	PTD	1			
3895002630121	ROLLER TWD SEPSPT 2 DR	\$ 2,256.00	DIDD	2	1/Feb 87	0	Abandon
3895002727768	TRIER HXE BITUM CONCRT		PTD	1			
3895005300169	ROLLER TWD BWD TIRRD	\$ 10,209.00	BIDJ	4	2/Feb-81		64-1030
					1/Jun 89		64-9024
					1/Jun-89	0	64-9024
3895006634680	DISTR BIT 800G TRK MTD	\$ 19,543.00	BID	2	2/Mar-89	0	64-3019
3895006634680	DISTR BIT 800G TRK MTD	\$ 17,840.00	BIDJ	1	1/Jun 89	0	64-9024
3895006634680	DISTR BIT 800G TRK MTD	\$ 15,610.00	BIDJ	1	1/Jun-89	0	64-9024
3895007528830	HEATER ASPHALT 900 GPH	\$ 6,037.00	DIDD	2			
3895009227024	ROLLER MTD FMT-9 TIRE SP	\$ 8,874.00	BIDJ	4	2/Jun-89	2	64-9024
3895009568916	HEATER BIT 2100Z00	\$ 7,564.00	DIDD	1			
3895009650072	ROLLER MTD 10 TN	\$ 10,216.00	BIDJ	7	1/Mar-83	6	64-3019
3895009650072	ROLLER MTD 10 TN	\$ 10,216.00	BID	5			
3895009650072	ROLLER MTD 10 TN	\$ 10,216.00	DIDD	1	1/Feb 81	0	64-1030

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
3950000501098	CRANE TRK WISE 10000 LB	\$ 16,451.00	PTD	1			
3950003294210	CRANE WAREHOUSE 5000 LB	\$ 3,971.00	DID	1			
3950003294210	CRANE WAREHOUSE 5000-LB	\$ 9,147.00	DIDD	1			
3910002987088	CONVEYOR BELT-300 -EPH-57-PT		DIDD	12			
3930000539168	TRK-LIFT-6-M-SRT-GED-127	\$ 6,457.00	BIDR	4	2/Feb-87	2	Abandon
3930000539168	TRK-LIFT-6-M-SRT-GED-127	\$ 6,942.00	BIDK	10	3/Jun-89	7	64-9009
3930000539176	TRK-LIFT-4-M-LB-GED-PT144		PIDZ	1	1/Feb-81	0	64-1030
3930000539176	TRK LIFT 4 M LB GED PT144		BIDZ	2			
3930000539187	TRK LIFT 15 M LB GED PT	\$ 11,527.00	BIDK	2			
3930000539187	TRK-LIFT-16-M-LB-GED-PT	\$ 17,215.00	PIDE	4			
3930000539187	TRK LIFT 15 M LB GED PT		BIDE	1			
3930000539192	TRK LIFT 4 M SRT GED 100		BIDZ	8	3/Feb 87	5	Abandon
3930000539197	TRK LIFT 6 M LB GED PT	\$ 6,560.00	BIRA	3	1/Jun 89	2	64-9024
3930000539197	TRK LIFT 6 M LB GED PT	\$ 6,560.00	BIDJ	7			
3930000539214	TRACTOR WISE 4 M PT GED	\$ 3,606.00	BIDJ	1			
3930000539214	TRACTOR WISE 4 M PT GED	\$ 3,606.00	BIDA	2			
3930000699039	TRK-LF-6-M-LB-GED-PT-168	\$ 6,560.00	PIDE	4			
3930000699039	TRK LF 6 M LB GED PT 168	\$ 15,286.00	PIDQ	1	1/Feb 81	0	64-1030
3930000699039	TRK-LF-6-M-LB-GED-PT-168	\$ 17,708.00	BIDT	1	4/Feb-81	0	64-1030
3930000699039	TRK LP 6 M LB GED PT 168	\$ 19,680.00	PIDE	2	2/Feb 81	0	64-1030

NSN	NOMENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
3930000738750	TRK LP 10 M LB PT DED RT	\$ 67,288.00	BIDV	1			
3930004890263	TRK LP 6 M SRT CED 180	\$ 6,942.00	BIDK	10			
3930005545204	TRK LP 6000 LB CED PT	\$ 5,871.00	BIDJ	2	2/Oct-81	0	64-2009
3930005545204	TRK LP 6000 LB CED PT	\$ 6,685.00	BIDH	2			
3930005545207	TRK LP 6000 LB CED PT	\$ 7,622.00	BIDH	1	1/feb-81	0	64-1030
3930005545207	TRK LP 6000 LB CED PT	\$ 7,622.00	BIDK	2			
3930006789913	TRK LP CED 4 M 144 PT		BIDZ	6			
3930008566897	TRK LP CED 10 M LB(463L)		DIDD	5			
3930009257844	TRK LP 6 M CED 180 IN LB	\$ 6,942.00	BIDH	3			
6720004989856	CAMERA EQUIPT	\$ 407.00	BIDJ	3			
6730000525618	PROJECTOR O/H TYP	\$ 243.00	PIDE	1			
67300016M302K	PROJECTOR MP 16 MM(MAGN/OPT)	\$ 978.00	KID	4			
67300016M302K	PROJECTOR MP-16 MM(MAGN/OPT)	\$ 732.00	PIDE	10			
67300016M302K	PROJECTOR MP 16 MM(MAGN/OPT)	\$ 798.00	BIDV	2			
6730002405135	PK-652/PEP-1 PROJECTR	\$ 379.00	BID	3			
6730003565665	AN/FPF-1 PROJECTR	\$ 446.00	BID9	8			
6730003565665	AN/FPF-1 PROJECTR	\$ 446.00	PID	3			
6730003565665	AN/FPF-1 PROJECTR	\$ 446.00	KID	2			
6730004704003	PROJECTR OVERHEAD MDL 567	\$ 215.00	KID	4			
6730004704003	PROJECTR OVERHEAD	\$ 148.00	PIDE	15			
6730004704003	PROJECTR-OVERHEAD	\$ 148.00	BIDZ	10			

NSN	NOVENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
6730004704003	PROJECTR OVERHEAD	\$ 148.00	BIDV	9			
6730005379268	AP-5 PROJECTOR	\$ 305.00	BID	3			
6730005988534	AP-9-1-PROJECTR	\$ 125.00	BID	1			
6730007029023	PROJECTOR-SEIDE		PIDE	12			
6730007286816	PROJECTR-OVERHEAD-MODEL-66	\$ 150.00	KID	4			
6730007286816	PROJECTR O/ERHEAD MODEL 66	\$ 150.00	PID	4			
6730007286816	PROJECTR O/ERHEAD-MODEL-66	\$ 150.00	BID9	4			
6730009090704	PROJECTR-SEIDE	\$ 50.00	BIDV	2			
6730009781499	PROJECTR-ROUND-16-144	\$ 426.00	PIDE	2			
6780006070030	PHOTO-SET	\$ 1,749.00	BIDJ	3			
691000EELP001	ENG-LANG-TSN-FORFABLEE	\$ 375.00	DID	1			
691000EELT020B	ENG-LANG-TSNR-20-BOOTH	\$ 14,758.00	DID	2			
691000EELT020B	ENG LANG TSNR 20 BOOTH	\$ 24,858.00	KID	3			
691000EELT10MK	10 POS LANG LAB MAINT KIT.	\$ 650.00	PIDE	1			
691000EELT10MK	10-POS-LANG-LAB-MAINT-KIT	\$ 650.00	BIDA	3			
691000EELT10MK	10-POS LANG-LAB-MAINT-KIT	\$ 650.00	KID	1			
691000EELT20MK	20 POS LANG LAB MAINT KIT	\$ 960.00	BIDM	2			
691000EELT20MK	20-POS LANG-LAB-MAINT-KIT	\$ 960.00	DID	1			
691000EELT20MK	20 POS LANG LAB MAINT KIT	\$ 960.00	KIDQ	1			
691000EELT20MK	20-POS-LANG-LAB-MAINT-KIT	\$ 960.00	DIDD	2			
691000EELT20HT	ENG-LANG-LAB-TRN-20-BOOTH	\$ 15,699.00	BIDH	2			

NSN	NONEXPLANATION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
691000ELT20WT	ENG LANG LAB TRN 20 BOOTH	\$ 17,000.00	DID	1			
691000ELT20WT	ENG LANG LAB TRN 20 BOOTH	\$ 17,500.00	BID	1			
691000ELT20WT	ENG LANG LAB TRN 20 BOOTH	\$ 17,500.00	KID	1			
691000ELT20HD	ENG LANG LAB TRN 20B W/O CH	\$ 13,200.00	DID	1			
691000ELT30HK	POS LANG LAB MAINT KIT	\$ 1,400.00	BID	1			
691000ELT30HK	POS LANG LAB MAINT KIT	\$ 1,400.00	DID	1			
691000ELT30HK	POS LANG LAB MAINT KIT	\$ 1,400.00	PID	1			
691000ELT30HK	POS LANG LAB MAINT KIT	\$ 2,400.00	BID	1			
691000ELT30HK	POS LANG LAB MAINT KIT	\$ 23,500.00	BID	1			
691000LLK10HK	10 POST LANG LAB MAINT KIT	\$ 650.00	BIDA	1			
691000LLK10HK	10 POST LANG LAB MAINT KIT	\$ 650.00	DID	1			
691000LLK20HK	10 POST LANG LAB MAINT KIT	\$ 960.00	DID	4			
691000LLK20HK	10 POST LANG LAB MAINT KIT	\$ 960.00	BID	7			
691000LLK20HK	10 POST LANG LAB MAINT KIT	\$ 1,461.00	BIDA	12			
691000LLK320KO	LANG LAB 20 BOOTH W/O CH	\$ 7,900.00	BIDA	1			
691000ELK320WB	LANG LAB 20 BOOTH W/O CH	\$ 13,200.00	DID	3			
691000LLK320KO	LANG LAB 20 BOOTH W/O CH	\$ 13,200.00	BIDA	10			
691000ELK320WB	LANG LAB 20 BOOTH W/O CH	\$ 11,625.00	BID	1			
6910003522079	TRAINR(ENG)-31N	\$ 9,800.00	KID	1			
6910003556538	TRAINR-AID WDE-3R09-12	\$ 1,987.00	BID	1			
6910003581701	TRAINR-HD MAP INST RDG	\$ 1,855.00	BID	7			
6910003581701	TRAINR AID MAP INST RDG	\$ 1,931.00	BID	2			
6910003581701	TRAINR-AID MAP INST RDG	\$ 1,750.00	BIDA	1			
6910003759105	TRAIN-AID RIPEE-124-PT	\$ 932.00	KID	3			

NSN	NOVENCATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
6910009789632	PROJ OVERHEAD PORTABLE	\$ 169.00	BID	10			
6910009789632	PROJ OVERHEAD PORTABLE	\$ 322.00	BIDA	20			
6920000456537	MORTAR TRAINER M32AL	\$ 388.00	BID	10			
6928000456537	MORTAR TRAINER M32AL	\$ 27159.00	BIDA	5			
6920006785279	TRGT HELD MECH TRNFR	\$ 305.00	BID	10			
6920006785279	TRGT BLDG MECH TRNFR	\$ 305.00	BIDA	70			
6920006788478	TRGT MECH NIGHT FIR	\$ 1,492.00	BID	10			
6920006788478	TRGT MECH NIGHT FIR	\$ 1,492.00	BIDA	4			
6930002056473	C/YIC INSTRUMENT FLIGHT	\$ 8,797.00	DID	4			
6940002431966	AN/PCC-TI TRAINER	\$ 4,840.00	BID	1			
6940002431972	AN/GSC-TI CODE TRAINING	\$ 259.00	BID	2			
761000512894	AF HAF LIBRARY SET	\$ 6,185.00	DID	1			
1670005759135	DOWNY PARACHUTE DROP	\$ 505.00	BIDT	4			
1670005980751	FRCHT PRES HAIN MURBLE	\$ 377.00	BIDT	1000			
1670008924218	FRCHT RES PRES MURBLE	\$ 166.00	BIDT	1000			
1670010117497	KIT TROOPER MEDIUM	\$ 1,265.00	BIDT	75			
1670010117500	KIT JUMP MASTER MEDIUM	\$ 1,310.00	BIDT	5			
3210000000002	SAMMILL 72 IN BAND SAW	\$ 71,920.00	BID	1			

NSN	NOMENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
3220009396693	SHOP EQ WD/MKG TRL W/GEN	\$ 9,671.00	BIDJ	2			
3220009396693	SHOP EQ WD/MKG TRG W/GEN	\$ 7,812.00	BIDJ	1			
3220009396693	SHOP EQ WD/MKG TRL W/GEN	\$ 7,412.00	BID	1	1/JUN 89	0	64-9009
3220009396693	SHOP EQ WD/MKG TRG W/GEN	\$ 7,812.00	BIDA	2	2/JUN 89	0	64-9024
3405002221324	SAM-BAND M-1 CUTTING	\$ 6,685.00	DIDD	2	1/MAY 86	1	64-6020
3405002949591	SAM-BAND METAL CUTTING	\$ 4,973.00	PIDE	2	2/MAY 86	0	64-6020
3405003519704	SAM-BANK	\$ 4,909.00	DIDD	2			
3405005277746	FILEING MACH SAW BLADE	\$ 880.00	PIDE	1			
3405008221593	SAM POWER HACK HORIZ	\$ 3,925.00	PIDE	2	2/MAR 86	0	64-6020
3405008121593	SAM POWER HACK HORIZ	\$ 10,924.00	BIDH	1			
3413005171045	DRILL MACH UPRIGHT 1 IN	\$ 681.00	PIDE	2	2/MAR 86	0	64-6020
3415002236336	GRIND MACH SURFACE HOR	\$ 24,760.00	BIDH	1			
3415002236481	GRIND MACH SURFACE	\$ 5,346.00	KID	1	1/MAY 86	0	64-6020
3415002236481	GRIND MACH SURFACE	\$ 4,831.00	BIDE	1			
3415002425735	GRIND MACH UTIL BOCH	\$ 535.00	KID	1	1/MAY 86	0	64-6020
3415002425735	GRIND MACH UTIL HACH	\$ 535.00	BIDH	3	2/AUG 86	0	64-6026
3415002425735	GRIND MACH UTIL HACH	\$ 535.00	PIDE	4	1/MAY 86	0	64-6020
3415002500895	GRIND MACH ROCK BIT	\$ 1,614.00	KID	2			
3415002768884	GRIND MACH TOOL CUT	\$ 10,841.00	PIDE	1	1/MAR 86	0	64-6020

MAP INVENTORY

NSN	MANUFACTURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
3415005170601	GRINDING MACH SAW TOOTH	\$ 227.00	BIDD	1			
341600576960	LATHE ENGINE FLECTD	\$ 18,630.00	DIDD	1			
341600576960	LATHE ENGINE FLECTD	\$ 24,708.00	PIDE	1			
341600602724	LATHE ENGINE	\$ 3,120.00	DIDD	1			
341600602724	LATHE ENGINE	\$ 9,394.00	DIDD	1	1/May 86	0	64-6020
3416001864060	LATHE ENGINE FLOOR MTD	\$ 12,018.00	DIDD	2			
3416001864060	LATHE ENGINE FLOOR MTD	\$ 13,980.00	PIDD	1			
3416008263890	LATHE ENGINE BENCH MTD	\$ 10,401.00	PIDD	1	1/May 86	0	64-6020
3417003571948	MILL MACH HORIZ PLN SHP	\$ 7,359.00	BIDD	1	1/May 86	0	64-6020
3417006244254	MILL MACH ADJ SWL	\$ 11,998.00	BIDR	1	1/Jun 86	0	64-9010
3417006244254	MILL MACH ADJ SWL	\$ 348.00	BIDR	1			
3418002230960	SHAPER METAL CUT HORIZ	\$ 1,075.00	DIDD	2	1/May 86	1	64-6020
3419002231976	BUFFING+POLISHING MACH	\$ 1,717.00	DIDD	1			
3424002439746	FURNACE HEAT TREAT EL	\$ 783.00	DIDD	2			
343100258357	WELDING MACHINE		DIDD	2			
3431003602785	WELDING MACHINE	\$ 3,283.00	DIDD	2			
3431006186004	WELDING MACHINE AC/DC 500A	\$ 2,991.00	PIDE	4	4/May 86	0	64-6020
3431007314163	WELDING SET ALUMINIUM	\$ 3,159.00	PIDE	7	3/May 86	4	64-6020

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
3431009035647	WLDG MCH 300 AMP SKDWT	\$ 3,753.00	BIPP	1	1/AUG 86	0	64-6026
3431009035647	WLDG MCH 300 AMP SKDWT	\$ 4,248.00	PIDE	6			
3431009035647	WLDG MCH 300 AMP SKDWT	\$ 6,690.00	PIDO	2	2/AUG 86	0	64-6026
3431009035647	WLDG MCH 300 AMP SKDWT	\$ 7,922.00	PIDE	2	2/MAY 86	0	64-6020
3431009357821	WLDG SHOP CARGO TLR HT	\$ 6,046.00	DIDD	1			
3432008924460	WLDG MACH SPOT ROCKER ARM	\$ 2,606.00	PIDE	1	1/MAY 86	0	64-6020
3433002646205	TORCH OUTFIT CUT-WEL	\$ 1,109.00	DIDD	3	3/MAY 86	0	64-6020
3433002646205	TORCH OUTFIT CUT-WEL	\$ 1,009.00	BIDF	2			
3433002646205	TORCH OUTFIT CUT-WEL	\$ 1,009.00	DIDD	1			
3433002646205	TORCH OUTFIT CUT-WEL	\$ 1,009.00	KID	2	2/JUN 89	0	64-9024
3433002646206	TORCH OUTFIT SET NO.2	\$ 413.00	DIDD	1			
3433002646206	TORCH OUTFIT SET NO.2	\$ 413.00	BIDF	5			
3433002646206	TORCH OUTFIT CUT-WELD NO.2	\$ 413.00	BIDF	2			
3433002728075	METALIZING OUTFIT SUPP	\$ 1,217.00	BIDJ	2			
3441002390702	BRAKE MACH SHEET METL	\$ 983.00	PIDE	1			
3441002657137	BRAKE MACH SHEET METL	\$ 983.00	PIDE	1			
3441002657137	BRAKE MACH SHEET METL	\$ 983.00	BIDN	1			
3445002946467	SHEAR MACH METL SQUAR	\$ 1,622.00	BIDH	1	1/MAY 86	0	64-6020
3445002946467	SHEAR MACH METL SQUAR	\$ 1,622.00	PIDE	2			
3445002946467	SHEAR MACH METL SQUAR	\$ 4,142.00	BIDH	1	1/MAY 86	0	64-6020
3445003576789	PUNCHING MACH METL BND	\$ 1,399.00	PIDE	2	1/MAY 86	1	64-6020
3449002630097	SHARP MACH INT. FTT. PNFBI	\$ 3,619.00	PIDE	2	2/MAY 86	0	64-6020

MAP INVENTORY

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
3449002734259	METAL WORKING SET	\$ 4,432.00	DIDD	2			
3470002646205	TORCH OUTFIT CUT WELD	\$ 2,780.00	PIDE	6			
3470003487597	SS WELDING FMP	\$ 4,191.00	BIDN	1			
3470003487597	SS WELDING FMP	\$ 5,460.00	BIDN	1			
3470003487578	SS WELDING FMP	\$ 4,943.00	KID	2			
3470003577268	SS WELDING FM	\$ 6,683.00	BIDH	1			
3470003577268	SS WELDING FM	\$ 14,422.00	BIDH	1			
3470007540695	SS BLACKSMITH AND WELD..	\$ 32,913.00	KID	1			
3470007540708	SS FM MACH BASIC LP	\$ 1,885.00	BIDH	1			
3470007540738	SS MACH FM HVY LP	\$ 38,454.00	BIDH	1			
3470007540739	SS MACH FM HVY	\$ 17,568.00	BIDH	1			
3470009190068	SS MACH FM BASIC	\$ 10,307.00	BIDH	2			
3470009190068	SS MACH FM BASIC RP	\$ 13,750.00	BIDH	2			
3470009190072	SS MACH FM HEAVY	\$ 21,270.00	BIDH	1			
3470009190073	SS MACH FM HEAVY	\$ 17,884.00	BIDH	1			
3470009190073	SS MACH FM HEAVY	\$ 25,546.00	BLOH	1			
361000430299	PRIG HEAT DEV MACH	\$ 393.00	BID	1			
3610000430299	PRIG HEAT DEV MACH	\$ 393.00	PLD	1			
3610001303612	DUP MACH STENCIL PROC	\$ 997.00	BIDZ	2			
3610001303612	DUP MACH STENCIL PROC	\$ 997.00	BLVAT	2			

MAP INVENTORY

NSN	NOMENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
3610001303632	DOP MACH STENCIL PROC	\$ 601.00	BIDA	10			
3610001745271	REPRO SET SILK SCREEN	\$ 1,043.00	BID	1			
3610001745271	REPRO SET SILK SCREEN	\$ 1,043.00	BIDA	1			
3610002042278	PRTG PRESS LTR PRESS	\$ 7,400.00	BID	1			
3610002042278	PRTG PRESS LTR PRESS	\$ 16,331.00	BIDA	1			
3610002141017	DOPL MACH OFFSET PROCESS	\$ 4,192.00	BIDO	1			
3610002656801	DOPL MACH STENCIL PROC	\$ 841.00	BID	2			
3610002656801	DOPL MACH STENCIL PROC	\$ 841.00	PIDE	2			
3610007532263	REPRO SET MOIST PROC	\$ 1,526.00	BIDJ	3			
3610007532263	REPRO SET MOIST PROC	\$ 1,803.00	BIDA	5			
3610007532263	REPRO SET MOIST PROC	\$ 1,803.00	BID	5			
3610008893246	REPRO EXP SUP SET M-PR	\$ 306.00	BIDJ	3			
3610008893254	CAMERA COPYING LITHO	\$ 10,255.00	BIDA	1			
3655005402733	TLR OXY HIPRES GASEOUS BCY	\$ 1,631.00	DIDD	1			
3695006796914	CHAIN SAW 18 IN	\$ 144.00	BID	16	6/Jun 89	10	64-9006
3695006796914	CHAIN SAW 18 IN	\$ 187.00	BID	14			
3695006796914	CHAIN SAW 18 IN	\$ 187.00	KIDQ	9			
3695006796914	CHAIN SAW 18 IN	\$ 198.00	BIDN	3	1/Jun 89	2	64-9024
3695006796914	CHAIN SAW 18 IN	\$ 147.00	BIDM	18			
3695006796914	CHAIN SAW 18 IN	\$ 220.00	BIDM	21	10/Feb 81	11	64-1030

MAP INVENTORY

<u>NSN</u>	<u>NOMENCLATURE</u>	<u>PRICE/UNIT</u>	<u>SERVICE</u>	<u>ISSUED</u>	<u>DISPOSAL</u>	<u>BALANCE</u>	<u>REMARKS</u>
4240009264199	MASK PROT M17AL SMALL	\$ 23.00	BIDA	50			
4240009264200	MASK PROT M17AL LARGE	\$ 23.00	BIDA	50			
4240009264201	MASK PROT M17AL MEDIUM	\$ 23.00	BIDA	70			
4430005414636	OVEN THERM DRY	\$ 2,348.00	DIDD	1			
4910000104948	TK 4 ECH M 602 TRK	\$ 710.00	BIDH	1			
4910000311514	BORING MACH CAM - MAIN	\$ 2,999.00	BIDJ	1	1/Jan 89	0	64-9024
4910000311514	BORING MACH CAM - MAIN	\$ 5,704.00	FIDQ	1	1/May 86	0	64-6020
4910000710741	TK 3 ECH ST M39 AZ TRK	\$ 196.00	BDD	7			
4910000710741	TK 3 ECH 5 TH 39 AZ TRK	\$ 355.00	KID	4			
4910000710742	TK FIELD MAINT 4 ECH	\$ 1,707.00	BIDH	2			
4910000710742	TK FIELD MAINT 4 ECH	\$ 1,708.00	KIDQ	1			
4910000710746	S/S RADIATOR TST RPR	\$ 6,005.00	BIDH	1			
4910000710746	S/S RADIATOR TST RPR	\$ 17,906.00	BIDH	1			
4910001905245	SPREADER TIRE PNEUMAT	\$ 3,220.00	FIDQ	1			
4910002239734	BORING MACH ENGINE CYL	\$ 1,464.00	BIDH	1			
4910002239734	BORING MACH ENGINE CYL	\$ 3,469.00	BIDA	1			
4910002521372	GRIND MACH VLV	\$ 2,056.00	KIDS	1	1/May 86	0	64-6020
4910002620390	ALIGNMENT SERVICE UNIT	\$ 11,593.00	KIDS	2			

MAP INVENTORY

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
4910002627532	SHOP EQUIP ENGINE REPAIR	\$ 17,580.00	BIDZ	1			
4910003001305	TEST SET IGNITION COIL	\$ 82.00	BID	2			
4910003001305	TEST SET IGNITION COIL	\$ 82.00	BIDZ	5			
4910003001305	TEST SET IGNITION COIL	\$ 82.00	BIDH	2			
4910003907774	SS FM AUTO FUEL ELECT	\$ 6,811.00	BIDH	1			
4910004430976	TESTER INJ PUMP	\$ 6,647.00	BID	1	1/May 86	0	64-6020
4910004736361	BORING MACH ENG CYL	\$ 1,069.00	BIDJ	1			
4910004736361	BORING MACH ENG CYL	\$ 1,531.00	KIDZ	2			
4910004736361	BORING MACH ENG CYL	\$ 1,549.00	BIDH	2			
4910004736361	BORING MACH ENG CYL	\$ 2,623.00	BIDH	1			
4910005166192	LATHB BRAKE DRUM FLNT	\$ 1,010.00	BIDJ	1			
4910005166192	LATHB BRAKE DRUM FLNT	\$ 1,163.00	BIDJ	1			
4910005406103	GRINDING MACHINE CRANKSHAFT	\$ 11,216.00	KID	2			
4910005665209	BORING MACHINE CNCTG	\$ 7,153.00	BIDH	1	1/Jun 89	0	64-9024
4910006041833	TK CARBURATOR 3-4 ECH	\$ 138.00	BIDZ	5			
4910006277052	TK 4 ECH M 151 TRK	\$ 181.00	BIDH	1			
4910007540650	TK CM NO 2 COMMON LP	\$ 2,485.00	BIDJ	5			
4910007540650	TK CM NO 2 COMMON LP	\$ 3,165.00	BIDF	2			
4910007540650	TK CM NO 2 COMMON LP	\$ 3,165.00	BIDS	1			
4910007540650	TK CM NO 2 COMMON LP	\$ 3,170.00	BID	1			
4910007540650	TK CM NO 2 COMMON LP	\$ 3,170.00	BIDJ	7			

MAP INVENTORY

PAGE NO.51

NSN	NOMENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
4910007540653	TK CH NO 1 SUPPL	\$ 817.00	DIDD	2			
4910007540653	TK CH NO 1 SUPPL	\$ 817.00	BIDJ	5			
4910007540653	TK CH NO 1 SUPPL	\$ 817.00	BID	2			
4910007540653	TK CH NO 1 SUPPL	\$ 817.00	BIDJ	8			
4910007540653	TK CH NO 1 SUPPL	\$ 817.00	BID	7			
4910009190076	SS EN AUTO MOTIVE BASIC WP	\$ 46,278.00	BIDH	1			
4910007540654	TK CH NO 1 COMMON	\$ 1,066.00	DID	1			
4910007540654	TK CH NO 1 COMMON	\$ 1,066.00	BIDJ	5			
4910007540654	TK CH NO 1 COMMON LP	\$ 1,300.00	BID	1			
4910007540654	TK CH NO 1 COMMON LP	\$ 1,300.00	BID	9			
4910007540654	TK CH NO 1 COMMON LP	\$ 1,300.00	BIDJ	8			
4910007540655	AUTO FUEL ELECTRIC	\$ 39.00	DIDD	1			
4910007540655	AUTO FUEL ELECTRIC	\$ 39.00	BIDJ	15			
4910007540655	AUTO FUEL ELEC LP	\$ 39.00	BID	2			
4910007540655	AUTO FUEL ELEC LP	\$ 39.00	BIDH	5			
4910007540655	AUTO FUEL ELEC LP	\$ 39.00	KID	3			
4910007540655	TK AUTO FUEL ELECTRIC	\$ 39.00	BIDZ	5			
4910007540655	TK AUTO FUEL ELECTRIC	\$ 51.00	BIDH	4			
4910007540655	TK AUTO FUEL ELECTRIC	\$ 51.00	BIDZ	1			
4910007540655	TK AUTO FUEL ELECTRIC	\$ 51.00	BIDH	4			
4910007540682	SS DM ENG REILD NO 16	\$ 38,825.00	BIDJ	1			
4910007540690	SS POWER ENG TRAIN REBUILD	\$ 9,172.00	BIDH	1			

MAP INVENTORY

PAGE NO.52 ✓

NSN	NOMENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
4910007540705	SS FM AUTOMV BASIC LP	\$ 13,400.00	BIDN	2			
4910007540705	SS FM AUTOMV BASIC LP	\$ 15,090.00	BIDN	1			
4910007540705	SS FM AUTO SUPPL NO 1 LP	\$ 11,888.00	BIDH	2			
4910007540714	SS FM AUTOFDEL ELEC LP	\$ 2,493.00	BIDH	1			
4910007950225	TK 4 ECH M 37 TRK	\$ 343.00	BIDH	1			
4910007950308	TK 4 ECH M 38 TRK	\$ 364.00	BIDH	1			
4910007950355	TK 5 ECH M 35 TRK ENG	\$ 542.00	PID	10			
4910008021423	RELINER BRAKE CLUTCH FL	\$ 170.00	BIDM	2	1/May 86	1	64-6020
4910008177431	TESTER FUEL INJECTION	\$ 10,763.00	BIDH	1	1/May 86	0	64-6020
4910009123960	TEST STAND IGMN MGMTD	\$ 2,175.00	DIDD	3	1/Jun 89	2	64-9024
4910009123961	DYNAMOMTR RUN IN 500HP	\$ 8,367.00	BIDH	2	1/May 86	1	64-6020
4910009123961	DYNAMOMTR RON IN 500HP	\$ 23,903.00	BIDH	2			
4910009190076	SS FM AUTO MOTIVE BASIC WP	\$ 21,841.00	BIDM	1			
4910009190076	SS FM AUTO MOTIVE BASIC WP	\$ 41,833.00	BIDG	1			
4910009190078	SS FM AUTO SUPL NO 1 WP	\$ 30,617.00	BIDH	1			
4910009190082	TK CM NO 2 COMMON WP	\$ 8,300.00	BIDS	2			
4910009190082	TK CM NO 2 COMMON WP	\$ 9,495.00	KIDQ	2			
4910009190082	TK CM NO 2 COMMON WP	\$ 13,879.00	BIDM	1			
4910009190082	TK CM NO 2 COMMON WP	\$ 10,987.00	PIDQ	1			

MAP INVENTORY

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
491009190083	FM AUTO FUEL ELEC WP	\$ 6 400.00	BIDH	1	1/Jun 89	0	64-9009
491009190083	FM AUTO FUEL ELEC WP	\$ 6 400.00	BIDN	2			
491009190097	TK OH NO 1 SUPPLY WP	\$ 3,672.00	KIDQ	1			
491009190097	TK OH NO.1 SUPPLY WP	\$ 3,672.00	BIDZ	1			
491009190098	TK OH NO.1 COMMON	\$ 1,700.00	KIDQ	2			
491009190098	TK OH NO.1 COMMON	\$ 1,700.00	BIDZ	2			
491009603612	TK FIELD MAINT ECH	\$ 2,135.00	BIDZ	1			
491008428315	LOB SVC TLR MTD 15 CFM	\$ 4,023.00	BID	6	4/Feb 81	2	64-1030
491008428315	LOB SVC TLR MTD 15 CFM	\$ 4,827.00	DIDD	2			
491008428315	LOB SVC TLR MTD 15 CFM	\$ 4,827.00	BIDJ	6	2/Jun 89	0	64-9010
491008428315	LOB SVC TLR MTD 15 CFM	\$ 4,827.00	BIDJ	10			
491008428315	LOB SVC TLR MTD 15 CFM	\$ 4,827.00	KID	3	3/Jun 89	0	64-9009
491008428315	LOB SVC TLR MTD 15 CFM	\$ 4,827.00	BID	5	3/Jun 89	2	64-9024
491009478243	TK FIRE CONT INSTR RPM	\$ 164.00	BIDN	1			
491009478243	TK FIRE CONT INSTR RPM	\$ 199.00	BIDH	3			
491003487393	S6 SMALL ARMS POST CNP	\$ 2,022.00	BIDH	1			
491003487394	SS SMALL ARMS FN	\$ 2,812.00	BIDH	1			
491003487394	SS SMALL ARMS FN	\$ 2,812.00	BIDZ	1			
491003487394	SS SMALL ARMS FN	\$ 6,803.00	BIDH	1			
491003577770	TK SMALL ARMS REFRN	\$ 78.00	BIDZ	4			
491003577770	TK SMALL ARMS REFRN	\$ 78.00	BID	5			

MAP INVENTORY

PAGE NO. 54 ✓

NSN	MOVEMENT	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
4933003577770	TK SMALL ARMS REPAIR	\$ 78.00	BIDH	2			
4933003577770	TK SMALL ARMS REPAIR	\$ 78.00	BIDB	4			
4933003577770	TK SMALL ARMS REPAIR	\$ 152.00	BIDM	5			
4933003577770	TK SMALL ARMS REPAIR	\$ 152.00	BIDE	2			
4933007540664	TS SMALL ARMS FIELD MAINT	\$ 1,164.00	BIDH	1			
4933007540664	TS SMALL ARMS FIELD MAINT	\$ 3,940.00	BIDB	1			
4933007540704	SS FM ARMY	\$ 1,164.00	BIDH	1			
4933007540704	SS FM ARMY	\$ 9,043.00	BIDH	1			
4933007750366	TS SM / ARMS WEAPON	\$ 175.00	BIDZ	4			
4933009190102	SS FM ARMY WP	\$ 1,823.00	BIDM	2			
4933009190103	SS FM SMALL ARMS WP	\$ 2,195.00	BIDM	1			
4933009190103	SS FM SMALL ARMS WP	\$ 5,251.00	BIDH	1			
4940002550246	DEGREASER VAPR TYP 72	\$ 3,200.00	PIDQ	1			
4940002558246	DEGREASER VAPR TYP 72	\$ 3,200.00	BIDH	1			
4940002874894	SHOP EQ GP RPR HVY SMT	\$ 58,559.00	DIDP	1			
4940002874894	SHOP EQ GP RPR HVY SMT	\$ 38,559.00	BIDJ	1			
4940002949516	SHOP EQ ORG REPAIR LT TK	\$ 37,382.00	BID	1			
4940002949516	SHOP EQ ORG REPAIR LT TK	\$ 43,556.00	BIDJ	1			
4940002949516	SHOP EQ ORG REPAIR LT TK	\$ 47,560.00	BIDJ	4			
4940002949518	SHOP EQ CONT MAINT TRK	\$ 14,495.00	BID	6	2/JUN 89	4	64-9024

NSN	NOMENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
4940002949518	SHOP EQ CONT MAINT TRK	\$ 14,495.00	DIDD	1	1/Jun 89	0	64-9009
4940002949518	SHOP EQ CONT MAINT TRK	\$ 10,879.00	BIDS	1	1/Mar 83	0	64-3019
4940002949518	SHOP EQ CONT MAINT TRK	\$ 10,879.00	BIDR	1	1/Mar 83	0	64-3019
4940003226016	SHOP SET SPR PTS STOR FN-1	\$ 895.00	BIDN	4			
4940003226016	SHOP SET SPR PTS STOR FN-1	\$ 895.00	BIDM	4			
4940003226016	SHOP SET SPR PTS STOR FN-1	\$ 1,259.00	BIDM	1			
4940003487490	SHOP EQUIPT MTL/WRKG STA	\$ 4,807.00	DIDD	2			
4940003577737	TK GLASS CUTTING DM	\$ 776.00	BIDR	1			
4940003577737	TK GLASS CUTTING DM	\$ 915.00	BIDM	1			
4940003577737	TK GLASS CUTTING DM	\$ 974.00	BIDZ	1			
4940003577737	TK GLASS CUTTING DM	\$ 974.00	BIDM	1			
4940003577737	TK GLASS CUTTING DM	\$ 1,836.00	BIDR	1			
4940004736218	CLEANER STEAM PRESSURE	\$ 2,953.00	DIDD	1	1/Aug 86	0	64-6026
4940004736218	CLEANER STEAM PRESSURE	\$ 2,953.00	BIDJ	6			
4910004736218	CLEANER STEAM PRESSURE JET	\$ 3,754.00	KIDQ	2			
4940004736218	CLEANER STEAM PRESSURE	\$ 4,110.00	BIDR	1			
4940005081036	SS RADAR RADIO REPAIR	\$ 1,279.00	BIDN	2			
4940005081036	SS RADAR RADIO REPAIR	\$ 1,279.00	BID	1			
4940005081036	SS RADAR RADIO REPAIR	\$ 1,970.00	BIDM	1			
4940006016985	HOSE ASSEMBLY KING MACH	\$ 5,537.00	DIDD	1			
4940008654738	CLEANER STEAM PRESSURE	\$ 1,697.00	BIDJ	1			
4940008654738	CLEANER STEAM PRESSURE	\$ 1,412.00	KIDQ	3			

<u>NSN</u>	<u>NOVENCLATURE</u>	<u>PRICE/UNIT</u>	<u>SERVICE</u>	<u>ISSUED</u>	<u>DISPOSAL</u>	<u>BALANCE</u>	<u>REMARKS</u>
4940009190107	SS PM PAINT SET A WP	\$ 7,132.00	PIDO	1			
4940009190111	SS PM CONTACT+EMERG RPR WP	\$ 3,749.00	BIDM	8			
4940009190111	SS PM CONTACT+EMERG RER WP	\$ 6,548.00	BIDB	1			
4940009190111	SS PM CONTACT+EMERG RPR WP	\$ 5,948.00	BIDM	1			
6115000178236	GEN 1,5 KW DC 28 VOLT	\$ 729.00	BIDM	1			
6115000178236	GEN 1,5 KW DC 28 VOLT	\$ 1,027.00	BIDM	4			
6115000178237	GEN 3 KW AC 60 CYCLE	\$ 1,283.00	DID	1			
6115000178237	GEN SET GED 3 KW AC 60 CY	\$ 1,283.00	DIDD	1			
6115000178237	GEN SET GED 3 KW AC 60 CY	\$ 1,283.00	BIDN	8			
6115000178237	GED SET GED 3 KW AC 60 CY	\$ 1,283.00	DIDD	2	2/Jun 89	0	64-9010
6115000178237	GEN SET GED 3 KW AC 60 CY	\$ 1,283.00	BIDV	1			
6115000178237	GEN SET GED 3 KW AC 60 CY	\$ 2,308.00	BIDB	4			
6115000178237	GEN SET GED 3 KW AC 60 CY	\$ 2,308.00	BIDM	1			
6115000178240	GEN SET GED 3 KW AC 60 CY	\$ 1,572.00	KID	1			
6115000178240	GEN SET GED 3 KW AC 60 CY	\$ 2,205.00	BIDZ	1	1/Feb 81	0	64-1030
6115000178240	GEN SET GED 3 KW AC 60 CY	\$ 2,205.00	BIDM	14			
6115000568421	GEN 10 KW 400 HZ FU304/C	\$ 5,587.00	BIDN	4			
611500181243	GEN GED 60 KW 60 HZ TU	\$ 14,382.00	PIDE	2	2/Jun 89	0	64-9007
6115004651030	GEN GED 10 KW 40 HZ TU	\$ 5,515.00	BIDB	4			
6115001756573	GEN GED 45 KW 400 HZ	\$ 10,386.00	PIDE	1	1/Jun 89	0	64-9010
6115005040146	GEN GED 0.5 KW AC 60 CY		PIDO	2	2/Jun 89	0	64-9010
6115005426229	FO-286/G GEN SET		BIDZ	6			

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
6115006281243	GEN 5 KW 60 CY		BIDZ	2	2/Mar 83	0	64-3019
6115006316811	GEN 10 KW AC 60 CY		PIDQ	1			
6115006433757	GEN GED 30 KW AC 60 CY	\$ 337.00	BID	2			
6115006923429	GEN 3 KW DC 28 V		PIDQ	1			
6115007120422	GEN 30 KW AC 60 CY	\$ 5,120.00	BIDJ	8			
896115007120422	GEN-30-KW-AC-60-CY	\$ 3,182.00	BIDJ	7	1/Jun-89		64-9024
					1/Jun 89	5	64-9024
6115007196122	GEN SET 10 KW DED EMU 10 U	\$ 170.00	DIDD	1			
6115007196122	GEN-SET-10-KW-DED-EMU-10-U	\$ 171.00	DIDD	1	1/Jun-89	0	64-9024
6115007318191	GEN-GED-3-KW-AC-60-CY		PIDQ	3			
6115007386337	GEN-5-KW-TRLR-MTD-PO-618	\$ 5,699.00	BIDM	1	1/Jun-89	0	64-9024
6115007386337	GEN 5 KW TRLR MTD PO 618	\$ 6,277.00	BIDM	17			
6115008878644	GEN GED 1.5 KW AC 60 CY		BIDZ	10			
6115008878644	GEN-GED-1.5-KW-AC-60-CY		PIDE	1	1/Jun-89	0	64-9024
6115008891370	GEN-15-KW-AC-60-CY	\$ 5,377.00	BID	2			
6115008891370	GEN 15 KW AC 60 CY	\$ 7,584.00	DIDD	2			
6115008891371	GEN-30-KW-AC-60-CY	\$ 7,649.00	BID	6			
6115008891371	GEN 30 KW AC 60 CY	\$ 5,120.00	DID	1	1/Feb 83	0	64-1030
6115008891446	GEN-1.5-KW-AC-60-CY	\$ 708.00	PIDE	2			
6115008891446	GEN-GED-1.5-KW-60-CY-ACTU	\$ 708.00	BIDZ	11			
6115008891446	GEN GED 1.5 KW 60 CY ACTU	\$ 708.00	PIDE	1			
6115008891446	GEN-GED 1.5-KW-60-CY-ACTU		PIDE	1			

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
6115C38891447	GEN SET GED 10 KW AC 60 CY	\$ 2,385.00	BIDZ	2	1/Jun 89	1	64-9024
6115C08891447	GEN SET GED 10 KW AC 60 CY	\$ 2,385.00	BIDH	8			
6115C38891447	GEN SET GED 10 KW AC 60 CY		PIDQ	2			
6115C09358729	GEN GED 200 KW AC 60 CY	\$ 35,422.00	PIDQ	1	1/Jun 89	0	64-9024
6115C39358729	GEN GED 200 KW AC 60 CY	\$ 35,452.00	PIDE	1			
6115C39758381	GEN GED 3 KW AC 60 CY		BIDZ	8			
6115C39758381	GEN GED 3 KW AC 60 CY		PIDQ	2			
6125C05685821	DX-107/AR DYNAMOTOR	\$ 241.00	BID	2			
6125C06696766	MOTOR GENERATOR MD 1		DIDD	1			
6130C02246089	RPP34/MSH CHARGER	\$ 399.00	BID	25			
6130C02246089	RPP34/MSH CHARGER	\$ 399.00	BIDN	8			
6130C02246089	RPP34/MSH CHARGER	\$ 399.00	BIDS	3			
6130C02246089	RPP34/MSH CHARGER	\$ 399.00	BIDJ	1			
6130C02246089	RPP34/MSH CHARGER	\$ 399.00	DID	6			
6130C02246089	RPP34/MSH CHARGER	\$ 399.00	KID	1			
6130C02246089	RPP34/MSH CHARGER	\$ 419.00	BIDS	2			
6130C02246089	RPP34/MSH CHARGER	\$ 418.00	BIDP	3			
6130C02246089	RPP34/MSH CHARGER	\$ 416.00	BIDS	4			
6130C02246089	RPP34/MSH CHARGER	\$ 875.00	BIDM	1			
6130C05040327	B-8-METALLIC RECT	\$ 711.00	DID	1			
6130C05041536	POWER SUPPLY MA/A	\$ 334.00	DIDD	2			
6130C05426385	PP-1104A/G-PWR-SUPPL	\$ 383.00	BIDH	1			

NSN	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
6130005578558	ECU/9AH POWER SUPPLY PP	\$ 2,536.00	DIDD	2			
6130009858157	PP-1451-G BTRY CHGR	\$ 784.00	BIDH	1			
6130009858257	PP-1451-G BTRY CHGR	\$ 940.00	BIDH	1			
6210009397435	LIGHT-5T-OPR-AREA-ACQ/5-KW	\$ 4,473.00	BIDA	1			
6230002995642	FLD/PT-ST-ELEC-PTBU-5-KW	\$ 981.00	DIDD	2			
6230002995642	FLD/PT-ST-ELEC-PTBL 5 KW	\$ 981.00	BIDJ	5			
6230002995642	FLD/PT-ST-ELEC-PTBU-5-KW	\$ 981.00	BIDB	2			
6230002997077	LIGHT-SET-25-OUTLET	\$ 508.00	BID	8			
6230002997077	LIGHT SET 25 OUTLET	\$ 539.00	BIDJ	7			
6230002997077	LIGHT-SET-25-OUTLET	\$ 637.00	BIDN	4			
6230002997077	LIGHT SET 25 OUTLET	\$ 637.00	BIDM	4			
6625001771639	DA-75/U DUMMY LOAD	\$ 158.00	BIDH	1			
6625001771639	DA-75/U DUMMY LOAD	\$ 141.00	BIDH	1			
6625002245174	TS-103/U-BAT-TESTER	\$ 197.00	PIDE	2	1/MAY 86		64-6070
6625002291040	AN/PIN-6-TEST-SET	\$ 313.00	BIDH	1			
6625002291060	ZM-3/U-TEST-SET	\$ 517.00	BIDH	1			
6625002434888	TS-140-PCN-TEST-SET	\$ 674.00	BIDH	1			
6625002440501	TS-58/U-OUTPUT METER	\$ 242.00	DIDD	1			
6625002440501	TS-58/U OUTPUT METER	\$ 424.00	DIDD	2			
6625003764939	TV-7/U TEST SET	\$ 180.00	BIDN	2			
6625003764939	TV-7/U-TEST-SET	\$ 179.00	BIDH	8			

NSN	NOMENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
6625003764939	TV-7/U TEST SET	\$ 192.00	BIDB	4			
6625003764939	TV-7/U-TEST-SET	\$ 192.00	BDM	1			9
6625005191954	AN/USM-32-OSCSCOPE	\$ 478.00	BIDM	1			
6625005398575	EG-13-TEST-SET	\$ 946.00	DIDD	4			
6625005399685	AN/USM-44A-SIG-GENERATOR	\$ 1,500.00	DIDD	1			
6625005399685	AN/USM 44A SIG GENERATOR	\$ 1,450.00	DIDD	4			
6625005426376	AN/URM-64A GENERATOR	\$ 742.00	BID	1			
6625005531178	AN/URM-48 GENERATOR	\$ 1,375.00	BIDH	1			
6625006431670	ME-30A MUT.TIMETER	\$ 309.00	BIDH	1			
6625006469409	ME-26B/U METER	\$ 126.00	BIDH	2			
6625006473737	ME-57/U-METER	\$ 1,029.00	BIDH	1			
6625006473737	ME-57/U METER	\$ 1,772.00	BIDH	1			
6625006494286	AN/URM-80 FREQ METER	\$ 1,206.00	BIDH	1			
6625006495193	GENERATOR AN/URM-25	\$ 500.00	BIDH	1			
6625006689749	AN/URM-79 FREQ METER	\$ 1,332.00	BIDH	1			
6625006689749	AN/URM-79-REQ-METER	\$ 1,732.00	PIDE	1			
6625006690269	TV-2/U-TUBB-TESTER	\$ 350.00	BIDH	1			
6625007400344	AN/USM-181-TEL-TEST-SET	\$ 1,361.00	BIDH	1			

MAP INVENTORY

PAGE NO. 61

<u>NSN</u>	<u>NOMENCLATURE</u>	<u>PRICE/CNT</u>	<u>SERVICE</u>	<u>ISSUED</u>	<u>DISPOSAL</u>	<u>BALANCE</u>	<u>REMARKS</u>
6625007835965	AN/URM-127 GENERATOR	\$ 172.00	BIDH	1			
6625008200064	TV-7D/U TUBE TESTER	\$ 262.00	BIDN	20			
6625008688352	AN/URN-103 GENERATOR	\$ 1,643.00	BIDH	1			
6625008688353	AN/GRM-50 GENERATOR	\$ 1,719.00	BIDH	1			
6625008925360	AN/USM-159 FREQ METER	\$ 657.00	DIDD	1			
6625009116368	AN/USM-207 EL DIG READ OUT	\$ 1,370.00	BIDH	1			
6625009139781	MULTIMETER ME26-D-1	\$ 176.00	BIDH	2			
6625009264357	ID-1189/FR INDICATOR CHANN	\$ 317.00	BIDH	1			
6625009732117	AN/GRN-55 TEST SET	\$ 643.00	BIDH	2			
6625009733986	AN/URM-145 VOLT METER	\$ 745.00	BIDH	1			
6625009930889	AN/URM-25B TEST SET	\$ 515.00	DIDD	2			
6625009980356	AN/USM-117 OSCILLOSCOPE	\$ 1,000.00	PIDE	2			
6625009996282	AN/URN-105C MULTIMETER	\$ 35.00	BIDH	1			
6630006413641	TEST SET CONCRETE	\$ 2,773.00	BID	5			
6630006413641	TEST SET CONCRETE	\$ 2,729.00	BIDJ	2			
6630006413642	TEST SET ASPHALT	\$ 1,506.00	BID	5			

6630006413643

NSN	NOMENCLATURE	PRICE/UNT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
6630009261250	TEST SET SOIL W/3M GEN	\$ 3,073.00	BIDJ	1			
6630009261251	TEST SET SOIL W/3M GEN	\$ 2,879.00	BIDJ	1			
6635006413641	TEST SET CONCRETE	\$ 2,844.00	BIDJ	1			
6635006413642	TEST SET ASPHALT	\$ 1,614.00	PIDE	1			
6635009261250	TEST SET SOIL W/3M GEN	\$ 5,372.00	BIDJ	1			
6635009261251	TEST SET ASP WH 3 RW GR	\$ 2,697.00	BIDJ	1			
6665006842659	MINE DET PORT METALLIC NMO	\$ 455.00	BIDM	18			
6665006842659	MINE DET PORT METALLIC NMO	\$ 329.00	BIDB	25			
6650006842659	MINE DET PORT METALLIC NMO	\$ 329.00	BIDM	6			
6675006413610	DRAFT EQ ST BN FOR CHTS	\$ 308.00	BIDJ	5			
6675006413610	DRAFT EQ ST BN FOR CHTS	\$ 299.00	BIDZ	1			
6675006413610	DRAFT EQ ST BN FOR CHTS	\$ 335.00	BIDA	20			
6675006423618	DRAFT AND DUPL EQ ST	\$ 424.00	BIDZ	4			
6675006413618	DRAFT AND DUPL EQ ST	\$ 424.00	BIDV	3			
6675006413639	SURV ST GENRL PURPOSE	\$ 5,622.00	BIDJ	1			
6675006412540	SURV SE PLANE TABLE	\$ 528.00	BIDV	3			
4310002030569	COMP 600 CFM 4WHL MTD	\$ 14,222.00	DIDO	1	1/Jun 89	0	64-9024
4310002030569	COMP 600 CFM 4WHL MTD	\$ 14,222.00	BIDJ	1	1/Jun 89	0	64-9024
4310002030569	COMP 600 CFM 4WHL MTD	\$ 13,534.00	BIDJ	1			
4310002030569	COMP 600 CFM 4WHL MTD	\$ 14,222.00	PIDE	1	1/Jun 89	0	64-9010
4310005424562	COMP AIR 5 CFM REPR	\$ 335.00	BIDH	4	1/MAY 88		21-0000

NSN	NOMENCLATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
4310005424564	COMP AIR 15 FM ELECT	\$ 464.00	BIDH	3	1/Jun 89 3/May 86	0 0	64-9010 64-6020
4310005424566	COMP 15 CFM RCVR MTD	\$ 906.00	BUDJ	1	1/May 86	0	64-6020
4310005424566	COMP 15 CFM RCVR MTD	\$ 1,228.00	BIDP	1	2/Feb 87	0	Abandon
4310005424566	COMP 15 CFM RCVR MTD	\$ 1,228.00	BIDM	1	1/Jun 89	0	64-9024
4310005424566	COMP 15 CFM RCVR MTD	\$ 1,814.00	BIDM	1	1/Feb 87	0	Abandon
4310005473741	COMPRESSOR MC2A	\$ 1,519.00	DID	1	1/Jun 89	0	64-9024
4310005473741	COMPRESSOR MC2A	\$ 1,935.00	DIDD	5	2/Feb 81	1	64-1030
4310005473741	COMPRESSOR MC2A	\$ 1,340.00	DIDD	3	1/Jun 89	2	64-9024
4310006259006	COMPRESSOR TYPE MC/IA		PID	1			
4310006259008	COMPRESSOR TYPE MC/IA		DID	1	1/Aug 86	0	64-6026
4310006259008	COMPRESSOR TYPE MC/IA	\$ 4,032.00	DIDD	2	1/Feb 81	1	64-1030
4310006259008	COMPRESSOR TYPE MC/IA			1	1/Jun 89	0	64-9024
4310006932653	COMPRESSOR 2000 PSI NM-8	\$ 2,776.00	DIDD	1	1/MAY 86	0	64-6020
4310008619820	COMP 5 CFM HD TRK MTD	\$ 446.00	BIDS	3			
4320000825004	PUMP 170 GPM 25 FT HD	\$ 919.00	BIDD	8	1/Jun 89	1	64-9024
4320000825004	PUMP 170 GPM 25 FT HD	\$ 919.00	BIDU	3	1/Jun 89 3/Feb 87	0	64-9024 Abandon
4320001326214	PUMP DEEP WELL 50 GPM	\$ 6,259.00	BIDU	2	2/Feb 81	0	64-1030

NSN	NOVENCIATURE	PRICE/UNIT	SERVICE	ISSUED	DISPOSAL	BALANCE	REMARKS
4320002711858	PUMPING ASSY 50 GPM	\$ 1,011.00	BIDK	3	3/feb 81	0	64-1030
4320002711858	PUMPING ASSY 50 GPM	\$ 1,011.00	BIDS	2	1/feb 81	1	64-1030
4320005425628	PUMP 200 GPM SKD HFD	\$ 2,733.00	BIDD	2	1/feb 81	1	64-1030
4320007247011	PUMP LENT SUMP 210 GPM	\$ 310.00	BIDD	10			
4320007248171	PUMP 50 GPM FLAM LIQUID	\$ 887.00	BIDD	5			
4320007248171	PUMP 50 GPM FLAM LIQUID	\$ 1,011.00	DID	10			
4320007529466	PUMP LENT 65 GPM	\$ 494.00	PIDE	4			
4320009351618	PUMP 200 GPM GED SKD HFD	\$ 2,105.00	PIDE	6			
2805001329079	MOTOR OUTBOARD		PIDZ	2	2/Jun 89	0	64-9006
2815001328679	ENGINE DIESEL		PID	1			
2815005801299	ENGINE DIESEL PACKARD		PIDE	2			
2815005801299	ENGINE DIESEL PACKARD		PIDE	3			
5430002569051	TANKSIG ASPHALT 4000 GAL	\$ 2,653.00	BIDD	2			
5430005618552	TANK ASSY FABRIK 10 H GAL	\$ 1,320.00	BIDK	7			
4210002244564	TRK PR PUMP A/S32P-12 (BT)	\$ 74,007.00	PIDQ	3			
4210002244564	TRK PR PUMP A/S32P-12 (BT)	\$ 74,007.00	PIDE	1			
42100023331538	TRK PR BRUSH POMP P-8 (BT)	\$ 93,370.00	PID	1			
4210005402734	TRK FIRE CRASH TYPE P-10	\$ 33,000.00	PIDE	1			

Lampiran 2:

“Exchange of Notes: U.S. – Indonesia, Security Assistance for Indonesia.” Jakarta, 15 Agustus 1950. TIAS no. 2306. *U.S. Treaties and Other International Agreements*.

(Sumber: Arsip Departemen Pertahanan RI).



Universitas Indonesia

INDONESIA

MILITARY ASSISTANCE

Agreement effected by exchange of notes signed at Djakarta August 15, 1950;
entered into force August 15, 1950.

TIAS 2306
Aug. 15, 1950

The American Ambassador to the Indonesian Prime Minister and
Acting Minister for Foreign Affairs

AMERICAN EMBASSY,
Djakarta, August 15, 1950.

No. 119

EXCELLENCE:

I have the honor to refer to the program of military assistance in the form of constabulary equipment to be supplied by the United States of America to the Republic of the United States of Indonesia in the interest of improving and stabilizing conditions for the maintenance of law and order in Indonesia. Following our discussions it is my Government's understanding that this program will be carried out on the basis of a series of mutual undertakings specified in the exchange of notes of today's date.

1. The Government of the United States of America records its understanding that the determining objective of the program of assistance is the enhancement of the welfare of the sovereign Indonesian nation and the preservation of its unimpaired and unqualified independence.

2. The United States of America and the Republic of the United States of Indonesia mutually undertake that such assistance as may be furnished by the United States of America to the Republic of the United States of Indonesia under this program shall be utilized solely for the maintenance of an effective constabulary and for the carrying out of the purposes of such a constabulary.

3. Such assistance as may be made available by the United States of America pursuant to this program will be furnished under such provisions of PL 569, Eighty-first Congress, as amended, as affect the furnishing of such assistance, and such other applicable United States laws as may hereafter come into effect. The two governments will, from time to time, negotiate detailed arrangements necessary to carry out the provisions of this paragraph.

4. Each government may take appropriate measures consistent with security to keep the public informed of operations under this program and will, at appropriate intervals, consult with the other on the measures to be employed to this end.

551474
U. S. G. 11151-
104.

1619

334
215

ment of Indonesia, as a result of which the following understandings have been reached:

1. The Government of the United States, subject to applicable United States laws and regulations, shall make available to the Government of Indonesia on terms of payment in rupiahs or dollars such equipment, materials, and services as may be requested by the Government of Indonesia and approved by the Government of the United States. Such equipment, materials and services as may be made available hereunder shall be designated by the Government of the United States in supplementary memoranda, which shall specify the pertinent terms of sale as they are mutually agreed upon.

2. The following assurances provided by the Government of Indonesia on March 14, 1957, shall be applicable to such equipment, materials, and services as may be made available hereunder:

(A) Any weapons or other military equipment or services purchased by the Government of Indonesia from the Government of the United States shall be used by the Government of Indonesia solely for legitimate national self-defense, and it is self-evident that the Government of Indonesia, as a member of the United Nations Organization, interprets the term "legitimate national self-defense" within the scope of the United Nations Charter as excluding an act of aggression against any other state.

(B) Any weapons or other military equipment or services purchased by the Government of Indonesia from the Government of the United States shall not be sold or otherwise disposed of to third parties.

3. In addition to the use provided for in subsection (A) of paragraph 2 of this note, the Government of Indonesia may use such equipment, materials, and services as may be made available hereunder to maintain its internal security.

I have the honor to propose that, if these understandings are acceptable to Your Excellency's Government, this note and your Excellency's note in reply concurring thereto shall constitute an agreement between our two governments, effective on the date of Your Excellency's note.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest considerations.

HOWARD P. JONES,
*Ambassador of the United
States of America, Djakarta.*

77AS 4095

I have the honor to confirm that the Government of the Republic of Indonesia concurs in the understandings as stated in the above-quoted note and that this reply and Your Excellency's note will constitute an agreement between our two governments effective on the date of exchange.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

SOEBANDIRIO

Dr. Soebandrio
*Minister of Foreign Affairs,
Republic of Indonesia*

His Excellency

HOWARD F. JONES

*Ambassador of the United States of America
Djakarta*

TIAS 4095

Lampiran 5:

“Memorandum of Conversation President Ford with President Soeharto in Laurel Cabin, Camp David, Maryland, July 5, 1975.”
National Security Archive Electronic Briefing Book, no.62.

(Sumber: <<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62> ...>).



Universitas Indonesia

MEMORANDUM

Scowcroft file

THE WHITE HOUSE

SECRET/NODIS/XGDS

WASHINGTON

DECLASSIFIED
E.O. 12958 Sec. 3.8

MEMORANDUM OF CONVERSATION

me 01-54-06; at 214 6/30/01

By *del* NARA, Date *7/2/01*

PARTICIPANTS:

President Ford
President Suharto, President of Indonesia
Dr. Henry A. Kissinger, Secretary of State
and Assistant to the President for NSA
Lt. General Brent Scowcroft, Deputy Assistant
to the President for NSA
Mr. Widodo (Indonesian Interpreter)

DATE & TIME:

July 5, 1975 - Saturday
12:40 p.m. - 2:00 p.m.
(1:44 Secretary Kissinger joined)

PLACE:

Laurel Cabin, Camp David, Maryland

President: Let me reiterate how pleased we are to have you visit. Secretary Kissinger told me you were here in 1970 when President Nixon was in office. We are just as concerned about our good relations with Indonesia as we were earlier.

Let me say now that we are as firmly committed and interested in Southeast Asia. The events in Indochina have in no way diminished our interest or commitment in the area.

We are committed to detente with the Soviet Union, but it has to be a mutual relationship. We will not let them have a bigger piece of the benefits. We will continue it as long as it is mutually beneficial. We recognize that the Soviet Union keeps assisting and strengthening its friends, just as we do. But they cannot take advantage of us.

In my trip to Brussels, I told my NATO allies that we were committed to them completely, and I want you and the countries in your area to feel the same.

CLASSIFIED BY Henry A. Kissinger
EXEMPT FROM GENERAL DECLASSIFICATION
SCHEDULE OF EXECUTIVE ORDER 11652
EXEMPTION CATEGORY 5 (b)(3)
AUTOMATICALLY DECLASSIFIED ON Imp. to Det.

SECRET/NODIS/XGDS

Declassified
Photocopy from Gerald R. Ford Library

We want to continue our assistance programs. As you know, that depends on the Congress, which has been cutting our program in recent years. This Congress is interested, but it is my intention to increase aid. We are able to make available some military equipment items to help you in your situation - four naval vessels, which may not be in tip-top condition, some tanks, aircraft such as C-47, and four C-123 transports.

Subarto: May I first convey my appreciation and gratitude, Mr. President, for your invitation to visit the United States. And on behalf of the Government and people of Indonesia, may I convey our heartfelt congratulations for the 4th of July. I would take this valuable opportunity and discuss the problems affecting not only Indonesia but all of Southeast Asia in light of recent changes which have swept the peninsula. I had already obtained valuable information from Mr. Habib and from you in respect to furthering American responsibility to its allies in the Southeast Asia region. After obtaining that information and valuable assessment, we have no fear that the United States will abandon its responsibility toward peace in the Southeast Asia region. Considering the bitter and sad experience of the American people in Vietnam, the U.S. has given such great help and to have it turn out so it is necessary to assess why it happened to come out so very badly after such American sacrifice.

If you would allow me, I will elaborate on Indonesia's problems in our struggles for independence against Communism; it will help us understand. It is not the military strength of the Communists but their fanaticism and ideology which is the principal element of their strength. To consider this, each country in the area needs an ideology of its own with which to counter the Communists. But a national ideology is not enough by itself. The well-being of the people must be improved so that it strengthens and supports the national ideology. From the experience of Laos and Vietnam in the past, they seem to have forgotten this national ideology to get the support of the people. Despite their superiority of arms in fighting the Communists, the human factor was not there. They lacked this national ideology to rally the people to fight Communism.

It is in this spirit that Indonesia has been unifying and nationalizing the people to prepare to fight the threats which eventually will be made against our independence. So we are busily engaged in encouraging and consolidating in Southeast Asia this national ideology and cooperating with others in the areas of culture, economics, and so on. This is of course to prepare for any eventuality of an Indochina eventually dominated by the Communists.

What will happen after Vietnam? There are two possibilities: Whether they will apply Communism just within their borders in order to improve the

conditions of their peoples. If so, we are okay. Ho Chi Minh has always wanted to unify all of Vietnam. We don't know yet what is going on and whether they will unify or whether there will be two separate Vietnams.

President: How long do you think it will take for them to decide this?

Suharto: I have been trying to find out from the Communists and Tito, and the judgment is that the consolidation will take five years, but by then, they will be unified.

President: How about the relations between Vietnam, Cambodia and Laos?

Suharto: Let me explain. As far as Cambodia, they recognize the GRUNK and Sihanouk -- although he is still in exile. I asked Tito why he didn't support Sihanouk's return and he said it would take some time. Tito's reply was that due to prevailing conditions in Phnom Penh, it is not safe for Sihanouk to return. There are still some dangerous elements. But my personal opinion is that they don't want him back yet. My information is that it will take Cambodia about five years to consolidate, so it will be similar to Vietnam. Considering that the time for consolidation is so long -- five years -- they might want two Vietnams and one Cambodia, all three joining a non-aligned world. So they may want to stay separate but with their policies aligned.

Even if it takes some time to consolidate, events will certainly encourage similar elements in Thailand, Malaysia, the Philippines and elsewhere. Of course, this Communist ideological solidarity will take the form of encouraging these elements to step up their activities among labor, farmers and youth. When they have built up the Communist movements, the Vietnamese will be able to supply the military equipment necessary for them to undertake military activities.

President: Are all the Communists working together?

Suharto: The Soviet Union and the Chinese don't work together. They are competing to expand their own individual influence in the region.

The second possibility is they may not stay within their borders but seek to Communize the region and the world. If so, we have to find out whether they will support the Soviet Union and China. Right now, I think Vietnam won't take sides, because then it would become a target between the two. Instead it will work for independent national Communist movements. But in any case, these events will have brief impact on the neighboring countries. The question

is how to counter it. Knowing well the Communist tactics -- infiltration, fanaticism, etc., it is essential for each country to have a strong national ideology -- to strengthen itself in the political, economic and military areas.

We are fortunate we already have this national ideology -- Pantchestita(?). The question is, is it strong enough? Here it is important that we strengthen our economic development so we can support our Pantchestita(?). Therefore if we fail in economic developments, it will create a lack of confidence of our national ideology and create doubts in the people and leave them susceptible to other ideologies.

President: You have done very well in controlling inflation. We have had problems in that regard, but we are now making progress. I understand if you don't make economic progress there will be the growth of a Communist ideology in Indonesia.

Subarto: The principal factor is creating a national stability principally in the economic and monetary fields. The role of the US in her responsibility toward this area -- the U.S. won't abandon her role, but the American assistance role should be reviewed, both in relation to Indonesia and all of Southeast Asia. Particularly in assisting and supporting those countries in establishing national resilience. That would help in creating a regional resilience and help keep out Communism. But we are running against time because the Communists are working very hard in these countries to convert them to Communism.

The best way of fighting subversion is intelligence and territorial operations, so we can detect Communist activity when it first arises. In carrying these out when the people are participating, we rely heavily on communications. Therefore, communication between areas is very important to knowing when problems emerge, so we can deal with them immediately. If the danger becomes greater and the insurgency becomes greater, we will require mobile units to send to these areas to squelch subversion. To supply and maintain this mobility we will need both sea and air transport so we can put down insurgency before it becomes too big to stop. Especially in the navy field, we need to improve the conditions of the navy -- not big ships but to be able to transport men and materials to be able to carry out these operations. Particularly, ships which can fight any attempts to interfere with these operations to cope with insurgency. Indonesia has many islands so we will need many of these ships with great mobility.

Especially at this moment, intelligence and territorial operations are very important. We are in a better condition to do this than other Southeast nations. With American assistance, we have built a national resilience and we are working hard at building it further.

President: How big a Navy do you have and how big do you need?

Suharto: We have many capable navy men prepared to man the Soviet ships we have -- that were gathered to liberate West Iran. These ships are now mothballed and useless, however.

If you will agree with those principles to strengthen the national resilience -- especially in the military field, we can set up a joint committee to decide what is needed in the Navy, Army and Air Force. We don't need new equipment, just to make them serviceable.

President: I think we should set up a joint commission to decide what is needed and what we can do to supply those needs. I will talk to Secretary Kissinger.

Suharto: But the most important need is not in the military field but in the economic area. This is where we must build the nation. Indonesia can be an example to other countries of the importance of strengthening their national resilience.

President: Our Ex-Im Bank has been working with your people. I would expect we would continue to work with you on providing more credits and grants. It is important that we help with everything we can make available in order to contribute to the essential development you have described.

Suharto: In view of our efforts to accelerate developments, we have four sources: The IGGI (Inter-Governmental Group for Indonesia), international organizations like the World Bank, the Ex-Im Bank, and private banks. These four go from soft to hard terms for loans. We are already obtaining joint Ex-Im commercial loans, and terms are still lower through commercial banks. We hope to continue these loans.

President: In Fortune I saw a ten-page story urging private investment. Is the investment picture encouraging?

Suharto: The figure has now reached \$5 billion. What remains is for industry which requires having capital input. Examples of these huge projects are liquefied natural gas (\$800 million), nickel (\$900 million), copper, and others. These will require the assistance of other countries to get the credits.

With regard to our efforts to strengthen our national resilience, I want to mention the archipelago principle. This principle has been followed by the Indonesian people for years. The purpose is to force ourselves in as a unified nation without any territorial ambition. From various countries we have gotten favorable response, but I see some hesitancy in the U.S. about this principle. Indonesia doesn't want to create difficulties with other countries establishing this principle in its territory.

President: We were encouraged at the progress of the Law of the Sea Conference and we hope for further progress. We do understand your problem. We do have reservations, and we would be happy to meet with your people to work it out. We must have maneuverability if we are to carry out our responsibility in the world. I assure you we will work with your people to try to work out a mutual understanding.

Suharto: Talks have been conducted bilaterally between us already. The third point I want to raise is Portuguese decolonization. Starting with our basic principle, the new Constitution of 1945, Indonesia will not commit aggression against other countries. So Indonesia will not use force against the territory of other countries. With respect to Timor, we support carrying out decolonization through the process of self-determination. In ascertaining the views of the Timor people, there are three possibilities: independence, staying with Portugal, or to join Indonesia. With such a small territory and no resources, an independent country would hardly be viable. With Portugal it would be a big burden with Portugal so far away. If they want to integrate into Indonesia as an independent nation, that is not possible because Indonesia is one unitary state. So the only way is to integrate into Indonesia.

President: Have the Portuguese set a date yet for allowing the Timor people to make their choice?

Suharto: There is no set date yet, but it is agreed in principle that the wishes of the people will be sought. The problem is that those who want independence are those who are Communist-influenced. Those wanting Indonesian integration are being subjected to heavy pressure by those who are almost Communists. The Communist elements practically sabotaged the recent meeting in Macao. I want to assert that Indonesia doesn't want to insert itself into Timor self-determination, but the problem is how to manage the self-determination process with a majority wanting unity with Indonesia. These are some of the problems I wanted to raise on this auspicious meeting with you.

President: I greatly appreciate the chance to learn your views, especially on the events in Vietnam as they consolidate -- and the thought it would take five years to consolidate.

I would like to mention OPEC.

[Secretary Kissinger enters.]

We appreciate your not joining the embargo in '73-74. We are concerned about OPEC raising prices in the fall meeting. We are concerned about the effect on the economic recovery of the United States, the world, and the Third World. I know you feel badly about the Trade Bill's penalties against OPEC members. We are trying to get Congress to change that to make the penalties selective, not comprehensive.

Suharto: We share with the other OPEC states the view that we should not confront the consumers in this energy crisis. We are also aware that some producers have taken a tough stand. We are a small producer, but the others still listen to us. The September meeting I don't think will focus on a price increase but how to keep the purchasing power of the producers from falling. Therefore Indonesia, with the others, is studying the problem seriously so that oil revenue will benefit the people despite the inflation and recessions which have beset the world.

President: We have been through difficult times and we are now coming out of it. The oil price increase would have an injurious effect on our recovery and thus our ability to help the world's economic recovery.

In the past you have sent a special emissary to contact Secretary Kissinger on occasion. I would like that arrangement to continue under me if you agree.

Suharto: I fully share the importance of sending an emissary to contact Secretary Kissinger. I haven't done it so much recently because of the problems that both our countries have been facing recently. I would also agree to resuming these contacts so we can maintain a similarity of views on problems, like with Japan and Australia.

President: Lunch is ready.

Lampiran 6:

“Memorandum for the President.” National Security Archive
Electronic Briefing Book, no.62.

(Sumber: <<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62 ...>>).



Universitas Indonesia

DECLASSIFIED
Authority: 100979508
By: WEP
NARA Date: 10/27/2011

THE SECRETARY OF STATE
WASHINGTON

SECRET

MEMORANDUM FOR: THE PRESIDENT
FROM: Henry A. Kissinger
SUBJECT: Your Visit to Indonesia

I. PURPOSE

Your Jakarta visit will be a dramatic reaffirmation of the significance we attach to our relations with Indonesia, the largest and most important non-Communist Southeast Asian state and a significant Third World country. In our relations with Indonesia we are seeking to move progressively away from a donor-client relationship and from preoccupation with aid issues toward ties that stress a broader sharing of interests and views. Your visit offers an excellent opportunity to encourage a more mature dialogue with the Indonesian leadership on issues of importance to us and less focused on our aid relationship.

A key mechanism for moving this process forward will be the Joint US-Indonesian Consultative Commission first agreed upon during your Camp David meeting with Suharto, on July 5. We expect that a formal announcement of the Commission's formation can be made during your brief visit, which provides an occasion to make the announcement under the most auspicious circumstances. We expect the Indonesians to welcome this step.

As a result of the Camp David meeting, Suharto is more confident of the steadiness of our commitment to our friends in Asia and our close ties with Indonesia in particular. At the same time, the Camp David meeting may have given the

SECRET
GDS

SECRET

Japan's life line to Middle East oil; its own oil fields provides a significant portion of Japan's oil consumption and a small but increasing part of our own oil imports. Its other major resources -- rubber, tin and tropical products -- are also of some significance to the United States.

On the international scene, Indonesia under Suharto has sought to carve out for itself a somewhat unique diplomatic position as an anti-Communist but non-aligned country capable of carrying on a dialogue with both radical "third world" states and the west while cautiously pursuing policies generally compatible with the latter. The government's desire not to offend politicized Moslem elements in Indonesia, however, influences it to side with the Arab states on certain issues, such as zionism; moreover, it values highly its membership in OPEC and supports OPEC actions, although it has never played a very active role at OPEC meetings.

Within the region, Indonesia is generally recognized as "first among equals" in the five-nation Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and increasingly regards the organization as the cornerstone of its regional policies.

Realization of Indonesia's potential is hampered by severe domestic problems and by economic backwardness which even its increased oil revenues have scarcely begun to overcome. Because of the Suharto Government's decision in the late 1960s to favor economic development over military preparedness, Indonesia's armed forces are poorly equipped and inadequately supplied. At best, it will be years before Indonesia can play a significant regional security role. The speed with which Indochina fell upset Suharto's calculations that Indonesia would have an extended grace period to develop its internal strength before confronting a communist threat from the north. To meet the changed situation following the loss of Indochina, President Suharto appears to have become, if anything, even more convinced in the months since your meeting at Camp David that Indonesia's policies must be based on the maintenance of close ties with the United States -- although not to the extent that its non-aligned image is tarnished.

SECRET

SECRET

- 4 -

President Suharto will want to hear about your discussions in Peking, particularly as they relate to Southeast Asia, and may also express some uncertainty about detente. He undoubtedly will take the opportunity to explain Indonesia's own views on regional security, and the future of ASEAN. He will probably describe the GOI's own tactics of gingerly approaching the question of restoring relations with the PRC and the GOI's assessment of the potential communist threat to Southeast Asia (which he sees largely as one of insurgency and subversion in the short run).

We expect Suharto will reaffirm Indonesia's non-aligned posture and its commitment to the doctrine of "national resilience", a somewhat mystical "do it yourself" concept of developing internal strength by combining equal parts of military self-reliance, broad based economic development and a political identity between the government/military and the people. Nevertheless President Suharto will probably try to obtain further general US understandings regarding economic and military assistance. He may express concern that, despite indications we gave at Camp David, the prospect for future aid seems uncertain.

President Suharto may also bring up other issues raised earlier at Camp David or of mutual interest to the two governments: Law of the Sea, Portuguese Timor, Indonesian exclusion from receiving tariff preference under the 1974 Trade Act and U.S. policy on Liquefied Natural Gas (LNG) imports. We anticipate, however, that his comments will be general and philosophic in character and that he will not expect detailed definitions of U.S. policy in response.

A straightforward, low-keyed, generally frank presentation will be most effective with Suharto. He may still harbor latent concerns as to the constancy of US policy toward Indonesia and Southeast Asia, and he is especially anxious that we recognize the magnitude of Indonesia's need for outside aid. Our desire to move away from preoccupation with aid toward a more balanced dialogue should thus be projected with caution, avoiding the impression of a change in the U.S. attitude toward Indonesia. The main forum for more detailed exchanges on this subject will be the Joint Commission.

SECRET

DECLASSIFIED
AUTHORITY: 10/27/01
BY: [redacted]
DATE: 10/27/01
8056160W

SECRET

- 5 -

III. US-INDONESIA JOINT COMMISSION

A key aspect of our strategy for the visit will be the announcement of the formation of a Joint US-Indonesia Consultative Commission. The announcement should specify that its first meeting is to be held in Washington next spring. Although the Indonesians have clearly intended that the first meeting be held in Jakarta, your visit and the fact that the announcement itself is being made in Jakarta should help us persuade the Indonesians to agree to Washington as the venue.

As worked out with the Indonesians, the Commission's purpose will be to broaden the range of our consultations with the Indonesian Government on major issues -- the latter to include cooperative programs in various fields, although the Commission will not actually negotiate programs or supervise their execution. The two co-chairmen will be Foreign Minister Malik and Secretary Kissinger, with representation on our side to include Treasury, Defense and such other agencies (AID, for example, or Commerce) as may be indicated by the agenda topics. The Commission is being created for renewable two-year terms and will meet annually, alternating between the two capitals. It will be supported by informally constituted subcommissions, initially a Joint Economic Subcommission and a Joint Security Subcommission, which will meet annually and be chaired on the U.S. side at the Under Secretary or Assistant Secretary level.

In discussing the Commission with Suharto, you may wish to stress the following points:

- We are especially pleased that agreement has been reached on establishing the Commission, and we look forward to the first meeting in the Spring.
- We see it as a most useful device for broadening the range of consultation and cooperation between our two countries and, on our side, as an indicator of the special importance we attach to our ties with Indonesia.

SECRET

DECLASSIFIED
Authority (M/D) 7/9/508
By (M/D) 10/9/74
NARA Date 10/9/74

SECRET

- 6 -

IV. ISSUES AND TALKING POINTS

1. Indonesia and the People's Republic of China

Of all the non-communist Southeast Asian countries, Indonesia has remained the most cautious about establishing (or in Indonesia's case, re-establishing) relations with Peking. Many Indonesians believe the PRC was behind the 1965 communist coup attempt and are highly skeptical of PRC pledges of non-interference in the internal affairs of its neighbors. They see their problem complicated by a sizeable Chinese minority in Indonesia (more than three million). Although Indonesia will probably normalize its relations with the PRC eventually, opinions differ within the GOI as to how quickly to proceed.

Suharto will be looking forward to your comments on your discussions with the Chinese and will be curious about our own plans for normalization with the PRC. You may wish to pass on any insights gained from your talks in Peking on Chinese intentions towards Southeast Asia (a topic in which Suharto will be keenly interested), while avoiding any appearance of advising the Indonesians on how they should handle their own relations with China. It is not in our interest to push Indonesia toward the PRC.

2. US-Soviet Detente

Indonesia's relations with the USSR are correct but wary. The GOI seeks aid from the Soviet bloc and receives a small quantity. (Aid from the USSR itself, terminated in 1965, will be resumed with a \$100 million Soviet credit for hydroelectric projects announced in November 1975). The GOI, however, remains innately suspicious of Soviet intentions. Especially in the context of your comments on China, Suharto may inquire briefly about detente. He will be seeking primarily a reassurance that we, too, are careful to keep our guard up in dealings with Moscow.

3. Indonesia's Regional Policies

Indonesia's answer to the potential threat by a communist Indochina is to build up the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN - pronounced AH-sea-an) as a cohesive regional organization (but without provoking Hanoi by portraying it as a defensive alliance); to encourage

SECRET

DECLASSIFIED
Authority: 10097958
By: WJW
Date: 10/20/01
NARA Doc ID: 10097958
REPRODUCTION AT THE NATIONAL ARCHIVES

SECRET

- 7 -

greater "national resilience" in each of the ASEAN countries; to step up its own defenses without diverting excessive resources from its economic development programs; to hold out a wary hand to Hanoi and Saigon (both of whom it recognizes) as an inducement to choose cooperation rather than confrontation with their non-communist neighbors; and to persuade the U.S. to maintain its presence in the region, especially in the form of "over the horizon" forces. As he did at Camp David, Suharto will want to acquaint you with his views of the region, Indonesia's position therein, and perhaps how he envisages the U.S. role. He will probably express concern about Malaysia's growing internal security problems (see below) and possibly about Thailand's as well.

Your Talking Points

- We welcome Indonesia's lead in developing regional cooperation, particularly through ASEAN. In our view, ASEAN represents an encouraging and constructive Southeast Asian effort to work toward regional self-reliance and security.
- We recognize that ASEAN is, and must remain, an organization of the Southeast Asian states themselves. We want to cooperate both with ASEAN's member countries and with ASEAN itself in way that ASEAN states find useful, but we look to ASEAN itself to give the lead in determining the extent and nature of our cooperation.
- For our part, we intend to maintain an effective presence in the region. We will honor our treaty commitments and we are determined to maintain our close ties with friends such as Indonesia.
- (If Suharto asks) We intend to retain our bases in the Philippines and certain facilities in Thailand with the agreement of the governments concerned.

SECRET

SECRET

- 8 -

4. The Malaysian Insurgency

The Indonesians profess great concern over the situation in Malaysia, where the chronic communist insurgency has become appreciably more active in the past year. Indonesia sees this as an opportunity for the Vietnamese Communist regimes to open a new and (for Indonesia) dangerous front by moving in with material support for the insurgents. While Malaysia is among their closest friends, the Indonesians fault the Malaysian Government for failing to take the domestic measures Jakarta believes necessary to minimize the threat -- particularly an easing of the legal and economic discrimination that favors the Malay plurality (44%) at the expense of the wealthier Chinese minority (38%). The Indonesians have some justification for their concern, but we believe their fears exaggerated. They are also concerned, but less immediately, with the insurgent threat to Thailand.

Your Talking Points (if raised by the Indonesians)

- We share Indonesia's concern over developments that could give the communists an opening to support subversion in the ASEAN region. Thailand and Malaysia appear particularly vulnerable in this regard. We hope that Indonesia, as Malaysia's close friend will help with advice and counsel.
- For our part, we sent a small military team to both Malaysia and Singapore at the request of those governments to discuss defense equipment needs. We are helping both governments in selecting military equipment and are planning to offer Malaysia credit (about \$15 million) for some of the purchases the year.

5. US Security Assistance to Indonesia

At Camp David President Suharto expressed concern to you about the potential threat of arms smuggled from the north to support insurgencies in Indonesia's neighbors and eventually in Indonesia itself. He sought our cooperation in reviewing Indonesia's equipment requirements.

SECRET

SECRET

- 9 -

During subsequent consultations in September with an Indonesian military mission we agreed to provide a modest military package (\$30 million in grants and \$12.5 million in credit for a total of \$42.5 million) of helicopter, ships, communication and radar equipment to meet Indonesia's primary threat -- the sea infiltration of arms -- and to maintain more effective control of the archipelago. Since we could not supply all their requirements, we agreed to work with them on a longer term effort to rehabilitate their military forces.

The level of military assistance which we told them they would receive this year, however, was later readjusted by switching approximately \$10 million from grant to credit. Given Congressional attitudes, overall prospects for security assistance in future years are not bright, a fact that the GOI may not adequately grasp. They could, in fact, be disappointed next spring if FY 1976 security assistance is significantly reduced as is quite possible.

Your Talking Points

- We recognize the seriousness of Indonesia's security concerns and have proposed to Congress approximately doubling the present level of our overall security assistance to Indonesia in the present fiscal year.
- For budgetary reasons we have had to make certain readjustments this year in the mix of grants to FMS credits. Increasingly, in the future, security assistance will be in terms of credit.
- We will continue to cooperate with Indonesia in the security assistance field within the limits of our capabilities. At the same time, Indonesia should not gauge US interests in Indonesia solely by our bilateral aid levels.

SECRET

SECRET

- 11 -

We believe both producer and consumer interests should be taken into account in discussing commodity policies.

- If we deal with the specifics of these issues we should be able to narrow our differences and reach practical solutions. We hope to discuss these matters with Indonesian policy makers in all appropriate fora: The Joint Commission, the Conference on International Economic Cooperation and elsewhere.
- Indonesia should also be aware of our political problems in this area. We need the support of the U.S. public to pursue policies to benefit the developing countries. We would welcome Indonesia's help in discouraging Third World positions which can only erode U.S. public support for a forthcoming U.S. posture.

7. Energy Issues

The Indonesians place considerable emphasis on solidarity with OPEC. Nevertheless they have played a passive moderate role at OPEC meetings and during the latest round kept their price increases significantly below those of other OPEC countries. They did not participate in the Arab oil embargo. The United States accounts for the bulk of Indonesia's oil investment (about 86%) and an increasing amount (about 11%) of our crude oil imports are from Indonesia.

There are two energy related issues which the Indonesians could raise in discussions: (a) Indonesian mandatory exclusion (as a member of OPEC) from the 1974 Trade Act benefits and (b) their hope for a favorable FPC ruling which would permit the GOI to go ahead with a major project to export liquefied natural gas (LNG) to California.

Your Talking Points (if the subject is raised)

- We have noted Indonesia's recent decision to hold its oil price increases below that sanctioned by OPEC. We have also appreciated Indonesia's moderate stance in other issues relating to OPEC. But we believe that in the long run Indonesia stands to gain most from increasing production and sales.

SECRET

- The Federal Power Commission will be taking up the Indonesian LNG case in the very near future.
- Meanwhile, the Administration's Energy Resources Council will be working toward decisions on our overall energy policies, including the question of LNG imports. While we cannot foretell what these decisions will be, we are very much aware of Indonesia's interest in LNG.
- We favor Congressional action to enable Indonesia to become eligible to receive those tariff preferences conferred by the 1974 Trade Act. However, Congressional concern over OPEC policies will make this difficult.

8. US Economic Aid to Indonesia

At Camp David President Suharto emphasized that "Indonesia's most important need was economic rather than military", reflecting the realistic Indonesian view that domestic socio-economic and political problems are the chief threat to the country's stability. Particularly on Java, where 80 million people are already as densely crowded as anywhere on earth, unemployment and grinding poverty are endemic. Compounding Suharto's political problems are signs that despite ten years of development under the "New Order" the gap between the rich and poor is growing, while corruption and maladministration remain widespread.

In response to Suharto's comments at Camp David, you expressed your intention to increase aid to Indonesia. Subsequently you proposed to the Congress an additional \$20 million in loans for Indonesia, bringing the total proposed U.S. assistance package of \$85 million for FY-1976. (Japan this year is providing almost twice as much, while the other members of the Indonesia aid consortium are providing roughly \$230 million). Prospects for future U.S economic assistance are less clear since there are proposals now under inter-agency review which could cut our aid significantly as part of worldwide budgetary reductions.

Your Talking Points

- We fully recognize Indonesia's continuing need for developmental assistance. We have asked Congress for \$20 million in additional development loans to Indonesia this year for a total of more than \$80 million in aid, the biggest single increase we have proposed this year for any Asian country.

DECLASSIFIED

SECRET

- 13 -

- We intend, within Congressional limits, to maintain a meaningful aid contribution to Indonesia. At the same time, Indonesia should not gauge U.S. interest in Indonesia solely by bilateral aid levels.
- Private foreign investment can become an increasingly important source of capital and technology for Indonesia's economic growth. We hope your Government will actively continue to encourage the foreign investor.
- We also hope that Indonesia will support our proposals at the UNGA Special Session to protect developing countries against cycles in their export earnings, to provide them with better access to western capital and to expand international facilities to finance development, to promote the transfer of technology, and to achieve an international consensus governing relations between trans-national enterprises and governments.

9. Indonesia and the UN

Indonesia walks a tightrope in its UNGA voting, maintaining a show of solidarity with the non-aligned majority while attempting to avoid too frequent opposition to the U.S. and the West. This is reflected in abstentions and behind-the-scenes efforts at compromise. In 1974 Indonesia worked hard to defend the seat of the Lon Nol delegation. The 1975 record has been mixed: On Korea Indonesia voted for the friendly resolution and abstained on the hostile one; on Zionism, however, it voted with the majority, to some extent because of internal political considerations arising from the pressure of Moslem political parties in Indonesia.

SECRET

DECLASSIFIED
Authority: WMD 979508
By: WMD
NARA Date: 10/27/11

SECRET

- 14 -

Your Talking Points.

- Despite the continued tendency of the UNGA non-aligned majority to use its voting strength irresponsibly, we are making every effort to avoid acrimonious confrontations.
- We understand Indonesia's dilemma in wanting to avoid taking issue with the non-aligned majority, and we appreciate Indonesia's support when we receive it.
- If the UN is to retain its importance, however, greater realism and consideration for the actual issues must be injected into the UNGA. It is in the interest of major countries such as Indonesia to ensure that the UN acts more effectively and responsibly. If every country voted forthrightly for what it actually believed, the extremists in the UN would find themselves a small minority.

10. Indonesia and the Law of the Sea

Indonesia has long sought international recognition of the archipelago principle, under which all waters within the Indonesian archipelago would be under extensive Indonesian control. We have not accepted the principle, but we have indicated that we could accept an objectively defined archipelago as part of an over-all Law of the Sea treaty which effectively guarantees our transit and over-flight rights through both archipelagos and international straits. After over two years of negotiation, we have narrowed our differences with Indonesia. We are prepared to resume bilateral discussions with the GOI on this subject whenever the Indonesians wish. A short while ago they expressed a desire for bilateral talks, but most recently seem to have backed away again.

Your Talking Points (if raised by the Indonesians)

- We understand Indonesia's position on the archipelago question.

SECRET

SECRET

- The United States can accept the archipelago principle in the Law of the Sea negotiations as part of a comprehensive treaty protecting our interests in transit through and over archipelagoes and international straits.
- We are willing to continue detailed law of the sea consultations with Indonesia to find a mutually acceptable solution to this important problem.

11. Indonesia and Human Rights

The human rights problem in Indonesia concerns about 35,000 suspected communists still under detention from the 500,000 or so arrested in the chaotic months following the attempted communist coup of September 1965. Held without trial or in many cases formal charges, these detainees have attracted a good deal of world (and Congressional) attention and criticism of Indonesia.

The Indonesians recognize the issue as a serious problem and are troubled by the criticism. They feel themselves in a dilemma. However, they are convinced the wholesale release of the detainees would lead to civil strife and a recrudescence of the Indonesian Communist Party.

We have frequently discussed the issue with the GOI in a quiet, non-accusatory manner, seeking to speed resolution of the problem, and we have alerted them to the human rights provisions of our aid legislation. The Indonesians have been responsive. During a recent US visit by a high level Indonesian delegation headed by General Ali Murtopo, one of Suharto's close advisors, the group raised the issue with Members of Congress and told them that they plan to step up the phased release of more detainees.

We believe it would be helpful if you raised this issue in a low key.

Your Talking Points

- The matter of the detainees in Indonesia has attracted a good deal of attention and concern in the U.S. and has affected Congressional and public attitudes toward Indonesia.

SECRET

SECRET

- 16 -

- The Congress has placed human rights restrictions on both economic and security assistance legislation which could make implementation of these programs more difficult. We understand that the delegation led by General Murtopo (Moor-TOE-poh) discussed this constructively with Members of Congress.
- Indonesia's release of about 1,500 detainees during the past year and the implementation of what we understand are present plans for the phased release of more detainees has already had a favorable impact on Congress and the U.S. public.

12. Indonesia and Portuguese Timor

Indonesia was content to leave in Portuguese hands the small colony (600,000 people) that shares with Indonesia the island of Timor. With the dismantling of the Portuguese empire, however, Jakarta has become concerned that the backward and resource-poor colony would attain what the Indonesians expect would be a weak, unviable independence leaving it susceptible to outside -- especially Chinese -- domination.

For about a year Jakarta has been maneuvering to absorb the colony through negotiations with Lisbon and covert military operations within the colony itself, showing considerable restraint. A small scale civil war between quarreling Timorese parties has opened the way to wider Indonesian intervention in support of pro-Indonesian factions. Portugal, meanwhile, has almost completely lost control of the colony.

A merger with Indonesia is probably the best solution for the colony if the inhabitants agree. Indonesia use of US-supplied weapons in an overt occupation of the territory, however, would contravene U.S. law. We have quietly pointed this out to the GOI, and it appears to have been a restraining factor.

SECRET

DECLASSIFIED

Authority / W0979508

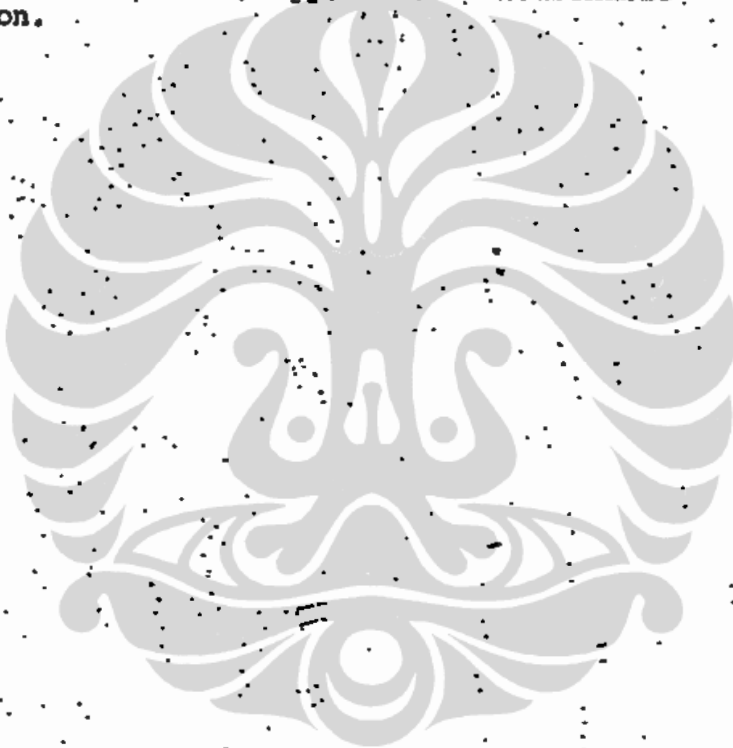
BY NARA DATE 10/27/01

SECRET

- 17 -

Your Talking Points (if raised by Indonesia side)

- We recognize the problem that Timor poses for Indonesia, and we appreciate the restraint that Indonesia has exercised to date.
- We note Indonesia has expressed willingness to see a merger of the territory with Indonesia take place with the assent of the inhabitants of Timor. This would appear to be reasonable solution.



SECRET

Lampiran 7:

“Telegram US Embassy Jakarta to Secretary of State.” National Security Archive Electronic Briefing Book, no.62.

(Sumber: <<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62> ...>).



Universitas Indonesia

ACTION COPY

Ldy: WH



Department of State

TELEGRAM

~~SECRET~~ HOD267

PAGE 01 JAKARTA 14940 01 OF 03 061141Z

2R
ACTION NODS.08

COPY 1 OF 15 COPIES

INFO OCT-01 ISO-00 /001 N

061972

R 061900Z DEC 78
FM AMEMBASSY JAKARTA
TO SECSTATE WASHDC PRIORITY 1579

SECRET SECTION 1 OF 3 JAKARTA 14940

NODIS

DEPARTMENT PASS NSC FOR SCOWCROFT

EO 11652: GDS
TAGS: OVIP (FORD GERALD R PRESIDENT)
SUBJ: FORD-SUHARTO MEETING

DECLASSIFIED
E.O. 12958 Sec. 3.0

Dec 01-83 #2; Dec 01-83 #101
By *dec NARA Date 1/10/01*

1. FOLLOWING IS MEMCON OF MEETING BETWEEN PRESIDENT FORD AND PRESIDENT SUHARTO IN JAKARTA DECEMBER 6. ALSO PRESENT WERE SECRETARY OF STATE KISSINGER, FOREIGN MINISTER HALIK, MINISTER OF STATE SUHARMONO, AMBASSADOR NELSON, AND AN INTERPRETER.

2. SUHARTO-I WISH TO EXPRESS MY THANKS AND VERY GREAT APPRECIATION FOR YOUR WILLINGNESS, MR PRESIDENT, TO ACCEPT MY INVITATION TO VISIT INDONESIA. ALTHOUGH THE VISIT IS VERY SHORT, I BELIEVE IT WILL BE MOST USEFUL. THE PROMOTION OF PERSONAL CONTACTS BETWEEN US IS IMPORTANT AND SIGNIFICANT FOR BOTH OF OUR COUNTRIES.

3. FORD-MY DELEGATION IS EXTREMELY GRATEFUL, MR PRESIDENT, FOR THE SPLENDID ARRANGEMENTS FOR THE VISIT. I REGRET THAT THE TIME IS SHORT BUT AFTER ELECTIONS, I HOPE TO COME BACK AGAIN FOR A LONGER PERIOD. THE OPPORTUNITY FOR SUCH FACE TO FACE MEETINGS IS ALSO HIGHLY IMPORTANT FOR ME. THE CONFIDENCE ESTABLISHED THROUGH SUCH MEETINGS IS IMPORTANT TO THE DEVELOPMENT OF OUR POLICIES. I CONSIDERED THE MEETING AT CAMP DAVID TO BE MOST FRUITFUL AND I AM CERTAIN THAT THIS CURRENT VISIT

~~SECRET~~

Declassified
Photocopy from Gerald R. Ford Library

SECRET



Department of State **TELEGRAM**

~~SECRET~~

PAGE 02 JAKART 14946 01 OF 03 061141Z

WILL EVEN FURTHER ENHANCE OUR RELATIONSHIP. THE UNITED STATES INTENDS TO CONTINUE A STRONG INTEREST IN AND INFLUENCE IN THE PACIFIC, SOUTHEAST ASIA AND ASIA, AS A WHOLE, WE HOPE TO EXPAND THIS INFLUENCE DESPITE THE SEVERE SETBACK OF VIETNAM. OUR COUNTRY-TO-COUNTRY RELATIONSHIPS ARE VERY IMPORTANT TO THE DEVELOPMENT OF THESE POLICIES.

4. AS YOU KNOW, I HAVE JUST RETURNED FROM CHINA WHERE WE HAD DISCUSSIONS OF THE INTERNATIONAL SCENE AND AN IN-DEPTH REVIEW OF OUR BILATERAL RELATIONS. WE MADE IT CLEAR THAT WE ARE OPPOSED TO THE EXPANSION OF ANY NATION OR COMBINATION OF COUNTRIES. WE HAVE NO TERRITORIAL AMBITIONS. WE VALUE OUR RELATIONSHIP WITH INDONESIA AND RESPECT YOUR REGIONAL AND NON-ALIGNED RELATIONSHIPS.

5. SUHARTO-WHAT ARE YOUR IMPRESSIONS OF CHINA'S ATTITUDE TOWARD SOUTHEAST ASIA AFTER VIETNAM?

6. FORD-THEY WILL VIGOROUSLY EXPANSIONISM BY OTHERS INTO ASIA. IN THIS THEY THINK PARTICULARLY OF THE USSR. THEY DON'T APPEAR TO HAVE AMBITIONS OF THEIR OWN.

7. KISSINGER-WE BELIEVE THAT CHINA DOES NOT HAVE EXPANSIONIST AIMS NOW. WE CANNOT PREDICT WHAT THE SITUATION WILL BE IN FIVE YEARS. RIGHT NOW THEIR FIRST CONCERN IS THE SOVIET UNION AND THEIR SECOND VIETNAM.

8. FORD-I HAD THE IMPRESSION OF A RESTRAINED CHINESE FOREIGN POLICY LARGELY DIRECTED AT MEETING THE CHALLENGE OF RUSSIA AND VIETNAM.

9. SUHARTO-AT CAMP DAVID WE DISCUSSED THE QUESTION OF UNIFICATION OF VIETNAM. THAT SEEMS NOW TO BE MOVING AHEAD. LAOS AND CAMBODIA SEEM ALREADY UNDER VIETNAMESE INFLUENCE. DOES THE UNITED STATES BELIEVE THE THREE WILL BE INCORPORATED INTO ONE COUNTRY?

10. FORD-THE UNIFICATION OF VIETNAM HAS COME MORE QUICKLY THAN WE ANTICIPATED. THERE IS, HOWEVER, RESISTANCE IN CAMBODIA TO THE INFLUENCE OF HANOI. WE ARE WILLING

~~SECRET~~

NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY



Department of State

TELEGRAM

~~SECRET~~

PAGE 03 JAKART 14946 01 OF 03 001141Z

TO MOVE SLOWLY IN OUT RELATIONS WITH CAMBODIA, HOPING PERHAPS TO SLOW DOWN THE NORTH VIETNAMESE INFLUENCE ALTHOUGH WE FIND THE CAMBODIAN GOVERNMENT VERY DIFFICULT. THE SITUATION IN LAOS IS DISTURBING AND APPEARS TO DEMONSTRATE AN ACCELERATED INTEREST ON THE PART OF NORTH VIETNAM.

11. KISSINGER-IT IS INTERESTING THAT IN LAOS SOUVANNAYONG IS NOW IN A SUBORDINATE POSITION. THE CHINESE WANT TO USE CAMBODIA TO BALANCE OFF VIETNAM AND ARE KEEPING TROOPS IN CONNECTION WITH ROAD BUILDING IN THE NORTH. HE DON'T LIKE CAMBODIA, FOR THE GOVERNMENT IN MANY WAYS IS WORSE THAN VIETNAM, BUT HE WOULD LIKE IT TO BE INDEPENDENT. HE DON'T DISCOURAGE THAILAND OR CHINA FROM DRAWING CLOSER TO CAMBODIA.

12. SUHARTO-THE FACT REMAINS THAT Sihanouk, DESPITE SUPPORT FROM CHINA, HAS NO AUTHORITY AND THE KHMER ROUGE LEADERSHIP IS CLOSER TO HANOI. THEY ARE GUIDED BY THE WILL OF HO CHI MINH.

13. KISSINGER-LE DUC THO USED TO TELL ME THAT THEIR AMBITION WAS ALL OF INDOCHINA AFTER WHICH THEY WOULD PROCEED TO TAKE OVER SOUTHEAST ASIA.

14. SUHARTO-IN RECENT POWER POLITICS THE THREE INDOCHINESE COUNTRIES ARE TRYING TO SEPARATE THEMSELVES FROM THE BIG POWERS AND BECOME MEMBERS OF THE NON-ALIGNED MOVEMENT. CAMBODIA AND LAOS ARE MEMBERS ALTHOUGH HANOI IS NOT YET A MEMBER. THIS CAN CAUSE NEW PROBLEMS FOR THE NON-ALIGNED MOVEMENT. SEVERAL COMMUNIST COUNTRIES NOW WANT TO BE NON-ALIGNED. YUGOSLAVIA, CUBA AND ROMANIA ARE EXAMPLES. NOW AMONG THE NON-ALIGNED COUNTRIES THERE ARE NO CONSISTENT POLICIES AND NO SOLID BLOC.

15. ONE OF INDONESIA'S MAIN CONCERNS IS THE DANGER FROM INDOCHINA WHETHER THERE IS ONE STATE OR THREE. THIS DANGER APPLIES TO ALL OF THE NON-COMMUNIST COUNTRIES IN THE AREA.

16. FORD-FROM PAST HISTORY IT IS CLEAR THAT INDOCHINA

~~SECRET~~



Department of State

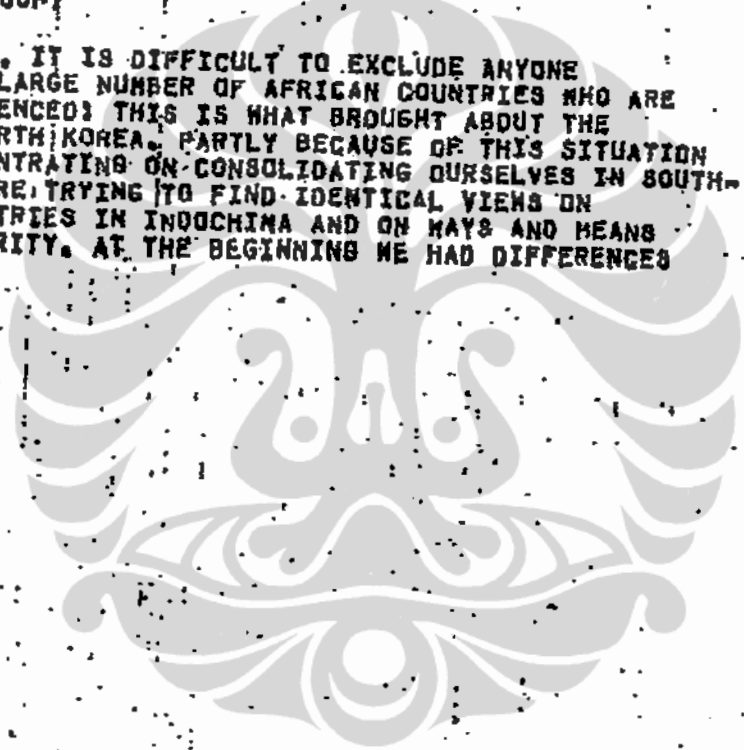
TELEGRAM

~~SECRET~~

PAGE 04 JAKARTA 14945 01 OF 03 001141Z

WOULD BE A DISTURBING ELEMENT IN ANY GROUP. DO THE NON-COMMUNIST COUNTRIES HAVE A VETO OVER NEW MEMBERS OF THE NON-ALIGNED GROUP?

17. SUHARTO: NO, IT IS DIFFICULT TO EXCLUDE ANYONE BECAUSE OF THE LARGE NUMBER OF AFRICAN COUNTRIES WHO ARE SO EASILY INFLUENCED; THIS IS WHAT BROUGHT ABOUT THE ADMISSION OF NORTH KOREA. PARTLY BECAUSE OF THIS SITUATION WE ARE NOW CONCENTRATING ON CONSOLIDATING OURSELVES IN SOUTH-EAST ASIA. WE ARE TRYING TO FIND IDENTICAL VIEWS ON FACING THE COUNTRIES IN INDOCHINA AND ON WAYS AND MEANS TO IMPROVE SECURITY. AT THE BEGINNING WE HAD DIFFERENCES



~~SECRET~~

NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY



Department of State

TELEGRAM

~~SECRET~~ NOD271

PAGE 01 JAKARTA 14946 02 OF 03 051211Z

20
ACTION NODS-00

INFO OCT-81 160-00 /001 W

052500

P 001800Z DEC 75
FM AMEMBASSY JAKARTA
TO SECSTATE WASHDC PRIORITY 1500

~~SECRET~~ SECTION 2 OF 3 JAKARTA 14946

NODIS

OF OPINION. THAILAND AND MALAYSIA, WITH A COMMON BORDER WITH INDOCHINA, SAW NO IMMEDIATE THREAT AND WANTED TO ESTABLISH RELATIONS WITH HANOI. INDONESIA ADVISED THEM THAT EVEN THOUGH THERE WAS NO PHYSICAL THREAT THIS DID NOT MEAN THERE WAS AN ABSENCE OF DANGER. THE LOCAL INSURGENCIES REPRESENT A GREATER DANGER THAN WOULD AN OVERT PHYSICAL THREAT. THE ASEAN LEADERS HAVE NOW CONCLUDED THAT THE INSURGENT ELEMENTS HAVE STEPPED UP THEIR ACTIVITIES. THE ASEAN LEADERS WILL SEEK TO CONSOLIDATE THEIR ACTION IN THE FORTHCOMING ASEAN SUMMIT. THE AGENDA WILL INCLUDE ECONOMICS AND POLITICS AS WELL AS SECURITY.

18. ON THE ECONOMIC SIDE THE OBJECTIVE WILL BE TO STRENGTHEN NATIONAL RESILIENCE. IT IS IMPORTANT TO COOPERATE CLOSELY TOGETHER SO THAT NO COUNTRY IS A WEAK LINK. IN THIS CONNECTION THE ASEAN COUNTRIES WISHED TO TAKE A COMMON STAND ON TRADE RELATIONS AND AVOID COMPETITION AMONG THEMSELVES. A RELATIONSHIP NOW EXISTS WITH THE EEC AND CONSULTATIONS ARE CONDUCTED THROUGH A SPECIAL COMMITTEE CALLED SCAN. INDONESIA WOULD LIKE TO SEE THE ESTABLISHMENT OF CONSULTATIONS ON ECONOMIC MATTERS BY ASEAN WITH OTHER COUNTRIES AND PARTICULARLY THE UNITED STATES. HOW THIS WOULD BE DONE IS NOW BEING DISCUSSED. INDONESIA IS THE LEADER OF THE GROUP TALKING WITH THE EEC AND THE PHILIPPINES WILL BE THE LEADER OF THE GROUP IN DISCUSSIONS WITH THE UNITED STATES. (THIS POINT HAS SUBSEQUENTLY CLARIFIED WITH GENERAL BUDHARMONO.)

~~SECRET~~



Department of State **TELEGRAM**

~~SECRET~~

PAGE 02 JAKART 14946 02 OF 03 081211Z

00M FORD-WE WOULD WELCOME SUCH DISCUSSIONS AND WILL
WAIT UNTIL THE INITIATIVE IS TAKEN BY THE PHILIPPINES FOR
THE GROUP.

20. SUHARTO-THE ASEAN COUNTRIES DO NOT WISH TO EMBARK
ON OVERLY AMBITIOUS PROGRAMS BUT WISH TO FIND PROJECTS
BENEFICIAL TO ALL. PART OF THE EFFORT WILL BE IN
INDUSTRIES IN WHICH PRODUCTS ARE CLEARLY IN DEMAND SUCH
AS IN FERTILIZER. INDONESIA IS NOW PRODUCING UREA FERTI-
IZER AND THE PHILIPPINES HAS THE PROSPECT OF PRODUCING
PHOSPHATES.

21. FORD-WHERE WOULD THE CAPITAL COME FROM FOR SUCH
PROJECTS?

22. SUHARTO-WE ENVISAGE JOINT VENTURES WITH ALL FIVE
COUNTRIES INVOLVED.

23. KISSINGER-WE WOULD WELCOME SUCH PROJECTS AND HAVE
LONG SUPPORTED THE IDEA OF REGIONAL ARRANGEMENTS. WE
BELIEVE THAT THESE WOULD HAVE AN IMPORTANT EFFECT.

24. SUHARTO-WE UNDOUBTEDLY WOULD BE LOOKING FOR
CAPITAL FROM THE US ALSO FOR SUCH PROJECTS.

25. IN DISCUSSIONS OF SECURITY AMONG THE ASEAN COUNTRIES,
WE ARE SEEKING TO AVOID ANY OUTWARD INDICATION OF A PACT.
WE INTEND TO BEGIN BY AN EXCHANGE OF INTELLIGENCE ANALYSES
AND ESTIMATES. WE WILL THEN DECIDE WHAT METHODS WE SHOULD
USE TO REINFORCE OUR SECURITY.

26. FORD-DO YOU CONSIDER THE INSURGENCY IN THAILAND
AND MALAYSIA YOUR MOST IMMEDIATE THREAT?

27. SUHARTO-EXACTLY. IT IS THERE THAT WE ARE NOW
TRYING TO ANALYSE WHAT WE SHOULD DO, WHAT WE DO MUST BE
CLOSELY RELATED TO OUR CAPABILITIES, TO A DETERMINATION
OF HOW STRONG WE ARE. THESE CAPABILITIES ARE CURRENTLY
LIMITED. IT IS IMPORTANT, THEREFORE, THAT WE CONSOLIDATE
THE STRENGTH OF THE PEOPLES IDEOLOGY, POLITICALLY,
ECONOMICALLY AND MILITARILY. ALL VILLAGES SHOULD BECOME

~~SECRET~~

NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY



Declassified
Photocopy from Gerald R. Ford Library

Department of State TELEGRAM

~~SECRET~~

PAGE 03 JAKART 14940 02 OF 03 061211Z

FORTRESSES. THIS REQUIRES SUBSTANTIAL SMALL ARMS. THAILAND AND INDONESIA ARE STUDYING THE MEANS OF PROVIDING SUCH ARMS. BOTH MALAYSIA AND THAILAND ARE INTERESTED IN SMALL ARMS PRODUCTION BUT FOR SECURITY REASONS WOULD BE PREPARED TO SEE THIS PRODUCTION IN INDONESIA. WE WOULD LIKE TO BUILD A PLANT TO PRODUCE M-16 RIFLES. WOULD THE UNITED STATES CONSIDER ASSISTING IN THE CONSTRUCTION OF SUCH A PLANT?

28. KISSINGER-WE WOULD FAVOR THIS AS A GOVERNMENT BECAUSE OF ITS INDICATION OF WIDER COOPERATION.

29. FORD-WE WOULD BE MORE THAN SYMPATHETIC, WE WOULD BE ENTHUSIASTIC ABOUT SUCH A CONCEPT.

30. SUHARTO-WE ARE NOW TAKING FORMAL STEPS. HE LEADERSHIP ON THE PROJECT IS LEFT TO INDONESIA.

31. FORD-WE WERE NOT ANXIOUS TO WITHDRAW FROM THAILAND AS RAPIDLY AS THE THAIS WANTED.

32. KISSINGER-WE WILL KEEP UTAPAO AIR BASE.

33. FORD-WE ARE STILL IN THAILAND. WE ALSO HAVE HAD SOME CONTACTS WITH MALAYSIA AND SINGAPOR ABOUT INCREASED MILITARY AID.

34. SUHARTO-INSURGENCY HAS NOW REACHED THE CAPITALS IN BOTH THAILAND AND MALAYSIA. IT IS BECOMING INCREASINGLY DIFFICULT TO FACE THIS INSURGENCY. FOR ONE THING, THERE ARE CONFLICTS OF INTEREST IN BOTH THAILAND AND MALAYSIA. THE RACIAL PROBLEMS IN MALAYSIA ARE AN EXAMPLE. THE COMMUNISTS ARE TRYING TO SUBVERT BY CUTTING LINKS BETWEEN THE ASEAN COUNTRIES. THEY WANT TO CUT MALAYSIA FIRST.

35. FORD-WHERE ARE THE INSURGENTS COMING FROM?

36. SUHARTO-MAINLY FROM CHINA. 40 PCT OF THE POPULATION IN MALAYSIA ARE CHINESE. VIETNAM AND THE SOVIET UNION WILL NOT STAND STILL IF THEY FEEL THERE ARE OPPORTUNITIES IN MALAYSIA. WE NEED TO PORTIFY MALAYSIA BUT THIS IS NOT EASY TO DO BECAUSE OF THE CHINESE INFLUENCE IN MALAYSIA.

~~SECRET~~

NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORITY OF THE SECRETARY OF STATE



Department of State

TELEGRAM

~~SECRET~~

PAGE 04 JAKART 14948 02 OF 03 061211Z

THIS CAUSES GREAT CONCERN TO SINGAPORE WHICH WOULD BE IN DANGER IF MALAYSIA FELL. WE ARE CONCERNED BECAUSE IT WOULD BRING THE COMMUNISTS RIGHT TO OUR THRESHHOLE.

37. FORD-18 THAILAND THREATENED BY VEITNAM?

38. SUHARTO-YES. THERE IS A LONG HATRED BETWEEN THAILAND AND VIETNAM.

39. I WOULD LIKE TO SPEAK TO YOU, MR PRESIDENT, ABOUT ANOTHER PRBLEM, TIMOR. WHEN IT LOOKED AS IF THE PORTUGUESE RULE WOULD END IN TIMOR WE SOUGHT TO ENCOURAGE THE PORTUGUESE TO AN ORDERLY DECOLONIZATION PROCESS. WE HAD AGREEMENT WITH THEM ON SUCH A PROCESS AND WE RECOGNIZED THE AUTHORITY OF PORTUGAL IN THE CARRYING OUT OF DECOLONIZATION AND IN GIVING PEOPLE THE RIGHT TO EXPRESS THEIR WISHES. INDONESIA HAS NO TERRITORIAL AMBITIONS. WE ARE CONCERNED ONLY ABOUT THE SECURITY, TRANQUILITY AND PEACE OF ASIA AND THE SOUTHERN HEMISPHERE. IN THE LATEST ROME AGREEMENT THE PORTUGUESE GOVERNMENT WANTED TO INVITE ALL PARTIES TO NEGOTIATE. SIMILAR EFFORTS WERE MADE BEFORE BUT PRETELIN DID NOT ATTEND. AFTER THE

~~SECRET~~



Department of State

TELEGRAM

~~SECRET~~ NOD274

PAGE 01 JAKART 14946 03 OF 03 001237Z

20
ACTION NODS-00

INFO OCT-01 130-00 /001 W

002050

P 001000Z DEC 78
FM ANEMBASSY JAKARTA
TO SECSTATE WASHDC PRIORITY 1001

~~SECRET~~ SECTION 3 OF 3 JAKARTA 14946

NODIS

FRETELIN FORCES OCCUPIED CERTAIN POINTS AND OTHER FORCES WERE UNABLE TO CONSOLIDATE, FRETELIN HAS DECLARED ITS INDEPENDENCE UNILATERALLY, IN CONSEQUENCE OTHER PARTIES DECLARED THEIR INTENTION OF INTEGRATING WITH INDONESIA. PORTUGAL REPORTED THE SITUATION TO THE UNITED NATIONS BUT DID NOT EXTEND RECOGNITION TO FRETELIN. PORTUGAL, HOWEVER, IS UNABLE TO CONTROL THE SITUATION. IF THIS CONTINUES IT WILL PROLONG THE SUFFERING OF THE REFUGEES AND INCREASE THE INSTABILITY IN THE AREA.

40. FORD-THE FOUR OTHER PARTIES HAVE ASKED FOR INTEGRATION?

41. SUHARTO=YES, AFTER THE UDT, INDONESIA FOUND ITSELF FACING A FATE ACCOMPLI. IT IS NOW IMPORTANT TO DETERMINE WHAT WE CAN DO TO ESTABLISH PEACE AND ORDER FOR THE PRESENT AND THE FUTURE IN THE INTEREST OF THE SECURITY OF THE AREA AND INDONESIA. THESE ARE SOME OF THE CONSIDERATIONS WE ARE NOW CONTEMPLATING. WE WANT YOUR UNDERSTANDING IF WE DEEM IT NECESSARY TO TAKE RAPID OR DRASTIC ACTION.

42. FORD-WE WILL UNDERSTAND AND WILL NOT PRESS YOU ON THE ISSUE. WE UNDERSTAND THE PROBLEM YOU HAVE AND THE INTENTIONS YOU HAVE.

43. KISSINGER-YOU APPRECIATE THAT THE USE OF US MADE ARMS COULD CREATE PROBLEMS.

~~SECRET~~

NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY



Department of State

TELEGRAM

~~SECRET~~

PAGE 02 JAKARTA 14048 03 OF 03 061237Z

RRM FORD-WE COULD HAVE TECHNICAL AND LEGAL PROBLEMS, YOU ARE FAMILIAR, MR PRESIDENT, WITH THE PROBLEMS WE HAD ON CYPRUS ALTHOUGH THIS SITUATION IS DIFFERENT.

45. KISSINGER-IT DEPENDS ON HOW WE CONSTRUCT IT, WHETHER IT IS IN SELF DEFENSE OR IS A FOREIGN OPERATION. IT IS IMPORTANT THAT WHATEVER YOU DO SUCCEEDS QUICKLY. WE WOULD BE ABLE TO INFLUENCE THE REACTION IN AMERICA IF WHATEVER HAPPENS HAPPENS AFTER WE RETURN. THIS WAY THERE WOULD BE LESS CHANCE OF PEOPLE TALKING IN AN UNAUTHORIZED WAY. THE PRESIDENT WILL BE BACK ON MONDAY AT 2:00 PM JAKARTA TIME. WE UNDERSTAND YOUR PROBLEM AND THE NEED TO MOVE QUICKLY BUT I AM ONLY SAYING THAT IT WOULD BE BETTER IF IT WERE DONE AFTER WE RETURNED.

46. FORD-IT WOULD BE MORE AUTHORITATIVE IF WE CAN DO IT IN PERSON.

47. KISSINGER-WHATEVER YOU DO, HOWEVER, WE WILL TRY TO HANDLE IN THE BEST WAY POSSIBLE.

48. FORD-WE RECOGNIZE THAT YOU HAVE A TIME FACTOR, WE HAVE MERELY EXPRESSED OUR VIEW FROM OUR PARTICULAR POINT OF VIEW.

49. KISSINGER-IF YOU HAVE MADE PLANS, WE WILL DO OUR BEST TO KEEP EVERYONE QUIET UNTIL THE PRESIDENT RETURNS HOME.

50. DO YOU ANTICIPATE A LONG GUERRILLA WAR THERE?

51. SUHARTO-THERE WILL PROBABLY BE A SMALL GUERRILLA WAR. THE LOCAL KINGS ARE IMPORTANT, HOWEVER, AND THEY ARE ON OUR SIDE. THE UDT REPRESENTS FORMER GOVERNMENT OFFICIALS AND FRETELIN REPRESENTS FORMER SOLDIERS. THEY ARE INFECTED THE SAME AS IS THE PORTUGUESE ARMY WITH COMMUNISM.

52. I WOULD LIKE TO SAY A WORD ABOUT TRADE RELATIONS. THERE ARE SEVERE ECONOMIC PRESSURES ON OUR COUNTRIES.

~~SECRET~~

NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY



Department of State

TELEGRAM

~~SECRET~~

PAGE 03 JAKARTA 14046 03 OF 03 0612377

WE MUST DO ALL WE CAN TO MAXIMIZE OUR INCOME. IN THIS CONNECTION THERE IS AN IMBALANCE OF PROFITS BETWEEN THE OIL COMPANIES OPERATING IN INDONESIA AND THOSE OPERATING IN THE MIDDLE EAST. INDOONESIAN COMPANIES MAKE AS MUCH AS \$2.50 A BARREL WHEREAS THE PROFITS IN THE MIDDLE EAST ARE UNDER \$1.00 A BARREL.

53. FORD-ARE THEY REINVESTING AND EXPANDING OPERATIONS?

54. SUHARTO-YES, WE DON'T WANT TO INTERFERE WITH THAT BUT WE BELIEVE THEY CAN STRETCH OUT THEIR PROFITS. WHAT WE DO SHOULD NOT BE INTERPRETED AS NATIONALIZATION. WE ARE SEEKING AN UNDERSTANDING AND NEGOTIATIONS ARE UNDER WAY. PROSPECTS ARE ENCOURAGING. WE ALSO WANT THE UNDERSTANDING OF THE USG HOWEVER.

55. FORD-THEY SHOULD BE GRATEFUL THAT THEY ARE TREATED WELL HERE IN INDONESIA, MUCH BETTER THAN IN SOME OTHER COUNTRIES. I HOPE THAT YOUR NEGOTIATIONS WITH THEM WILL BE BENEFICIAL AND THAT THEY WILL SUPPORT YOUR EFFORT.

56. KISSINGER-OUR MAIN CONCERN IS THAT WHATEVER YOU DO DOES NOT CREATE A CLIMATE THAT DISCOURAGES INVESTMENT. BASICALLY THE MATTER IS BETWEEN YOU AND THE COMPANIES. WE ARE NOT INVOLVED IN SUCH PROBLEMS.

57. SUHARTO-WE HAVE TAKEN THESE VIEWS INTO ACCOUNT AND EVERYTHING THAT WE DO WILL BE BASED ON EXISTING LAWS. WE WANT TO FIND WAY OF OBTAINING REVENUE WHICH WILL NOT JEOPARDIZE FAIR PROFITS FOR THE COMPANIES.

58. KISSINGER- WE APPRECIATE YOUR CLARIFICATION OF THIS MATTER.

59. FORD-LET ME ASSURE YOU THAT WE UNDERSTAND YOUR SITUATION. WE HAVE NO PARTICULAR RECOMMENDATIONS.

60. SUHARTO-ONCE MORE, I THANK YOU FOR THIS VISIT. WE ARE A COUNTRY THAT HAS MANY NEEDS AND WE CONTINUE TO LOOK TO THE UNITED STATES TO HELP US.

~~SECRET~~

NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY



Department of State

TELEGRAM

~~SECRET~~

PAGE 04 JANARY 14946 03 OF 03 001237Z

YOU FORD-WE WILL DO WHAT WE CAN, OUR PROBLEM IS TO CON-
VINCE CONGRESS WHERE WE HAVE GREAT DIFFICULTIES, ALTHOUGH
PROSPECTS MAY BE A LITTLE BETTER THAN WE HAD THOUGHT EARLIER.
ON THE ECONOMIC SIDE, WE ARE SEEKING TO OBTAIN THE MAXIMUM
AMOUNT WHICH IS IN THE VICINITY OF 300 MILLION THIS YEAR.
WE WILL ALSO TRY TO GET CONGRESS TO MODIFY THE TRADE ACT
WHICH EXCLUDES OPEC COUNTRIES FROM GENERALIZED PREFERENCES.
WE REALIZE THAT INDONESIA DID NOT PARTICIPATE IN THE OIL
EMBARGO, CONGRESS HAS, UNFORTUNATELY TREATED ALL OPEC
COUNTRIES IN THE SAME FASHION.

02. I WOULD LIKE TO MENTION ALSO, MR PRESIDENT, THAT I
WANT TO MAINTAIN A DIRECT RELATIONSHIP. IF YOU HAVE ANY-
THING SPECIAL, I HOPE YOU WILL COMMUNICATE WITH ME
DIRECTLY BY WHATEVER MEANS SEEMS APPROPRIATE. NEWSON

~~SECRET~~

NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY

Lampiran 8:

Nota Diplomatik "505 Agreement." No. D.638/PO/IX/2006/36,
tanggal 6 September 2006. Departemen Luar Negeri RI.

(Sumber: Arsip Departemen Pertahanan RI).



Universitas Indonesia

U.S. security assistance..., Martinus Siswanto Prajogo, Pascasarjana UI, 2009.



DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT AMERIKA UTARA DAN TENGAH

Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat 10110
Telp.: 3456176 Fax: 3854568

Jakarta, 7 September 2006

Nb. : **640/PO/IX/2006/36**
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Nota Diplomatik "505 Agreement"

Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal
Strategi Pertahanan, Dephan
2. Kepala Staf Umum TNI,
Mabas TNI

di

Jakarta

Merujuk surat Dirjen Strahan, Dephan, nomor B/2132/VI/2006/DJSTRA perihal pada pokok surat, bersama ini dengan hormat disampaikan copy dari nota diplomatik Departemen Luar Negeri RI kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta nomor D-638/PO/IX/2006/36 tanggal 6 September 2006 yang telah diparaf oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Deplu. Nota diplomatik tersebut pada intinya menyetujui usulan "505 Agreement" mengenai jaminan Pemerintah RI tidak akan melakukan retransfer terhadap barang / peralatan militer yang dihibahkan AS dan kesanggupan untuk melindungi barang / peralatan tersebut.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Acting Direktur Amerika Utara dan Tengah



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Deplu (sebagai laporan)
2. Kepala Staf Angkatan Laut, TNI AL
3. Asrenum Panglima TNI
4. Dirjen Renhan, Dephan
5. Dirjen Ranahan, Dephan
6. Direktur Kersin, Dephan
7. Direktur Perjanjian Polkamwil, Deplu



DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

No. D - 638/PO/IX/2006/36

The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the Embassy of the United States of America in Jakarta and acknowledges receipt of the Embassy's note number 716, dated June 29, 2006, which reads as follows:

"The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and has the honor to refer to discussions between representatives of the two Governments regarding grants under the Foreign Assistance Act of 1961, as amended, or successor legislation, and the furnishing of defense articles, related training and other defense services, including pursuant to the International Military and Education Training Program, from the United States of America to the Government of the Republic of Indonesia pursuant to the Foreign Assistance Act of 1961, or successor legislation. In this regard, the Embassy refers to the Agreement relating to the furnishing of military equipment, materials and services for a program of civic action, effected by exchange of notes at Djakarta, April 14, 1967; the Agreement regarding the furnishing of combat equipment to Indonesia as additional military assistance, effected by exchange of notes at Jakarta, August 18 and 19, 1970; the net proceeds Agreement, effected by the exchange of notes at Jakarta, June 12 and 29, 1974; and the Agreement regarding eligibility for United States military assistance and training pursuant to the International Security Assistance and Arms Export Control Act of 1976, effected by exchange of notes at Jakarta, August 3 and 24, 1976.

In accordance with these discussions, it is proposed that the Government of the Republic of Indonesia agrees:

- A. That unless the consent of the Government of the United States of America has been first obtained the Government of the Republic of Indonesia shall not:
 - (i) Permit any use of such defense articles, related training, including training materials, or other defense services by anyone not an officer, employee or agent of the Government of the Republic of Indonesia;
 - (ii) Transfer, or permit any officer, employee or agent of the Government of the Republic of Indonesia to transfer, such defense articles, related training, including training materials, or other defense services by gift, sale or otherwise; or
 - (iii) Use, or permit the use of, such defense articles, related training, including training materials, or other defense services for purposes other than those for which provided;
- B. That such defense articles, related training, including training materials, or other defense services shall be returned to the Government of the United States of America when they are no longer needed for the purposes for which they were furnished, unless the Government of the United States of America consents to another disposition;

- C. That the net proceeds of sale received by the Government of the Republic of Indonesia in disposing of, with prior written consent of the Government of the United States of America, any defense article furnished by the Government of the United States of America on a grant basis, including any scrap from any such defense article, shall be paid to the Government of the United States of America;
- D. That the Government of the Republic of Indonesia shall maintain the security of such defense articles, related training, including training materials, or other defense services; that it shall provide substantially the same degree of protection afforded to such defense articles, related training, including training materials, or other defense services by the Government of the United States of America; that it shall, as the Government of the United States of America may require, permit continued observation and review by, and furnish necessary information to, representatives of the Government of the United States of America with regard to the use thereof by the Government of the Republic of Indonesia; and
- E. That the Government of the United States of America may also, from time to time, make the provision of articles, services and related training furnished under other authority (except the United States Arms Export Control Act) subject to the terms and conditions of the agreement proposed therein. (Transfer under the United States Arms Export Control Act shall continue to be governed by the requirements of that Act and United States regulations applicable to such transfers.)

It is further proposed that this Agreement shall supersede the above-referenced 1974 agreement in its entirety. The 1967, 1970 and 1978 agreements shall not be affected by this Agreement. This Agreement shall apply to defense articles and defense services to which the superseded 1974 agreement had applied prior to entry into force of this Agreement.

The Ministry of Foreign Affairs' note stating that the foregoing is acceptable to the Government of the Republic of Indonesia shall, together with this note, constitute an agreement between the two Governments, which shall enter into force on the date of the Ministry's note.

The Embassy of the United States of America avails itself of this opportunity to renew to the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia the assurances of its highest consideration."

The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia has the honor to confirm that the proposals set forth in the Embassy's note are acceptable to the Government of the Republic of Indonesia and that the Embassy's note and this note in reply shall constitute an Agreement between the two governments which shall enter into force on this date.

The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the United States of America in Jakarta the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 6 September 2006

The Embassy of the
United States of America
in Jakarta, Indonesia

Lampiran 9:
"DATA IMET/E-IMET Program for Indonesia."
(Sumber: Arsip Departemen Pertahanan RI).



Universitas Indonesia

DATA IMET/E-IMET Program for Indonesia

F.Y.	U.S. FUNDING		PERSONNEL	REMARKS
	PLANNING	SPENDING		
1	2	3	4	5
1971	1,666,000	1,272,000	433	IMET
1972	1,973,000	1,624,000	320	IMET
1973	2,045,000	1,791,000	194	IMET
1974	1,687,000	1,775,000	234	IMET
1975	2,335,000	2,310,000	276	IMET
1976	2,394,000	2,455,000	268	IMET
1977	2,440,000	2,757,000	198	IMET
1978	2,709,000	2,778,000	240	IMET
1979	1,973,000	1,848,000	195	IMET
1980	1,639,000	1,874,000	173	IMET
1981	1,700,000	1,700,000	233	IMET
1982	2,200,000	2,200,000	154	IMET
1983	2,300,000	1,906,000	120	IMET
1984	2,700,000	2,700,000	158	IMET
1985	2,300,000	1,906,000	170	IMET
1986	2,400,000	2,400,000	183	IMET
1987	1,881,000	1,881,000	115	IMET
1988	1,688,000	1,688,000	88	IMET
1989	1,660,000	1,660,000	90	IMET
1990	1,820,000	1,791,000	102	IMET
1991	2,092,000	1,948,000	100	IMET
1992	2,300,000	2,125,000	122	IMET
1993	0	0	0	Suspended
1994	0	0	0	Suspended

1	2	3	4	5
1995	0	0	0	Suspended
1996	600,000	577,000	17	E-IMET
1997	800,000	105,000	7	E-IMET
1998	400,000	476,000	16	E-IMET
1999	550,000	486,000	15	E-IMET
2000	0	0	0	Suspended
2001	0	0	0	Suspended
2002	400,000	276,000	12	E-IMET
2003	276,000	276,000	68	E-IMET
2004	459,000	459,000	72	E-IMET+CTFP*
2005	600,000	600,000	63	E-IMET+CTFP*
2006	983,000	792,000	43	IMET +CTFP*
2007	1,285,000	1,234,000	59	IMET +CTFP*
2008	974,000	1,474,000	43	IMET +CTFP*
2009	2,300,000	Still going on	68 (seat)	IMET +CTFP*

* CTFP: Counter Terrorism Fellowship Program.

Jakarta, April 2009

DITKERSIN DITJEN STRAHAN